



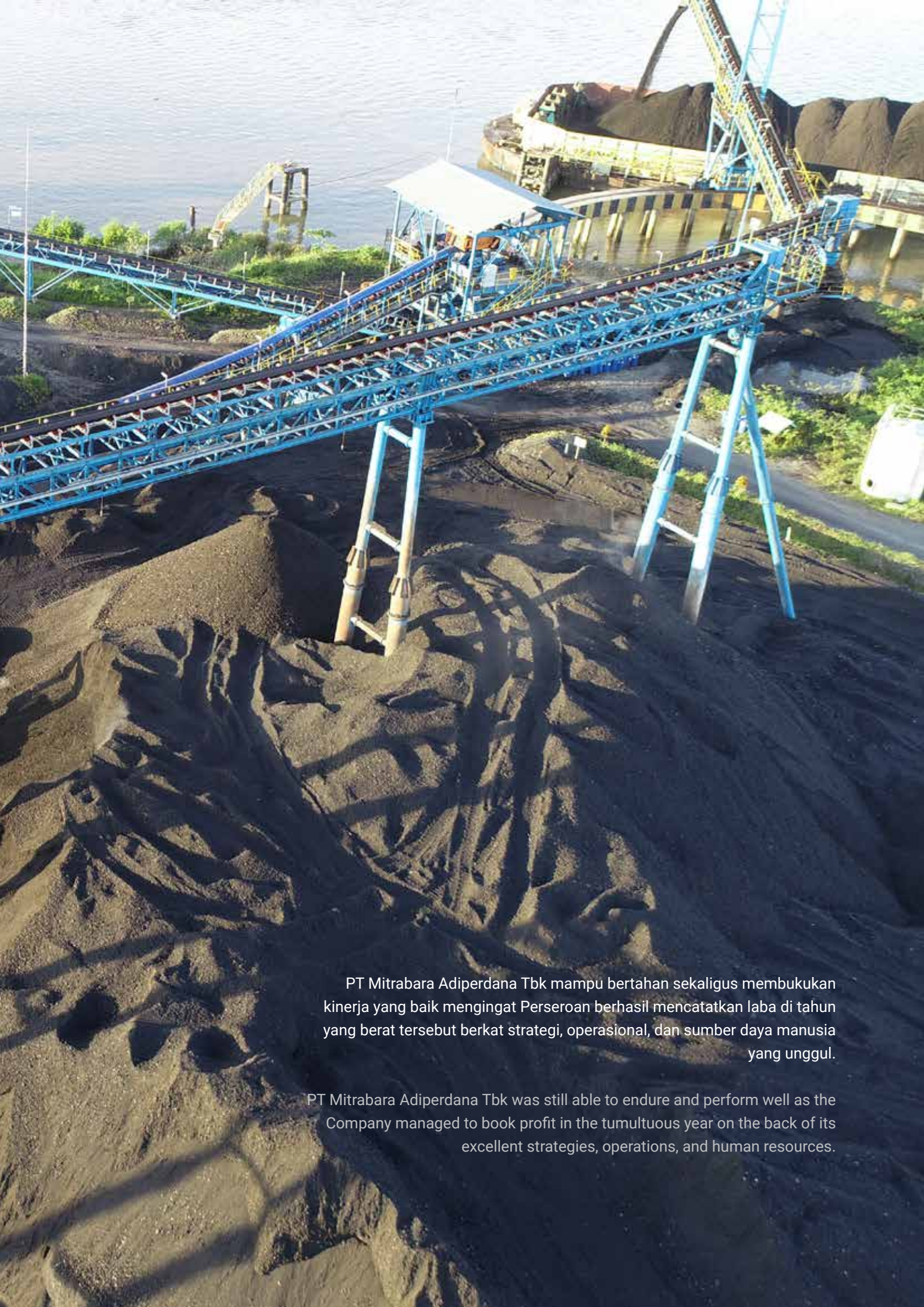
PT. MITRABARA ADIPERDANA TBK.

EXCELLENCE AND ENDURANCE AMIDST TURBULENCE



Laporan Tahunan **2020** Annual Report





PT Mitrabara Adiperdana Tbk mampu bertahan sekaligus membukukan kinerja yang baik mengingat Perseroan berhasil mencatatkan laba di tahun yang berat tersebut berkat strategi, operasional, dan sumber daya manusia yang unggul.

PT Mitrabara Adiperdana Tbk was still able to endure and perform well as the Company managed to book profit in the tumultuous year on the back of its excellent strategies, operations, and human resources.

// Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer

Laporan Tahunan ini berisikan pernyataan-pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta terdapat kemungkinan adanya perkembangan aktual secara material yang berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan asumsi mengenai kondisi terkini dan prediksi kondisi mendatang dari Perseroan serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai pernyataan yang disampaikan.

This Annual Report contains the Company's financial condition, operation results, projections, plans, strategies, policies, and objectives, which are classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws, excluding historical matters. Such forward-looking statements are subject to prospective risks, uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results.

Prospective statements in this Annual Report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company, and the business situation where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as in accordance with the statement that has been declared.

// Terminologi

Terminology

Penggunaan kata "Mitrabara" atau "Perseroan" didefinisikan sebagai PT Mitrabara Adiperdana Tbk, yang menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan perdagangan batubara.

"BDMS" didefinisikan sebagai PT Baradinamika Mudasukes, yang merupakan entitas anak Mitrabara yang menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan perdagangan batubara.

"MME" didefinisikan sebagai PT Mitra Malinau Energi, yang merupakan entitas anak Mitrabara yang menjalankan usaha dalam bidang industri pembangkit tenaga listrik dengan mempergunakan sumber energi bio-massa.

"MHL" didefinisikan sebagai PT Malinau Hijau Lestari, yang merupakan entitas anak Mitrabara yang menjalankan usaha dalam bidang perkebunan dan kehutanan.

ECTS / Engie Cipta Tenaga Surya yang merupakan ventura bersama Mitrabara yang menjalankan usaha dalam bidang aktivitas penyewaan mesin dan peralatan tenaga surya/solar power leasing.

"DBU" yang didefinisikan sebagai PT Duta Bara Utama yang merupakan ventura bersama Mitrabara yang menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan perdagangan batubara.

"MMM" yang didefinisikan sebagai PT Mitra Muda Makmur yang merupakan entitas anak Mitrabara yang menjalankan usaha di bidang jasa konsultan pertambangan.

The use of "Mitrabara" or the "Company", hereinafter referred to as PT Mitrabara Adiperdana Tbk that is engaged in coal trading and mining business.

"BDMS" hereinafter refers to PT Baradinamika Mudasukes as the subsidiary of Mitrabara that is engaged in coal trading and mining business.

"MME" hereinafter refers to PT Mitra Malinau Energi as the subsidiary of Mitrabara that is engaged in biomass energy-based industrial power plant business.

"MHL" hereinafter refers to PT Malinau Hijau Lestari as the subsidiary of MME that is engaged in plantation and forestry business.

"ECTS" hereinafter refers to PT Engie Cipta Tenaga Surya as the joint venture of Mitrabara that is engaged in solar panel-based industrial power plant business.

"DBU" hereinafter refers to PT Duta Bara Utama as the joint venture of Mitrabara that is engaged in coal mining and coal trading business.

"MMM" hereinafter refers to PT Mitra Muda Makmur as the subsidiary of Mitrabara that is engaged in mining consulting services business.

// Tema Laporan Tahunan 2020 2020 Annual Report Theme

EXCELLENCE AND ENDURANCE AMIDST TURBULENCE

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang dan penuh gejolak. Berbagai konflik, insiden, dan bencana terjadi sepanjang tahun 2020, namun tidak ada yang dampaknya lebih besar daripada penyebaran penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19). Bermula di Tiongkok pada awal 2020, pandemi Covid-19 dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan melumpuhkan ekonomi global. Berbagai upaya ekstrim diambil oleh seluruh negara untuk mencegah penularan penyakit Covid-19 tersebut seperti kegiatan *lockdown*, maupun pembatasan kegiatan sosial ekonomi, dan upaya tersebut berdampak secara langsung terhadap perekonomian seluruh negara.

Perlambatan ekonomi pada akhirnya mempengaruhi seluruh sektor industri, termasuk pertambangan batubara. Penurunan permintaan global terhadap batubara menyebabkan anjloknya harga yang tercermin oleh harga batubara acuan (HBA) di Indonesia yang sempat jatuh ke level terendah dalam lima tahun di US\$49,42 per ton pada bulan September 2020. Selain itu, konsumsi batubara dalam negeri juga melemah akibat penurunan kebutuhan listrik.

Kendati demikian, di tengah kondisi tersebut, PT Mitrabara Adiperdana Tbk mampu bertahan sekaligus membukukan kinerja yang sangat baik, mengingat Perseroan berhasil mencatatkan laba positif di tahun yang berat tersebut berkat strategi, operasional, dan sumber daya manusia yang unggul. Dengan keunggulan dan daya tahan tersebut, Mitrabara berhasil melalui berbagai dampak yang muncul sebagai gejala pandemi Covid-19. Tak hanya itu, Mitrabara sangat optimis bahwa dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah mengakhiri pandemi sudah semakin dekat, dan Mitrabara telah mempersiapkan berbagai langkah maju serta memperkuat rencana pengembangan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, yaitu menjadi korporasi terkemuka berbasis energi yang berkelanjutan, berstandar kualitas kelas dunia dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat.

The 2020 was an arduous and perilous year. Numerous conflicts, incidents, and disasters occurred throughout the year, none were more impactful than the dreaded Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Started in China in early 2020, the Covid-19 pandemic quickly spread worldwide and crippled the global economy. All countries took various extreme measures to prevent Covid-19 transmission, such as lockdowns and socio-economic activities restrictions, and those extreme measures had a direct impact on the economy of all countries.

The resulting economic downturn subsequently affected all industrial sectors and coal mining was not an exception. The declining global demand for the commodity led to falling prices as indicated by the coal benchmark price (HBA) in Indonesia that dropped to a five-year low of US\$49.42 per ton in September 2020. Likewise, domestic coal consumption also dropped due to lower electricity demand.

However, under the abovementioned conditions, PT Mitrabara Adiperdana Tbk was still able to endure and perform excellently as the Company managed to book positive profit in the tumultuous year on the back of its excellent strategies, operations, and human resources. With the aforementioned Excellence and Endurance, Mitrabara managed the turbulence caused by the Covid-19 pandemic. In addition, Mitrabara is confident that the end of the pandemic is in sight due to the government's hard work, and therefore Mitrabara has prepared numerous strategies to maintain its forward and upward momentum and enhance development plans in accordance with the predetermined vision to be a leading corporation with sustainable energy basis, having world-class quality standard and to contribute to community development.

// Daftar Isi

Table of Contents

Kilas Kinerja 2020

2020 Performance Review

- 10 Ikhtisar Data Keuangan
Financial Highlights
- 12 Ikhtisar Saham
Share Highlights
- 12 Aksi Korporasi
Corporate Actions

Laporan Manajemen

Management's Report

- 16 Laporan Dewan Komisaris
The Board of Commissioners' Report
- 24 Laporan Direksi
The Board of Directors' Report

Profil Perusahaan

Company Profile

- 36 Informasi Perseroan
Corporate Information
- 37 Sekilas Perseroan
Company in Brief
- 37 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications
- 38 Visi dan Misi
Vision and Mission
- 40 Tonggak Sejarah Perseroan
Corporate Milestones

- 42 Bidang Usaha
Line of Business
- 43 Produk dan Jasa
Products and Services
- 44 Struktur Organisasi
Organizational Structure
- 46 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Profile
- 48 Profil Direksi
Board of Directors' Profile
- 50 Sumber Daya Manusia
Human Resources
- 55 Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition
- 56 Kronologis Pencatatan Saham
Share Listing Chronology
- 57 Daftar Entitas Anak dan Ventura Bersama
List of Subsidiaries and Joint Ventures
- 58 Struktur Grup Perseroan
Corporate Group Structure
- 60 Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Institutions

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

- 64 Tinjauan Umum Industri Batubara
Coal Industry Overview
- 64 Tinjauan Operasional
Operational Review

- 65 Tinjauan Keuangan
Financial Overview
- 69 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas
Solvency and Collectability Rate
- 70 Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen
Capital Structure and Management Policy
- 70 Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir
Capital Goods Investment Realized in Current Fiscal Year
- 71 Ikatan Material untuk Investasi Barang
Material Commitments for Capital Goods Investment
- 72 Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Pelaporan
Material Information and Facts Subsequent to Reporting Date
- 72 Prospek Usaha
Business Prospect
- 73 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect
- 74 Kebijakan Dividen
Dividend Policy
- 74 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Utilization of Proceeds from Public Offering

- Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi
- 74** Utang/Modal
Information on Investments, Expansions, Divestments, Mergers, Acquisitions or Restructuring of Capital/Debt
- 75** Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan bagi Perusahaan
Changes in Government Regulations with Significant Impact on the Company
- 75** Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

- 78** Komitmen, Tujuan, Pedoman dan Kebijakan
Commitment, Objectives, Guidelines and Policies
- 81** Pemetaan Tata Kelola
GCG Roadmap
- 82** Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure
- 82** Penilaian terhadap Implementasi GCG
Assessment of GCG Implementation
- 83** Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

- 84** RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 2020
2020 Annual GMS and Extraordinary GMS
- 88** RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 2019
2019 Annual GMS and Extraordinary GMS
- 91** Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 95** Direksi
Board of Directors
- 100** Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Composition Diversity Policy
- 101** Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration Policy for Board of Commissioners and Board of Directors
- 102** Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali
Affiliation between Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority or Controlling Shareholders
- 103** Komite Audit
Audit Committee
- 108** Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
- 115** Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
- 119** Divisi Audit Internal
Internal Audit Division
- 122** Divisi Control & Risk Management
Control & Risk Management Division

- 125** Manajemen Risiko
Risk Management
- 132** Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of Good Corporate Governance Guideline for Public Companies

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

- 140** Landasan, Komitmen, dan Pencapaian
Foundation, Commitment, and Achievements
- 143** Implementasi Program Pengembangan Masyarakat
Community Development Program Implementation

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Mitrabara Adiperdana Tbk tahun 2020

Statement of Members of Board of Commissioners and Board of Directors on the Responsibility for the 2020 Annual Report of PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Laporan Keuangan

Financial Statements

KILAS KINERJA 2020

2020 PERFORMANCE REVIEW

Di tengah berbagai perubahan radikal, kendala, dan keterbatasan yang diakibatkan pandemi Covid-19, Perseroan berhasil membukukan total volume produksi sebesar 4,0 juta ton hingga akhir tahun 2020.

Amid various radical changes, obstacles, and limitations caused by the Covid-19 pandemic, the Company successfully posted 4.0 million tons total production volume as of the end of 2020.





// Ikhtisar Data Keuangan

Financial Highlights

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statements of Financial Position

(dalam AS\$/in US\$)

Keterangan	2020	2019	2018	Description
Aset	181.973.102	192.527.289	173.509.262	Assets
Liabilitas	43.752.926	46.886.899	49.328.008	Liabilities
Ekuitas	138.220.176	145.640.390	124.181.254	Equity

Laba Rugi Konsolidasian

Consolidated Statements of Profit or Loss

(dalam AS\$/in US\$)

Keterangan	2020	2019	2018	Description
Pendapatan	201.207.287	260.849.803	258.138.029	Revenue
Laba Usaha	36.503.964	48.399.231	67.366.485	Operating Profit
EBITDA	44.405.030	55.373.271	73.536.753	EBITDA
Laba Bruto	66.989.064	91.420.748	100.939.711	Gross Profit
Laba Bersih	27.467.486	35.287.557	50.310.702	Net Income
Laba per Saham	0,022	0,029	0,041	Earnings per Share
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	27.467.417	35.287.482	50.310.669	Profit for the year attributable to Owners of the parent entity
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali	68	75	33	Profit for the year attributable to non-controlling interests
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	27.294.919	35.469.136	50.446.379	Total comprehensive income for the year attributable to Owners of the parent entity
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali	27.294.851	35.459.061	50.446.346	Total comprehensive income for the year attributable to non-controlling interests

Rasio-Rasio Keuangan

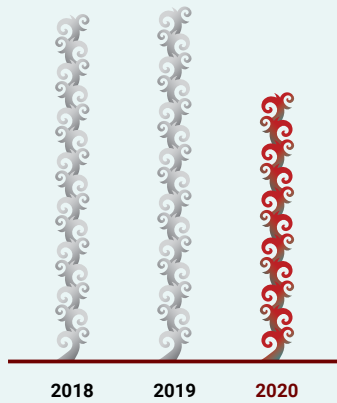
Financial Ratios

Keterangan	2020	2019	2018	Description
Rasio Laba Terhadap Jumlah Aset	15,09%	18,33%	29,00%	Return on Assets (ROA)
Rasio Laba Terhadap Ekuitas	19,87%	24,23%	40,51%	Return on Equity (ROE)
Margin Laba Bersih	13,65%	13,53%	19,49%	Net Profit Margin
Rasio Lancar	374,40%	360,36%	263,79%	Current Ratio
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	31,65%	32,19%	39,72%	Debt to Equity Ratio (DER)
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	24,04%	24,35%	28,43%	Debt to Assets Ratio (DAR)

Pendapatan
Revenue

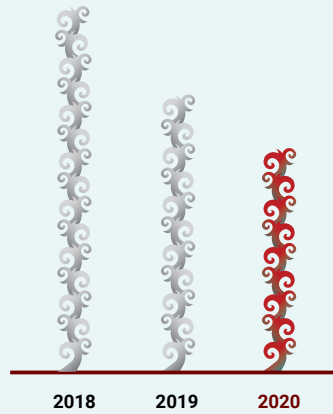
(dalam AS\$/in US\$)

258,14 260,85 201,21


EBITDA
EBITDA

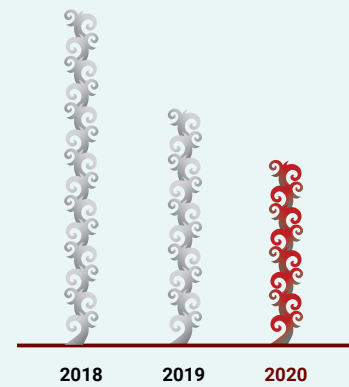
(dalam AS\$/in US\$)

73,54 55,37 44,40


Laba Bersih
Net Income

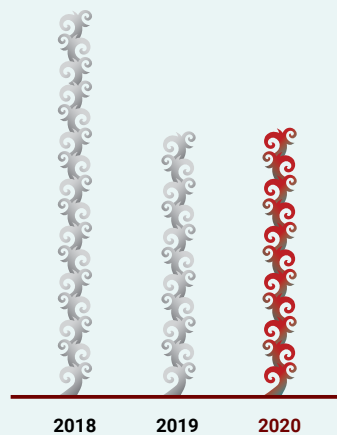
(dalam AS\$/in US\$)

50,31 35,29 27,47


Margin Laba Bersih
Net Profit Margin

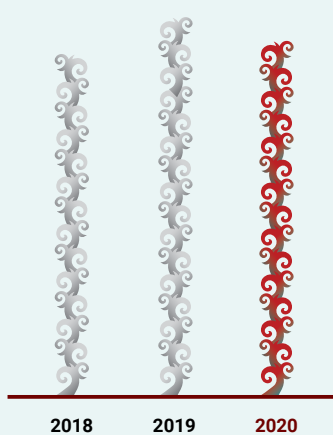
(dalam persentase/percentage)

19,49 13,53 13,65


Total Aset
Total Assets

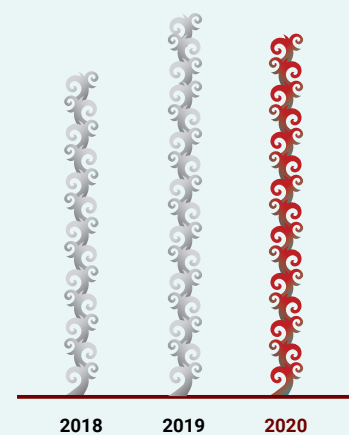
(dalam AS\$/in US\$)

173,51 192,53 181,97


Total Ekuitas
Total Equity

(dalam AS\$/in US\$)

124,18 145,64 138,22



// Ikhtisar Saham

Share Highlights

Tahun Year	Periode Period	Jumlah Saham Number of Shares	Harga Tertinggi Highest Price	Harga Terendah Lowest Price	Harga Penutupan Closing Price	Volume Perdagangan Trade Volume
2020	Kuartal 1 Quarter 1	1.227.271.952	2.200	1.300	1.550	2.121.300
	Kuartal 2 Quarter 2	1.227.271.952	1.870	1.450	1.625	3.560.700
	Kuartal 3 Quarter 3	1.227.271.952	3.330	1.630	2.050	35.515.000
	Kuartal 4 Quarter 4	1.227.271.952	3.090	2.040	2.690	18.949.396
2019	Kuartal 1 Quarter 1	1.227.271.952	3.140	2.790	2.980	2.087.300
	Kuartal 2 Quarter 2	1.227.271.952	3.453	3.033	3.147	4.892.233
	Kuartal 3 Quarter 3	1.227.271.952	3.687	3.053	3.343	5.379.667
	Kuartal 4 Quarter 4	1.227.271.952	4.140	2.960	3.493	4.747.433



// Aksi Korporasi

Corporate Action

Selama tahun buku 2020, Perseroan tidak melakukan aksi korporasi seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai nominal saham. Perseroan juga tidak mencatatkan efek lainnya selain saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.


Throughout 2020, the Company did not conduct corporate action, such as stock split, share merger, or distribute share dividend, bonus shares, and decrease share nominal value. The Company also did not list other securities other than shares listed in the Indonesia Stock Exchange.



LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT'S REPORT

Di tengah kondisi harga batubara yang kurang kondusif, Perseroan memfokuskan strateginya pada optimalisasi dan efisiensi biaya pokok dan operasional dengan menyusun beberapa inisiatif kunci yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional.

As coal prices remained unfavorable, the Company focused its strategy on optimizing cost of sales and operating cost efficiency by preparing several key initiatives directly related to operational activities.



// Foto ini diambil sebelum masa pandemi Covid-19
This picture was taken before the Covid-19 pandemic.





“

Dewan Komisaris memandang keberhasilan Perseroan mempertahankan kinerja positifnya di tahun 2020 merupakan hasil dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara efektif. Manajemen pun telah menerapkan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran dengan baik di seluruh tingkatan organisasi dan wilayah operasional Perseroan.

The Board of Commissioners concludes that the Company's success in maintaining its positive performance in 2020 was the result of effective implementation of good corporate governance (GCG). The management had also implemented GCG principles namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness at all levels of the organization and in all of the Company's operational areas.

”

Arie Prabowo Ariotedjo

Komisaris Utama | President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris The Board of Commissioners' Report

Yang Terhormat Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan PT Mitrabara Adiperdana Tbk,

Pandemi Covid-19 telah menjadikan 2020 sebagai tahun yang penuh tantangan dan ketidakpastian di tingkat global. Sebagai akibat berbagai tindakan dan kebijakan drastis seperti *lockdown* dan pembatasan pergerakan masyarakat yang diterapkan berbagai negara termasuk Indonesia, perekonomian dunia dan domestik serta berbagai industri termasuk batubara terdampak sangat negatif. Di industri batubara, hal ini terlihat pada penurunan harga batubara yang cukup drastis seperti pada kuartal III saat indeks NEWC GCI anjlok hingga di bawah US\$50 per metrik ton.

Di tengah kondisi usaha yang sangat tidak kondusif tersebut, Dewan Komisaris senantiasa konsisten memantau kinerja Perseroan serta menyampaikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi secara terbuka melalui rapat gabungan yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali serta melalui media komunikasi lainnya seperti email dan aplikasi Whatsapp. Melalui rapat dan komunikasi tersebut, kami senantiasa mengingatkan Direksi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dear Shareholders and Stakeholders of PT Mitrabara Adiperdana Tbk,

The Covid-19 pandemic has turned 2020 into a year full of challenges and uncertainties at global level. The world and domestic economy as well as numerous industries, including coal mining, were adversely and severely affected by various drastic measures and policies implemented to curb the spread of the pandemic such as lockdowns and public mobility restrictions. In coal industry, the negative impact could be observed in the plummeting prices of the commodity, such as in Q3 when the NEWC GCI index fell below US\$50 per metric ton.

Amid the aforementioned unfavorable business climate, the Board of Commissioners continuously and consistently monitored the Company's performance and provided opinions and recommendations to the Board of Directors in an open manner through joint board meetings held 6 (six) times well as through other means of communication such as email and WhatsApp application. Through the meetings and communication efforts, we constantly reminded the Board of Directors to perform its duties and responsibilities by taking into account the interests of both the shareholders and other stakeholders.



Penilaian Kinerja Direksi

Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sepanjang tahun 2020. Kami melihat bahwa di tengah berbagai perubahan radikal, kendala, dan keterbatasan di industri batubara yang diakibatkan pandemi Covid-19, Direksi telah mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyikapi pelemahan ekonomi pada tahun 2020, termasuk kondisi pelemahan harga batubara yang cukup drastis, sehingga Perseroan tetap mampu membukukan laba tahun berjalan sebesar US\$27,5 juta. Dewan Komisaris pun memberikan apresiasi atas seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Direksi untuk memastikan bahwa pandemi Covid-19 tidak berdampak signifikan terhadap kinerja, operasional, maupun aspek usaha Perseroan lainnya.

Dewan Komisaris juga memandang bahwa strategi dan rencana usaha yang dijalankan selama tahun 2020 telah sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Meski demikian, Dewan Komisaris juga selalu mengingatkan Direksi, agar dalam menjalankan strategi dan rencana usaha tersebut, Direksi harus memiliki strategi yang terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui penerapan manajemen risiko yang konsisten dan disiplin. Kami juga mengingatkan Direksi dan manajemen agar tetap waspada dan memiliki rencana untuk memitigasi berbagai tantangan di masa depan mengingat hingga saat ini masih belum dapat diprediksi kapan pandemi Covid-19 akan dapat dikendalikan secara efektif.

Assessment of the Board of Directors' Performance

The Board of Commissioners acknowledges that the Board of Directors had properly performed its duties and responsibilities throughout 2020. We saw that amid various radical changes, obstacles, and limitations within the coal industry in the wake of the Covid-19 pandemic, the Board of Directors had taken proper measures in responding to the aforementioned economic downturn as well as the drastic price decline and therefore enabled the Company to book US\$27.5 million profit for the year. The Board of Commissioners also applauds the Board of Directors' efforts to ensure that the Covid-19 pandemic had no significant impacts on the Company's performance, operations, and other business aspects.

The Board of Commissioners also concludes that the strategies and business plans implemented throughout 2020 were in accordance with the Company's vision and mission. However, the Board of Commissioners consistently reminds the Board of Directors that in implementing said strategies and business plans, the Board of Directors must prepare measured strategies and continue to observe the principle of prudence through the application of consistent and rigorous risk management. We also expect the Board of Directors and the management to remain vigilant and have plans to mitigate various challenges in the future considering that it is still unclear exactly when the Covid-19 pandemic can be effectively controlled.



Pandangan terhadap Prospek Usaha

Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi Perseroan telah menyusun prospek usaha yang sejalan dengan visi dan misi Perseroan, serta mempersiapkan strategi peningkatan kapasitas karyawan untuk memperkuat pondasi-pondasi pendukung Perseroan. Kami pun melihat bahwa dalam menyusun strategi Perseroan, Direksi telah memperhitungkan dan mengambil berbagai tindakan-tindakan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat muncul terkait pandemi Covid-19, baik tindakan berkaitan dengan pelaksanaan protokol pencegahan dalam menjalankan kegiatan operasional, maupun tindakan-tindakan strategis dalam menghadapi fluktuasi harga serta persediaan dan permintaan batubara.

Dewan Komisaris pun optimis terhadap implementasi rencana diversifikasi entitas anak yang telah dijalankan sejak beberapa tahun lalu. Karena itulah kami mendorong Direksi dan manajemen untuk memanfaatkan peluang pada 2021 dan tahun-tahun berikutnya sehingga rencana tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan, pemegang saham, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Views on Business Outlook

The Board of Commissioners agrees that the Board of Directors has prepared business prospects in line with the Company's vision and mission, including strategies to improve employees' capacity to strengthen the Company's supporting foundations. Moreover, the Board of Directors prepared the Company's strategies by taking into account and preparing correct measures against various challenges that could arise with regard to the Covid-19 pandemic, including measures related to the implementation of preventive protocols in operational activities, as well as strategic measures to mitigate coal price fluctuation as well as supplies and demand.

The Board of Commissioners is also optimistic about the implementation of subsidiaries' diversification plan that has been underway for several years. Accordingly, we expect the Company to capitalize on opportunities in 2021 and in the coming years to ensure the aforementioned plan can provide added value to the Company, shareholders, and other stakeholders.



// Foto ini diambil sebelum masa pandemi Covid-19
This picture was taken before the Covid-19 pandemic.



Selain itu, Dewan Komisaris berharap agar Direksi dan manajemen senantiasa melaksanakan pengembangan dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak agar peningkatan kinerja yang selama ini telah dijalankan dapat terjaga dengan baik dan terus ditingkatkan. Direksi dan manajemen pun harus memberikan dukungan kepada seluruh karyawan untuk senantiasa menjunjung profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar target yang telah ditetapkan dan disetujui bersama dan tertuang dalam target *Key Performance Indicator* masing-masing Departemen dapat tercapai dengan baik dan tepat waktu.

Pandangan terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dewan Komisaris memandang keberhasilan Perseroan mempertahankan kinerja positifnya di tahun 2020 merupakan hasil dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara efektif. Manajemen pun telah menerapkan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran dengan baik di seluruh tingkatan organisasi dan wilayah operasional Perseroan. Melalui penerapan GCG tersebut, Perseroan juga mempertahankan kepatuhannya terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite pendukungnya yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2020, ketiga komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya membantu Dewan Komisaris untuk memperkuat penerapan GCG secara berkelanjutan. Dengan bangga kami melaporkan bahwa sinergi antara Dewan Komisaris dan ketiga komite tersebut memainkan peranan penting dalam memastikan kecukupan penerapan GCG Perseroan selama tahun 2020.

In addition, the Board of Commissioners expects the Board of Directors and the management to regularly develop and monitor the Company's and subsidiaries' business activities to ensure the performance improvements that have been conducted to date can be properly maintained and improved upon continuously. The Board of Directors and the management must also encourage all employees to consistently uphold professionalism in performing their duties and responsibilities so that the agreed upon predetermined targets set out in the Key Performance Indicator for each Department can be achieved properly in timely manner.

Views on Implementation of Good Corporate Governance

The Board of Commissioners concludes that the Company's success in maintaining its positive performance in 2020 was the result of effective implementation of good corporate governance (GCG). The management had also implemented GCG principles namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness at all levels of the organization and in all of the Company's operational areas. Likewise, through GCG implementation, the Company also maintained its compliance with all applicable laws and regulations.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by its supporting committees namely the Audit Committee, the Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. Throughout 2020, the three committees had performed their duties and responsibilities in assisting the Board of Commissioners to strengthen the GCG implementation in a sustainable manner. We are proud to report that the synergy between the Board of Commissioners and its supporting committees played an important role in ensuring the adequacy for the Company's GCG implementation throughout 2020.

Pandangan terhadap Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dewan Komisaris melihat bahwa kendati kondisi Covid-19 pada tahun 2020 yang juga berdampak pada lokasi tambang Perseroan, manajemen Perseroan tetap mampu melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi aktif dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, kesehatan, dan infrastruktur. Tak hanya itu, kondisi pandemi Covid-19 mendorong Perseroan bekerja sama dengan instansi masyarakat setempat, baik instansi kesehatan, maupun instansi terkait lainnya untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan di wilayah sekitarnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup pemberian bantuan sarana dan prasarana kesehatan seperti alat pelindung diri, penyemprotan disinfektan, dan sosialisasi kesehatan. Kami juga mendorong Direksi dan manajemen untuk terus melaksanakan sekaligus mengembangkan kegiatan-kegiatan tersebut, terutama mengingat pandemi Covid-19 masih belum berakhir.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris mengalami perubahan pada tahun 2020 sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 9 Juni 2020 yang menerima pengunduran diri Ibu Yo Angela Soedjana dan Bapak Fumitake Uyama dari posisinya masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama serta mengangkat Bapak Arie Prabowo Ariotedjo dan Bapak Kenji Tomisawa masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama.

Views on the Implementation of Corporate Social Responsibility

The Board of Commissioners saw that even though the Covid-19 pandemic in 2020 also affected the Company's mine sites, the Company's management was still able to conduct corporate social responsibility (CSR) activities as part of its concern and active participation in the development of social affairs, economy, education, culture, health and infrastructure. Moreover, the Covid-19 pandemic prompted the Company to cooperate with local community agencies i.e. health agencies and other relevant agencies to prevent and treat the pandemic in its surrounding areas. To this end, the Company provided facilities and infrastructures including personal protective equipment, sprayed disinfectants, and held health dissemination. We also encourage the Board of Directors and the management to continue and expand these activities as the Covid-19 pandemic has yet to subside.

Changes to Composition of the Board of Commissioners

The composition of the Board of Commissioners changed in 2020 in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on June 9th, 2020, that accepted the resignation of Mrs. Yo Angela Soedjana from her position as President Commissioner and Mr. Fumitake Uyama from his position as Vice President Commissioner, and appointed Mr. Arie Prabowo Ariotedjo as President Commissioner and Mr. Kenji Tomisawa as Vice President Commissioner.



// Foto ini diambil sebelum masa pandemi Covid-19
This picture was taken before the Covid-19 pandemic.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Arie Prabowo Ariotedjo
Wakil Komisaris Utama : Kenji Tomisawa
Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik

Perubahan ini bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam memberikan perspektif baru yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan Perseroan. Dengan perspektif baru tersebut, diharapkan Dewan Komisaris dapat menerapkan strategi usaha dengan lebih efektif, khususnya dalam menghadapi tantangan yang dapat muncul di tahun-tahun berikutnya.

Penutup

Dewan Komisaris memandang bahwa meski Perseroan berhasil menjawab berbagai tantangan pada tahun 2020, Direksi dan segenap manajemen Perseroan harus tetap mawas diri dalam menghadapi tantangan yang masih akan tetap berlanjut pada tahun 2021. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi Perseroan ke depannya diprediksi akan semakin menantang, namun Dewan Komisaris yakin bahwa dengan didukung oleh profesionalisme dan kemampuan yang dimiliki oleh Direksi dan manajemen, Perseroan mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Akhir kata, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama Direksi, seluruh manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Marilah kita semua menyongsong masa depan yang lebih baik di era kebiasaan baru dengan semangat dan optimisme.

Therefore, the current composition of the Board of Commissioners is as follows:

President Commissioner : Arie Prabowo Ariotedjo
Vice President Commissioner : Kenji Tomisawa
Independent Commissioner : Abdullah Fawzy Siddik

The aforementioned change was aimed to maximize the capabilities of each member of the Board of Commissioners in providing new perspectives that could contribute to the Company's development. Equipped with said new perspectives, the Board of Commissioners is expected to implement business strategies more effectively, particularly to overcome challenges that may arise in the following years.

Closing

The Board of Commissioners believes that even though the Company was able to overcome various challenges in 2020, the Board of Directors and the entire management must remain vigilant in facing challenges that will continue to emerge in 2021. However, even though those challenges are predicted to be even tougher, the Board of Commissioners is confident that the Board of Directors and the management will be able to rise to the occasion with their professionalism and capability.

Last but not least, the Board of Commissioners would like to thank the Board of Directors, the management, all employees and stakeholders involved directly and indirectly with the Company for their support and cooperation. Let us all welcome a better future in the new normal era with good spirit and optimism.

Jakarta, April 2021

Atas nama Dewan Komisaris,
On behalf of the Board of Commissioners,



Arie Prabowo Ariotedjo

Komisaris Utama
President Commissioner



Kenji Tomisawa

Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner

Arie Prabowo Ariotedjo

Komisaris Utama
President Commissioner

Abdullah Fawzy Siddik

Komisaris Independen
Independent Commissioner



“

Perseroan berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar US\$27,5 juta di tengah kondisi harga batubara yang tidak kondusif di tahun 2020.

The Company managed to post US\$27.5 million profit for the year despite unfavorable coal prices throughout 2020.

”

Khoirudin

Direktur Utama President Director

Laporan Direksi

The Board of Directors' Report

Yang Terhormat Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan PT Mitrabara Adiperdana Tbk,

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan usaha Perseroan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, dengan ini kami menyampaikan Laporan Tahunan Direksi 2020. Dalam laporan tahunan ini, kami membahas kinerja dan pencapaian Perseroan, langkah-langkah strategis, tantangan yang dihadapi pada tahun yang penuh ketidakpastian tersebut, serta prospek usaha ke depannya.

Tinjauan Ekonomi dan Industri Batubara

Tahun 2020 adalah tahun yang sangat menantang dan penuh gejolak. Berbagai konflik, insiden, dan bencana terjadi sepanjang tahun, namun tidak ada yang dampaknya lebih besar daripada berkembangnya penyakit Coronavirus (Covid-19). Bermula di Tiongkok pada akhir 2019, pandemi Covid-19 dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan melumpuhkan ekonomi global, dan mengakibatkan banyak negara harus mengambil tindakan – tindakan pencegahan penyebaran pandemi tersebut, dan tidak terkecuali negara Indonesia. Adapun tindakan – tindakan yang dilakukan tersebut, antara lain akibat langkah-langkah drastis yang diambil untuk membatasi penyebarannya seperti *lockdown* dan pembatasan perjalanan.

Dear Shareholders and Stakeholders of PT Mitrabara Adiperdana Tbk,

As part of our obligation to run the Company's business in accordance with predetermined plans and targets, we hereby present the Board of Directors' 2020 Annual Report. Through this annual report, we discuss the Company's performance and achievements, strategic measures taken, challenges that arose in that uncertain year, as well as business prospect in the future.

Economic and Coal Industry Overview

The 2020 was an arduous and perilous year. Numerous conflicts, incidents, and disasters occurred throughout the year, none were more impactful than the Coronavirus disease (Covid-19) outbreak. Started in China at the end of 2019, the Covid-19 pandemic quickly spread worldwide and crippled the global economy in part due to drastic preventive measures taken by numerous countries, including Indonesia, to contain the disease. Those drastic measures included lockdowns and travel restrictions.



// Foto ini diambil sebelum masa pandemi Covid-19
This picture was taken before the Covid-19 pandemic.

Perlambatan ekonomi pada akhirnya memengaruhi berbagai industri, termasuk pertambangan batubara. Penurunan permintaan global terhadap batubara menyebabkan anjloknya harga yang tercermin pada rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) di Indonesia yang menurun 25,3% di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pemerintah juga kembali mencoba memperketat penerapan kebijakan *domestic market obligation* (DMO) serta penetapan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Kedua kebijakan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap para pemain industri batubara dengan pangsa pasar ekspor. Wacana pengalihan proses perizinan pertambangan mineral dan batubara dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat juga mengharuskan penambang batubara mempersiapkan diri menghadapi berbagai implikasinya di masa depan. Selain itu, secara umum, semua perusahaan juga diwajibkan mematuhi peraturan terkait upaya penanggulangan pandemi baik di kantor pusat, termasuk di tempat perusahaan tersebut beroperasi.

The resulting economic downturn subsequently affected industries, and coal mining was not an exception. The declining global demand for the commodity led to falling prices as indicated by the average coal benchmark price (HBA) in Indonesia that fell by 25.3% in 2020 compared to the previous year.

In addition, the government yet again tried to toughen the implementation of the domestic market obligation (DMO) policy as well as the determination of coal selling price for power plants for public interest. Both policies would greatly affect export-oriented coal industry players. Likewise, the discourse on the transfer of mineral and coal mining licensing authority from regional administrations to the central government also compelled coal miners to prepare for its various implications in the future. Moreover, all companies were required to comply with regulations on pandemic mitigation efforts at their head office as well as their operational areas.



Faktor-faktor perekonomian lain seperti tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, serta harga minyak turut memengaruhi kinerja industri batubara, termasuk Perseroan. Faktor-faktor eksternal tersebut berada di luar kendali Perseroan, oleh karena itulah Perseroan tetap mempersiapkan strategi dan kebijakan mitigasi, terutama yang difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja operasionalnya demi membukukan hasil usaha yang lebih baik.

Strategi Usaha

Di tengah kondisi harga batubara yang kurang kondusif, Perseroan memfokuskan strateginya pada optimalisasi dan efisiensi biaya pokok dan operasional dengan menyusun beberapa inisiatif kunci yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional. Beberapa inisiatif kunci tersebut tertuang dalam *Cost Reduction Program* yang menjadi panduan Perseroan dalam menjalankan operasionalnya sepanjang tahun 2020. Di saat bersamaan, Perseroan terus memperkuat komitmennya untuk mematuhi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait faktor operasional, lingkungan dan keselamatan agar terhindar dari risiko yang dapat menghambat kegiatan operasional Perseroan.

Other economic factors such as the inflation rate, the Rupiah exchange rate against the US Dollar, as well as oil prices also affected the performance of the coal industry, including the Company. These were all external factors beyond the Company's control, however, the Company promptly implemented proper mitigation strategies and policies, particularly those focused on the improvement of operating performance efficiency and effectiveness in order to achieve better business results.

Business Strategy

As coal prices remained unfavorable, the Company focused its strategy on optimizing cost of sales and operating cost efficiency by preparing several key initiatives directly related to operational activities. A number of those key initiatives were included in the *Cost Reduction Program* that served as the Company's guideline in carrying out its operations throughout 2020. In addition, the Company continued to strengthen its commitment to complying with applicable laws and regulations, particularly with regard to its operations, the environment, and safety in order to mitigate risks that may disrupt its operations.



// Foto ini diambil sebelum masa pandemi Covid-19
This picture was taken before the Covid-19 pandemic.

Selain itu, Perseroan memanfaatkan seluruh kekuatan pondasi-pondasi usahanya untuk menjawab tantangan-tantangan usaha selama tahun 2020. Salah satu pondasi utama tersebut adalah efisiensi biaya melalui upaya-upaya pengurangan beban biaya operasional Perseroan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, dan juga menetapkan dasar harga penjualan yang tetap memperhatikan target pendapatan saat harga batubara sedang tidak bersahabat dan biaya operasional yang harus ditanggung oleh Perseroan. Kegiatan operasional Perseroan juga ditunjang oleh pondasi-pondasi lainnya yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, seperti kelengkapan infrastruktur yang dimiliki oleh Perseroan dan entitas anak, termasuk di dalamnya adalah fasilitas laboratorium, pelabuhan, jalan angkut, dan jembatan dengan sistem *double bridge*, serta proses bisnis yang terintegrasi dan dikendalikan sepenuhnya oleh Perseroan dan afiliasinya.

Keuangan, infrastruktur dan proses bisnis tersebut pun dijalankan oleh satu lagi pondasi Perseroan yaitu sumber daya manusia yang kompeten dengan keahlian di bidang masing-masing serta diperkuat *work ethics* dengan keunggulan sebagai berikut:

(1) *Discipline in Execution*

Setiap karyawan dituntut untuk selalu memastikan bahwa pengambilan keputusan serta tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik dan benar, sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

(2) *Close Supervisory*

Setiap atasan bertugas dan bertanggung jawab mengawasi dan memastikan bahwa setiap bawahan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Moreover, the Company fully utilized the strength of its entire business foundations to overcome business challenges throughout 2020. One of those main foundations was cost efficiency through efforts to reduce the Company's operating costs while maintaining focus on safety aspects, in addition to sales price determination that persistently paid close attention to revenue target when coal prices were less than ideal as well as the Company's operating costs. The Company's operations were also supported by other integrated foundations from upstream to downstream namely infrastructures including laboratories, ports, hauling roads, and bridges with double bridge system, in addition to integrated business processes fully controlled by the Company and its affiliates.

The aforementioned finances, infrastructures, and business processes were manned by the Company's other foundation namely competent human resources with expertise in their respective fields, and superior work ethics with the following advantages:

(1) *Discipline in Execution*

Each employee is required to consistently ensure that decision making as well as duties and responsibilities are carried out properly and correctly in accordance with the predetermined timetable.

(2) *Close Supervisory*

Each superior is responsible for overseeing and ensuring that each subordinate understands their respective duties and responsibilities.



// Foto ini diambil sebelum masa pandemi Covid-19
This picture was taken before the Covid-19 pandemic.

(3) Sense of Emergency

Pemikiran bahwa tidak ada hal yang kurang penting, semua hal adalah penting dan harus diperhatikan secara khusus oleh masing-masing karyawan. Dengan adanya pemikiran tersebut, masing-masing karyawan harus selalu waspada dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup Perseroan.

(4) Kuberikan 1000%-ku

Kendati kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020 membatasi ruang kerja karyawan, namun setiap jajaran Direksi, manajemen dan seluruh karyawan Perseroan dituntut untuk memberikan kinerja terbaiknya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, rasa memiliki yang tinggi, dan tidak hanya sebatas menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan *job description* yang telah disampaikan oleh atasan, namun juga berkontribusi lebih dengan inisiatif dan inovasi baru untuk kebaikan Perseroan.

(3) Sense of Emergency

The thought that nothing is unimportant, and that everything is important and requires special attention from each employee. With this in mind, each employee must remain vigilant in carrying out their duties and responsibilities, to prevent events that can have a negative impact on the survival of the Company.

(4) I Give My 1,000%

Despite the Covid-19 pandemic in 2020 that limited the employees' work space, the Board of Directors, the management and all employees are required to do their best in carrying out their duties and responsibilities, with a strong sense of belonging, and not merely carrying out their duties and responsibilities in accordance with their job description from their superiors, but also contributing more with new initiatives and innovations in the best interest of the Company.

Kinerja Perseroan Tahun 2020

Di tengah pandemi dan situasi usaha yang kurang kondusif, Perseroan mampu mempertahankan kinerja operasionalnya di tahun 2020 dengan baik dengan tetap memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan kerja. Hal tersebut tercermin pada pencapaian volume produksi batubara sebanyak 4 juta ton sesuai dengan target yang ditetapkan sejak awal tahun 2020.

Dalam hal kinerja keuangan, Perseroan berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar US\$27,5 juta di tengah kondisi harga batubara yang tidak kondusif di tahun 2020. Perseroan pun berhasil mempertahankan rasio-rasio keuangannya di tingkat yang sama dengan tahun sebelumnya antara lain *current ratio* di 3,7x dan *debt-to-equity ratio* di 31,6%.

Prospek Usaha

Perseroan telah mempersiapkan berbagai program pengembangan usaha jangka panjang yang akan dijalankan secara langsung oleh Perseroan atau melalui entitas anak. Program tersebut mencakup pengembangan usaha di bidang sewa tanpa hak opsi untuk pembangkit tenaga listrik berbasis tenaga surya (*roof-mounted solar panel*), batubara, perkebunan energi, serta berbagai rencana pengembangan usaha lainnya dengan tetap mengacu kepada visi dan misi Perseroan, yaitu menjadi perusahaan terkemuka berbasis energi yang berkelanjutan. Kami meyakini program pengembangan usaha tersebut akan semakin mendiversifikasi usaha, sekaligus mempertahankan keberlanjutan Perseroan di masa depan.

The Company's Performance in 2020

Amid the pandemic and unfavorable business climate, the Company was able to properly maintain its operating performance in 2020 by observing occupational health and safety factors. This was reflected in the Company's 4 million tons coal production volume in 2020, meeting the target set at the beginning of the year.

In terms of financial performance, the Company managed to post US\$27.5 million profit for the year despite unfavorable coal prices throughout 2020. Likewise, the Company was able to maintain its financial ratios at a level similar to the previous year such as current ratio that was recorded at 3.7x and debt-to-equity ratio at 31.6%.

Business Prospect

The Company has prepared various long-term business development programs that will be carried out directly by the Company or through its subsidiaries. The programs include leasing business without option rights for roof-mounted solar panel, coal, energy plantations, and various other business development plans by observing the Company's vision and mission to be a leading corporation with sustainable energy basis. We are confident the aforementioned business development programs will further diversify the Company's business, and simultaneously maintain the Company's sustainability in the future.

Tak hanya itu, dilengkapi dengan berbagai pondasi kuat yang telah dijabarkan di atas, Direksi optimis Perseroan dapat menghadapi berbagai tantangan di tahun 2021 seperti kondisi harga batubara yang masih belum dapat diprediksi, dan dampak berkepanjangan atas pandemi Covid-19 yang masih terus bergulir. Kami pun siap untuk terus-menerus meningkatkan kinerja usaha dan mendukung upaya pertumbuhan Perseroan sesuai perkembangan industri dan perekonomian.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada tahun 2020, Perseroan secara konsisten telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* - GCG) dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah GCG yang ada. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi rutin yang telah dilakukan oleh manajemen baik di kantor pusat, dan lokasi tambang, maupun komunikasi yang dilakukan antara manajemen di kantor pusat dan lokasi tambang, baik mempergunakan fasilitas *video conference* maupun fasilitas komunikasi lain seperti aplikasi WhatsApp dan *email*.

Untuk memastikan bahwa seluruh anggota Perseroan menjalankan prinsip GCG dengan baik dan benar, Direksi dibantu oleh tim-tim di bawah arahan Direksi secara langsung. Tim-tim tersebut mengawasi pelaksanaan operasional Perseroan untuk memastikan kegiatan operasional dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kaidah tata kelola pertambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practice*), dengan memperhatikan berbagai aspek baik aspek hukum, ekonomi, sosial, khususnya keselamatan baik karyawan maupun para pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, Direksi yakin bahwa setiap karyawan menjalankan proses pengambilan keputusan dengan prinsip kehati-hatian sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing.

Selain itu, kendati kondisi Covid-19 tidak membatasi Perseroan untuk menyampaikan informasi-informasi yang terkini kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya, baik melalui *website* Perseroan, maupun melakukan kegiatan pemaparan publik yang telah dilaksanakan, dengan menjalankan protokol kesehatan dan Covid-19.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*-CSR) yang bertujuan meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat sekitar lokasi tambang dan para pemangku kepentingan lainnya.

In addition, equipped with the abovementioned strong foundations, the Board of Directors expects the Company to be able to face various challenges in 2021 such as coal prices that remain unpredictable as well as the prolonged impacts of the Covid-19 pandemic that has yet to subside. We are also ready to continuously improve business performance and support the Company's efforts to grow in line with the industry's and economic developments.

Implementation of Good Corporate Governance

In 2020, the Company consistently implemented the principles of good corporate governance (*Good Corporate Governance* - GCG) in a proper and correct manner in accordance with applicable GCG guideline. This was signified by the constant communication at the headquarters, the mine sites, as well as between the headquarters and the mine sites through video conferences as well as other telecommunication methods such as WhatsApp application and email.

To ensure that all members of the Company apply GCG principles in a proper and correct manner, the Board of Directors was assisted by teams directly under its direction. The teams supervised the Company's operations to ensure proper execution in compliance with Good Mining Practice by taking into account the legal, economic, social, and especially safety factors, for both employees and other stakeholders. In this regard, the Board of Directors has sufficient assurance that each employee prudently carries out decision-making process in accordance with their respective duties, responsibilities, and authorities.

In addition, the Covid-19 pandemic does not hamper the Company's capability to deliver the most up-to-date information to shareholders and other stakeholders through the Company's website as well as public exposures held by observing health and Covid-19 protocols.

Implementation of Corporate Social Responsibility

Throughout 2020, the Company had implemented numerous corporate social responsibility (*Corporate Social Responsibility*-CSR) programs and activities in order to improve various aspects of community life around its mine sites. By observing local wisdom and the Company's 5 (five) CSR pillars namely

Dengan tetap berpegangan pada kearifan lokal dan mengacu kepada 5 (lima) pilar CSR Perseroan yaitu Kesehatan, Pendidikan, Kemasyarakatan, Ekonomi, dan Lingkungan, Perseroan bekerja bersama-sama instansi terkait, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar secara langsung untuk menjalankan program CSR-nya. Secara berkala Perseroan turut pula melaksanakan evaluasi terhadap program-program tersebut, mensosialisasikan manfaat program CSR kepada masyarakat, serta melakukan peningkatan dan/atau perbaikan program CSR untuk tahun berikutnya, untuk memastikan bahwa program CSR yang dilaksanakan Perseroan adalah tepat sasaran, membentuk masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.

Perseroan pun berperan aktif dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Di sepanjang tahun 2020, Perseroan menyumbangkan alat bantu kesehatan, melaksanakan sosialisasi mengenai Covid-19, dan menjalankan penyemprotan disinfektan di fasilitas umum. Perseroan pun membangun fasilitas pendukung penerapan protokol kesehatan seperti wastafel darurat di berbagai tempat umum, serta menerapkan kewajiban pemeriksaan kesehatan karyawan dan/atau pihak ketiga yang hendak memasuki wilayah tambang Perseroan. Kami meyakini tindakan-tindakan tersebut berkontribusi positif dalam melindungi kesehatan karyawan, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan lainnya di sekitar wilayah operasional Perseroan, khususnya selama masa pandemi Covid-19 ini.

Informasi lebih lanjut mengenai program CSR disampaikan pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Education, Health, Economy, Community, and Environment, the Company directly worked together with related agencies, community leaders and the surrounding communities to implement its CSR programs. Moreover, the Company regularly evaluated its CSR programs, disseminated their benefits to the communities, and improved and/or intensified said CSR programs for the following year in order to ensure that the Company's CSR programs reach their intended recipients and establish self-reliant and sustainable communities.

Likewise, the Company played an active role with regard to the Covid-19 pandemic mitigation efforts. Throughout 2020, the Company donated health equipment, disseminated information on Covid-19, and regularly sprayed disinfectants at public facilities. The Company also built supporting facilities for the implementation health protocols such as emergency hand sinks in various public places as well as implementing mandatory health screening for employees and/or third parties about to enter the Company's mining areas. We sincerely believe these efforts positively contributed to protecting the health of employees, the general public, and other stakeholders around the Company's operational areas, especially over the course of the Covid-19 pandemic.

Further information about the CSR programs is available in the Corporate Social Responsibility chapter of this Annual Report.



Perubahan Susunan Direksi

Susunan anggota Direksi mengalami perubahan pada tahun 2020 sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 20 Oktober 2020 yang menerima pengunduran diri Bapak Widada dan Bapak Deden Ramdan dari posisinya masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur, serta mengangkat Bapak Khoirudin dan Bapak Eric Rahardja masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur.

Dengan demikian, susunan Direksi saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Khoirudin
Wakil Direktur Utama	: Hidefumi Kodama
Direktur	: Ir. Syadaruddin
Direktur	: Eric Rahardja

Dengan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing Bapak Khoirudin di bagian kepatuhan dan operasional, dan pengalaman Bapak Eric Rahardja untuk bidang pengembangan kegiatan usaha, akan berperan sangat penting dalam upaya Perseroan mengembangkan berbagai konsep baru untuk mengoptimalkan fungsi Perseroan dan setiap entitas anak.

Penutup

Direksi sangat optimis bahwa dengan pondasi-pondasi internal dan eksternal yang kuat, Perseroan akan mampu mengatasi berbagai tantangan yang tengah dihadapi industri batubara saat ini dan di masa depan. Oleh karena itulah, Direksi mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, seluruh manajemen dan karyawan Perseroan, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya Perseroan mempertahankan kinerja usahanya di tahun 2020 yang kurang begitu kondusif.

Marilah kita semua bekerja lebih keras bersama-sama demi memperkuat usaha Perseroan di era *new normal* dan di masa depan.

Changes to the Composition of the Board of Directors

The composition of the Board of Directors changed in 2020 in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 20th, 2020, that accepted the resignation of Mr. Widada from his position as President Director and Mr. Deden Ramdan from his position as Director, and appointed Mr. Khoirudin as President Director and Mr. Eric Rahardja as Director.

Therefore, the current composition of the Board of Directors is as follows:

President Director	: Khoirudin
Vice President Director	: Hidefumi Kodama
Director	: Ir. Syadaruddin
Director	: Eric Rahardja

Mr. Khoirudin's experience with regard to compliance and operations as well as Mr. Eric Rahardja's experience in business development will play a crucial role as the Company develops various new concepts to optimize the functions of the Company and each subsidiary.

Closing

Equipped with strong internal and external foundations, the Board of Directors is confident that the Company will be able to overcome challenges the coal industry faces today and tomorrow. Therefore, the Board of Directors would like to thank Shareholders, stakeholders, the Board of Commissioners, the entire management and all employees for their support and trust that enabled the Company to maintain its business performance in the tumultuous 2020.

Let us all work harder together in order to strengthen the Company's business under the new normal paradigms and in the future.

Jakarta, April 2021

Atas nama Direksi,
On behalf of the Board of Directors,



Khoirudin
Direktur Utama
President Director



Eric Rahardja

Direktur
Director

Hidefumi Kodama

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Khoirudin

Direktur Utama
President Director

Ir. Sydaruddin

Direktur
Director

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

Saat ini Perseroan memiliki wilayah izin usaha pertambangan batubara seluas total 2.960 hektare serta mempekerjakan lebih dari 600 karyawan.

The Company currently controls a total of 2,960 hectares of coal mining license area and employs more than 600 employees.





// Informasi Perseroan

Corporate Information

Nama Name	PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tanggal Pendirian Date of Establishment	28 Oktober 1992 October 28 th , 1992
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Nomor 34 tanggal 29 Mei 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Hendrik Hondo berkedudukan di Jakarta, dan diamandemen dengan Akta Nomor 9 tanggal 12 Oktober 1992, yang dibuat dihadapan Notaris Haji Abdul Kadir Usman yang berkedudukan di Jakarta Deed No. 34 dated May 29 th , 1992, prepared before Hendrik Hondo, Substitute Notary, domiciled in Jakarta, and amended by Deed No. 9 dated October 12 th , 1992, prepared before Haji Abdul Kadir Usman, Notary, domiciled in Jakarta.
Tanggal Pencatatan Saham Date of Share Listing	10 Juli 2014 July 10 th , 2014
Kode Saham Ticker Symbol	MBAP
Bidang Usaha Line of Business	Pertambangan Batubara Coal Mining
Alamat Address	Grha Baramulti Komplek Harmoni Plaza, Blok A-8 Jl. Suryopranoto No.2 Jakarta Pusat 10130
Website	www.mitrabaraadiperdana.co.id
Email	corsec@mitrabaraadiperdana.co.id
Nomor Telepon Phone Number	+6221 6385 6211
Nomor Fax Fax Number	+6221 6385 2326



// Sekilas Perseroan

Company in Brief

PT Mitrabara Adiperdana Tbk merupakan perusahaan pertambangan batubara yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1992 serta memiliki izin usaha pertambangan batubara dan wilayah izin usaha pertambangan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (dahulu Kalimantan Timur).

Perseroan memulai kegiatan operasional pertambangan batubaranya pada tahun 2008 dan hingga saat ini telah diperkuat oleh sinergi antar entitas anak serta integrasi infrastruktur yang mengakomodasi kegiatan eksplorasi, produksi, dan distribusi dari hulu hingga hilir. Produk unggulan Perseroan adalah batubara berkualitas tinggi dengan *medium CV (low ash-low sulfur)* yang sangat diminati oleh pasar internasional berkat karakteristiknya yang lebih ramah lingkungan.

Pada tahun 2014, Perseroan melaksanakan penawaran umum saham perdana dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia menggunakan nama PT Mitrabara Adiperdana Tbk dengan kode bursa "MBAP" sebagai bagian dari strategi pengembangan usahanya. Dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana tersebut dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan seperti pengembangan fasilitas pelabuhan dan pengoperasian fasilitas penanganan batubara (*coal handling facilities*).

Saat ini Perseroan memiliki wilayah izin usaha pertambangan batubara seluas total 2.960 hektare serta mempekerjakan lebih dari 600 karyawan.

PT Mitrabara Adiperdana Tbk is a coal mining company established on October 28th, 1992, that holds coal mining license with coal mining license area in Malinau Regency, North Kalimantan (formerly East Kalimantan).

The Company commenced its coal mining operations in 2008 and to date has leveraged the synergy between subsidiaries as well as integrated infrastructures that accommodate exploration, production, and distribution from upstream to downstream. The Company's mainstay product is high quality coal with medium CV (low ash-low sulfur) most favored by the global market due to its more environmentally friendly characteristics.

In 2014, the Company conducted initial public offering by listing its shares on the Indonesia Stock Exchange under the name PT Mitrabara Adiperdana Tbk with "MBAP" ticker symbol as part of its strategy to develop its business. The proceeds from the initial public offering were utilized to enhance the Company's operations such as port facilities development and the operation of coal handling facilities.

The Company currently controls a total of 2,960 hectares of coal mining license area and employs more than 600 employees.

// Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications



6 November 2020
November 6th, 2020

Perseroan memperoleh penghargaan Indonesian CSR Award (ICA) 2020 dari Corporate Forum for Community Development (CFCD) di kategori Gold dengan subjek inti: Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat UMKM Cafe Sahabat sebagai Peningkatan Pendapatan Pemuda dalam Mendukung Program Desa Wisata Long Loreh.

The Company received the 2020 Indonesian CSR Award (ICA) from Corporate Forum for Community Development (CFCD) in the Gold category with the core subject: Community Engagement and Development of the Cafe Sahabat MSME to Increase Youth Income in Supporting the Long Loreh Tourist Village Program.



8 Desember 2020
December 8th, 2020

Perseroan menerima Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Mengelola Lingkungan Hidup Tingkat Nasional (PROPERNAS) Peringkat BIRU Periode 2019-2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

The Company received BLUE Rating in the 2019-2020 National Environmental Performance Rating Program (PROPERNAS) Award from the Ministry of Environment and Forestry.

// Visi dan Misi

Vision and Mission

Menjadi korporasi terkemuka berbasis energi yang berkelanjutan, berstandar kualitas kelas dunia dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat.

To be a leading corporation with sustainable energy basis, having world-class quality standard and to contribute to community development.

VISI

Vision



- Mengembangkan usaha berbasis energi yang ramah lingkungan;
 - Menyediakan produk berkualitas dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan;
 - Meningkatkan nilai perusahaan yang berkelanjutan;
 - Menerapkan tata kelola perusahaan berstandar kelas dunia;
 - Mewujudkan tanggung jawab sosial dengan menumbuhkan ekonomi masyarakat setempat;
 - Membangun kompetensi sumber daya manusia dan budaya organisasi yang unggul.
-
- To develop eco-friendly energy business activities;
 - To provide good quality product and focus on customer satisfaction;
 - To increase sustainable enterprise value;
 - To implement a world class Good Corporate Governance;
 - To implement corporate social responsibility by developing the local economy;
 - To build high competence human resources and excellent organization culture.

MISI

Mission



// Foto ini diambil sebelum masa pandemi Covid-19
This picture was taken before the Covid-19 pandemic.

// Tonggak Sejarah Perseroan Corporate Milestone

1992

Mitrabara didirikan di Jakarta Pusat sebagai perusahaan pertambangan batubara.

Mitrabara was established in Central Jakarta as a coal mining company.

1995

Mitrabara memperoleh kuasa pertambangan KP eksplorasi.

Mitrabara obtained its exploration mining concession.

2014

Mitrabara melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia.

Mitrabara conducted initial public offering on the Indonesia Stock Exchange.

2013

Mitrabara mengakuisisi 99,995% saham BDMS.

Mitrabara acquired 99.995% of BDMS shares.

2015

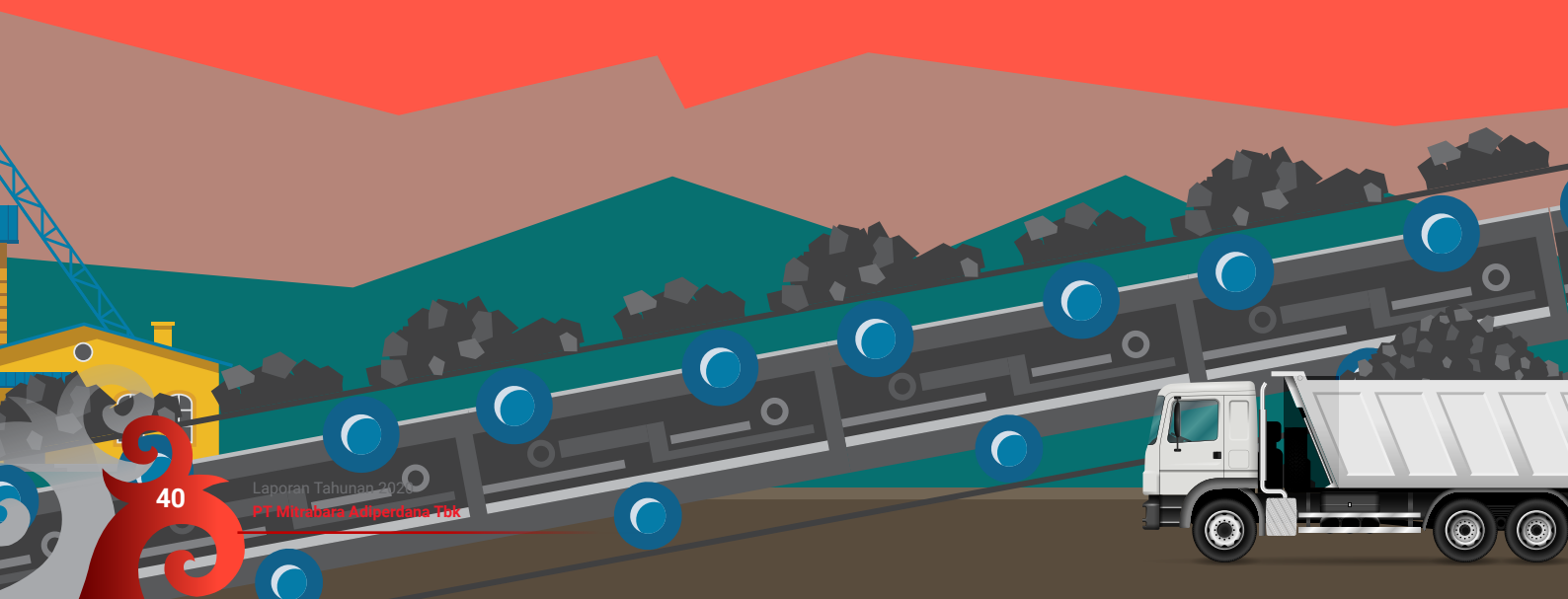
Mitrabara mendirikan entitas anak MME untuk proyek pembangkit tenaga biomassa dan MHL untuk proyek perkebunan energi dan perusahaan hutan.

Mitrabara established subsidiaries MME for biomass power plant project and MHL for energy plantation and forestry concession project.

2016

Mitrabara mengakuisisi ECTS dan bekerja sama dengan ENGIE Global Development BV serta PT Tritama Mitra Lestari untuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya.

Mitrabara acquired ECTS and collaborated with ENGIE Global Developments BV and PT Tritama Mitra Lestari to develop solar power plant project.



2003

Mitrabara memperoleh KP eksploitasi.

Mitrabara obtained its exploitation mining concession.

2008

Mitrabara memulai penambangan batubara.

Mitrabara commenced its coal mining operations.

2012

Mitrabara dan BDMS mendapatkan sertifikat *Clean and Clear* dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Mitrabara and BDMS obtained Clean and Clear Certificate from the Directorate General of Minerals and Coal.

2009

Mitrabara memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagai penyesuaian dengan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Mitrabara obtained its Mining Business Permit (IUP) for Operations of production in compliance with the Law No. 4/2009 on Mineral and Coal Mining.

2017

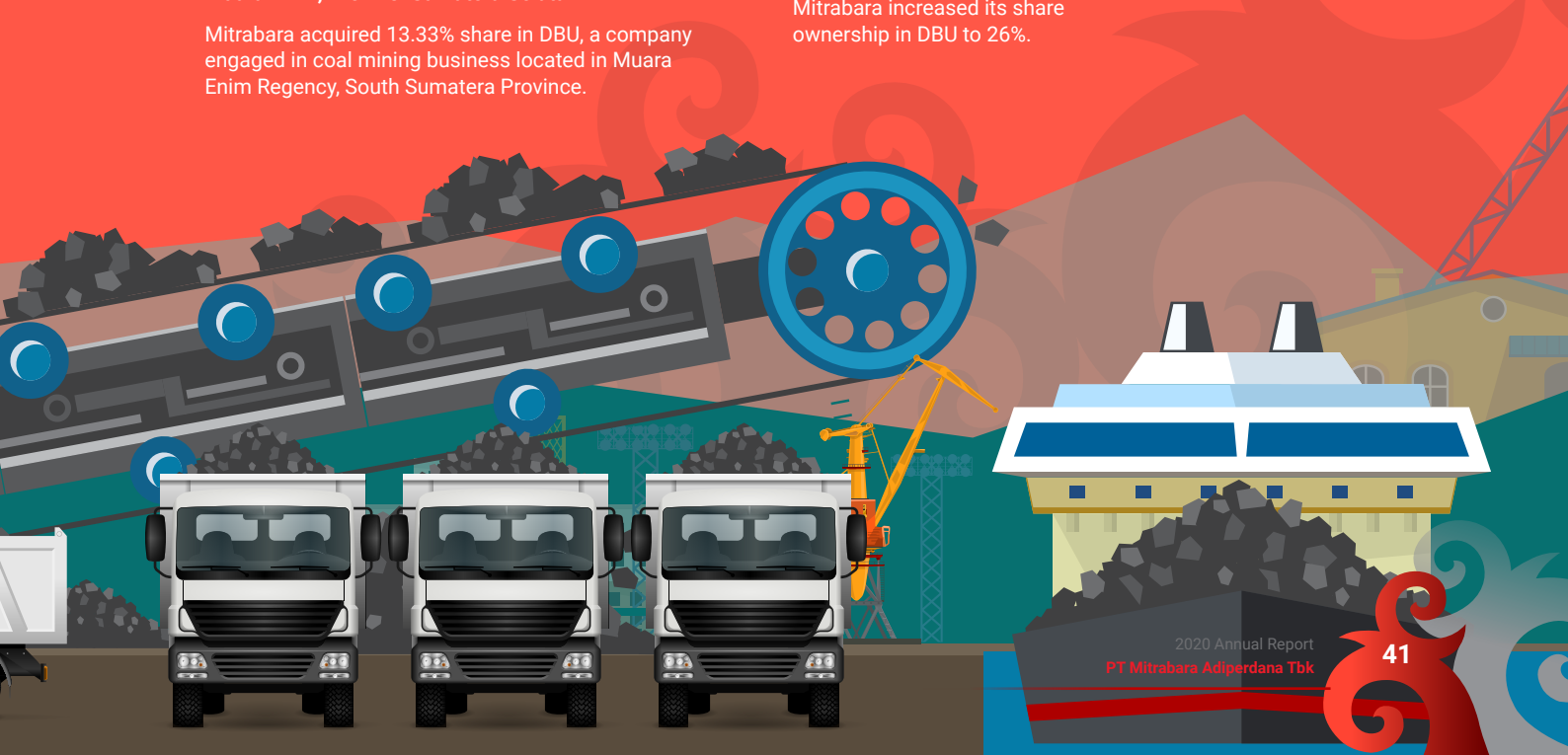
Mitrabara mengakuisisi 13,33% saham di DBU, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Mitrabara acquired 13.33% share in DBU, a company engaged in coal mining business located in Muara Enim Regency, South Sumatera Province.

2018

Mitrabara meningkatkan kepemilikan sahamnya pada DBU menjadi sebesar 26%.

Mitrabara increased its share ownership in DBU to 26%.



// Bidang Usaha

Line of Business

Sesuai Anggaran Dasar terakhir yang disahkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 Juni 2019, kegiatan utama Perseroan dan entitas anaknya mencakup pertambangan, perdagangan dan perindustrian batubara.

1. Kegiatan Usaha Utama
 - a. Menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor pertambangan sebagaimana diizinkan oleh pemerintah dan sepanjang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku, termasuk pengeringan batubara;
 - b. Menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor industri;
 - c. Menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor perdagangan, termasuk perdagangan dalam negeri, inter-insulair, ekspor dan impor, perdagangan besar, pemasok dan distributor atas jenis barang apapun;
 - d. Menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor konstruksi.

2. Kegiatan Usaha Penunjang yaitu sarana penunjang kegiatan usaha pertambangan dan konsultasi bidang pertambangan
 Perseroan bekerja sama dengan kontraktor pertambangan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi penambangan tanah buangan (*overburden*), pengadaan transportasi, serta penyediaan peralatan pertambangan, bahan-bahan, dan suku cadang sesuai dengan kewajibannya masing-masing, khususnya untuk menunjang kegiatan produksi batubara Perseroan.

Pursuant to the latest Articles of Association ratified in accordance with the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 12th, 2019, the principal activities of the Company and its subsidiaries are coal mining, trading and industrial services.

1. Core Business
 - a. Conducting business in mining sector in accordance with the permit issued by the government as well as prevailing regulations, including coal drying;
 - b. Conducting business in industrial sector;
 - c. Conducting business in trading sector, including domestic trading, inter-island, export-import, wholesale trading, supplying and distributing any type of goods;
 - d. Conducting business in construction sector.

2. Supporting Business namely mining supporting infrastructure and mining consultation

The Company partners with mining contractors who are responsible for overburden removal, transportation procurement, as well as mining equipments, materials, and spare parts provision in accordance with their respective obligations, particularly in supporting the Company's coal production activities.



// Produk dan Jasa

Products and Services

Wilayah izin usaha pertambangan Perseroan dan BDMS terletak di Desa Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (dahulu Kalimantan Timur) dengan luas masing-masing sebesar 1.930 Ha dan 1.030 Ha.

Spesifikasi batubara ramah lingkungan yang diproduksi dan dipasarkan Perseroan adalah sebagai berikut:

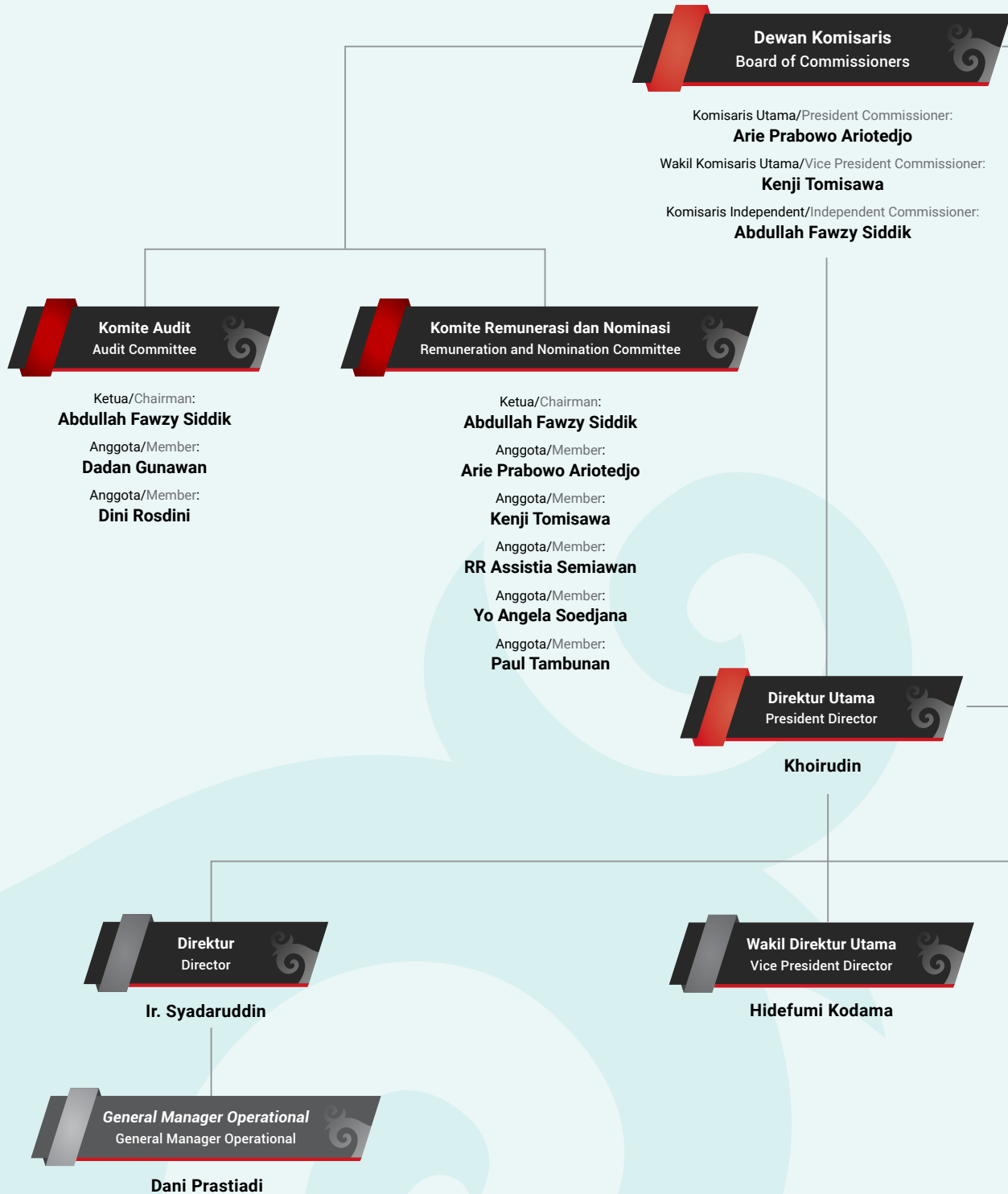
The Company's and BDMS' coal mining license areas are located in Loreh Village, South Malinau Sub-district, Malinau Regency, North Kalimantan (formerly East Kalimantan) Province, covering areas of 1,930 Ha and 1,030 Ha respectively.

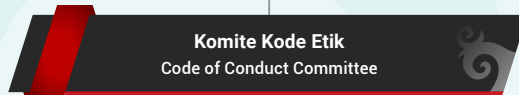
The specifications of environmentally friendly coal the Company produces and markets are as follows:

Spesifikasi Batu Bara Coal Specification	Kelembaban Total Total Moisture (TM)	Kelembaban Inheren Inherent Moisture (IM)	Abu Ash	Sulfur Sulphur
Malinau 5700 GAR	20%	12%	5%	0.3%
Malinau 5400 GAR	21%	13.5%	5%	0.3%
Malinau 5200 GAR	23%	13.5%	6%	0.3%
Malinau 5000 GAR	21%	13.5%	10%	0.3%

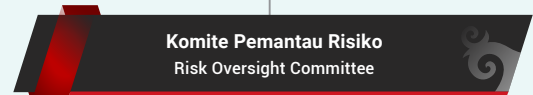
// Struktur Organisasi

Organizational Structure

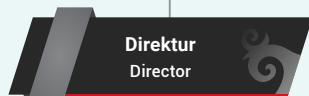




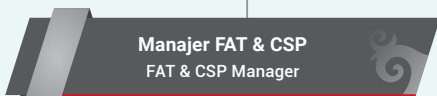
Ketua/Chairman:
Richard Pardede
Wakil Ketua/Vice Chairman:
Helmy Paramaditya
Anggota/Member:
Budhi Ishak
Anggota/Member:
Dani Prastiadi



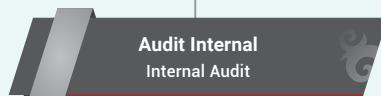
Ketua/Chairman:
Abdullah Fawzy Siddik
Anggota/Member:
Yo Angela Soedjana
Anggota/Member:
Masanori Sugino
Anggota/Member:
Dini Rosdini



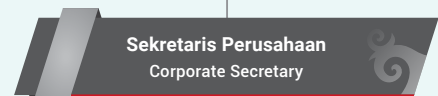
Eric Rahardja



Hans Kartika Putra



Daniel Eka Chandra



Chandra Lautan

// Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Profile



Arie Prabowo Ariotedjo

Komisaris Utama President Commissioner

(Juni 2020-sekarang | June 2020-present)

Kewarganegaraan | Citizenship

Usia | Age

Domisili | Domicile

Indonesia

60 tahun | years old

Jakarta

Arie Prabowo Ariotedjo diangkat menjadi Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Juni 2020. Meraih gelar Master of Science in Civil Engineering (Structural) dari University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, dan memiliki pengalaman lebih dari 38 tahun di berbagai perusahaan tambang. Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai CEO/President Director PT Antam Tbk (2017-2019), *Commerce Director* PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2016- 2017), *Chairman* PT Bukit Asam Prima (2016- 2017), CEO/President Director PT Medco Energi Mining Internasional (MEMI) (2014-2015), dan CEO/*Managing Director* PT Medco Energi Mining Internasional (MEMI) (2009-2014).

Arie Prabowo Ariotedjo was appointed as President Commissioner in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 9th, 2020. Obtained his Master of Science in Civil Engineering (Structural) degree from the University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, and has more than 38 years of professional experiences at various mining companies. He previously served as, among others, CEO/President Director of PT Antam Tbk (2017- 2019), *Commerce Director* of PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2016-2017), *Chairman* of PT Bukit Asam Prima (2016-2017), CEO/President Director of PT Medco Energi Mining Internasional (MEMI) (2014-2015), and CEO/*Managing Director* of PT Medco Energi Mining Internasional (MEMI) (2009-2014).



Kenji Tomisawa

Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner

(Juni 2020-sekarang | June 2020-present)

Kewarganegaraan | Citizenship

Usia | Age

Domisili | Domicile

Jepang | Japan

54 tahun | years old

Jepang | Japan

Kenji Tomisawa menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Juni 2020. Meraih gelar Bachelor of Engineering dari Kyushu University dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang pertambangan batubara. Sebelumnya pernah menduduki berbagai poisisi strategis di Idemitsu Kosan Co.,Ltd. antara lain sebagai *West Japan Coal Marketing Office Manager* (2017-2019); *Assistant to General Manager, Coal Business Development* (2015-2017); *General Manager, Jakarta Branch Office* (2011- 2015); *Deputy Manager, Petroleum & Coal Marketing Department* (2008-2011); dan *Industrial Energy Department*. Saat ini juga menjabat sebagai *Deputy General Manager, Coal Business Department* di Idemitsu Kosan Co.,Ltd. sejak Juli 2019.

Kenji Tomisawa was appointed as Vice President Commissioner in accordance with the resolution the Annual General Meeting of Shareholders dated June 9th, 2020. Obtained his Bachelor of Engineering degree from Kyushu University and has more than 30 years of professional experiences in coal mining. He previously held numerous strategic positions at Idemitsu Kosan Co.,Ltd. including as *West Japan Coal Marketing Office Manager* (2017-2019); *Assistant to General Manager, Coal Business Development* (2015-2017); *General Manager, Jakarta Branch Office* (2011-2015); *Deputy Manager, Petroleum & Coal Marketing Department* (2008-2011); and *Industrial Energy Department*. In addition, he concurrently serves as *Deputy General Manager, Coal and Energy Solution Department* of Idemitsu Kosan Co.,Ltd. since July 2019.



Abdullah Fawzy Siddik

Komisaris Independen | Independent Commissioner

(Mei 2016-sekarang | May 2016-present)

Kewarganegaraan | Citizenship

Usia | Age

Domisili | Domicile

Indonesia

67 tahun | years old

Jakarta

Abdullah Fawzy Siddik diangkat menjadi Komisaris Independen sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Mei 2016. Beliau adalah seorang profesional dengan pengalaman lebih dari 45 tahun di bidangnya. Beliau mendapatkan gelar *Master in Business Administration (Honours)* dari Concordia University, Kanada, pada tahun 1979, *Bachelor of Commerce (Cum Laude) in Accounting and Business Administration* dari Concordia University, Kanada, pada tahun 1976, dan *Diploma in Business* dari Loyolla College, Canada pada tahun 1972, Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama (2002-2009) di PT Orindo Alam Ayu, Komisaris Independen (2003-2004) di PT Asuransi Bintang, Tbk, Komisaris Utama (1987-2000) di PT Tribandhawa Binathara dan Komisaris Utama (1985-2000) di PT Udemco Otis Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama di beberapa perusahaan, antara lain PT Erindo Utama dan PT Udemco Prima. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Ericsson Indonesia sejak tahun 1996.

Abdullah Fawzy Siddik was appointed as Independent Commissioner in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 19th, 2016. He is a professional with more than 45 years of experience in his field of expertise. He obtained his Master of Business Administration (Honours) degree from Concordia University, Canada, in 1979, Bachelor of Commerce (Cum Laude) in Accounting and Business Administration from Concordia University, Canada, in 1976, and Diploma in Business from Loyolla College, Canada, in 1972. He served as President Commissioner (2002-2009) of PT Orindo Alam Ayu, Independent Commissioner (2003-2004) of PT Asuransi Bintang, Tbk, President Commissioner (1987-2000) of PT Tribandhawa Binathara and President Commissioner (1985-2000) of PT Udemco Otis Indonesia. He served as President Director in numerous companies, among others, PT Erindo Utama and PT Udemco Prima. In addition, he concurrently serves as Commissioner of PT Ericsson Indonesia since 1996.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Abdullah Fawzy Siddik merupakan pihak independen yang diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan kemampuan dan latar belakangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Beliau tidak memiliki hubungan usaha atau afiliasi dengan Perseroan serta memiliki hubungan keluarga dengan seluruh anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan. Dengan demikian, Komisaris Independen dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen tanpa konflik kepentingan atau intervensi dari pihak mana pun.

Independent Commissioner's Independency Statement

Abdullah Fawzy Siddik was an independent party appointed as Independent Commissioner based on his ability and background in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Listed or Public Companies. In addition, he does not have business relation or affiliation with the Company as well as family relation with any members of Board of Directors or Board of Commissioners. Accordingly, he is capable of fulfilling his duties and responsibilities independently without conflict of interest or intervention.

Program Pengembangan Kompetensi

Sepanjang tahun 2020, anggota Dewan Komisaris mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menunjang pelaksanaan tugas mereka.

Competency Development Program

In 2020, members of the Board of Commissioners participated in numerous competency development programs in the form of training and education activities aimed to improve their capability and to support the execution of their duties.

// Profil Direksi

Board of Directors' Profile



Khoirudin

Direktur Utama President Director

(Oktober 2020-sekarang | October 2020-present)

Kewarganegaraan | Citizenship

Usia | Age

Domisili | Domicile

Indonesia

50 tahun | years old

Jakarta

Khoirudin diangkat menjadi Direktur utama sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Oktober 2020. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Politeknik Universitas Brawijaya dan memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman profesional di berbagai perusahaan pertambangan. Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Presiden Direktur PT Antang Gunung Meratus (2016-2019), Presiden Direktur PT Baramulti Sukses Sarana Tbk (2016-2018), dan Presiden Direktur Perseroan (2013-2016). Saat ini juga menjabat sebagai *Chief of Corporate and Legal Officer* PT Baramulti Sugih Sentosa sejak Januari 2020.

Khoirudin was appointed as President Director in accordance with the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 20th, 2020. Obtained his Bachelor of Civil Engineering degree from Brawijaya University's Polytechnic and has more than 29 years of extensive professional experiences at various mining companies. He previously served as, among others, President Director of PT Antang Gunung Meratus (2016-2019), President Director of PT Baramulti Sukses Sarana Tbk (2016-2018), and President Director of the Company (2013-2016). In addition, he concurrently serves as Chief of Corporate and Legal Officer of PT Baramulti Sugih Sentosa since January 2020.



Hidefumi Kodama

Wakil Direktur Utama Vice President Director

(Juni 2019-sekarang | June 2019-present)

Kewarganegaraan | Citizenship

Usia | Age

Domisili | Domicile

Jepang | Japan

55 tahun | years old

Jepang | Japan

Hidefumi Kodama ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 12 Juni 2019. Meraih gelar Bachelor of Law dari Kanazawa University dan memiliki pengalaman lebih dari 34 tahun dan saat ini juga merangkap jabatan sebagai *General Manager, Coal Business Department* Idemitsu Kosan Co.,Ltd.. Sebelumnya menjabat sebagai *General Manager, Public Relations & CSR Affairs Office* (2017- 2019), Wakil Komisaris Utama Perseroan (2015-2017), dan berbagai jabatan penting lainnya di Perseroan.

Hidefumi Kodama was appointed as Vice President Director in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 12th, 2019. Obtained his Bachelor of Law degree from Kanazawa University and has more than 34 years of professional experience and concurrently serves as General Manager, Coal and Energy Solution Department, of Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Previously served as General Manager, Public Relations & CSR Affairs Office (2017-2019), Vice President Commissioner of the Company (2015-2017), and held several other strategic positions at the Company.



Ir. Syadaruiddin

Direktur Director

(Januari 2018-sekarang | January 2018-present)

Kewarganegaraan | Citizenship

Usia | Age

Domisili | Domicile

Indonesia

53 tahun | years old

Jakarta

Ir. Syadaruiddin ditunjuk sebagai Direktur berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 Juni 2019. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Beliau merupakan seorang profesional yang memiliki berbagai pengalaman di bidang pertambangan batubara. Sebelumnya beliau bergabung dengan Baramulti Group pada tahun 1995 dengan posisi terakhir *Chief Operating Officer* PT Baramulti Sugih Sentosa (2013-2017). Tak hanya itu, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Teknik PT Baramulti Sugih Sentosa (2010-2013), dan Direktur Operasi PT Antang Gunung Meratus (2009-2010).

Ir. Syadaruiddin was appointed as Director in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 12th, 2019. He earned his Bachelor's degree in Geology Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB). He is a professional with extensive experience in coal mining industry. Previously he joined Baramulti Group in 1995 with his last position as Chief Operating Officer of PT Baramulti Sugih Sentosa (2013-2017). In addition, he once served as Director of Engineering of PT Baramulti Sugih Sentosa (2010-2013) and Director of Operations of PT Antang Gunung Meratus (2009-2010).



Eric Rahardja

Direktur Director

(Oktober 2020-sekarang | October 2020-present)

Kewarganegaraan | Citizenship

Usia | Age

Domisili | Domicile

Indonesia

37 tahun | years old

Jakarta

Eric Rahardja ditunjuk sebagai Direktur berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 20 Oktober 2020. Meraih gelar Bachelor of Commerce majoring in Accounting and Finance dari The Australian National University, Canberra, dan memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang operasional pertambangan batubara dan saat ini merangkap jabatan sebagai Direktur beberapa anak perusahaan Perseroan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Head of Business Development* Baramulti Group (Holding) (Apr 2019 – present), *Chief Finance Office* PT Baramulti Sukses Sarana Tbk (Jul 2012 – March 2019), *Group Financial Controller* Baramulti Group (Oct 2011 – Jul 2012). “

Eric Rahardja was appointed as Director in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 20th, 2020. He obtained his Bachelor of Commerce degree majoring in Accounting and Finance from The Australian National University, Canberra, and has more than 15 years of professional experience in coal mining operations and concurrently serves as Director of the Company's several subsidiaries. He previously served as the Head of Business Development of Baramulti Group (Holding) (Apr 2019 – present), Chief Financial Officer of PT Baramulti Sukses Sarana Tbk (Jul 2012 – March 2019), Group Financial Controller of Baramulti Group (Oct 2011 – Jul 2012). “

Program Pengembangan Kompetensi

Sepanjang tahun 2020, anggota Direksi Perseroan mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menunjang pelaksanaan tugas mereka.

Competency Development Program

In 2020, members of the Board of Directors participated in numerous competency development programs in the form of training and education activities aimed to improve their capability and to support the execution of their duties.

// Sumber Daya Manusia

Human Resources

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang kompleks serta membutuhkan tingkat presisi dan kehati-hatian yang tinggi, Mitrabara memandang sumber daya manusianya sebagai salah satu aset utama yang mendukung kelangsungan dan keberhasilan usaha. Atas dasar itulah Perseroan berkomitmen untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan profesional, kompeten, dan berkualitas demi mencapai tujuan dan sasaran usahanya.

Dengan mempertimbangkan semakin berkembangnya organisasi Perseroan, dan untuk meningkatkan kemudahan pengawasan sumber daya manusia yang ada, Perseroan telah menerapkan penggunaan sistem *Human Resources Information System* (HRIS) yang ditujukan untuk mengintegrasikan, meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan aspek-aspek sumber daya manusia dan di saat yang sama mengurangi *human error*.

Melalui implementasi HRIS, Perseroan mampu melakukan pemetaan serta menetapkan alokasi anggaran dan sumber daya untuk organisasi, data karyawan, manajemen waktu, sistem *reimbursement*, manajemen kinerja, *payroll* serta proses pengurusan administrasi sumber daya manusia lainnya.

Perseroan menjalankan proses rekrutmen yang sangat selektif berlandaskan pada standar yang telah ditetapkan serta memperhatikan peraturan yang berlaku. Perseroan juga memfokuskan pada program peningkatan kompetensi karyawan, termasuk dalam peningkatan karier untuk membangun tenaga kerja yang kompeten dan profesional sekaligus budaya organisasi yang unggul.

Pembangunan kompetensi SDM ini juga terkait dengan tata nilai yang telah diterapkan Perseroan terhadap standar kualitas SDM melalui aktualisasi "5 Insan Baramulti" dengan sasaran yang dapat melebihi standar internasional yang ditetapkan. Tata nilai tersebut terdiri dari Integritas, Semangat, Gigih, Peduli, dan Rendah Hati, yang merupakan bentuk komitmen Perseroan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG yaitu TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness*).

Tak hanya itu, di tengah pandemi Covid-19 di sepanjang tahun 2020, Perseroan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan karyawan dengan mempersiapkan pengaturan tempat kerja sesuai protokol kesehatan Covid-19, seperti penyediaan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan, baik di kantor maupun di tambang. Perseroan pun menyesuaikan budaya kerja dengan memperbaiki paradigma dan sikap kerja

As a company engaged in coal mining operations that are both intricate and require a high level of precision and caution, Mitrabara views its human resources as one of the main assets supporting its business sustainability and success. The Company therefore is committed to hiring, developing, and retaining professional, competent, and qualified employees in order to achieve its business goals and objectives.

By taking into account the Company's growing organization and to better accommodate the existing human resources supervision, the Company has implemented the Human Resources Information System (HRIS) to integrate and improve the quality and efficiency of human resources management aspects while simultaneously reduce human error.

Through the implementation of HRIS, the Company is able to map and determine budget and resource allocation for organization, employee data, time management, reimbursement system, performance management, payroll, as well as other human resources administration management processes.

The Company implements a very strict recruitment process by observing established standards and applicable regulations. The Company also puts greater focus on employee competency development program, including career development, to nurture a competent and professional workforce as well as excellent organizational culture.

The development of HR competency is aligned with the corporate code of conduct applied under the HR quality standard through the actualization of "5 Insan Baramulti" with the target of exceeding global standards. The corporate code of conduct consists of integrity, passion, perseverance, compassion, and humility as part of the Company's commitment to the implementation of the TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness*) GCG principles.

In addition, amid the Covid-19 pandemic throughout 2020, the Company prioritized employees' safety and health by preparing workplace arrangements in accordance with the Covid-19 health protocol, such as the provision of health protocol-supporting facilities and infrastructures, both at offices and mine sites. The Company also adjusted its work culture by improving work paradigms and attitudes in order to maintain

guna mempertahankan produktivitas, seperti mengatur jadwal kerja karyawan melalui penerapan WFO (*work from office*) dan WFH (*work from home*).

Komposisi Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2020, jumlah karyawan Perseroan mengalami penurunan sebesar 4.7% menjadi 636 dibandingkan 667 orang pada tahun sebelumnya.

Komposisi karyawan Perseroan di tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan, dan masa kerja adalah sebagai berikut:

Jenis Kelamin Sex	2020	2019
Laki-laki Male	571	599
Perempuan Female	65	68
Total	636	667

Usia Age	2020	2019
>55 tahun >55 years old	8	9
>46-55 tahun >46-55 years old	99	102
>36-45 tahun >36-45 years old	215	224
>26-35 tahun >26-35 years old	244	256
>18-25 tahun >18-25 years old	70	76
Total	636	667

Tingkat Pendidikan Education	2020	2019
S2 Master's degree	18	15
S1 Bachelor's degree	156	165
D3	31	31
D2	0	0
D1	4	4
SLTA High School	310	328
SLTP Junior High School	67	70
SD Elementary School	50	54
Total	636	667

productivity, such as by managing employee work schedules through the implementation of WFO (*work from office*) and WFH (*work from home*).

Composition of Human Resources

In 2020, the Company employed a total of 636 employees, went down by 4.7% compared to 667 in the previous year.

The composition of the Company's employees in 2020 based on sex, age, educational background, position, and term of office was as follows:

Jabatan Position	2020	2019
Eksekutif Executive	8	7
Manajer Manager	15	15
Departemen/Kepala Seksi Department/Section Head	29	34
Supervisor Officer	77	79
Staff GL	112	110
<i>Skill</i>	229	247
<i>Non Skill</i>	166	175
Total	636	667

Masa Kerja Term of Office	2020	2019
>20 tahun >20 years	24	25
16-20 tahun 16-20 years	9	10
11-15 tahun 11-15 years	135	96
6-10 tahun 6-10 years	141	206
1-5 tahun 1-5 years	263	255
<1 tahun <1 year	64	75
Total	636	667

Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mitrabara berkomitmen membangun kualitas SDM secara konsisten dan berkesinambungan dengan mengikutsertakan karyawan terhadap kegiatan pengembangan kompetensi baik yang dilakukan internal maupun pihak eksternal. Tak hanya itu, Perseroan melalui Divisi Pengelolaan SDM telah menerapkan program pengelolaan SDM meliputi perencanaan sumber daya manusia, perekrutan karyawan, pelatihan dan pendidikan karyawan, pengelolaan kinerja, penggajian dan kompensasi karyawan serta membina hubungan kerja secara industri. Tak hanya itu, seluruh kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM Perseroan di tahun 2020 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat demi memitigasi pandemi Covid-19.

Human Resources Development Policy

Mitrabara is committed to consistently and continuously improving the quality of its workforce by sending employees to competency development training conducted by either internal or external parties. In addition, the Company through HR Management Division has implemented HR development program including employee recruitment planning, employee training and education, performance management, payroll and compensation, as well as industrial relations development. In addition, all of the Company's human resources training and development activities in 2020 were conducted with strict adherence to health protocol in order to mitigate the Covid-19 pandemic.

Implementasi Pengembangan SDM 2020

Melalui penerapan HRIS yang berbasis teknologi informasi, pada tahun 2020 Perseroan mampu memetakan pengembangan dan perkembangan SDM secara akurat dan menyeluruh. Tak hanya itu, Perseroan mampu menjalankan berbagai program dan kegiatan pelatihan dan pendidikan yang tepat sasaran, efisien, dan serta meningkatkan kompetensi SDM secara berkelanjutan.

Pada 2020, sebanyak 255 karyawan dan 7 anggota Direksi berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelatihan dan pendidikan dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp391.702.240, sebagai berikut:

HR Development Activities in 2020

Through the implementation of the information technology-based HRIS, in 2020 the Company was able to accurately and thoroughly map HR progress and development. Moreover, the Company was able to efficiently execute various training and development programs and activities that reached their intended target in order to improve HR's competency in a sustainable manner.

In 2020, as many as 255 employees and 7 Board of Directors members attended training and education courses with total fees incurred of approximately Rp391,702,240, as follows:

Pelatihan Training	Tanggal Date	Jumlah Peserta Headcount
Training Wheel Loader Volvo L220 H	7-8 Januari 2020 January 7 th -8 th , 2020	1
Basic Safety Training	8 Januari 2020 January 8 th , 2020	11
Basic Safety Training	9 Januari 2020 January 9 th , 2020	6
Basic Safety Training	10 Januari 2020 January 10 th , 2020	4
Basic Safety Training	13 Januari 2020 January 13 th , 2020	3
Basic Safety Training	21 Januari 2020 January 21 st , 2020	13
Basic Safety Training	23 Januari 2020 January 23 rd , 2020	9
Basic Safety Training	28 Januari 2020 January 28 th , 2020	16
Sukses Mulia Inspirational	29 Januari 2020 January 29 th , 2020	40
Seminar Sosialisasi PUHH	29 Januari 2020 January 29 th , 2020	1
Basic Safety Training	30 Januari 2020 January 30 th , 2020	18
Basic Safety Training	4 Februari 2020 February 4 th , 2020	17
Geotech Talkshow	14 Februari 2020 February 14 th , 2020	10
Basic Safety Training	15 Februari 2020 February 15 th , 2020	8
CRMO (Certified Risk Management Officer)	17-20 Februari 2020 February 17 th -20 th , 2020	2
Air Pollution Controlling Certification	21-22 Februari 2020 February 21 st -22 nd , 2020	1
Basic Safety Training	21 Februari 2020 February 21 st , 2020	8
Basic Safety Training	25 Februari 2020 February 25 th , 2020	13
Training Parameter URCl	3 Maret 2020 March 3 rd , 2020	5
Training Human Resource Management	2-6 Maret March 2 nd -6 th , 2020	1
Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air	9-11 Maret March 9 th -11 th , 2020	1
Training Safety Bekerja Diatas Ketinggian	11 Maret 2020 March 11 th , 2020	13
API-653 Storage Tank Inspection	14-15 Maret March 14 th -15 th , 2020	1
Covid-19 Pandemic Understanding Force Mejure in Mining Sector	20 Mei 2020 May 20 th , 2020	2
Sertifikasi PLB3	22 Mei 2020 May 22 nd , 2020	1
Training ISO Auditing Practice	6 Juni 2020 June 6 th , 2020	16

Pelatihan Training	Tanggal Date	Jumlah Peserta Headcount
Understanding New Mining Law and Impact To Industry	10 Juni 2020 June 10 th , 2020	6
Penyusunan Struktur & Skala Uph (Sesuai PERMENAKER 1/2017)	13 Juni 2020 June 13 th , 2020	1
Training Hydraulic Control System PC200	6-8 Juli 2020 July 6 th -8 th , 2020	2
Training Hydraulic Control System PC200	10-12 Juli 2020 July 10 th -12 th , 2020	3
Prokrastnasi Vs Produktivitas (Breaking Bad Habbit For A New Normal)	17 Juli 2020 July 17 th , 2020	4
Training CHF	23-25 Juli 2020 July 23 rd -25 th , 2020	3
Training CHF	1 - 3 Agustus 2020 August 1 st -3 rd , 2020	3
Training & Sertifikasi Manager Energi	3,4,6, Agustus 2020 August 3 rd , 4 th , 6 th , 2020	1
Training Sampling, Preparasi & Bias Testing	3 - 4 Agustus 2020 August 3 rd -4 th , 2020	2
Training CHF	5 - 7 Agustus 2020 August 5 th -7 th , 2020	2
Training & Sertifikasi Auditor Energi	10,11,12,14 Agustus 2020 August 10 th , 11 th , 12 th , 14 th , 2020	2
Training Wheel Loader Volvo	10 - 12 Agustus 2020 August 10 th -12 th , 2020	2
Training GD 705	23 - 25 Agustus 2020 August 23 rd -25 th , 2020	2
Training GD 705	27 - 29 Agustus 2020 August 27 th -29 th , 2020	2
Training GD 705	1 - 3 September 2020 September 1 st -3 rd , 2020	3
Training GD 705	5 - 7 September 2020 September 5 th -7 th , 2020	2
Sertifikasi SIO Crane	11 September 2020 September 11 th , 2020	1
Training DZ 155	12 - 14 September 2020 September 12 th -14 th , 2020	2
Training DZ 155	17 - 19 September 2020 September 17 th -19 th , 2020	2
Webinar Kewirausahaan	3 Oktober 2020 October 3 rd , 2020	15
Training DT Hino	1 - 3 Oktober 2020 October 1 st -3 rd , 2020	2
Training DT Hino	5 - 7 Oktober 2020 October 5 th -7 th , 2020	3
Training Pra POP	8 Oktober 2020 October 8 th , 2020	3
Training DT Hino	9 - 11 Oktober 2020 October 9 th -11 th , 2020	3
Sertifikasi Kelistrikan	30-31 Oktober 2020 October 30 th -31 st , 2020	2
Training 7 Habits	11-13 November 2020 November 11 th -13 th , 2020	27
Training Risk Management	16-17 November 2020 November 16 th -17 th , 2020	16
Sustainability Reporting Training	24-25 November 2020 November 24 th -25 th , 2020	1
Training Realible Centered Maintenance	24-25 November 2020 November 24 th -25 th , 2020	1
Sertifikasi Profesi Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja	1-4 Desember 2020 December 1 st -4 th , 2020	1

// Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition

Sampai dengan 31 Desember 2020, struktur dan Komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

As of December 31st, 2020, the structure and composition of the Company's shareholders were as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage (%)
PT Wahana Sentosa Cemerlang	736.363.152	60%
Publik Public		
a. Publik di atas 5% Public above 5%		
Idemitsu Kosan Co.,Ltd.	368.181.600	30%
b. Publik di bawah 5% Public below 5%	119.317.000	10%
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Arie Prabowo Ariotedjo	0	0
Kenji Tomisawa	0	0
Abdullah Fawzy Siddik	0	0
Direksi Board of Directors		
Khoirudin	3,408,100	0.2776972%
Hidefumi Kodama	0	0
Ir. Syadaruddin	2,000	0.0001630%
Eric Rahardja	100	0.0000081%
Total	1.227.271.952	100%



Komposisi Kepemilikan Saham Lokal dan Asing (per 31 Desember) Local and Foreign Share Ownership Composition (as of December 31st)

Keterangan Description	2020		2019	
	Jumlah Lembar Number of Shares	%	Jumlah Lembar Number of Shares	%
Lokal Domestic				
Perorangan Indonesia Indonesian Individual	68.970.454	5,61982	69.250.854	5,64267
Perseroan Terbatas Limited Liability Company	736.373.216	60,00082	736.488.996	60,01025
Asing Foreign				
Perorangan Asing Foreign Individual	516.546	0,04209	444.446	0,03621
Badan Usaha Asing Foreign Company	421.411.736	34,33727	420.660.656	34,27608
Total	1.227.271.952	100,00	1.227.271.952	100,00

// Kronologis Pencatatan Saham Share-Listing Chronology

Jenis Penawaran Type of Offering	Jumlah Saham Total Shares	Tanggal Efektif Effective Date	Harga Penawaran Offering Price	Jumlah Total (Rp)
Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering	122.727.200	10 Juli 2014 July 10th, 2014	Rp1.300	159.545.360.000

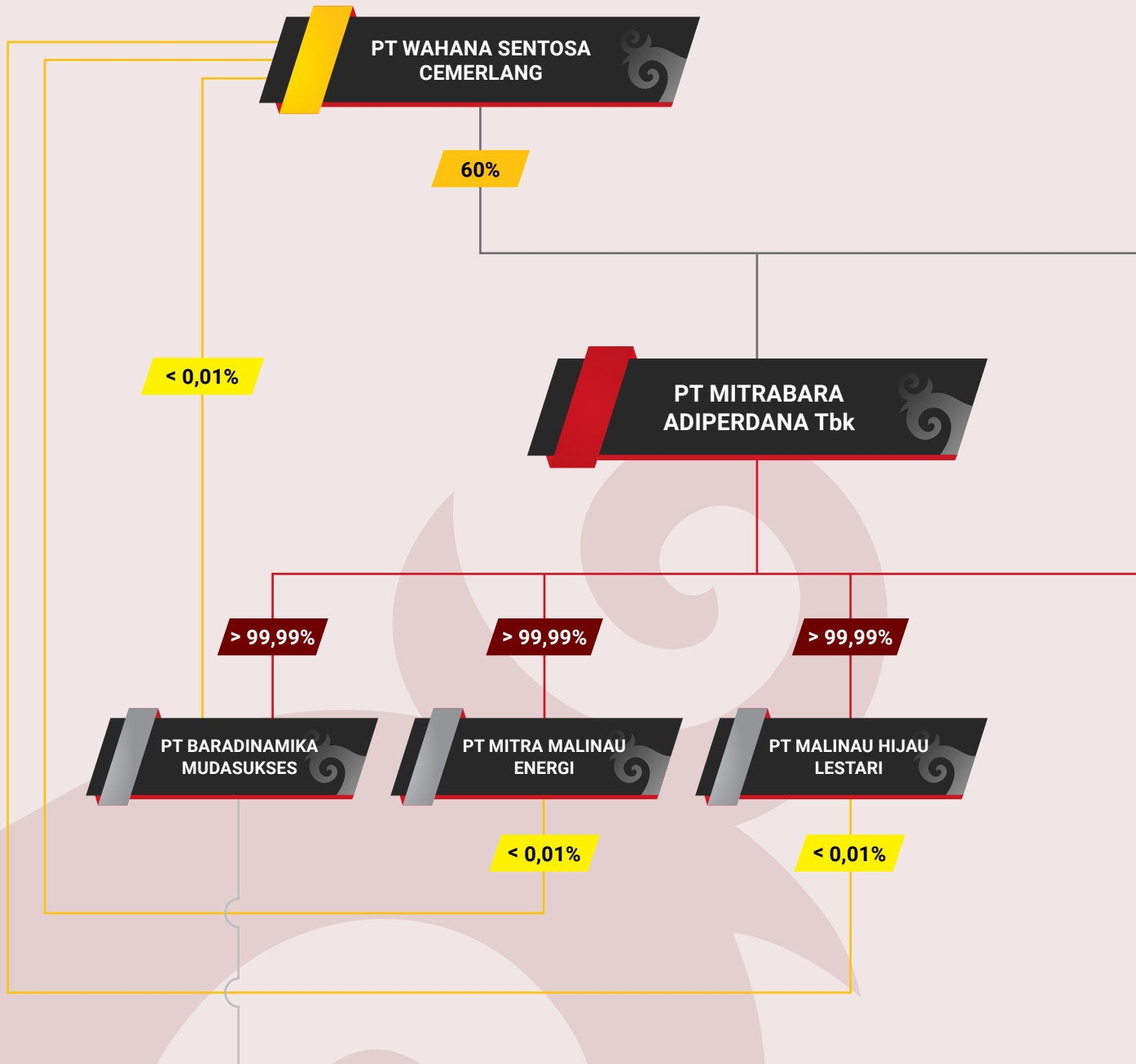
// Daftar Entitas Anak dan Ventura Bersama

List of Subsidiaries and Joint Ventures

Nama Name	Alamat Address	Bidang Usaha Line of Business	Total Aset Total Asset (USD)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Status Operasional Operational Status
PT Baradinamika Mudasukses	Grha Baramulti Komplek Harmoni Plaza Blok A-8 Jl. Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130, Indonesia Telepon : +6221 6385 6211 Faksimili : +6221 6385 2326	Pertambangan Batubara Coal Mining	60.377.659	>99,9%	Telah Beroperasi Operational
PT Mitra Malinau Energi	Grha Baramulti Komplek Harmoni Plaza Blok A-8 Jl. Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130, Indonesia Telepon : +6221 6385 6211 Faksimili : +6221 6385 2326	Pembangkit Tenaga Listrik Bio-Massa Biomass Power Plant	686.503	>99,9%	Belum Beroperasi Not Yet Operational
PT Engie Cipta Tenaga Surya	Grha Baramulti Komplek Harmoni Plaza Blok A-8 Jl. Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130, Indonesia Telepon : +6221 6385 6211 Faksimili : +6221 6385 2326	Sewa <i>Rooftop Solar Panel</i> Rooftop Solar Panel Leasing	152.265	47,5%	Belum Beroperasi Not Yet Operational
PT Duta Bara Utama	Gedung Chase Plaza lantai 20 JL. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta Faksimili : +6221 520 8100	Pertambangan Batubara Coal Mining	16.180.653	26%	Telah Beroperasi Operational
PT Malinau Hijau Lestari	Grha Baramulti Komplek Harmoni Plaza Blok A-8 Jl. Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130, Indonesia Telepon : +6221 6385 6211 Faksimili : +6221 6385 2326	Perkebunan Energi Energy Plantation	2.217.707	>99,9%	Belum Beroperasi Not Yet Operational
PT Mitra Muda Makmur	Grha Baramulti Komplek Harmoni Plaza Blok A-8 Jl. Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130, Indonesia Telepon : +6221 6385 6211 Faksimili : +6221 6385 2326	Konsultasi Manajemen Management Consultation	263	>99,9%	Belum Beroperasi Not Yet Operational

// Struktur Grup Perseroan

Corporate Group Structure



Masyarakat Lainnya Public

40%

> 99,99%

PT MITRA MUDA
MAKMUR

47,5%

PT ENGIE CIPTA
TENAGA SURYA

26%

PT DUTA BARA
UTAMA

< 0,01%

// Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions

Lembaga atau Profesi Institution or Profession	Nama Name	Alamat dan Nomor Telepon Address and Phone Number	Jasa yang Diberikan Services Provided	Biaya Fee	Periode Period
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Purwanton, Sungkoro & Surja - EY Indonesia	Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Telepon/Phone Number: +6221 5289 5000 Faksimili/Fax Number: +6221 5289 4100	Audit Keuangan Perseroan untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. The Company's financial audit for the financial statements ending on December 31 st , 2020.	Rp 1.045.000.000	2020
Biro Administrasi Efek Share Registrar	PT Datindo Entrycom Asosiasi: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia ("ABI") Association of Indonesian Share Registrar ("ABI") No STTD: Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1995 No. STTD: Kep 16/PM/1991 dated April 19 th , 1995	Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Telepon/Phone number: +6221 350 8077 (Hunting) Faksimili/Fax Number: +6221 350 8078 Surat Penunjukan: 074/ DIR-MA/LEG/ XI/13 tanggal 25 November 2013 Appointment Letter: 074/ DIR-MA/LEG/ XI/13 dated November 25 th , 2013	Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam rangka penawaran umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham ("FPSS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak formulir konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan penawaran umum perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Rp 126.500.000	2020



Lembaga atau Profesi Institution or Profession	Nama Name	Alamat dan Nomor Telepon Address and Phone Number	Jasa yang Diberikan Services Provided	Biaya Fee	Periode Period
			The scope of duties of a Share Registrar includes share purchase order in the form of List of Share Purchase Order ("DPPS") and Share Purchase Order Forms ("FPPS") that have been completed with documents as required in the share purchase order and approved by the Underwriters as an order submitted to obtain portion of shares. Another duty is to administer share order and purchase based on the application available in the Share Registrar. The Underwriters, together with the Share Registrar, has the rights to decline orders that do not meet the prevailing order requirements. If the amount of order exceeds the amount of shares offered, the Share Registrar shall conduct allotment process in accordance with the formula set by the Allotment Manager, issue allotment confirmation forms and prepare allotment reports. The Share Registrar is also responsible for issuing Collective Share Certificate ("SKS"), if deemed necessary, and drafting reports of initial public offering under applicable regulations.		
Notaris Notary	Notaris Liestani Wang, SH., M.KN, Liestani Wang, SH, M.KN, Notary	Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan Telepon/Phone Number: (021) 57952359 Email: liestiani.wang@gmail.com	Jasa Notaris Notary Service	Rp 10.000.000	2020

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Pada tahun 2020, Perseroan membukukan pendapatan sebesar US\$201.207.287 atau 84,7% dari target, dan laba bersih sebesar US\$27.467.486 atau 117,8% dari target.

In 2020, the Company posted US\$201,207,287 sales or 84.7% of the target, and US\$27,467,486 net profit or 117.8% of the target.





// Tinjauan Umum Industri Batubara

Coal Industry Overview

Pandemi Covid-19 yang bermula pada Desember 2019, merupakan tantangan terbesar bagi industri batubara di tahun 2020. Demi mencegah penyebaran pandemi tersebut, berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan cepat melaksanakan *lockdown* dan/atau berbagai bentuk pembatasan pergerakan masyarakat yang pada akhirnya berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian global dan domestik. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan perekonomian dunia di sepanjang tahun 2020 adalah sebesar -3,5%. Indonesia sendiri mengalami resesi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07% sepanjang tahun.

Perlambatan ekonomi pada akhirnya memengaruhi berbagai industri, termasuk pertambangan batubara. Penurunan permintaan global terhadap batubara menyebabkan anjloknya harga yang tercermin pada rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) di Indonesia yang menurun 25,3% di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor perekonomian lain seperti tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, serta harga minyak turut pula memengaruhi kinerja industri batubara.

The Covid-19 pandemic that started in December 2019 was the greatest challenge the coal industry faced in 2020. In order to halt the spread of the pandemic, numerous countries, including Indonesia, promptly imposed lockdowns and/or various forms of public movement restrictions that eventually crippled the global and domestic economy. The International Monetary Fund (IMF) estimated the world economic growth throughout 2020 was at -3.5%. Similarly, Indonesia was plunged into recession with -2.07% economic growth throughout the year.

The resulting economic downturn subsequently affected industries, and coal mining was not an exception. The declining global demand for the commodity led to falling prices as indicated by the average coal benchmark price (HBA) in Indonesia that fell by 25.3% in 2020 compared to the previous year. Other economic factors such as the inflation rate, the Rupiah exchange rate against the US Dollar, as well as oil prices also affected the performance of the coal industry.

// Tinjauan Operasional

Operational Overview

Di tengah berbagai perubahan radikal, kendala, dan keterbatasan yang diakibatkan pandemi Covid-19, Perseroan membukukan total volume produksi sebesar 4,0 juta ton di tahun 2020, menurun 4,20% dibandingkan 4,2 juta ton di tahun 2019.

Di sisi lain, beban operasional menurun 10,6% menjadi US\$42,8 per ton dari US\$47,9 per ton di tahun 2019, yang terutama disebabkan penurunan beban pokok penjualan di tahun 2020 sebesar 9,9% menjadi US\$34,5 per ton dari US\$38,3 per ton di tahun sebelumnya.

Amid various radical changes, obstacles, and limitations caused by the Covid-19 pandemic, the Company posted 4.0 million tons total production volume in 2020, went down by 4.20% compared to 4.2 million tons in 2019.

On the other hand, operating expenses went down by 10.6% to US\$42.8 per ton compared to US\$47.9 per ton in 2019, mainly due to cost of revenue that declined by 9.9% in 2020 to US\$34.5 per ton from US\$38.3 per ton in the previous year.

// Tinjauan Keuangan

Financial Overview

Aset

Total aset Perseroan pada akhir tahun 2020 adalah sebesar US\$182,0 juta, turun 5,5% dari US\$192,5 juta di akhir tahun 2019. Aset lancar menurun 4,9% dari US\$132,1 juta pada akhir tahun 2019 menjadi US\$125,6 juta. Penurunan aset lancar Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha sebesar US\$8,0 juta, yang dikarenakan penurunan harga jual dan volume penjualan.

Aset tidak lancar juga menurun 6,8% dari US\$60,4 juta pada akhir tahun 2019 menjadi US\$56,3 juta. Penurunan aset tidak lancar terutama disebabkan penurunan aset tetap sebesar US\$6,4 juta.

Assets

The Company's total assets by end of 2020 amounted to US\$182.0 million, went down by 5.5% compared to US\$192.5 million by end of 2019. Current assets went down by 4.9% from US\$132.1 million by end of 2019 to US\$125.6 million, mainly due to trade receivables that declined by US\$8.0 million following the decreasing selling price and sales volume.

Non-current assets also declined by 6.8% from US\$60.4 million by the end of 2019 to US\$56.3 million as fixed assets decreased by US\$6.4 million.

Keterangan Description	Dalam US\$/In US\$		
	2020	2019	2018
Aset Lancar Current Assets	125.650.152	132.090.716	107.855.898
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	56.322.950	60.436.573	65.653.364
Total Aset Total Assets	181.973.102	192.527.289	173.509.262

Liabilitas

Liabilitas Perseroan di akhir tahun 2020 tercatat US\$43,7 juta, menurun 6,7% dari US\$46,9 juta di akhir tahun 2019. Liabilitas jangka pendek tercatat sebesar US\$33,6 juta, turun 8,4% dibandingkan US\$36,6 juta pada akhir tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan biaya masih harus dibayar sebesar US\$3,8 juta.

Liabilitas jangka panjang di akhir tahun 2020 relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar US\$10,2 juta.

Liabilities

The Company's total liabilities by end of 2020 amounted to US\$43.7 million, went down by 6.7% compared to US\$46.9 million by end of 2019. Current liabilities amounted to US\$33.6 million, a 8.4% decrease compared to US\$36.6 million by the end of previous year. This was mainly due to the accrued expenses that declined by US\$3.8 million.

Non-current liabilities were relatively unchanged by the end of 2020 compared to the end of 2019 at US\$10.2 million.

Keterangan Description	Dalam US\$/In US\$		
	2020	2019	2018
Liabilitas Jangka Pendek Current liabilities	33.560.298	36.654.975	40.887.182
Liabilitas Jangka Panjang Non-current liabilities	10.192.628	10.231.924	8.440.826
Total Liabilitas Total Liabilities	43.752.926	46.886.899	49.328.008

Ekuitas

Di akhir tahun 2020, ekuitas Perseroan tercatat sebesar US\$138,2 juta, turun 5,1% dibandingkan US\$145,6 juta di akhir tahun 2019. Penurunan ekuitas ini terutama disebabkan oleh pembagian dividen tahun berjalan.

Equity

The Company's equity by the end of 2020 amounted to US\$138.2, went down by 5.1% compared to US\$145.6 million by the end of previous year. This was due to the dividend payment for the current year.

Dalam US\$/In US\$

Keterangan Description	2020	2019	2018
Ekuitas Equity	138.220.176	145.640.390	124.181.254

Pendapatan

Pada tahun 2020, Perseroan membukukan pendapatan sebesar US\$201,2 juta, turun 22,8% dibandingkan US\$260,8 juta pada tahun sebelumnya, yang terutama disebabkan karena penurunan harga jual dan volume penjualan.

Revenue

In 2020, the Company posted US\$201.2 million revenue, went down by 22.8% compared to US\$260.8 million in the previous year, which was mainly due to the declining selling price and sales volume.

Dalam US\$/In US\$

Keterangan Description	2020	2019	2018
Pendapatan Revenue	201.207.287	260.849.803	258.138.029

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami penurunan 20,8% dari US\$169,4 juta di tahun 2019 menjadi US\$134,2 juta. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan volume penjualan dan juga biaya produksi, terutama terkait jasa kontraktor dan bahan bakar.

Cost of Revenue

Cost of Revenue fell by 20.8% from US\$169.4 million in 2019 to US\$134.2 million. This was mainly due to the declining sales volume and production cost, particularly with regard to contractor fee and fuel.

Dalam US\$/In US\$

Keterangan Description	2020	2019	2018
Beban Pokok Penjualan Cost of Revenue	134.218.223	169.429.055	157.198.318

Laba Bruto

Di tahun 2020, Perseroan membukukan laba bruto sebesar US\$67,0 juta, menurun 26,7% dibandingkan US\$91,4 juta pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penjualan sebesar 22,8%.

Gross Profit

The Company booked US\$67.0 million gross profit in 2020, went down by 26.7% compared to US\$91.4 million in 2019 due to the declining sales by 22.8%.

Dalam US\$/In US\$

Keterangan Description	2020	2019	2018
Laba Bruto Gross Profit	66.989.064	91.420.748	100.939.711

Laba Bersih

Sebagai akibat dari penurunan laba bruto, laba tahun bersih Perseroan pada tahun 2020 menurun 22,1% dari US\$35,3 juta pada tahun 2019 menjadi US\$27,5 juta.

Net Profit

Due to the declining gross profit, net profit also fell by 22.1% from US\$35.3 million in 2019 to US\$27.5 million.

Dalam US\$/In US\$

Keterangan Description	2020	2019	2018
Laba Bersih Net Profit	27.467.486	35.287.557	50.310.702

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Di tahun 2020, Perseroan membukukan total penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar US\$27,3 juta, menurun 23,0% dibandingkan US\$35,5 juta pada tahun sebelumnya sebagai akibat penurunan laba tahun berjalan.

Total Comprehensive Income for the Year

In 2020, the Company posted US\$27.3 million total comprehensive income for the year, went down by 23.0% compared to US\$35.5 million in the previous year due to the declining profit for the year.

Dalam US\$/In US\$

Keterangan Description	2020	2019	2018
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	27.294.919	35.459.136	50.446.379

Laba Per Saham

Pada tahun 2020, laba per saham Perseroan menurun 24,1% dari US\$0,029 menjadi US\$0,022 yang disebabkan oleh penurunan laba bersih.

Earnings per Share

In 2020, earnings per share went down by 24.1% from US\$0.029 to US\$0.022 due to the declining net profit.

Dalam US\$/In US\$

Keterangan Description	2020	2019	2018
Laba per Saham Earnings per Share	0,022	0,029	0,041



// Foto ini diambil sebelum masa pandemi Covid-19
This picture was taken before the Covid-19 pandemic.

Laporan Arus Kas

Perseroan mencatat kas dan setara kas sebesar US\$46,1 juta di akhir tahun 2020, meningkat 58,3% dari US\$29,1 juta pada akhir tahun 2019.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi menurun sebesar 14,0% dari US\$51,9 juta pada 2019 menjadi US\$44,6 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$51,9 juta.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah sebesar US\$15,4 juta, dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar US\$65,9 juta pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh pencairan investasi jangka pendek sebesar US\$19 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$43,4 juta, naik 290,7% dibandingkan US\$11,1 juta pada tahun 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran dividen kas kepada pemegang saham sebesar US\$34,7 juta.

Statements of Cash Flows

The Company's cash and cash equivalent by the end of 2020 amounted to US\$46.1 million, went up by 58.3% compared to US\$29.1 million by the end of 2019.

Net cash provided by operating activities went down by 14.0% from US\$51.9 million in 2019 to US\$44.6 million. This was due to cash received from customers that decreased by US\$51.9 million.

Net cash provided by investing activities amounted to US\$15.4 million, compared to US\$65.9 million net cash used in investing activities in 2019. This was due to withdrawal of short-term investment that amounted to US\$19 million.

Net cash used in financing activities amounted to US\$43.4 million, went up by 290.7% compared to US\$11.1 million in 2019. This was mainly due to the payments of cash dividends to shareholders amounted US\$34.7 million.

Dalam US\$/In US\$

Keterangan Description	2020	2019	Perubahan Variance
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	44.616.153	51.860.700	-14.0%
Arus Kas dari/ (digunakan untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows from/(used in) Investing Activities	15.387.763	(65.910.234)	-123.3%
Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Cash Flows used in Financing Activities	(43.456.622)	(11.121.699)	290.7%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	46.063.170	29.103.941	58.3%



// Kemampuan Membayar Utang Dan Tingkat Kolektibilitas

Solvency and Collectability Rate

Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang ditunjukkan dengan rasio lancar. Rasio lancar Perseroan pada 2020 tercatat 3,7x, lebih tinggi dari rasio lancar tahun 2019 yaitu 3,6x. Peningkatan ini disebabkan penurunan aset lancar yang lebih kecil daripada penurunan liabilitas jangka pendek.

Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan perbandingan dana yang disediakan oleh Perseroan dengan dana yang dipinjam dari kreditur. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aset Perseroan dibiayai oleh utang, dan menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para kreditur (Bank). Solvabilitas Perseroan ditunjukkan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang berada pada posisi 31,6% pada 2020, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2019 pada posisi 32,2%, yang terutama disebabkan oleh penurunan total liabilitas.

Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan dapat dilihat melalui rasio lama penagihan rata-rata (*average collection period*) yang menunjukkan waktu rata-rata yang dibutuhkan Perseroan dalam menagih piutangnya dan rasio perputaran piutang (*receivable turnover*) yang menunjukkan berapa kali dana yang ditanam dalam piutang berputar dalam setahun. Rasio lama penagihan rata-rata adalah selama 43 hari di tahun 2020, lebih lambat 5 hari dibandingkan tahun 2019 selama 38 hari. Sedangkan rasio perputaran piutang untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar 8,4 kali dan 9,3 kali.

Liquidity

The liquidity ratio illustrates the Company's capability to meet its financial obligations as indicated by current ratio. The Company's current ratio in 2020 was 3.7x, higher than 3.6x in 2019. This increase was due to the current assets' decline that was not as steep as the decline in current liabilities.

Solvency

Solvency ratio is the ratio of funds provided by the Company with funds borrowed from banks. This ratio shows the measurement of how far the Company's assets are financed by debt, and indicates the level of security of the banks. The Company's solvency as indicated by Debt to Equity Ratio (DER) was at 31.6% in 2020, slightly went down compared to 32.2% in 2019, due to the declining total liabilities.

Receivables Collectability

The Company's receivables collectability is indicated by the ratio of average collection period that shows an average time required to collect receivables and ratio of receivable turnover that shows the number of turnover the invested funds experienced in one year. The ratio of average collection period was 43 days in 2020, 5 days slower than 38 days in 2019. Whereas the receivable turnover ratios for 2020 and 2019 were 8.4 times and 9.3 times respectively.

// Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen

Capital Structure and Management Policy

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, pengembalian modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholders' value.

The Company is required by the Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies, effective on August 16th, 2007, to allocate and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements are considered by the Company in each Annual General Meeting of Shareholder.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, if necessary, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust its capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. No changes were made to the objectives, policies or processes for the years ended on December 31st, 2020 and 2019.

// Investasi Barang Modal yang Direalisasikan Pada Tahun Buku Terakhir

Capital Goods Investment Realized In Current Fiscal Year

Perseroan telah merealisasikan investasi barang modal sebagaimana terangkum pada tabel di bawah. Selain investasi barang modal, Perseroan selama tahun 2020 tidak melakukan investasi untuk ekspansi usaha.

The Company's capital goods investments are summarized in the following table. Other than capital goods investment, in 2020 the Company did not make investment for business expansion.

Dalam US\$/In US\$

Keterangan Description	2020	2019
Lahan/Land	-	91.973
Gedung dan Infrastruktur/Building and Infrastructure	-	14.725
Mesin, Alat Berat dan Kendaraan/Machinery, Heavy Equipment, and Vehicles	220.620	1.749.070
Peralatan Tambang/Mining Equipment	261.898	547.291
Perlengkapan dan Kebutuhan Kantor/Office Furniture and Fixtures	80.994	199.953
Aset tetap dalam penyelesaian/Constructions-in-progress	237.701	838.142
Total	801.213	3.441.154

// Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal

Material Commitments for Capital Goods Investment

Selama tahun 2020, Perseroan tidak memiliki ikatan material atas investasi barang modal.

In 2020, the Company had no material commitments for capital goods investment.

// Realisasi Pencapaian Target Tahun 2020

2020 Targets Achievement

Untuk tahun 2020, Perseroan telah menetapkan target volume produksi dan penjualan sebesar 4,0 juta ton. Realisasi volume produksi Perseroan di tahun 2020 adalah sebesar 100,3% dari target dan realisasi volume penjualan sebesar 96,4% dari target.

For 2020, the Company had set production and sales volume target at 4.0 million tons. The Company's actual production volume in 2020 was 100.3% of the target, and actual sales volume was 96.4% of the target.

Dari sisi kinerja keuangan, Perseroan mampu membukukan kinerja positif di tengah pelemahan ekonomi dan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19, dengan mencatat pendapatan sebesar US\$201,2 juta dan laba bersih sebesar US\$27,5 juta.

In terms of financial performance, the Company was still able to record positive performance amid the economic and business slowdown due to the Covid-19 pandemic, by posting US\$201.2 million revenue and US\$27.5 million net profit.

// Penetapan Target Tahun 2021

2021 Targets Determination

Untuk tahun 2021, Perseroan telah menetapkan target produksi dan penjualan sebesar 3,5 juta ton, dengan tetap memperhatikan kondisi pasar pada tahun tersebut.

For 2021, the Company has set production and sales volume target at 3.5 million tons, by taking into account the market conditions throughout the year.



// Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Pelaporan

Material Information and Facts Subsequent to Reporting Date

Tidak ada informasi dan fakta material setelah tanggal pelaporan yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

There is no material information and fact subsequent to reporting date that will significantly affect the Company.

// Prospek Usaha

Business Prospect

Meski harga batubara masih belum dapat diprediksi dan dampak berkepanjangan atas pandemi Covid-19 yang masih terus bergulir, Perseroan optimis industri batubara global dan domestik akan semakin pulih di tahun 2021. Optimisme ini dilandasi oleh vaksinasi yang telah berjalan di berbagai negara serta pembatasan pergerakan masyarakat dan barang yang semakin diperlonggar.

Even though coal prices are likely to remain unpredictable in addition to the prolonged impacts of the Covid-19 pandemic that has yet to subside, the Company expects the global and domestic coal industry to continue to recover in 2021. This expectation is based on the Covid-19 vaccination efforts that have been ongoing in numerous countries as well as the relaxation of people and goods movement restrictions.

Oleh karena itulah Perseroan telah mempersiapkan berbagai program pengembangan usaha jangka panjang yang akan dijalankan secara langsung oleh Perseroan atau melalui entitas anak. Program tersebut mencakup pengembangan usaha di bidang sewa tanpa hak opsi untuk panel surya atap, batubara, perkebunan energi, serta berbagai rencana pengembangan usaha lainnya dengan tetap mengacu kepada visi dan misi Perseroan, yaitu menjadi perusahaan terkemuka berbasis energi yang berkelanjutan.

The Company therefore has prepared various long-term business development programs that will be carried out directly by the Company or through its subsidiaries. Those programs include leasing business without option rights for roof-mounted solar panels, coal, energy plantations, and various other business development plans by observing the Company's vision and mission to be a leading corporation with sustainable energy basis.



// Aspek Pemasaran

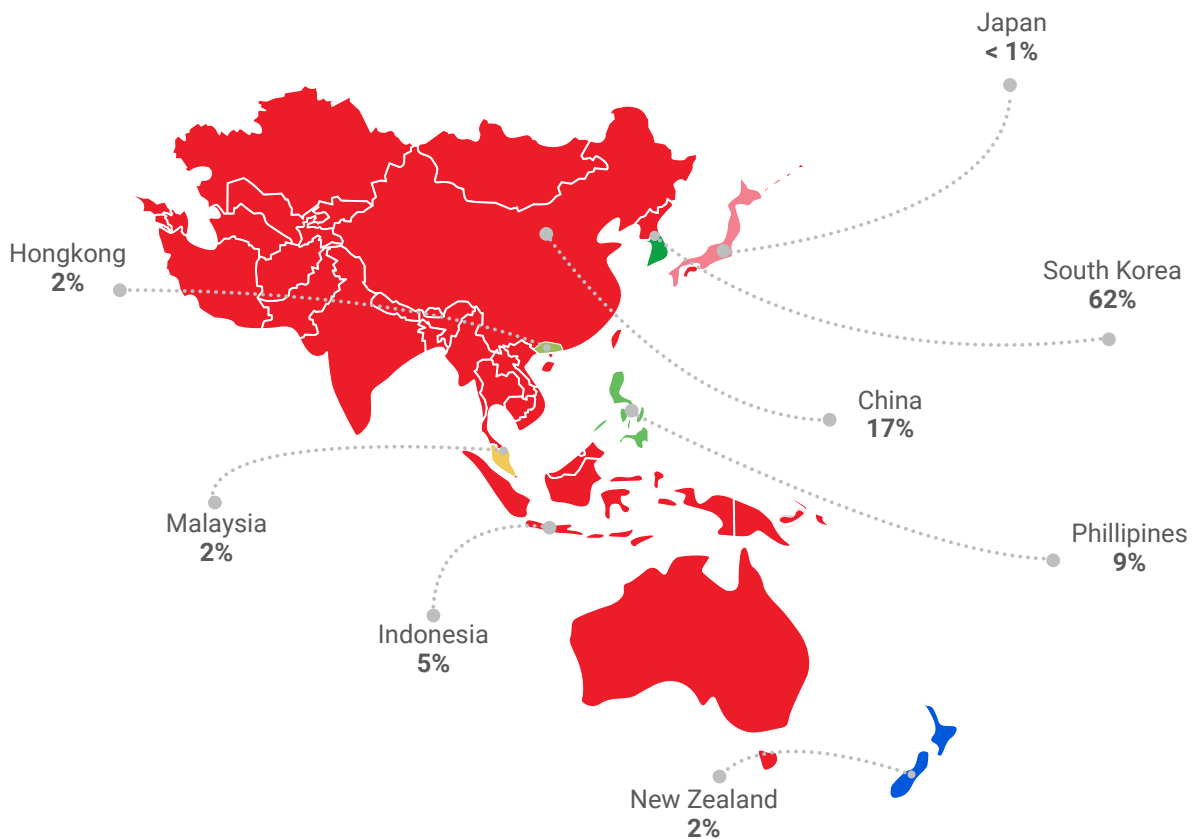
Marketing Aspect

Perseroan telah melakukan perjanjian jual-beli dengan pembeli lokal sebagai antisipasi terhadap kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dari Pemerintah yang akan mulai diterapkan pada awal 2017. Strategi yang dijalankan ini bertujuan untuk mencapai keuntungan maksimal dengan melakukan penetrasi pasar, baik domestik maupun ekspor. Tak hanya itu, meski terdapat kelebihan pasokan, Perseroan tetap menyeleksi setiap tawaran pembelian dari pelanggan. Hal ini dilakukan agar kredibilitas Perseroan sebagai penyedia batubara berkualitas tetap terjaga, sekaligus memberikan keuntungan bagi Perseroan yang hanya menawarkan produk dengan tingkat harga premium. Dengan strategi pemasaran tersebut, Perseroan berkeyakinan produk batubara yang dihasilkan akan terserap secara maksimal, mengingat tingkat persaingan di level batubara premium relatif rendah.

Di tahun 2020, Perseroan membukukan volume penjualan sebesar 3,9 juta ton, menurun dibandingkan 4,4 juta ton pada 2019. Pasar utama Perseroan di tahun 2020 adalah Korea Selatan yang menyumbang 62% terhadap total volume penjualan, diikuti Tiongkok 17%, Filipina 9%, dan Indonesia 5%.

The Company has made a sale-purchase agreement with local buyers in anticipating the Government policy of Domestic Market Obligation (DMO), which will be started to apply in the beginning of 2017. The strategy aims to reach maximum profit by penetrating both domestic and export market. In addition, despite coal oversupply, the Company remained careful in reviewing any purchasing offer from customers to maintain our credibility as the quality coal provider, while giving advantage to the Company in offering the products at premium price only. This marketing strategy is believed to be able to optimally absorb the Company's coal products, considering the fact that the competition in premium coal is relatively low.

In 2020, The Company posted 3.9 million tons sales volume, went down compared to 4.4 million tons in 2019. The Company's main markets in 2020 were South Korea that contributed 62% to total sales volume, followed by China 17%, the Philippines 9%, and Indonesia 5%.



Volume Penjualan Berdasarkan Negara
Sales by Country

// Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 9 Juni 2020, Perseroan membagikan dividen final kepada pemegang saham sebesar Rp72.409.045.168 atau sebesar Rp59 per lembar saham dan telah dibayarkan seluruhnya oleh Perseroan pada tanggal 24 Juni 2020.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris dan Direksi tertanggal 11 Agustus 2020, Perseroan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2020 kepada pemegang saham sebesar Rp439.363.358.816 atau Rp358 per lembar saham dan telah dibayarkan seluruhnya pada tanggal 31 Agustus 2020.

Pursuant to the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders dated June 9th, 2020, the Company distributed the final dividends to the shareholders amounting to Rp72,409,045,168 or Rp59 per share that had been fully paid by the Company on June 24th, 2020.

In accordance with the Board of Commissioners' and Board of Directors' Circular Resolution dated August 11th, 2020, the Company distributed the interim dividends for the 2020 fiscal year to the shareholders amounting to Rp439,363,358,816 or Rp358 per share that had been fully paid on August 31st, 2020.

// Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Utilization of Proceeds from Public Offering

Dana dari hasil realisasi bersih Penawaran Umum sebesar Rp153,520,013,179.50, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, telah direalisasikan penggunaannya untuk:

- Sebesar 41,50% telah digunakan untuk modal kerja dan pembangunan fasilitas operasional Perseroan;
- Sebesar 58,50% telah digunakan untuk pengembangan fasilitas pelabuhan, *overhaul* dan penggantian peralatan Entitas Anak.

Net proceeds from Public Offering amounting to Rp153,520,013,179.50, after deducting issuance fees, were used for:

- About 41.50% for the Company's working capital and construction of operational facilities;
- About 58.50% for the Subsidiaries' development of port facilities, *overhaul* and equipment replacement.

// Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi Atau Restrukturisasi Utang/Modal

Information on Investments, Expansions, Divestments, Mergers, Acquisitions or Restructuring of Capital/Debt

Pada tahun 2020, Perseroan tidak melaksanakan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal sehingga tidak ada informasi material yang dapat disampaikan Perseroan mengenai hal tersebut.

The Company did not conduct investments, expansions, divestments, mergers, acquisitions or restructuring of capital/debt in 2020, therefore there is no information on the matter that the Company must disclose.

// Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Bagi Perseroan

Changes in Government Regulations with Significant Impact on The Company

Pada tahun 2020, ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap industri batubara dan Perseroan. Yang pertama adalah Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan pada bulan Juni 2020. UU tersebut memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi baik bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). UU tersebut juga menetapkan sanksi pidana dan denda yang lebih berat yang diharapkan mendorong kepatuhan dari pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang kedua adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada bulan Oktober 2020. UU tersebut memberikan insentif berupa pengenaan royalti 0 persen bagi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara atau hilirisasi. Di saat yang sama, UU itu juga menetapkan batubara sebagai barang kena pajak (BKP).

Tak hanya itu, menyusul merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan 2 (dua) peraturan baru mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di tengah pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan ketat yaitu Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK No. 16/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Di tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan RUPS sesuai peraturan baru tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi seluruh ketentuan yang tertuang dalam UU dan peraturan OJK tersebut.

In 2020, there were 2 (two) laws and regulations that had significant impacts on the coal industry and the Company. The first is Law No. 3/2020 on Amendments to Law No. 4/2009 on Mineral and Coal Mining ratified in June 2020. The law provides legal certainty and investment certainty to holders of mining business permits (IUP), special mining business permits (IUPK), contract of work (CoW), and coal contract of work (CCoW). The law also stipulates harsher criminal sanctions and heavier fines that are expected to improve businesses' compliance with applicable laws and regulations.

The second is Law No. 11/2020 on Job Creation ratified in October 2020. The law provides incentives in the form of 0% royalty to businesses that conduct efforts to increase coal's added value or downstream efforts. The Law also classifies coal as a taxable good.

In addition, following the spread of the Covid-19 pandemic in Indonesia, the Financial Services Authority (OJK) had issued 2 (two) new regulations on the implementation of General Meetings of Shareholders (GMS) amidst the pandemic by complying with strict health protocols, namely OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, and OJK Regulation No. 16/2020 on the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies. In 2020, the Company held its GMS in accordance with the new regulations by observing strict health protocols.

The Company is committed to fulfilling all the provisions stipulated by the aforementioned laws and OJK regulations.

// Perubahan Kebijakan Akuntansi

Changes in Accounting Policies

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah PSAK 73 "Sewa".

Rincian disajikan dalam Catatan 2.b. atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada halaman 13-14.

Accounting policy with effective date on 1 January 2020 onwards that had significant impact on the Company is SFAS 73 "Leases"

Detail information is disclosed in Note 2.b. on the Consolidated Financial Statements at page 13-14.

TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komitmen dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik berperan penting dalam mempertahankan kepercayaan konsumen, regulator, dan masyarakat umum, serta mengoptimalkan nilai Perseroan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka panjang.

The commitment to Good Corporate Governance and its implementation are key to maintain customers', regulators', and general public's trust, as well as to optimize the Company's long-term values for all of its shareholders as well as other stakeholders.



Annual General Meeting of Shareholders
of PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk



PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk.



// Komitmen, Tujuan, Pedoman dan Kebijakan

Commitment, Objectives, Guidelines and Policies

Komitmen

Perseroan berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) demi menjamin efektivitas fungsi setiap organ Perseroan sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan. Atas dasar itulah Perseroan melalui Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa mengembangkan budaya perusahaan yang baik melalui implementasi tata kelola perusahaan dengan baik dan konsisten, serta terus melakukan inovasi dan penyempurnaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kebutuhan usaha, serta perkembangan industri pertambangan terkini, khususnya terkait pertambangan batubara.

Komitmen dan implementasi GCG tersebut sangat vital bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut turut pula berperan penting mempertahankan kepercayaan konsumen, regulator, dan masyarakat umum, serta mengoptimalkan nilai Perseroan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka panjang.

Tujuan

Tujuan penerapan GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai tambah Perseroan untuk meningkatkan kepercayaan kepada para pemegang saham maupun para pemangku kepentingan lainnya.
2. Memaksimalkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang kuat dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan, serta fungsi Komite- Komite lainnya sebagai pengawasan atas kinerja Perseroan.
5. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melindungi Dewan Komisaris dan Direksi dari kemungkinan adanya tuntutan hukum.

Tak hanya itu, implementasi GCG Perseroan juga bertujuan mengatur hal-hal sebagai berikut:

Commitment

The Company is committed to implementing good corporate governance (GCG) in order to ensure effective execution of each of the Company body's function as well as to maintain business sustainability. To this end, the Company through the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees persistently develops good corporate culture through proper and consistent application of corporate governance enhanced with continuous innovations and improvements in accordance with applicable regulations, business requirements, and latest developments in the mining industry, particularly related to coal mining.

The aforementioned GCG commitment, including subsequent GCG implementation, is vital for the Company to be able to run its business in a transparent, accountable, and responsible manner. Likewise, it is also key to maintain customers', regulators', and general public's trust, as well as to optimize the Company's long-term values for all of its shareholders as well as other stakeholders.

Objectives

The objectives of the Company's GCG implementation are as follows:

1. Increase the Company's added value to increase shareholders' and other stakeholders' trust.
2. Maximize the Company's value to have a strong competitiveness in running its business.
3. Improve compliance with the government in accordance with applicable laws and regulations
4. Enhance professional, transparent, and efficient corporate management as well as empower the functions of Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Internal Audit, and Corporate Secretary as well as the functions of other Committees as part of the corporate performance oversight
5. Establish high moral value and compliance with prevailing laws and regulations as the basis of each decision or policy making.
6. Protect the Board of Commissioners and Board of Directors from any potential lawsuit.

In addition, the Company's GCG implementation also aims to regulate the following matters:

- **Transaksi Benturan Kepentingan**

Peraturan Transaksi Benturan Kepentingan diterapkan untuk menegaskan bahwa pihak-pihak internal maupun eksternal Perseroan yang memiliki peluang tersangkut dalam transaksi dimaksud dilarang terlibat dalam proses pembuatan keputusan menyangkut transaksi tersebut. Dengan demikian, seluruh organ Perseroan dapat terhindar dari dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, bebas dari segala pengaruh dan tekanan sehingga pengambilan keputusan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat dilakukan secara objektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

Dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, Perseroan melakukan transaksi secara transparan dan wajar sehingga kepentingan seluruh Pemegang Saham dan Perseroan dapat terjaga.

- **Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi**

Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, seluruh pihak Perseroan baik di dalam maupun di luar Perseroan, dilarang memberi atau menerima hadiah dan donasi. Larangan ini diberlakukan karena penerimaan dan pemberian hadiah atau bantuan dalam pekerjaan dan donasi, dapat menyebabkan benturan kepentingan dan/atau turunya kepercayaan publik terhadap integritas Perseroan.

- **Pengadaan Barang**

Perseroan mengupayakan proses pengadaan barang dan jasa melalui persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari terjadinya transaksi-transaksi yang dapat berdampak negatif Perseroan dan seluruh Pemegang Saham. Kebijakan pengadaan barang dan jasa senantiasa Perseroan dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, memenuhi prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka dan bersaing adil, serta tidak diskriminatif.

- **Pengendalian Kualitas Karya**

Sebagai bagian dari tanggung jawab Perseroan terhadap para pelanggan, Perseroan menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mengontrol kualitas batubara yang dijual oleh Perseroan. Jaminan kualitas ini merupakan hasil dari serangkaian kegiatan jual beli batubara berstandar internasional yang dilakukan pada setiap tahap pengangkutan dan penjualan, mulai dari awal pelaksanaan hingga penjualan selesai dilaksanakan.

- **Manajemen Kinerja**

Perseroan menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai ukuran kinerja yang harus dicapai oleh manajemen dalam mencapai target operasi sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.

- **Conflict of Interest Transactions**

Regulation on Conflict of Interest Transactions is applied to ensure that the Company's internal and external parties that have an interest in the transactions are prohibited to engage in the decision-making process of such transactions. Thus, the Company's bodies will not be dominated by any party, and free from any influence and pressure so that decisions related to such transactions can be made objectively in accordance with the prevailing regulations.

- **Transactions with Related Parties**

The Company conducts transactions with related parties in a transparent and reasonable manner so as to protect the interests of both the Shareholders and the Company.

- **Prohibition of Granting and Receiving Gifts and Donations**

All members of the Company are prohibited to give or receive any gifts and donations in day-to-day operations inside and outside the Company. The prohibition is enforced as receiving and giving gifts or aid in work and in the form of donation can lead to conflict of interests and/or undermine public trust towards the Company's integrity.

- **Procurement of Goods/Services**

The Company strives to properly conduct goods and services procurement through a healthy competition in accordance with applicable laws and regulations and avoid transactions that may have negative impact for the Company and all Shareholders. Goods and services procurement policy is continuously updated and implemented in a transparent, accountable, effective, efficient, open and fair manner with the spirit of fair competition and without discrimination.

- **Work Quality Control**

As part of the Company's responsibility to customers, the Company has implemented an integrated quality management system to control coal quality the Company sells. The quality assurance is the result of a series of global standard coal trading activities carried out at every stage of hauling and trading, starting from the initial implementation until trading completion.

- **Performance Management**

The Company has set Key Performance Indicator (KPI) as the measure of performance to be achieved by the management in reaching operational target in accordance with the predetermined strategy.

Pedoman dan Kebijakan

Perseroan menerapkan GCG dengan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.
4. Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
6. Peraturan OJK No. 16/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
7. Peraturan OJK No. 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
8. Peraturan OJK No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
9. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
11. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
12. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
13. Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
14. Pedoman Nasional *Good Corporate Governance* Indonesia.
15. Peraturan-peraturan relevan terkait dengan praktik terbaik GCG.

Selain itu Perseroan juga telah memiliki pedoman dan kebijakan internal sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar
2. Kode Etik
3. Piagam Dewan Komisaris
4. Piagam Direksi
5. Piagam Komite Audit
6. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
7. Piagam Divisi Audit Internal

Guidelines and Policies

The Company implements GCG in accordance with the following applicable laws and regulations:

1. Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies.
2. Law No. 8 of 1995 on Capital Market.
3. Financial Services Authority (OJK) Circular No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of the Annual Report of Listed and Public Companies.
4. OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guideline for Public Companies and OJK Circular No. 32/SEOJK/04/2015 on the Corporate Governance Guideline for Public Companies.
5. OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
6. OJK Regulation No. 16/2020 on the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
7. OJK Regulation No. 42/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
8. OJK Regulation No. 17/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.
9. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Listed or Public Companies.
10. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Work Guideline of the Audit Committee.
11. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Listed or Public Companies.
12. OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Listed or Public Companies.
13. OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 on Internal Audit Unit Establishment and Charter Preparation Guideline.
14. Indonesia's Code of Good Corporate Governance.
15. Relevant regulations on GCG best practices.

In addition, the Company is also equipped with the following internal guidelines and policies:

1. Articles of Association
2. The Code of Conduct
3. The Board of Commissioners Charter
4. The Board of Directors Charter
5. Audit Committee Charter
6. Nomination and Remuneration Committee Charter
7. Internal Audit Division Charter

// Pemetaan Tata Kelola GCG Roadmap

Pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip utama GCG dalam mengelola Perseroan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengelolaan risiko usaha Perseroan, implementasi GCG juga diarahkan sebagai pedoman bagi manajemen dan karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan dilakukannya hal tersebut, diharapkan agar implementasi GCG tersebut mampu memberikan nilai tambah kepada seluruh pemakai jasa dan para pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan semua kegiatan usaha telah mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam penerapan GCG meliputi, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.

Penerapan GCG juga didukung oleh instrumen-instrumen GCG yang dimiliki Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada *Board Manual*, Pedoman Etika, dan Pedoman Pelaporan Pelanggaran untuk memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan implementasi sudah berjalan secara baik, secara reguler Perseroan melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan juga melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh insan perusahaan. Sosialisasi terhadap nilai serta prinsip yang terkandung dalam implementasi GCG dilakukan secara berkala dan menyentuh semua tingkatan dan jabatan. Selain sosialisasi, Perseroan juga melakukan internalisasi agar implementasi tata perusahaan yang baik menjadi bagian dari budaya Perseroan. Perseroan menyadari efektivitas penerapan GCG harus melibatkan seluruh pihak terkait, baik di internal maupun eksternal Perseroan.

The Company's business activities have been carried out in line with GCG main principles in the corporate management. As part of the Company's responsibility and business risk management, GCG implementation also serves as a guideline for the management and employees to perform their respective duties and responsibilities. The aforementioned GCG implementation is expected to provide added value to all customers and stakeholders. In this regard, all of the Company's activities have been carried out by taking into account GCG principles namely transparency, accountability, responsibility, independency, as well as equality and fairness.

GCG implementation is also supported by the Company's GCG instruments including but not limited to Board Manual, Code of Conduct, as well as Whistleblowing System Guideline in order to ensure good corporate governance that is in compliance with the prevailing laws and regulations. To ensure proper implementation of GCG, the Company also conducts evaluation periodically and continuously on a regular basis.

In practice, the Company also conducts dissemination and internalization of such matters to all of its members. Dissemination of values and principles inherent in the implementation of GCG is performed periodically to employees at all levels and positions. Furthermore, internalization is conducted so that GCG implementation can become part of the Company's culture. The Company realizes that the effectiveness of GCG implementation must involve all related parties, internally or externally.

// Foto ini diambil sebelum masa pandemi Covid-19
This picture was taken before the Covid-19 pandemic.

// Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

Struktur tata kelola Perseroan terdiri atas organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ Perseroan tersebut memainkan peranan masing-masing dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Fungsi dari Organ Perseroan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lainnya yang didasari prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan. Dengan demikian, RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dapat saling memahami tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

The Company's governance structure consists of main bodies namely General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. Each of these bodies plays significant roles in maintaining the success of GCG implementation in the Company. The functions of each body are conducted in line with the provisions of prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association, and other provisions, which are based on the principle that each body is independent in performing their duties, functions and responsibilities for the Company's interests. Therefore, GMS, Board of Commissioners and Board of Directors may comprehend each other's duties, responsibilities and authority in accordance with the legislations and Company's Articles of Association.

// Penilaian terhadap Implementasi GCG

Assessment of GCG Implementation

Keberhasilan Perseroan dalam mewujudkan tujuannya tercermin dari implementasi GCG dan dibentuknya organ-organ Perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efektivitas implementasi GCG, Perseroan secara berkala melakukan penilaian baik yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) maupun dilaksanakan oleh pihak independen.

The Company's success in achieving its objectives is reflected in GCG implementation and the establishment of the Company's bodies, namely General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors, which have implemented their respective duties diligently. To measure the success and effectiveness of GCG implementation, the Company has periodically conducted assessment, either self assessment or assessment by independent party.



// Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Salah satu organ penting dalam Perseroan yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur Perseroan sebagai pengambil kebijakan atau keputusan-keputusan terkait Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam struktur tata kelola Perseroan, RUPS memiliki wewenang penuh dan tidak dapat diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Wewenang yang diberikan pada RUPS antara lain mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan tugas dan wewenang, menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, menyetujui laporan keuangan, menetapkan remunerasi terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan lain sebagainya. RUPS Perseroan terdiri atas RUPS Tahunan yang diadakan paling sedikit satu tahun sekali serta RUPS Luar Biasa jika diperlukan untuk membahas kejadian luar biasa yang berdampak pada kinerja Perseroan. RUPS diadakan setiap tahunnya sesuai dengan UUPT, dimana RUPS Tahunan Perseroan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku Perseroan.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Seluruh tahapan dan tata cara penyelenggaraan RUPS Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 16/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan aturan terkait lain.

Ketentuan Kuorum dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan mengenai syarat sah terlaksananya RUPS telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perusahaan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Dalam Anggaran Dasar Perseroan menetapkan bahwa RUPS dapat dilaksanakan jika telah memenuhi kuorum apabila dihadiri dan/atau diwakili sekurang-kurangnya 2/3 dari total Pemegang Saham Perseroan.

Kesetaraan antara Pemegang Saham

Perseroan memegang prinsip untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih objektif dan memenuhi kewajiban dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas.

One of the Company's crucial bodies is the General Meeting of Shareholders (GMS). GMS is the highest organ in the Company's structure as a policy or decision maker related to the Company pursuant to Articles of Association and applicable laws and regulations. In the Company's GCG structure, GMS has the full authority not given to the Board of Commissioners and Board of Directors as regulated by Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies (UUPT). The GMS is authorized to appoint Board of Commissioners and Board of Directors as well as assign duties and authorities, approve amendment to the Company's Articles of Association, approve financial statements, determine remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors, etc. The Company's GMS consists of Annual GMS held at least once a year and if deemed necessary, Extraordinary GMS may also be held to discuss extraordinary events affecting the Company's performance. GMS is held annually pursuant to the UUPT, in which the Company's Annual GMS is held at least 6 (six) months after the close of the Company's fiscal year.

GMS Implementation Procedure

All phases and procedures of holding the Company's GMS are in accordance with OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, OJK Regulation No. 16/2020 on the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, as well as other related regulations.

Provision of Quorum and Attendance of Board of Commissioners and Board of Directors

Provision regarding valid requirements to implement GMS is regulated in the Articles of Association (AD/ART) of the Company in accordance with Law No. 40/2007. The Company's Articles of Association stipulates that GMS may be held if it met the quorum and is attended and/or represented by at least 2/3 of the total Shareholders of the Company.

Equality Between Shareholders

The Company upholds the principle of creating more objective working environment that satisfies equality and fairness principles despite various existing interests, including the interest of both majority and minority shareholders.

// RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 2020

2020 Annual GMS and Extraordinary GMS

Pada tahun 2020, Perseroan melaksanakan 1 (satu) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 9 Juni 2020 serta 1 (satu) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 20 Oktober 2020.

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 9 Juni 2020

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 9 Juni 2020 di Jakarta dan dihadiri oleh 60,817% dari total pemegang saham Perseroan dengan keputusan sebagai berikut:

Agenda Pertama

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
- Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda Kedua

- Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:
 - Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp72.409.045.168 atau sebesar Rp59/lembar saham untuk sejumlah 1.227.271.952 saham yang ditempatkan dan disetor penuh.
 - Sebesar Rp22.200.000.000, ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Sisa total pendapatan komprehensif tahun berjalan untuk tahun 2019 akan dibukukan sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana prospek usaha Perseroan lainnya.
- Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas rencana pembagian Dividen Interim yang telah dibagikan Perseroan kepada seluruh pemegang saham Perseroan, pada tanggal 15 November 2019.
- Memberikan persetujuan atas rencana pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

In 2020, the Company held 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders on June 9th, 2020, and 1 (one) Extraordinary General Meetings of Shareholders, both on October 20th, 2020.

The Resolutions of Annual GMS on June 9th, 2020

The Company held Annual General Meeting of Shareholders on June 9th, 2020, in Jakarta and attended by 60.817% of the Company's total shareholders with the following resolutions:

First Agenda

- Approved and ratified the Company's Annual Report and audited Financial Statements for the fiscal year ended on December 31st, 2019.
- Granted full release and discharge (*acquitt et de charge*) to all members of the Company's Boards of Commissioners and Directors (*acquitt et de charge*) for the supervision and management activities as stated in the Company's Annual Report for the fiscal year ended on December 31st, 2019.

Second Agenda

- Approved the utilization of the Company's net profit for the fiscal year ended on December 31st, 2019, as follows:
 - To be distributed as Cash Dividend amounting to Rp72,409,045,168 or Rp59/share for a total of 1,227,271,952 shares issued and fully paid.
 - An amount of Rp22,200,000,000 was allocated as mandatory reserve in order to meet the Article 70 of the Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies.
 - The remaining comprehensive income for current year of 2019 would be accounted as retained earnings to support operational activities of the Company and Subsidiaries as well as other business prospects of the Company.
- Approved and ratified the plan of distribution of Interim Dividend that had been distributed to all shareholders on November 15th, 2019.
- Approved the plan of distribution of Final Dividend for the fiscal year ended on December 31st, 2019.

- d. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut di atas.

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Agenda Ketiga

Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 termasuk menentukan honorarium kantor Akuntan Publik.

Agenda Keempat

Dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi:

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun 2020.

Agenda Kelima

- Memberikan persetujuan untuk penunjukkan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arie Prabowo Ariotedjo
Wakil Komisaris Utama	: Kenji Tomisawa
Komisaris Independen	: Abdullah Fawzy Siddik

Direksi

Direktur Utama	: Widada
Wakil Direktur Utama	: Hidefumi Kodama
Direktur	: Ir. Syadaruddin
Direktur	: Deden Ramdhan

- d. Granted authority to the Board of Directors to determine the schedule and procedures for dividend distribution as well as to perform all required actions.

The cash dividend would be taxed in accordance with applicable tax regulations. The tax amount was levied to the Company's shareholders and deducted from the amount of cash dividend owned by the concerned Company's Shareholders.

Third Agenda

Approved the Board of Commissioners to appoint Public Accountant assigned for the fiscal year ended on December 31st, 2020, as well as to determine the honorarium of the Public Accounting Firm.

Fourth Agenda

With due regard to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee:

- Granted power and authority to President Commissioner to determine the amount of honorarium and allowances for each member of the Board of Commissioners for the year 2020.
- Granted power and authority to President Commissioner to determine the remuneration and allowances for the members of the Board of Directors for the year 2020.

Fifth Agenda

- Granted approval for the appointment of members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors as follows:

The Board of Commissioners

President Commissioner	: Arie Prabowo Ariotedjo
Vice President Commissioner	: Kenji Tomisawa
Independent Commissioner	: Abdullah Fawzy Siddik

The Board of Directors:

President Director	: Widada
Vice President Director	: Hidefumi Kodama
Director	: Ir. Syadaruddin
Director	: Deden Ramdhan



b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut.

b. Granted power and authority to the President Director of the Company with the right of substitution to state these decisions in a notarial deed and take necessary actions/actions required by the competent authority and carry out actions that are deemed good and necessary in connection with the aforementioned changes to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 20 Oktober 2020

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 20 Oktober 2020 di Jakarta dan dihadiri oleh 61,302% dari total pemegang saham Perseroan dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Widada dan Bapak Deden Ramdhan, dalam kedudukannya berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitted de charge*) kepada Bapak Widada dan Bapak Deden Ramdhan sepanjang tindakan pengurusannya tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

The Resolution Extraordinary GMS on October 20th, 2020

The Company held Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 20th, 2020, in Jakarta and attended by 61.302% of the Company's total shareholders with the following resolutions:

1. Accepted the resignation of Mr. Widada and Mr. Deden Ramdhan from their respective position as President Director and Director effective as of the closing of the Meeting, and granted full release and discharge (*acquitted de charge*) to Mr. Widada and Mr. Deden Ramdhan for their management actions as reflected in the Company's Annual Report.



2. Menyetujui penunjukan:
- Bapak Khoirudin selaku Direktur Utama.
 - Bapak Eric Rahardja selaku Direktur Perseroan. terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat.

Sehingga terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direktur Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arie Prabowo Ariotedjo
Wakil Komisaris Utama : Kenji Tomisawa
Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik

Direksi:

Direktur Utama : Khoirudin
Wakil Direktur Utama : Hidefumi Kodama
Direktur : Ir. Syadaruddin
Direktur : Eric Rahardja

Realisasi Keputusan RUPS Tahun 2020

Seluruh keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 2020 telah direalisasikan pada tahun buku 2020.

2. Approved the following appointments:
- Mr. Khoirudin as President Director
 - Mr. Eric Rahardja as Director. effective as of the closing date of the Meeting.

Therefore, effective as of the closing of the Meeting, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

The Board of Commissioners:

President Commissioner : Arie Prabowo Ariotedjo
Vice President Commissioner : Kenji Tomisawa
Independent Commissioner : Abdullah Fawzy Siddik

The Board of Directors:

President Director : Khoirudin
Vice President Director : Hidefumi Kodama
Director : Ir. Syadaruddin
Director : Eric Rahardja

The Implementation of the 2020 GMS Resolutions

All of the 2020 Annual GMS and Extraordinary GMS resolutions have been implemented in the 2020 fiscal year.

// RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 2019

2019 Annual GMS and Extraordinary GMS

Pada tahun 2019, Perseroan melaksanakan 1 (satu) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta 1 (satu) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang keduanya dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2019.

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2019

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 12 Juni 2019 di Jakarta dan dihadiri oleh 90,40% dari total pemegang saham Perseroan dengan keputusan sebagai berikut:

Agenda Pertama

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
- Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan auditan Perseroan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia), sebagaimana tercantum dalam Laporan tertanggal 15 Maret 2019, dengan pendapat wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan konsolidasian PT Mitrabara Adiperdana Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agenda Kedua

- Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:
 - Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp71.181.773.216 atau sebesar Rp58/lembar saham untuk sejumlah 1.227.271.952 saham yang ditempatkan dan disetor penuh.
 - Sebesar Rp22.200.000.000, ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

In 2019, the Company held 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders and 1 (one) Extraordinary General Meetings of Shareholders, both on June 12th, 2019.

The Resolutions of Annual GMS on June 12th, 2019

The Company held Annual General Meeting of Shareholders on June 12th, 2019, in Jakarta and attended by 90.40% of the Company's total shareholders with the following resolutions:

First Agenda

- Approved and ratified the Company's Annual Report for the fiscal year ended on December 31st, 2018.
- Approved and ratified the Company's audited financial statements ended on December 31st, 2018, audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) Public Accounting Firm, as stated in the Report dated March 15th, 2019, with unqualified opinion in all material matters in relation to PT Mitrabara Adiperdana Tbk's and subsidiaries' consolidated financial statements on December 31st, 2018, as well as consolidated financial performance and cash flow for the year ended on the aforementioned date, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.
- Granted full release and discharge (*acquitt et de charge*) to all members of the Company's Boards of Commissioners and Directors (*acquitt et de charge*) for the supervision and management activities as stated in the Company's Annual Report for the fiscal year ended on December 31st, 2018.

Second Agenda

- Approved the utilization of the Company's net profit for the fiscal year ended on December 31st, 2018, as follows:
 - To be distributed as Cash Dividend amounting to Rp71,181,773,216 or Rp58/share for a total of 1,227,271,952 shares issued and fully paid.
 - An amount of Rp22,200,000,000 was allocated as mandatory reserve in order to meet the Article 70 of the Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies.

3. Sisa total pendapatan komprehensif tahun berjalan untuk tahun 2018 akan dibukukan sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana prospek usaha Perseroan lainnya.
- b. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas rencana pembagian Dividen Interim yang telah dibagikan Perseroan kepada seluruh pemegang saham Perseroan, pada tanggal 7 Desember 2018.
- c. Memberikan persetujuan atas rencana pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Sehubungan dengan rencana pembagian Dividen, Pemegang Saham telah setuju untuk memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut di atas.

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

- d. Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 termasuk menentukan honorarium kantor Akuntan Publik.

Agenda Ketiga

Dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi:

- a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun 2019.

Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 12 Juni 2019

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 Juni 2019 di Jakarta dan dihadiri oleh 90,41% dari total pemegang saham Perseroan dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri dengan hormat dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupanya Rapat:

3. The remaining comprehensive income for current year of 2018 would be accounted as retained earnings to support operational activities of the Company and Subsidiaries as well as other business prospects of the Company.
- b. Approved and ratified the plan of distribution of Interim Dividend that had been distributed to all shareholders on December 7th, 2018.
- c. Approved the plan of distribution of Final Dividend for the fiscal year ended on December 31st, 2018.

With regard to the aforementioned plan, the Shareholders agreed to grant authority to the Board of Directors to determine the schedule and procedures for dividend distribution as well as to perform all required actions.

The cash dividend would be taxed in accordance with applicable tax regulations. The tax amount was levied to the Company's shareholders and deducted from the amount of cash dividend owned by the concerned Company's Shareholders.

- d. Approved the Board of Commissioners to appoint Public Accountant assigned for the fiscal year ended on December 31st, 2019, as well as to determine the honorarium of the Public Accounting Firm.

Third Agenda

With due regard to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee:

- a. Granted power and authority to President Commissioner to determine the amount of honorarium and allowances for each member of the Board of Commissioners for the year 2019.
- b. Granted power and authority to President Commissioner to determine the remuneration and allowances for the members of the Board of Directors for the year 2019.

The Resolution Extraordinary GMS on June 12th, 2019

The Company held Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 12th, 2019, in Jakarta and attended by 90.41% of the Company's total shareholders with the following resolutions:

1. Approved the resignation with honour and granted full release and discharge (*acquitt et de charge*) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, effective as of the closing of this Meeting, to the following:

- a. Shinichi Naruchii dalam kedudukannya selaku Wakil Direktur Utama.
 - b. Richard Pardede dalam kedudukannya selaku Direktur Independen.
2. Menyetujui penunjukan nama-nama sebagai berikut dalam jabatannya selaku:
- a. Hidefumi Kodama selaku Wakil Direktur Utama.
 - b. Deden Ramdhan selaku Direktur.

Sehingga selanjutnya susunan Direksi Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Widada
Wakil Direktur Utama	: Hidefumi Kodama
Direktur	: Ir. Syadaruddin
Direktur	: Deden Ramdhan

3. Memberikan persetujuan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan seiring dengan kepatuhan hukum terhadap:
- a. Diterbitkannya KBLI 2017 dan seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan akan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar untuk didaftarkan secara elektronik sesuai dengan KBLI 2017.
 - b. Sesuai dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Keputusan I-A), Perseroan akan melakukan perubahan Anggaran Dasar, sehubungan dengan penghapusan istilah Direktur Independen, sehingga selanjutnya susunan Pengurus Perseroan terdiri dari:
 - (1) Direktur Utama
 - (2) Wakil Direktur Utama
 - (3) 2 (dua) orang Direktur

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan RUPSLB termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan RUPSLB ini di hadapan Notaris serta melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk tercapainya tujuan tersebut.

Realisasi Keputusan RUPS Tahun 2019

Seluruh keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 2019 telah direalisasikan pada tahun buku 2019.

- a. Shinichi Naruchii from his position as Vice President Director.
 - b. Richard Pardede from his position as Independent Director.
2. Approved the appointment of the following individuals for the following positions:
- a. Hidefumi Kodama as Vice President Director.
 - b. Deden Ramdhan as Director.

Therefore, the new composition of the Board of Directors is as follows:

Board of Directors

President Director	: Widada
Vice President Director	: Hidefumi Kodama
Director	: Ir. Syadaruddin
Director	: Deden Ramdhan

3. Approved the amendment to the Company's Articles of Association as part of compliance to the following regulations:
- a. The issuance of the 2017 Indonesian Standard Business Classification (KBLI) and the issuance of Government Regulation No. 24/2018 on Integrated Electronic Licensing Services. Accordingly, the Company will amend its Articles of Association to be registered electronically in accordance with the 2017 KBLI.
 - b. In accordance with the issuance of PT Bursa Efek Indonesia's Board of Directors' Decree No. Kep-00183/BEI/12-2018 dated December 26th, 2018 on Listing of Shares and Equity Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies (Decree I-A), the Company will amend its Articles of Association with regard to the abolition of the term Independent Director, henceforth the composition of the Company's Management is as follows:
 - (1) President Director
 - (2) Vice President Director
 - (3) 2 (two) Directors

With regard to the abovementioned changes to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company's President Director is granted the authority and power with the right of substitution to take any action related to the EGMS resolution, including but not limited to preparing or requesting to prepare and signing any deed related to this EGMS resolution in the presence of a Notary and conduct any other action deemed necessary for that purpose.

The Implementation of the 2019 GMS Resolutions

All of the 2019 Annual GMS and Extraordinary GMS resolutions have been implemented in the 2019 fiscal year.

// Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ utama Perseroan yang bekerja secara kolektif untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara umum maupun khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, khususnya terkait strategi usaha, tata kelola perusahaan, implementasi pengendalian internal dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris telah memiliki Piagam Dewan Komisaris sebagai panduan dan tata tertib kerja.

Komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sedikitnya terdiri atas 3 (tiga) orang anggota. Satu di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan hingga 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Arie Prabowo Ariotedjo	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Juni 2020 The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 9 th , 2020	3 tahun 3 years
Kenji Tomisawa	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Juni 2020 The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 9 th , 2020	3 tahun 3 years
Abdullah Fawzy Siddik	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Juni 2020 The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 9 th , 2020	3 tahun 3 years

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Dewan Komisaris menjalankan fungsi utama melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi guna memastikan Perseroan dikelola sesuai dengan target dan rencana yang telah dicanangkan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Board of Commissioners is one of the Company's main organs that works collectively to implement general and special supervisory duties pursuant to the Articles of Associations as well as to provide advice to the Board of Directors in managing the Company, particularly related to business strategies, corporate governance, implementation of internal control as well as the Company's compliance with applicable laws and regulations. In performing its duties and functions, the Board of Commissioners is equipped with the Board Of Commissioners Charter as its work guideline and procedures.

Board of Commissioners' Composition

Board of Commissioners consists of at least 3 (three) members. One of them shall be appointed as President Commissioner. The composition Board of Commissioners as of December 31st, 2020, was as follows:

Duties, Responsibilities and Authorities

Board of Commissioners performs its main function of supervising and providing advice to the Board of Directors to ensure the Company is managed according to the predetermined target and plan.

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:

- The Board of Commissioners is responsible for conducting oversight function and supervising management policy, general management, as well as providing advice to the Board of Directors.

- Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
- Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- Under certain condition, the Board of Commissioners must hold annual GMS and extraordinary GMS in accordance with its authority as regulated by laws and regulations and Articles of Associations.
- Members of the Board of Commissioners must implement their duties and responsibilities in good faith, with full of responsibilities and prudence.
- In order to support the effectiveness of their duties and responsibilities, Commissioners must form Audit Committee and other committees.
- The Board of Commissioners must evaluate its supporting committees' performance in assisting the implementation of its duties and responsibilities by the end of book year.
- The Board of Commissioners is authorized to suspend any member of Board of Directors by stating the reason thereof.
- The Board of Commissioners is authorized manage the Company under certain circumstances for a definite period of time in accordance with the Articles of Association or GMS resolutions. Each member of the Board of Commissioners is jointly and severally responsible for losses to the Company caused by mistakes or negligence of the members of Board of Commissioners in carrying out its duties.

Komisaris Independen

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan telah memenuhi ketentuan memiliki Komisaris Independen yang tertuang dalam POJK Nomor 33 tahun 2014 bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan usaha atau afiliasi dengan Perseroan serta memiliki hubungan keluarga dengan seluruh anggota Direksi maupun Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan RUPS, Perseroan telah memiliki satu Komisaris Independen yang dijabat oleh Abdullah Fawzy Siddik.

Kriteria Komisaris Independen

- Komisaris Independen bukanlah orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
- Komisaris Independen tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung.

Independent Commissioner

Pursuant to the applicable regulations, the Company has complied with provision on the establishment of Independent Commissioner as set out in FSA Regulation No. 33/2014 that requires public companies to have Independent Commissioners of at least 30% of the total members of the Board of Commissioners. Independent Commissioners shall not have business relation or affiliation with the Company as well as family relation with any members of Board of Directors or Board of Commissioners. Pursuant to GMS Resolution, the Company has one Independent Commissioner namely Abdullah Fawzy Siddik.

Criteria of Independent Commissioner

- The Independent Commissioner is not an individual that works or has an authority and responsibility to plan, lead, control or monitor the Company's activities within the last 6 (six) month period, except for the re-appointment of the individual as the Company's Independent Commissioner for the subsequent period.
- The Independent Commissioner does not possess any share, either directly or indirectly.

- Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
- Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Keberadaan Komisaris Independen diperlukan agar dalam praktik transaksi tidak mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta pemangku kepentingan lainnya.

Pernyataan Independensi Komisaris

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen dan bertindak semata-mata demi kepentingan Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengadakan rapat dan pertemuan baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi serta komite-komite. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.

Sepanjang 2020, Dewan Komisaris mengadakan 4 (empat) rapat dan mengambil keputusan secara sirkuler sebanyak 2 (dua) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	%
Arie Prabowo Ariotedjo*	Komisaris Utama President Commissioner	2	2	100
Yo Angela Soedjana**	Komisaris Utama President Commissioner	2	2	100
Kenji Tomisawa*	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	2	2	100
Fumitake Uyama**	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	2	2	100
Abdullah Fawzy Siddik	Komisaris Independen Independent Commissioner	4	4	100

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Juni 2020
Appointed as members of Board of Commissioners at Annual General Meeting of Shareholders on June 9th, 2020

** Mengundurkan diri pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Juni 2020
Resigned at Annual General Meeting of Shareholders on June 9th, 2020

- The Independent Commissioner does not have any affiliation with the Company, other members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or major shareholders of the Company.
- The Independent Commissioner does not have any business relationship, directly or indirectly, associated with the Company's business activity.

The presence of Independent Commissioner is required to prevent conflict of interest in the transactions that can potentially overlook the interest of public shareholders (minority shareholders) and other stakeholders.

Independent Commissioners' Statement of Independency

Independent Commissioner is a member of Board of Commissioners not affiliated with members of Board of Directors, other members of Board of Commissioners and controlling shareholders, and is free from business as well as other relationships that may influence his/her ability to act independently for the interests of the Company.

Board of Commissioners' Meetings

The Board of Commissioners holds meeting consisting of the Board of Commissioners' internal meetings or joint meeting with Board of Directors and other committees. The resolutions of the Board of Commissioners' Meetings are made by deliberation toward consensus. In the event that deliberation toward consensus is not achieved, resolution shall be made by majority votes.

Throughout 2019, Board of Commissioners held 4 (four) meetings and made 2 (two) circular decisions. The attendance rate of each member is as follows:

Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Perseroan melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dalam RUPS sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara berkala terkait pelaksanaan tugas yang telah direncanakan setiap awal tahun. Pada akhir tahun, Dewan Komisaris menyusun laporan Tugas Pengawasan yang disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi dan disahkan.

Penilaian terhadap Komite-Komite Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2020, komite-komite tersebut telah melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dengan mengawasi efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, menelaah informasi keuangan, menelaah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Auditor Internal, serta memberikan rekomendasi terkait praktik penerapan GCG berikut struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Assessment of Performance of Board of Commissioners

The Company conducts assessment of the performance of the Board of Commissioners during GMS pursuant to the prevailing regulations. Assessment of the performance of the Board of Commissioners is conducted related to the duties planned at the beginning of the year. At the end of year, the Board of Commissioners prepares and submits Supervisory Duty report to the Shareholders during GMS to be evaluated and ratified.

Assessment of Committees Under Board of Commissioners

In performing its duties and functions, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners concludes that in 2020, the aforementioned committees had performed their duties to the best of their ability by properly and thoroughly overseeing the effectiveness of the internal control implementation, reviewing financial information, reviewing audits performed by Internal Auditor, and providing recommendations regarding GCG implementation practices as well as the remuneration structure and amount for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.



// Direksi

Board of Directors

Organ penting lainnya yang berada dalam perseroan adalah Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas serta pengelolaan Perseroan meliputi kegiatan operasional, dan keuangan agar pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Direksi senantiasa menjalankan tugas kepengurusan Perseroan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak terkait dengan aktivitas usaha Perseroan. Peran dan tanggung jawab Direksi Perseroan dijabarkan dalam Anggaran Dasar. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar serta keputusan RUPS.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Direksi telah memiliki Piagam Direksi sebagai panduan dan tata tertib kerjanya. Direksi turut pula dibantu oleh Divisi Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan.

Komposisi Direksi

Hingga tanggal 31 Desember 2020 komposisi Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Another important organ of the Company is the Board of Directors. The Board of Directors is responsible for ensuring that all management activities of the Company, i.e. operational and financial activities, are implemented properly and in line with GCG principles as well as the Company's vision and mission. The Board of Directors has continuously managed the Company by taking into account the balance of interest of all related parties with the Company's business activities. Duties and responsibilities of the Board of Directors is described in the Articles of Associations. The Board of Directors must comply with the prevailing regulations, Articles of Associations as well as GMS resolutions.

In performing its roles and functions, the Board of Directors is equipped with the Board Of Directors Charter as its work guidelines and procedures. Likewise, the Board of Directors is assisted by the Internal Audit Division and the Corporate Secretary.

Board of Directors' Composition

As of December 31st, 2020, the composition of the Board of Directors is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Khoirudin	Direktur Utama President Director	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Oktober 2020 The Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 20 th , 2020	3 tahun 3 years
Hidefumi Kodama	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Juni 2019 The Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 12 th , 2019	3 tahun 3 years
Ir. Syadaruddin	Direktur Director	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Juni 2019 The Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 12 th , 2019	3 tahun 3 years
Eric Rahardja	Direktur Director	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Oktober 2020 The Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 20 th , 2020	3 tahun 3 years

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pasal 12 ayat 1 (Akta No. 46 tanggal 6 Juni 2016), anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada

Appointment and Dismissal of Board of Directors

Pursuant to Article 12 paragraph 1 of the Company's Articles of Association (Deed No. 46 dated June 6th, 2016), each member of the Board of Directors is appointed by the GMS for a period of 3 (three) years from the date of the GMS that appointed

saat ditutupnya RUPS Tahunan ketiga yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi setiap waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite Nominasi.

Independensi Direksi

Direksi Perseroan bekerja secara independen dan profesional tanpa ada campur tangan atau intervensi dari pihak-pihak lain, atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan sehingga terhindar dari potensi terjadinya benturan kepentingan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Sesuai Piagam Direksi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Perseroan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan sesuai Visi dan Misi Perseroan.
- Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab kehati-hatian dan melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Bersama-sama dengan Dewan Komisaris memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perseroan sepanjang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- Menjalankan fungsi-fungsi Sekretaris Perusahaan serta menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan.
- Menjalankan program-program tanggung jawab sosial Perseroan.
- Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian

them until the closing of the third Annual GMS held after the appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any given time with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations. Proposal of appointment, dismissal, and/or replacement of members of Board of Directors shall be submitted to GMS by taking into account the recommendation from Board of Commissioners or Nomination Committee.

Independency of Board of Directors

The Board of Directors works independently and professionally without interference from other parties or those that are against the legislation and the Company's Articles of Association in order to avoid conflict of interest in the implementation of the Company's business activities.

Duties, Responsibilities, and Authorities of Board of Directors

Pursuant to Board of Directors Charter, the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors are as follows:

- The Board of Directors runs the Company and is responsible for managing the Company in the interest of the Company in line with the objectives and targets of the Company set in the Articles of Association.
- In conducting its duties and responsibilities on the management of the Company, the Board of Directors is obliged to convene an Annual GMS and Extraordinary GMS as stipulated in the legislation and the Company's Articles of Association.
- Implement the principles of good corporate governance in the Company's every business activity in accordance with its Vision and Mission.
- Each member of the Board of Directors must perform their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence, and perform all of their obligations in accordance with the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association.
- Together with the Board of Commissioners, the Board of Directors must ensure that external auditors, internal auditors, and the Audit Committee have access to the accounting records, supporting data, and information about the Company to the extent of the execution of their duties.
- Perform the functions of Corporate Secretary, and maintain and evaluate the quality of the aforementioned functions.
- Implement the Company's corporate social responsibility programs.
- The Board of Directors is entitled to represent the Company in and out of court in all matters and in all incidents in

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

- Dalam hal perbuatan tertentu, mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil dan kuasanya dengan memberikan kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Direksi melakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota Direksi, sebagai berikut:

Direktur Utama

- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan berlaku.
- Mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan bisnis dengan mendorong kinerja bisnis yang lebih dinamis dan kompetitif.
- Mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan unit usaha agar berjalan lancar efektif dan efisien.
- Meningkatkan citra Perseroan dengan membina hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan.
- Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai visi dan misi Perseroan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan serta mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Perseroan.
- Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dan berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam Surat Kuasa.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari Direksi lainnya.
- Berhubungan dengan penerapan hukum Perseroan.

Wakil Direktur Utama

- Membantu Direktur Utama untuk menetapkan acuan sistem dan mekanisme seluruh divisi yang ditata berdasarkan sistem manajemen umum yang terus berkembang sebagai suatu kontribusi terhadap kelancaran seluruh divisi yang terkait.
- Membantu Direktur Utama untuk menetapkan sasaran manajemen secara konseptual, mengarah pada pemenuhan target Perseroan dalam menata sistem manajemen operasi, pemasaran, keuangan, kepegawaian dan administrasi yang didasarkan pada keputusan strategi yang diambil oleh Perseroan.

accordance with the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association.

- In the case of certain actions, the Board of Directors may appoint one or more persons as its representatives or proxies by granting them power as stated in a power of attorney.

Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

The Board of Directors allocates its duties to each member of the Board of Directors, as follows:

President Director

- Coordinate the management of the Company as stipulated in the Company's Articles of Association and GMS resolutions by taking into account the prevailing laws and regulations.
- Direct the transformation processes required to meet the challenge of business competition by encouraging a more dynamic and competitive business performance.
- Coordinate the implementation of duties that are related to business units so as to run well, effectively, and efficiently.
- Improve the Company's image by nurturing good relationship with all stakeholders.
- Fully responsible for conducting his duties in the interest of the Company in order to achieve the Company's vision and mission.
- Coordinate Corporate Social Responsibility activities and encourage the implementation of good corporate governance principles in the Company.
- Have the rights and authority to act for and on behalf of the Board of Directors, to represent the Company, and to appoint one or more proxies by granting the proxy (ies) an authority to perform activities as stipulated in the Power of Attorney.
- Coordinate duties of other members of Board of Directors.
- Conduct duties related to the implementation of the Company's laws and regulations.

Vice President Director

- Assist the President Director to determine system guideline and mechanism of all divisions that are formulated based on general management systems. This will be continuously developed as a contribution for a seamless operation of all related divisions.
- Assist the President Director to determine the management target by developing the right concept that focuses on fulfilling the Company's target in managing the management system of operations, marketing, finance, employment, and administration based on the strategy decisions made by the Company.

- Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan bisnis dan pemasaran untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- Melakukan koordinasi kerja keseluruhan divisi pada satu sistem dan strategi sebagai konsep dari keseluruhan kebijakan.
- Melakukan marketing research yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk sejenis dari kompetitor.
- Melakukan perencanaan analisis peluang pasar dan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya Perseroan.
- Melakukan pengawasan terhadap pengendalian atas dampak lingkungan akibat kegiatan operasional Perseroan.
- Bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, yang mana tidak perlu dibuktikan oleh pihak ketiga.

Direktur

- Memimpin dan mengarahkan strategi bisnis, tujuan dan target finansial jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Perseroan secara komprehensif.
- Memimpin dan mengarahkan aktivitas pembukuan dan pelaporan agar memiliki sistem keuangan dengan pengawasan, kebijaksanaan dan prosedur yang tepat untuk dapat menghasilkan informasi keuangan yang tepat waktu, lengkap, konsisten, andal dan terukur.
- Mengarahkan kebijakan Sumber Daya Manusia termasuk mengusulkan rekrutmen, promosi, mutasi, pembinaan dan pelatihan melalui Divisi *Human Resources Development*.
- Bertugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, perencanaan dan pengembangan strategi keuangan Perseroan, serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.
- Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan bisnis dengan mendorong kinerja usaha dengan meningkatkan produksi.
- Melakukan tinjauan manajemen secara berkala untuk melihat kinerja pelaksanaan Sistem Manajemen K3 serta memberikan arahan dan peningkatan yang diperlukan secara berkesinambungan.
- Memastikan proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen K3 diterapkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan.
- Bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan oleh pihak ketiga.

- Lead and direct policies and strategies related to business and marketing activities for the long, mid, and short terms.
- Perform work coordination among all divisions that is integrated in a single system and strategy as the essence of all policies.
- Plan marketing research by keeping up with market development, especially similar product of the competitors.
- Perform market analysis opportunities and marketing strategies by considering market trend and the Company's resources.
- Monitor internal control of environmental impact arising from the Company's operational activities.
- Together with the other member of the Board of Directors, have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors as well as to represent the Company in the absence of President Director due to any reason whatsoever, of which impediment need not be proved by third party.

Director

- Lead and direct business strategy and objective, as well as long-term, medium-term and short-term financial target of the Company comprehensively.
- Lead and direct financial activities and the reporting so that the Company's financial system is monitored according to the proper policies and procedures in order to generate timely, complete, consistent, reliable and measured financial information.
- Direct Human Resources policies including proposing recruitment, promotion, transfer, coaching and training through the Human Resources Development Division.
- Responsible for preparing, developing financial policies, plans and strategy development of the Company, as well as coordinating, monitoring, assessing, and reporting its implementation.
- Assist the President Director in directing the required transformation processes to meet challenges in business competition and encourage performance to improve production.
- Ensure that certain procedures necessary in the Occupational Health and Safety Management System are in place and continuously applied.
- Monitor internal control of environmental impact arising from the Company's operational activities.
- Have full responsibility to perform duties for the interests of the Company and to achieve the Company's targets and objectives;
- Together with other member of the Board of Directors, have an authority to act for and on behalf of the Board of Directors as well as to represent the Company if the President Director is not present due to any reason, of which impediment need not be proved by third party.

Frekuensi Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Direksi Perseroan secara rutin dan berkala menggelar rapat, baik secara internal ataupun bersama Dewan Komisaris membicarakan implementasi keputusan yang dibuat dalam rapat sebelumnya, atau karena hal-hal lain yang dianggap penting demi perkembangan Perseroan. Dalam pelaksanaannya, rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang dibacakan di hadapan para peserta rapat, selanjutnya hasil rapat tersebut harus mendapat tanda tangan dari Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk. Kebijakan rapat Direksi ini mengacu pada POJK No. 33/POJK.04/2014 dan Piagam Direksi yakni diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan.

Sepanjang tahun 2020, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali pertemuan dan mengambil keputusan secara sirkuler sebanyak 6 (enam) kali, dengan tingkat kehadiran anggota direksi adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	%
Khoirudin*	Direktur Utama President Director	3	3	100
Widada**	Direktur Utama President Director	11	11	100
Hidefumi Kodama	Wakil Direktur Utama Vice President Director	14	14	100
Ir. Syadaruddin	Direktur Director	14	14	100
Eric Rahardja*	Direktur Director	3	3	100
Deden Ramdhan**	Direktur Director	11	11	100

* Diangkat sebagai anggota Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Oktober 2020
Appointed as members of Board of Directors at Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 20th, 2020

** Mengundurkan diri pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Oktober 2020
Resigned at Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 20th, 2020

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Sepanjang tahun 2020, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Board of Directors' Meeting Attendance

Board of Directors of the Company periodically holds both internal and joint meetings with the Board of Commissioners to discuss the implementation of decision made in the previous meeting, or due to other important matters deemed crucial to the development of the Company. In its implementation, Minutes of Board of Directors Meeting shall be made and read out in the meeting and signed by Meeting Chairman and one of the Directors appointed. This Board of Directors meeting policy refers to FSA Regulation No. 33/POJK.04/2014 and the Board of Directors Charter that stipulates that Board of Directors' meeting must held periodically at least once a month.

Throughout 2020, the Company's Board of Directors has held 14 (fourteen) meetings and made 6 (six) circular decisions. The attendance rate of each member of the Board of Directors is as follows:

Joint Board Meetings

Pursuant to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, joint board meetings are held periodically at least once every 4 (four) months. In 2020, joint board meetings were held 6 (six) times with the following attendance level:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	%
Arie Prabowo Ariotedjo*	Komisaris Utama President Commissioner	4	4	100
Yo Angela Soedjana**	Komisaris Utama President Commissioner	2	2	100
Kenji Tomisawa*	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	4	4	100
Fumitake Uyama**	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	2	2	100
Abdullah Fawzy Siddik	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100
Khoirudin***	Direktur Utama President Director	2	2	100
Widada****	Direktur Utama President Director	4	4	100
Hidefumi Kodama	Wakil Direktur Utama Vice President Director	6	6	100
Ir. Syadaruddin	Direktur Director	6	6	100
Eric Rahardja***	Direktur Director	2	2	100
Deden Ramdhan****	Direktur Director	4	4	100

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Juni 2020
Appointed as members of Board of Commissioners at Annual General Meeting of Shareholders on June 9th, 2020

** Mengundurkan diri pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Juni 2020
Resigned at Annual General Meeting of Shareholders on June 9th, 2020

*** Diangkat sebagai anggota Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Oktober 2020
Appointed as members of Board of Directors at Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 20th, 2020

**** Mengundurkan diri pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Oktober 2020
Resigned at Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 20th, 2020

Penilaian terhadap Kinerja Direksi

Dewan Komisaris berwenang dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi Perseroan sesuai indikator-indikator yang telah ditentukan. Dalam lingkup internal Direksi, Direktur Utama melakukan penilaian terhadap kinerja anggota Direksi lainnya secara individual berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.

Assessment of the Performance of Board of Directors

Board of Commissioners is authorized to assess the performance of the Board of Directors in accordance with the predetermined indicators. In the internal scope of Board of Directors, President Director assesses the performance of other members of the Board of Directors individually based on performance indicator of each duty and responsibility.

// Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Composition Diversity Policy

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perseroan berasal dari beragam latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjawab segala tantangan usaha yang semakin dinamis. Oleh karenanya, penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada pengetahuan, keahlian, pengalaman profesional serta pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan.

The Board of Commissioners and Board of Directors have a diverse background to carry out effective implementation of their duty in addressing business challenges that are increasingly dynamic from time to time. Therefore, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is determined based on the knowledge, skills, professional experience, and education by taking into account the needs and complexity of the Company's conditions.

// Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy for Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan tentang remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 UUP, jumlah remunerasi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup gaji dan tunjangan lainnya, ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS dengan ketentuan kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Untuk tahun buku 2020, jumlah keseluruhan remunerasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebesar AS\$1.516.472 (termasuk pajak penghasilan). Remunerasi tersebut telah disesuaikan dengan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun buku.

Policy regarding remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors of the Company refers to the provision in Article 96 paragraph 1 of UUP, total remuneration for members of Board of Commissioners and Board of Directors, which includes salary and other allowances, is determined based on GMS Resolution on conditions that such GMS authority may be delegated to the Board of Commissioners and by taking into account recommendation from the Nomination and Remuneration Committee.

For the 2020 fiscal year, total remuneration allocated for members of Board of Commissioners and Board of Directors amounted to US\$1,516,472 (including income tax). The remuneration has been adjusted to the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors during the fiscal year.



// Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali

Affiliation between Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority or Controlling Shareholders

Nama Name	Jabatan Posisi	Hubungan Keluarga dengan Organ Perseroan Family Relation with Organs of the Company						Hubungan Keuangan dengan Organ Perseroan Financial relation with Organs of the Company					
		Sebagai Komisaris As Commissioner		Sebagai Direksi As Director		Sebagai Pemegang Saham As Shareholder		Sebagai Komisaris As Commissioner		Sebagai Direksi As Director		Sebagai Pemegang Saham As Shareholder	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Arie Prabowo Ariotedjo	Komisaris Utama President Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Kenji Tomisawa	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Abdullah Fawzy Siddik	Komisaris Independen Independent Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Khoirudin	Direktur Utama President Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hidefumi Kodama	Wakil Direktur Utama Vice President Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ir. Syadaruddin	Direktur Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Eric Rahardja	Direktur Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓

// Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan terhadap sistem dan proses Pelaporan Keuangan, proses audit atas laporan Keuangan Perseroan, evaluasi atas pelaksanaan pengawasan internal (*internal control*) Perseroan, evaluasi atas kinerja Internal Auditor Perseroan, dan pengawasan kinerja teknis dan operasional serta pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Struktur Organisasi

Secara struktur organisasi, Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Dasar Penunjukan

Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 08 September 2020 tentang Perubahan anggota Komite Audit.

Persyaratan Keanggotaan

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Paling sedikit salah seorang anggota harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- f. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen.
- g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.

The Audit Committee was established by and answers to the Board of Commissioners to assist the Board in supervising Financial Reporting system and process, the Company's financial statements audit process, evaluation on the Company's internal control implementation, evaluation on the performance of the Company's Internal Auditor, and technical and operational performance evaluation as well as compliance with other laws and regulations.

Organization Structure

In terms of organization structure, the Audit Committee is independent in performing its duties or in reporting and directly answers to the Board of Commissioner.

Basis of Appointment

The Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Audit Committee was appointed pursuant to Circular Decree of Board of Commissioners dated September 8th, 2020, on the Appointment of the Audit Committee.

Membership Requirement

- a. Possess high integrity, skills, adequate knowledge and experience according to their educational background and able to communicate well.
- b. At least one member must have accounting or financial education background.
- c. Possess adequate knowledge to read and understand financial statements.
- d. Possess adequate knowledge regarding laws and regulations in the capital market and other related regulations.
- e. Not a member of Public Accounting Firm, Legal Consultant Office or other party providing audit service, non-audit service and or other consultation to the Company within the last 6 (six) months prior to appointment by Board of Commissioners.
- f. Not a person authorized and responsible to plan, lead, or control the company's activities within the last 6 (six) months prior to being appointed by Board of Commissioners, except for Independent Commissioner.
- g. Does not own shares directly and indirectly in the Company.

- h. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama perseroan, dan/atau hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- i. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Komposisi Komite Audit

Susunan, komposisi, keahlian, integritas dan kriteria independensi dari Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan Otoritas OJK yang berlaku. Adapun komposisi dan profil Audit adalah sebagai berikut:

Audit Committee's Composition

The formation, composition, skills, integrity and criteria of independency of Audit Committee are in accordance with the prevailing provision and regulation of Bank Indonesia and FSA. The Audit Committee's composition and profile are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pangkatan Legal Basis of Appointment	Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Position	Periode Jabatan Term of Office	Tahun Berakhirnya Jabatan End of Term of Office
Abdullah Fawzy Siddik	Ketua Head	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 08 September 2020 Circular Decree of Board of Commissioners dated September 8 th , 2020	Komisaris Independen Independent Commissioner	2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, tanpa mengesampingkan hak Dewan Komisaris untuk melakukan pemberhentian lebih awal. 2 (two) years 4 (four) months without prejudice to rights of the Board of Commissioners to make early termination.	31 Desember 2022 December 31 st , 2022
Dini Rosdini	Anggota Member	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 08 September 2020 Circular Decree of Board of Commissioners dated September 8 th , 2020	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, tanpa mengesampingkan hak Dewan Komisaris untuk melakukan pemberhentian lebih awal. 2 (two) years 4 (four) months without prejudice to rights of the Board of Commissioners to make early termination.	31 Desember 2022 December 31 st , 2022
Dadan Gunawan	Anggota Member	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 08 September 2020 Circular Decree of Board of Commissioners dated September 8 th , 2020	N/A	2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, tanpa mengesampingkan hak Dewan Komisaris untuk melakukan pemberhentian lebih awal. 2 (two) years 4 (four) months without prejudice to rights of the Board of Commissioners to make early termination.	31 Desember 2022 December 31 st , 2022

Profil Komite Audit

Audit Committee's Profile

Abdullah Fawzy Siddik

Profil sudah disajikan pada bab profil tentang Dewan Komisaris.

His profile is available under the Board of Commissioners' profile segment.

Dini Rosdini

Anggota Komite Audit Audit Committee's Member



Memiliki pengalaman lebih dari 18 tahun di bidang keuangan dan akuntansi. Beliau mendapatkan gelar Doktor di bidang keuangan dan akuntansi dari Universitas Indonesia (2015) serta sertifikasi dalam tata kelola risiko perusahaan (CERG), bersertifikat dalam tata kelola risiko (*risk governance/CRGP*), *charter accountant* (CA), dan bersertifikat komite audit (CACP). Beliau kini tercatat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia (2016-sekarang). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Komite Audit PT Jasa Sarana, Bandung (2014-2016), Komite Audit PT Tugu Pratama Indonesia, Jakarta (2014-2016), dan Sekretaris Dewan Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Jakarta (Januari 2013-Desember 2013).

Has more than 18 years experience in finance and accounting. She holds a doctoral degree in accounting from the University of Indonesia (2015) as well as certification in corporate risk governance (CERG), risk governance (CRGP), chartered accountant (CA), and audit committee practices (CACP). She is currently a member of the Risk Oversight Committee of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia (2016-present). Previously served as Audit Committee of PT Jasa Sarana, Bandung (2014-2016), Audit Committee of PT Tugu Pratama Indonesia, Jakarta (2014-2016), and Secretary of the Board of Commissioners of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Jakarta (January 2013-December 2013).

Dadan Gunawan

Anggota Komite Audit Audit Committee's Member



Memiliki pengalaman lebih dari 22 tahun dalam bidang Management. Meraih gelar Magister Manajemen (*Strategic Management*) Universitas Prasetya Mulya (2016), dan sertifikasi profesi sebagai Certified Internal Auditor (CIA). Saat ini juga merangkap jabatan sebagai *Founder* dan *Chief Executive Officer* PT Veda Praxis (sejak 2005).

Has more than 22 years of experience in Management. Earned his Master of Management (Strategic Management) from Prasetya Mulya University (2016), and holds professional certification as a Certified Internal Auditor (CIA). Concurrently serves as Founder and Chief Executive Officer of PT Veda Praxis (since 2005).

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit merupakan anggota yang profesional dan independen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan. Anggota Komite Audit juga tidak terkait dengan Direksi, Dewan

Audit Committee's Independency

All members of Audit Committee are professional and independent in conducting their duties and responsibilities and do not have affiliation with the Company. Audit Committee members are also not related to Board of Directors, Board of

Komisaris, maupun pemegang saham. Komite Audit berasal dari luar Perseroan yang tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan dengan Perseroan. Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku.

Commissioners or shareholders. Audit Committee is an external party to the Company that does not have interest or personal relation which may later cause negative impact and conflict of interest with the Company. Audit Committee complies with the prevailing laws and regulations in conducting its duties.

Aspek Independensi Independency Aspect	Abdullah Fawzy Siddik	Dini Rosdini	Dadan Gunawan
Tidak Memiliki Hubungan Keuangan dengan Komisaris dan Direksi Does not have Financial Relation with Commissioners and Directors	✓	✓	✓
Tidak Memiliki Hubungan Kepengurusan di Perseroan ataupun di perusahaan aliasi Does not have Management Relation in the Company or other affiliated company	✓	✓	✓
Tidak Memiliki Hubungan Kepemilikan Saham di Perseroan Does not have Share Ownership Relation in the Company	✓	✓	✓
Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan sesama anggota Komite Does not have Family relation with members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, and other members of the Committee	✓	✓	✓
Tidak Memiliki Hubungan Keuangan dengan Komisaris dan Direksi Does not have Financial relation with Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak Menjabat sebagai Pengurus Parpol, Pejabat Pemerintah Daerah Does not serve as a Board of Political Party, Regional Government Official	✓	✓	✓

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Adapun tugas tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi atas laporan keuangan Perseroan berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
- Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari Dewan Komisaris.
- Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
- Menelaah atas lingkup dan kesesuaian audit eksternal, honorarium audit eksternal serta independensi dan objektivitas audit eksternal.
- Melakukan penelaahan atas implementasi dan efektivitas pengendalian internal Perseroan.
- Menelaah tingkat kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Pasar Modal dan peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, seperti melakukan kunjungan ke kantor cabang Perseroan.

Audit Committee's Duties and Responsibilities

In implementing its duties, the Audit Committee refers to Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23rd, 2015, on the Establishment and Work Guidelines of Audit Committee. The duties and responsibilities of Audit Committee are as follows:

- Evaluate the Company's financial statements based on the regulations and the generally accepted accounting principles.
- Provide opinion to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and identifying issues that require attention of the Board of Commissioners.
- Report to the Board of Commissioners on risks that may be faced by the Company and risk management implementation by the Board of Directors.
- Review the scope and conformity of external audit, honorarium for external auditors as well as independency and objectivity of external auditors.
- Review the implementation and effectiveness of the Company's internal control.
- Review the Company's compliance with the Regulations of Capital Market and other regulations associated with the Company's business activities.
- Conduct other duties mandated by the Board of Commissioners, such as conducting a visit to the Company's branch office.

Wewenang

Selain tugas dan tanggung jawab, Komite Audit juga diberikan wewenang khusus untuk mendukung pelaksanaan kerja yang sesuai dengan Piagam Komite Audit. Wewenang tersebut meliputi:

- Anggota Komite Audit wajib mengenal serta memahami peran dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Komite Audit, yang merupakan Pedoman Kerja Komite Audit.
- Komite Audit menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan pasar modal.
- Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- Komite Audit berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris, memiliki hak akses atas informasi yang ada di perseroan dari direksi, internal audit dan semua satuan organisasi Perseroan bila terjadi kasus/indikasi penyimpangan dimana Komite Audit perlu meneliti atau mengklarifikasi kasus-kasus tersebut.
- Komite Audit dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat meminta saran dan bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban Perseroan.

Piagam Komite Audit

Komite Audit Perseroan memiliki Piagam atau Pedoman Kerja dalam membantu tugas Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasannya terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal atas pengelolaan perseroan, dan ketaatan terhadap undang-undang serta peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan terjadinya perubahan susunan Komite Audit pada tanggal 27 November 2017, saat ini Komite Audit sedang dalam proses melakukan pengkinian atas Piagam Komite Audit Perseroan.

Laporan

Komite Audit berkewajiban membuat laporan secara tertulis dalam melaksanakan kerjanya baik terhadap Dewan Komisaris maupun terkait temuan terkait kendala yang dihadapi oleh Perseroan.

- Komite Audit membuat laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- Apabila Komite Audit menemukan hal-hal yang diperkirakan akan mengganggu kegiatan Perseroan dan bersifat material, Komite Audit akan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
- Komite Audit membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

Authority

In addition to duties and responsibilities, Audit Committee also has special authority to support work implementation in accordance with Audit Committee Charter, as follows:

- Audit Committee members are required understand roles and responsibilities pursuant to Audit Committee Charter, which is the Work Guidelines of Audit Committee.
- Audit Committee receives authority and assignment from Board of Commissioners with due observation of regulations related to capital market.
- In performing its duties, the Audit Committee is authorized to access records or information regarding employees, funds, assets and other company resources related to its duty implementation.
- Based on duty form from the Board of Commissioners, Audit Committee is authorized to access information about the Company, including directors, audit internal and every unit of the organization in the event of the occurrence of cases/indication of deviation which require investigation or clarification from Audit Committee.
- With the approval from the Board of Commissioners, the Audit Committee may ask for suggestion and assistance from experts and other professionals at the expense of the Company.

Audit Committee Charter

The Audit Committee is equipped with Audit Committee Charter in assisting duties of Board of Commissioners in running its oversight function, especially in improving the quality of financial statements, internal control effectiveness on the company's management, and compliance with the prevailing laws and regulations. In connection with changes in the Audit Committee composition on November 27th, 2017, the Company's Audit Committee Charter is currently being updated by the Audit Committee.

Report

The Audit Committee is required to prepare a written report in carrying out its duty as mandated by Board of Commissioners or in findings of obstacles faced by the Company.

- Audit Committee prepares report on each special assignment by Board of Commissioners.
- In case Audit Committee finds matters that can potentially cause material damage to the Company's activities, Audit Committee shall report it to Board of Commissioners.
- Audit Committee prepares its Annual Report on activities implementation for the Board of Commissioners.

Rapat Komite Audit

Komite Audit melaksanakan rapat secara berkala baik dengan internal anggota maupun dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Sepanjang 2020, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali rapat dan mengambil keputusan/rekomendasi diluar rapat kepada Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	%
Abdullah Fawzy Siddik	Ketua Head	8	8	100
Dini Rosdini	Anggota Member	8	8	100
Dadan Gunawan*	Anggota Member	5	5	100
Fransiscus Alip**	Anggota Member	3	3	100

* Ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 08 September 2020
Appointed in accordance with the Circular Decree of the Board of Commissioners dated September 8th, 2020

** Sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Audit sejak tanggal 1 Juli 2020
No longer serving as member of the Audit Committee since July 1st, 2020

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2020

Komite Audit dibentuk guna membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan secara profesional dan independen. Komite Audit menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengawasan kepada Dewan Komisaris tersebut. Tak hanya itu, Komite Audit Mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja - EY Indonesia untuk melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pelatihan dan Pengembangan Anggota Komite Audit Tahun 2020

Pada tahun 2020, Perseroan menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan skill, kompetensi dan wawasan seluruh anggota Komite Audit.

Audit Committee's Meetings

Audit Committee holds periodical meetings either internally or jointly with members of the Board of Commissioners and Board of Directors. Throughout 2020, Audit Committee held 8 (eight) meetings and having decision/giving recommendation outside of the meeting to the Board of Commissioners for 4 (four) times. The attendance rate of each member was as follows:

Implementation of Audit Committee's Activities in 2020

The Audit Committee was established to assist the Board of Commissioners in implementing supervisory function over the Company's management in a professional and independent manner. Audit Committee submits periodical report of their duties and responsibilities to assist the performance of supervisory function of Board of Commissioners. In addition, the Audit Committee Provided recommendation to the Board of Commissioners regarding the appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja - EY Indonesia Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the fiscal year ended on December 31st, 2020.

Training and Development of Audit Committee Members in 2020

In 2020, the Company implemented training and competency development programs to improve skills, competency, and knowledge of all members of Audit Committee.

// Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian atas efektifitas nominasi dan remunerasi. Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satu fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris yaitu menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Anggota Komite penunjang Dewan Komisaris, serta kerangka Nominasi dan Remunerasi pejabat Perseroan dan karyawan secara keseluruhan maka dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Diharapkan dengan adanya Komite Nominasi dan Remunerasi ini, proses nominasi dan remunerasi pengurus Perseroan dan organ pelaksana Perseroan lainnya dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perkembangan usaha Perseroan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan stakeholders lainnya terhadap pengelolaan Perseroan.

Dasar Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dan ditunjuk keanggotaannya melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 23 Juni 2020 tentang Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

The Nomination and Remuneration Committee was established to assist the Board of Commissioners in monitoring, supervising, and assessing the effectiveness of nomination and remuneration performance. In accordance with Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies, one of the supervisory functions run by Board of Commissioners is to manage nomination and remuneration function for members of Board of Commissioners, Board of Directors, Committee Members supporting Board of Commissioners, as well as Nomination and Remuneration of the Company's officials and employees at large. Therefore, the Nomination and Remuneration Committee was established to help manage nomination and remuneration process in a transparent and accountable manner according to business development of the Company, which eventually is expected to increase the trust of the shareholders and other stakeholders in the Company's management.

Basis of Establishment of Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee was established and its members were appointed pursuant to Board of Commissioners' Decree dated June 23rd, 2020 on Changes to the Nomination and Remuneration Committee's Composition.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Position	Periode Jabatan Term of Office	Tahun Berakhirnya Jabatan End of Term of Office
Abdullah Fawzy Siddik	Ketua Head	Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 23 Juni 2020 Decree of the Board of Commissioners dated June 23 rd , 2020	Komisaris Independen Independent Commissioner	2 tahun 2 years	9 Juni 2022 June 9 th , 2022
Kenji Tomisawa	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 23 Juni 2020 Decree of the Board of Commissioners dated June 23 rd , 2020	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	2 tahun 2 years	9 Juni 2022 June 9 th , 2022
Arie Prabowo Ariotedjo	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 23 Juni 2020 Decree of the Board of Commissioners dated June 23 rd , 2020	Komisaris Utama President Commissioner	2 tahun 2 years	9 Juni 2022 June 9 th , 2022
Yo Angela Soedjana	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 23 Juni 2020 Decree of the Board of Commissioners dated June 23 rd , 2020		2 tahun 2 years	9 Juni 2022 June 9 th , 2022
RR Assistia Semiawan	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 23 Juni 2020 Decree of the Board of Commissioners dated June 23 rd , 2020		2 tahun 2 years	9 Juni 2022 June 9 th , 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Position	Periode Jabatan Term of Office	Tahun Berakhirnya Jabatan End of Term of Office
Paul Tambunan	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 23 Juni 2020 Decree of the Board of Commissioners dated June 23 rd , 2020		2 tahun 2 years	9 Juni 2022 June 9 th , 2022
Yogo Voluntoro	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 23 Juni 2020 Decree of the Board of Commissioners dated June 23 rd , 2020	Senior Manager Human Resources	2 tahun 2 years	9 Juni 2022 June 9 th , 2022

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Abdullah Fawzy Siddik

Profil sudah disajikan pada bab profil tentang Dewan Komisaris.

Kenji Tomisawa

Profil sudah disajikan pada bab profil tentang Dewan Komisaris.

Arie Prabowo Ariotedjo

Profil sudah disajikan pada bab profil tentang Direksi.

Profile of Nomination and Remuneration Committee

Abdullah Fawzy Siddik

His profile is available under the Board of Commissioners' profile segment.

Kenji Tomisawa

His profile is available under the Board of Commissioners' profile segment.

Arie Prabowo Ariotedjo

His profile is available under the Board of Commissioners' profile segment.

Yo Angela Soedjana

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Member



Sosok wanita profesional yang kaya pengalaman di bidangnya. Saat ini juga menjabat sebagai *Chief HR & Services Officer* di PT Baramulti Sugih Sentosa sejak 1 Desember 2020 dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan (2016-2020). Direktur PT Baradinamika Mudasukkes (2014-2016), Direktur Perseroan (2011-2016), General Manager PT Hasil Bumi Kalimantan (2008-2010), serta Akuntan di Mondial Orient Limited (1992-2005).

She is a professional with extensive experience in her field of expertise. Concurrently serves as Chief HR & Services Officer of PT Baramulti Sugih Sentosa since December 1st, 2020, and previously served as President Commissioner of the Company (2016-2020), Director of PT Baradinamika Mudasukkes (2014-2016), Director of the Company (2011-2016), General Manager of PT Hasil Bumi Kalimantan (2008-2010), and Accountant at Mondial Orient Limited (1992-2005).

RR Assistia Semiawan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Member



Seorang profesional yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang energi. Mendapatkan gelar Master Ilmu Lingkungan dari Murdoch University, Perth, Australia (1995) setelah sebelumnya menempuh pendidikan di Indiana University, Amerika Serikat (1989) dan mendapatkan gelar Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung (1983). Bergabung bersama Grup Baramulti Sukses Sarana pada 2015 dan sejak 2016 dipercaya menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia. Saat ini juga menjabat sebagai Penasihat sektor swasta untuk pengembangan energi terbarukan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Haleyora Power (2013-2016) serta bergabung bersama PLN sejak tahun 1984 hingga 2014.

A professional with more than 30 years of experience in the energy field. Earned her Master of Environmental Science degree from Murdoch University, Perth, Australia (1995) after previously studied at Indiana University, United States (1989) and earned her Bachelor's degree in Geological Engineering from Bandung Technological Institute (1983). Joined Baramulti Sukses Sarana Group in 2015, and since 2016 has been serving as Head of the Human Resources Division. Concurrently serves as private sector Advisor for renewable energy development. Previously served as Commissioner of PT Haleyora Power (2013-2016) and was with PLN from 1984 until 2014.

Paul Tambunan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Member



Seorang profesional dengan pengalaman lebih dari 24 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Science in Aerospace Engineering* dari TU Delft, Belanda (1992); Gelar *Master of Science in Aeronautical Engineering* dari TU Delft, Belanda (1995); dan gelar *Master of Business Administration* dari IPMI Jakarta/Monash University Australia (2001). Sebelumnya menjabat sebagai *Lead Engineer* di PT Dirgantara Indonesia (1995-1998), *Engineering Manager* di PT Devatech Indonesia (1998-2000), *Manager of Corporate Consulting and Government Advisory* di Grant Thornton Indonesia/Moores Rowland Indonesia (2001-2005), *Senior Manager Performance Improvement Unit* di PricewaterhouseCoopers Indonesia (2005-2012), dan *Direktur Operasi* PT Citra Putra Mandiri (2012-2013). Saat ini juga menjabat sebagai *Project Leader and Organisation and Human Capital Specialist* di ADB (sejak 2014), dan *Senior Human Capital and Institutional Transformation Consultant* di Bank Dunia (sejak 2013).

A professional with more than 24 years of experience. Obtained his Bachelor of Science degree in Aerospace Engineering from TU Delft, the Netherlands (1992); Master of Science degree in Aeronautical Engineering from TU Delft, the Netherlands (1995); and Master of Business Administration degree from IPMI Jakarta/Monash University Australia (2001). Previously served as Lead Engineer at PT Dirgantara Indonesia (1995-1998), Engineering Manager at PT Devatech Indonesia (1998-2000), Manager of Corporate Consulting and Government Advisory at Grant Thornton Indonesia/Moores Rowland Indonesia (2001-2005), Senior Manager in Performance Improvement Unit at PricewaterhouseCoopers Indonesia (2005-2012), and Director of Operations of PT Citra Putra Mandiri (2012-2013). Concurrently serves as Project Leader and Organization and Human Capital Specialist at ADB (since 2014), and Senior Human Capital and Institutional Transformation Consultant at World Bank (since 2013).

Yogo Voluntoro

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Member

Seorang profesional dengan pengalaman lebih dari 24 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Psikologi Industri dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (1996). Sebelumnya menjabat sebagai *Area HR Manager* PT Trakindo Utama (2008-2011), *Government Relation Head* PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (2013-2018), dan *Human Capital Head* SBU Agribusiness PT Dharma Satya Nusantara Group Tbk (2018-2019). Saat ini juga menjabat sebagai *Senior Manager Human Resources* Perseroan (sejak 2020).

A professional with more than 24 years of experience. Obtained his Bachelor of Industrial Psychology from Faculty of Psychology of Gadjah Mada University (1996). Previously served as *Area HR Manager* at PT Trakindo Utama (2008-2011), *Government Relation Head* at PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (2013-2018), and *Human Capital Head* at SBU Agribusiness of PT Dharma Satya Nusantara Group Tbk (2018-2019). Concurrently serves as *Senior Manager Human Resources* of the Company (since 2020).

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan anggota yang profesional dan tidak memiliki hubungan dengan Perseroan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, dan tanggung jawabnya. Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas. Komite Nominasi dan Remunerasi juga tidak terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada ketentuan/hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Perseroan.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi juga mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, objektivitas dan etika yang tinggi.
2. Mempunyai pengetahuan yang memadai termasuk ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.
3. Paling sedikit salah satu dari anggota komite harus memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman kerja di bidang nominasi, remunerasi karyawan, atau Human Resource Development.
4. Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Konsultan Hukum, Kantor Konsultan Sumber Daya Manusia, Kantor Konsultan Business Development, atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa nonassurance, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat sebagai anggota komite oleh Dewan Komisaris.

Nomination and Remuneration Committee's Independency

All members of the Nomination and Remuneration Committee are professional and do not have business relations with the Company to maintain the independency in the implementation of duties and responsibilities. The Nomination and Remuneration Committee has met integrity, expertise, experience and integrity criteria. The Nomination and Remuneration Committee is also not related to the Board of Directors, Board of Commissioners, or shareholders. In implementing its duties, the Nomination and Remuneration Committee complies with the provision of laws and regulations applicable in the Company.

The independency of Nomination and Remuneration Committee includes the following:

1. Possess high integrity, objectivity and ethics.
2. Possess adequate knowledge including prevailing provision and laws and regulations.
3. At least one of the committee members must have educational background or work experience in the field of employee nomination and remuneration, or Human Resource Department.
4. Able to act independently to implement duty professionally without conflict of interest and influence/pressure from other party.
5. Willing to improve competency continuously through education and training;
6. Not a person from Legal Consultant Firm, Human Resources Consultant Firm, Business Development Consultant Firm, or other party providing assurance service, non-assurance service, and/or other consultancy service to the Company within the last 6 (six) months prior to the appointment as committee member by Board of Commissioners.

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Table of Nomination and Remuneration Committee's
Independency

Aspek Independensi Independency Aspect	Abdullah Fawzy Siddik	Kenji Tomisawa	Arie Prabowo Ariotedjo	Yo Angela Soedjana	RR Assistia Semiawan	Paul Tambunan	Yogo Voluntoro
Tidak Memiliki Hubungan Keuangan dengan Komisaris dan Direksi Does not have Financial Relation with Commissioners and Directors	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak Memiliki Hubungan Kepengurusan di Perseroan ataupun di perusahaan afiliasi Does not have Management Relation in the Company or other affiliated company	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak Memiliki Hubungan Kepemilikan Saham di Perseroan Does not have Share Ownership Relation in the Company	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan sesama anggota Komite Does not have Family relation with members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, and other members of the Committee	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak Memiliki Hubungan Keuangan dengan Komisaris dan Direksi Does not have Financial relation with Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak Menjabat sebagai Pengurus Parpol, Pejabat Pemerintah Daerah Does not serve as a Board of Political Party, Regional Government Official	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan dan kriteria nominasi, kebijakan evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

- Provide recommendation to the Board of Commissioners on the composition of members of the Boards of Commissioners and Board of Directors, nomination policy and criteria, as well as evaluation policy of the performance of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Boards of Directors and/or Board of Commissioners based on the established parameter as the evaluation material.
- Provide recommendation to the Board of Commissioners on capacity development program of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
- Propose qualified candidates as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to GMS.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan agenda kegiatan rapat guna membahas nominasi dan remunerasi Perseroan. Dalam pengambilan keputusan dalam rapat yang diselenggarakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan secara musyawarah dan mufakat, serta pengambilan suara terbanyak bila tidak mendapatkan mufakat sedangkan hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan secara baik oleh Sekretaris.

Sepanjang 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali rapat termasuk memberikan rekomendasi secara sirkuler kepada Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	%
Abdullah Fawzy Siddik	Ketua Head	7	7	100
Kenji Tomisawa	Anggota Member	7	7	100
Arie Prabowo Ariotedjo	Anggota Member	7	7	100
Yo Angela Soedjana	Anggota Member	7	7	100
RR Assistia Semiawan	Anggota Member	7	7	100
Paul Tambunan	Anggota Member	7	7	100
Yogo Voluntoro	Anggota Member	7	7	100

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pemberian remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perseroan. Kajian dalam penetapan remunerasi mempertimbangkan aspek kinerja dan kewajaran dengan Perseroan. Hasil kajian tersebut sebagai bahan usulan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Komisaris Utama.

Nomination and Remuneration Committee's Meetings

The Nomination and Remuneration Committee holds meetings to discuss nomination and remuneration of the Company. Meeting resolutions are made by deliberation toward consensus by the Nomination and Remuneration Committee or by majority votes if consensus is not reached. The meeting decisions shall be recorded in a minutes of meeting signed by all members present and documented properly by the Secretary.

Throughout 2020, the Nomination and Remuneration Committee held 7 (seven) meetings including to provide 2 (two) circular recommendations to the Board of Commissioners. The attendance rate of each member is as follows:

Remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors

Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners refers to the decision of Shareholders as stipulated in the General Meeting of Shareholders (GMS) by taking into account review results conducted by the Company. Review for remuneration stipulation considers the performance and fairness aspect with the company. The result of review will be incorporated in a proposal prepared by the Board of Commissioners to be submitted to the Shareholders. Pursuant to Article 96 paragraph (1) of Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies, the amount of salary and allowance for Board of Directors will be determined based on GMS resolution. The authority is assigned to the President Commissioner.

// Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Dalam rangka membantu tugas Direksi, Perseroan menunjuk Sekretaris Perusahaan guna membangun dan memelihara hubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal, yaitu kepada regulator, Pasar Modal, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang sejalan dengan semangat keterbukaan informasi Perseroan. Sekretaris Perusahaan juga harus dapat memastikan penyampaian informasi terkait dengan Perseroan secara akurat, transparan dan tepat waktu kepada instansi yang terkait, Pemegang Saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Dasar Hukum Penunjukan

Penunjukan dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 18 September 2017 yang menunjuk Chandra Lautan sebagai Sekretaris Perusahaan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Penunjukan ini telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Profil Sekretaris Perusahaan

In order to assist the Board of Directors' duties, the Company appoints Corporate Secretary to build and maintain relations with internal and external parties, namely the regulators, Capital Market, shareholders and other stakeholders, in line with the spirit of transparency in the Company. The Corporate Secretary must also ensure that the Company's information is presented in an accurate, transparent, and timely manner to related institution, Shareholders or other stakeholders. Corporate Secretary was established pursuant to the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Listed or Public Companies.

Legal Basis of Appointment

The Corporate Secretary was appointed pursuant to Appointment Letter dated September 18th, 2017, which appointed Chandra Lautan as Corporate Secretary of PT Mitrabara Adiperdana Tbk. Corporate Secretary is appointed and dismissed pursuant to decision of Board of Directors. This appointment is in accordance with the prevailing laws and regulations of Financial Services Authority (POJK) Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated December 8th, 2014 on Corporate Secretary of Listed or Public Companies.

Corporate Secretary's Profile

Chandra Lautan

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary



Seorang profesional yang berpengalaman di bidang legal dan hukum. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung, pada tahun 2004 dan memegang izin sebagai Advokat dari PERADI. Sebelumnya menjabat sebagai Legal Advisor Perseroan (2012-2014). Sebelum bergabung dengan Perseroan, pernah menjabat sebagai Legal Development Division Head di Kawan Lama Retail Group (2009- 2012), Associate di Brigitta I Rahayoe & Partners Law Office (2007-2009), dan Legal Officer di PT Tarunacipta Kencana (2006-2007).

A professional experienced in the legal and law fields. Earned his Bachelor of Laws degree from Padjajaran University, Bandung, in 2004 and holds a license as an Advocate from PERADI. Previously served as and Legal Advisor of the Company (2012-2014). Before joining the Company, served as Legal Development Division Head at Kawan Lama Retail Group (2009-2012), Associate at Brigitta I Rahayoe & Partners Law Office (2007-2009), and Legal Officer at PT Tarunacipta Kencana (2006-2007).

Tugas Sekretaris Perusahaan

Adapun tugas Sekretaris Perusahaan meliputi:

- Mengkoordinasikan pelaksanaan RUPS dan aktivitas Perseroan lainnya.
- Mengikuti rapat-rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta membuat berita acara rapat-rapat tersebut.
- Mengikuti perkembangan regulasi khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dengan mengikuti berbagai seminar, workshop dan pertemuan yang diadakan oleh OJK, BEI, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Asosiasi Emiten Indonesia serta lembaga lainnya.
- Mempersiapkan Laporan Tahunan dan publikasi laporan keuangan di surat kabar.
- Menyampaikan laporan keuangan berkala kepada regulator.
- Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
- Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, seperti Pemegang Saham, media massa, OJK, BEI, dan otoritas Pasar Modal lainnya.
- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh Perseroan.
- Memastikan bahwa laporan-laporan yang wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada instansi-instansi yang berwenang dilakukan secara benar dan tepat waktu.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Dalam struktur organisasi, Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Dengan adanya Sekretaris Perusahaan, diharapkan dapat membantu Direksi dalam menjalankan pengelolaan informasi Perusahaan dan memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Pelatihan dan Pendidikan Sekretaris Perusahaan 2020

Untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam menjalankan fungsi, Sekretaris Perusahaan secara konsisten mengikuti pelatihan dan program pengembangan kemampuan.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2020

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan keterbukaan informasi atas kewajiban Perseroan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

Corporate Secretary's Duties

The duties of Corporate Secretary are as follows:

- Coordinate the implementation of GMS and other activities of the Company.
- Participate in the meeting of Board of Directors and Board of Commissioners and preparing minutes of meetings.
- Keep abreast of the development of regulation, particularly those applicable in the Capital Market, and participating in various seminars, workshops and meeting conducted by OJK, IDX, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and Indonesian Issuers Association, as well as other institutions.
- Prepare the Company's Annual Report and publication of financial statements in the newspapers.
- Submit financial statements to the regulators periodically.
- Provide input to the Board of Directors in order to maintain the Company's compliance with the Capital Market regulations, Law of Limited Liability Companies, and other rules.
- Act as the liaison or contact person between the Company and other third parties, such as the Shareholders, mass media, OJK, IDX, and other Capital Market authorities.
- Coordinate activities conducted by the Company.
- Ensure that all reports submitted by the Company to all authorities are presented properly and punctually.

Organization Structure of Corporate Secretary

In terms of the organization structure, the Corporate Secretary answers to the President Director. Corporate Secretary is expected to assist Board of Directors in running the Company's information management and ensure that the Company complies with the regulation on transparency requirements in line with the Good Corporate Governance principles.

Training and Education of Corporate Secretary in 2020

To improve his ability and knowledge in performing his function, Corporate Secretary consistently participated in training and skill development programs.

Implementation of Corporate Secretary's Duty in 2020

Pursuant to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 35/POJK.04/2014 dated December 8th, 2014, on Corporate Secretary of Listed or Public Companies, the Corporate Secretary performed the following duties in 2020:

- a. Performed information disclosure on the Company's obligation according to capital market laws and regulations.

- b. Mengatur pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit.
- c. Mengatur persiapan dan pengurusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2020 (termasuk pembagian dividen, dan pengumuman dan keterbukaan informasi lainnya).
- d. Mempersiapkan laporan tahunan.
- e. Sebagai perantara antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, media massa, serta para pemangku kepentingan lainnya.
- f. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan kewajiban Perseroan dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Akses Data dan Informasi Perseroan

Sebagai komitmen dalam menerapkan prinsip keterbukaan, Perseroan menyediakan berbagai sarana dan media untuk menjamin pemenuhan dan ketersediaan informasi bagi para pemangku kepentingan, baik mengenai keuangan maupun tentang operasional Perusahaan yang dapat diakses melalui alamat sebagai berikut:

Grha Baramulti

Komplek Harmoni Plaza Blok A-8
Jl. Suryopranoto No. 2.
Jakarta Pusat 10130. Indonesia
Telepon : +62 21 6385 6211
Faksimili : +62 21 6385 2326
Email : corsec@mitrabaraadiperdana.co.id

Selain itu, informasi Perseroan juga dapat diakses pada situs BEI dengan kode saham MBAP, dan website Perusahaan di www.mitrabaraadiperdana.co.id.

- b. Organized routine meeting of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Audit Committee.
- c. Managed preparations required to convene General Meeting of Shareholders in 2020 (including distribution of dividend, notice, and other information disclosure activities).
- d. Prepared the annual report.
- e. Acted as a liaison between the Company and Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, mass media, and other stakeholders.
- f. Provided input to the Company's Board of Directors in relation to the Company's obligation in complying with the applicable laws and regulations in the capital market.

Access to the Company's Data and Information

As part of its commitment to implementing transparency principle, the Company provides various facilities and media to ensure the fulfillment and availability of information for stakeholders, either regarding financial or operations of the Company, through the following address:

Grha Baramulti

Komp. Harmoni Plaza Block A-8
Jl. Suryopranoto No. 2
Central Jakarta 10130, Indonesia
Phone : +62 21 6385 6211
Fax : +62 21 6385 2326
Email : corsec@mitrabaraadiperdana.co.id

In addition, the Company's Information may also be accessed on IDX sites with share ticker MBAP, as well as the Company's website at www.mitrabaraadiperdana.co.id.



// Divisi Audit Internal

Internal Audit Division

Dalam rangka memastikan kinerja Perseroan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Direksi Perseroan membentuk Divisi Audit Internal. Dengan adanya Divisi Audit Internal diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui pendekatan sistematis sehingga Manajemen dapat mencapai tujuan dan sasarnya. Peran Divisi Audit Internal untuk membantu Manajemen adalah memberikan kepastian atas pengendalian internal, tata kelola dengan praktik yang baik, dan efektivitas manajemen resiko, serta memberikan saran perbaikan atas proses bisnis yang ada di Perusahaan. Dalam rangka mengelola Perseroan secara efektif dan efisien serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, Perseroan telah menerapkan suatu Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Penerapan SPI diawasi oleh Audit Internal yang berfungsi untuk mengevaluasi, mengkaji, menganalisis dan menguji sistem pengendalian internal serta melaporkan temuannya kepada Komite Audit secara berkala. Divisi Audit Internal terbebas dari pengaruh berbagai pihak, termasuk dalam hal pemilihan objek, metodologi, teknik, pendekatan dan cara, lingkup, prosedur, strategi, frekuensi, waktu, dan/atau isi laporan audit. Divisi Audit Internal juga melakukan evaluasi secara periodik ke seluruh fungsi dan unit kerja di Perseroan.

Audit Internal selain bertujuan membantu menyempurnakan dan memperkuat pengendalian internal Perseroan, saat ini juga berperan sebagai *Strategic Business Partner* untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perseroan. Cakupan kegiatan audit yang dilakukan meliputi evaluasi menyeluruh baik kegiatan operasional Perseroan maupun proses produksi. Penetapan kunjungan audit dan fokus pemeriksaan audit dilakukan berdasarkan *Risk Based Audit*.

Struktur dan Kedudukan Audit Internal

Divisi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bekerja erat dengan Komite Audit. Divisi Audit Internal dipimpin oleh Manajer Audit Internal dan didukung oleh auditor-auditor yang telah berpengalaman di industri sejenis dan bekerja secara objektif dan independen. Sementara, untuk menjaga kesinambungan pengetahuan dan keahlian di bidang pemeriksaan, karyawan Divisi Audit Internal dibekali dengan kegiatan pelatihan yang memadai. Daniel Eka Chandra ditunjuk sebagai Manajer Audit Internal sejak tanggal 28 Mei 2020, menggantikan Andi Indratno.

To ensure that the Company's performance runs well according to its target, the Company's Board of Directors has established Internal Audit Division. The establishment of Internal Audit Division is expected to provide added value for the Company through systematic approach to help the Management achieve its target and purposes. The Internal Audit Division's role is to assist the Management in providing assurance over internal control, good governance practices, and risk management effectiveness, as well as suggestion of improvement on business process in the Company. To effectively and efficiently manage the Company as a basis of healthy and safe operational activities, the Company has implemented Internal Control System (SPI).

SPI implementation is monitored by Internal Audit that is responsible for evaluating, reviewing, analyzing, and testing internal control system as well as report its finding to Audit Committee periodically. The Internal Audit Division is not influenced by any party, including in choosing object, methodology, technique, approach and means, scope, procedure, strategy, frequency, time and/or audit report content. Internal Audit Division also conducts evaluation periodically on all functions and work units in the Company.

Aside from supporting the Company to improve and strengthen internal control of the Company, Internal Audit also serves as a Strategic Business Partner in order to provide added value and improve operations efficiency of the Company. The scope of audit activities conducted includes thorough evaluation on both operational and production processes. Audit visit and focus are determined based on Risk Based Audit.

Internal Audit's Structure and Position

The Internal Audit Division is directly responsible to the President Director and works closely with the Audit Committee. The Internal Audit Division is led by Internal Audit Manager and supported by auditors having extensive experience in similar industry that work independently and objectively. Meanwhile, to ensure the Internal Audit Division keeps up to date with the latest knowledge and expertise in audit, employees of Internal Audit Division are equipped with proper training activities. The Company has appointed Daniel Eka Chandra as Internal Audit Manager since May 28th, 2020, replacing Andi Indratno.

Profil Manajer Audit Internal

Internal Audit Manager's Profile

Daniel Eka Chandra

Manajer Audit Internal Internal Audit Manager



Daniel Eka Chandra memiliki pengalaman profesional di bidang Audit Internal selama lebih dari 18 tahun. Kemampuan beliau ditunjang dengan pengalaman kerja di sejumlah perusahaan dan firma terkemuka yaitu PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, PT Adaro Energy Tbk, PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk, PT Mitra Integrasi Informatika, dan PT Allbrite Investment. Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Soegijapranata, dan merupakan anggota Institute of Internal Auditors (IIA).

Daniel Eka Chandra has more than 18 years of professional experience in the fields of Internal Audit. His extensive capabilities are supported by work experience in a number of leading companies and firms namely PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, PT Adaro Energy Tbk, PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk, PT Mitra Integrasi Informatika, and PT Allbrite Investment. He holds a Bachelor Degree in Accounting from Soegijapranata Catholic University, and is a member of the Institute of Internal Auditors (IIA).

Piagam Divisi Audit Internal

Dalam pelaksanaan kerjanya, Divisi Audit Internal Perseroan mengacu pada Piagam Komite atau Pedoman Kerja Divisi Audit Internal. Piagam atau Pedoman Kerja tersebut berisi tata laksana tugas, tanggung jawab serta wewenang yang melekat pada seluruh anggota Divisi Audit Internal.

Internal Audit Division Charter

In implementing its duties, the Company's Internal Audit Division refers to Internal Audit Charter or Work Guidelines. The Internal Audit Charter contains procedures, duties, responsibilities and authority of all members of Internal Audit Division.

Tugas dan Tanggung Jawab

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian ekonomi atas efisiensi dari penggunaan sumber daya Perseroan;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Duties and Responsibilities

- Prepare and execute the annual Internal Audit plan;
- Test and evaluate the implementation of internal control and risk management system according to the company's policy;
- Audit and assess the efficiency of Company's use of resource against economic value;
- Provide constructive input and objective information on audited activities at all management levels;
- Prepare audit result report and submit such report to President Director and Board of Commissioners;
- Monitor, analyze, and report follow-up of corrective action that has been suggested;
- Cooperate with Audit Committee;
- Develop program to evaluate the quality of internal audit activities conducted; and
- Conduct special audit if needed.

Pelatihan dan Pengembangan Divisi Audit Internal Tahun 2020

Pada tahun 2020, Divisi Audit Internal tidak mengikuti program pengembangan kompetensi.

Pelaksanaan Audit 2020

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Internal Audit bekerja berdasarkan mekanisme kerja yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Audit Internal mengikuti Rencana Kerja Audit Tahunan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Utama. Rencana Kerja Audit Tahunan tersebut telah dirancang untuk mewakili area audit yang penting dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan.

Selama tahun 2020 Divisi Internal Audit telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan pemeriksaan atas hal-hal sebagai berikut:
 - Penggunaan bahan bakar
 - Kegiatan pengadaan
 - Kegiatan inventarisasi
 - Reklamasi

Manajemen telah berkomitmen untuk menindaklanjuti saran perbaikan atas pengendalian dan proses usaha Perseroan.
- Mengadakan rapat dengan Direksi, Manajemen, dan Komite Audit dalam rangka melaporkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Manajemen.
- Mengadakan rapat dengan Direksi dan Komite Audit dalam rangka melakukan kajian atas kinerja Audit Internal.
- Penugasan khusus lainnya dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas Audit Internal.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses sistematis yang dibentuk oleh Direksi dan jajaran Manajemen untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Perseroan dalam hal sebagai berikut:

- Kegiatan operasi Perseroan berjalan secara efektif dan efisien.
- Pelaporan keuangan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.
- Kepatuhan terhadap Peraturan dan Hukum yang berlaku.
- Menjaga aset Perseroan.

Training and Development of Internal Audit Division in 2020

In 2020, the Internal Audit Division did not participate in any competency development programs.

2020 Audit Implementation

In executing its duties, Internal Audit Division works based on work mechanism that includes planning, implementation, reporting, and monitoring of follow-up action.

In performing its duties, the Internal Audit Division follows the Annual Audit Work Plan established and approved by the President Director. The Annual Audit Work Plan has been designed to represent an important audit area by taking into account the risks that may affect the achievement of the Company's targets and objectives.

Throughout 2020, Internal Audit Division has undertaken the following activities:

- Audited the following matters:
 - Fuel used
 - Procurement activities
 - Inventories activities
 - Reclamation

The Management was committed to following up on suggestions for improvements to the Company's control and business processes.
- Held meetings with the Board of Directors, the Management, and the Audit Committee in order to report the results of the audit and follow-up actions taken by the Management.
- Held meetings with the Board of Directors and the Audit Committee to review of the performance of Internal Audit.
- Carried out other special assignments while maintaining the independence and objectivity of Internal Audit.

Internal Control System

The Internal Control System is a systematic process established by the Board of Directors and the Management to provide reasonable assurance in the achievement of the Company's objectives in terms of the following matters:

- The Company's effective and efficient operating activities.
- Reliable financial reporting for decision making.
- Compliance with applicable regulations and laws.
- The protection of the Company's assets.

Kerangka Kerja Pengendalian Internal

Audit Internal terlibat secara ekstensif dalam evaluasi efektivitas pengendalian internal Perseroan. Evaluasi yang dilakukan meliputi efektivitas atas komponen-komponen pengendalian internal yang ditetapkan oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), yang terdiri dari:

- Lingkungan Pengendalian: integritas, perilaku Perseroan dan personelnnya, filosofi dan model bisnis operasi Perseroan, proses pengendalian atas delegasi wewenang dan tanggung jawab, kompetensi personel, pengelolaan dan pengembangan karyawan, dan pelaksanaan atas arahan dari Direksi.
- Penilaian Risiko: Perseroan telah membentuk Unit Manajemen Risiko untuk memastikan pengelolaan risiko telah berjalan sesuai dengan prioritas dan perhatian Direksi dan Manajemen.
- Aktivitas Pengendalian: Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk menjalankan operasi Perseroan dan mencapai tujuannya sesuai dengan arahan Direksi. Proses verifikasi, persetujuan, otorisasi, dan pemisahan fungsi telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
- Informasi dan Komunikasi: Informasi material dapat dengan segera diketahui dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak relevan secara bertanggung jawab, dapat diandalkan, dan sesuai dengan kebijakan Perseroan dengan tetap mematuhi peraturan dan hukum berlaku.
- Pemantauan: Pengendalian internal dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kualitasnya dapat terjaga secara berkesinambungan.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Audit Internal memiliki peran penting dalam melakukan pengujian dan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal Perseroan melalui pendekatan pemeriksaan yang sistematis dan memberikan saran perbaikan. Evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal telah dimasukkan dalam program kerja Audit Internal. Tak hanya itu, Audit Internal tetap berkomitmen menjaga objektivitas dan independensi dalam menjalankan tugasnya.

Divisi Audit Internal telah melakukan pemeriksaan atas pengendalian keuangan dan operasional Perseroan. Manajemen Perseroan pun telah berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal dengan memperbaiki sistem pengendalian yang ada agar dapat efektif mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku.

Internal Control Framework

Internal Audit is extensively involved in the evaluation of the effectiveness of the Company's internal controls. The evaluation includes the effectiveness of the internal control components established by the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), which consists of the following:

- Control Environment: integrity, the behavior of the Company and its personnel, the Company's philosophy and operating style, the control process over the assignment of authority and responsibility, personnel's competency, employee management and development, and implementation of directives from the Board of Directors.
- Risk Assessment: The Company had established Risk Management Unit to ensure that risk management is implemented in accordance with the Board Directors' and the Management's priorities and concerns.
- Control Activities: Policies and procedures established to carry out the Company's operations and achieve the Company's objectives in accordance with the directive from the Board of Directors. The processes of verification, approval, authorization, and separation of functions have been implemented in accordance with the predetermined policy.
- Information and Communication: Material information can be immediately known and communicated to relevant parties in a responsible and reliable manner in accordance with the Company's policy pursuant to the applicable laws and regulations.
- Monitoring: Internal control is regularly monitored to ensure that its effectiveness and quality can be maintained on an ongoing basis.

Review of the Internal Control System's Effectiveness

Internal Audit plays an important role in testing and evaluating the effectiveness of the Company's internal controls through a systematic audit approach and providing suggestions for improvements. To this end, the evaluation of the internal control system's effectiveness has been included in the Internal Audit's work program. In addition, Internal Audit remains committed to maintaining objectivity and independence in the implementation of its duties.

The Internal Audit Division had audited the Company's financial and operational control. Likewise, the Company's management is committed to following up on the Division's findings by improving the existing internal control system in order to effectively comply with applicable regulations and procedures.

// Divisi Manajemen Risiko

Risk Management Division

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan sangat menyadari akan adanya sejumlah risiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya sehari-hari, dan merupakan kebijakan dari Perseroan untuk menerapkan strategi pengendalian risiko-risiko tersebut secara cermat.

Untuk itu, Perseroan telah membentuk Divisi Manajemen Risiko untuk mengelola dan mengimplementasikan proses manajemen risiko di Perseroan. Divisi Manajemen Risiko bertugas untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menentukan prioritas risiko serta mengalokasikan sumber daya secara terkoordinasi dan efektif untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak negatif terhadap usaha Perseroan.

Profil Kepala Divisi Manajemen Risiko

In running its business, the Company is keenly aware of several risks that will be encountered in its daily operations, and it is the Company's policy to prudently implement risk control strategies.

To that end, the Company has established Risk & System Management Division to manage and implement its risk management process. The Division identifies, evaluates, and prioritizes risks and subsequently coordinates effective allocation of resources to minimize, monitor, and control the probability or adverse impact on the Company's business.

Risk & System Management Division Head's Profile

Budhi Pribadi Ishak

Kepala Divisi Risk & System Management | Risk & System Management Division Head's



Mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA) dengan konsentrasi pada Financial Mangement dari University of Central Oklahoma, Edmond, OK, USA pada tahun 1995. Beliau bergabung dengan Baramulti Group pada tahun 2007 sebagai Financial Controller untuk Sumatra Operation. Kemudian beliau bertugas sebagai Direktur Keuangan pada PT Muara Alam Sejahtera (2008 - 2012), dan sejak 2013, beliau bergabung dengan PT Mitrabara Adperdana Tbk. Pada tahun 2018 beliau menyelesaikan training ISO 31000:2018 Risk Management Principles and Guidelines dan mendapatkan gelar *Certified Risk Management Professional* (CRMP) pada tahun 2020.

Obtained his Master of Business Administration (MBA) in Financial Management degree from the University of Central Oklahoma, Edmond, OK, USA in 1995. He joined Baramulti Group in 2007 as Financial Controller for Sumatra Operation. He then served as Finance Director of PT Muara Alam Sejahtera (2008-2012), and joined PT Mitrabara Adperdana Tbk in 2013. In 2018 he completed the ISO 31000:2018 Risk Management Principles and Guidelines training and obtained his Certified Risk Management Professional (CRMP) certification in 2020.

Sistem Manajemen Risiko

Perseroan memandang pentingnya untuk melakukan Manajemen Risiko untuk menjaga dan melindungi Perseroan dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Melalui penerapan manajemen risiko yang baik tentunya akan mendukung kinerja Perseroan sehingga manajemen risiko menjadi faktor penting bagi Perseroan dalam aktivitas kegiatan usahanya. Tujuan utama penerapan manajemen risiko adalah menjaga dan melindungi Perseroan dari risiko-risiko yang mungkin terjadi sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan Perseroan. Perseroan mengadopsi model pertahanan tiga lapis (*three lines of defense*) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungannya, dimana pertahanan pertama dalam penanganan risiko adalah pemilik proses (*process owner*), dalam hal ini adalah tiap-tiap Departemen di Perseroan. Sedangkan pertahanan kedua adalah fungsi manajemen risiko yang berada di ranah Divisi Manajemen Risiko, dan pertahanan ketiga adalah fungsi independen yang menjadi tugas Divisi Internal Audit. Perseroan mewajibkan penerapan manajemen risiko yang menyeluruh sehingga bermanfaat bagi Perseroan dan pemangku kepentingan. Dalam penerapannya, Divisi Manajemen Risiko dibantu oleh personil yang bertanggung jawab atas aktivitas manajemen risiko pada tiap Departemen yang disebut sebagai Risk Champion.

Struktur dan Kedudukan Divisi Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bekerja dengan Komite Pemantau Risiko yang telah dibentuk Perseroan. Divisi Manajemen Risiko dipimpin oleh *Risk & System Management* General Manager dan didukung oleh tim manajemen risiko yang telah berpengalaman di industri sejenis dan bekerja secara objektif dan independen. Sementara, untuk menjaga kesinambungan pengetahuan dan keahlian di bidangnya, karyawan Divisi Manajemen Risiko dibekali dengan kegiatan pelatihan yang memadai. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tertanggal No:012/SK-HR/BDMS/IX/18, Budhi Pribadi Ishak ditunjuk sebagai kepala Divisi Manajemen Risiko.

Komitmen Divisi Risk & System Management

Dalam pelaksanaan kerjanya, Divisi Manajemen Risiko Perseroan mengacu pada Komitmen dan Pedoman Manajemen Risiko, sedangkan Komite Pemantau Risiko mengacu kepada Piagam Komite Pemantau Risiko yang sekarang masih dalam tahap pengesahan. Komitmen, Pedoman dan Piagam tersebut berisi tata laksana, tugas, tanggung jawab serta wewenang yang melekat pada seluruh anggota Divisi Manajemen Risiko dan anggota Komite Pemantau Risiko.

Risk Management System

The Company considers that Risk Management is important to protect the Company from various risks which may arise. The implementation of good risk management will certainly support the Company's performance. Thus, risk management becomes an important factor of the Company in the implementation of its business activities. The main objective of risk management implementation is to maintain and protect the Company from any arising risks to ensure that the Company's business operations are well on track. The Company adopts three lines of defense model in implementing risk management in its environment. The first defense in risk management is the process owner, in this case each department in the Company. The second defense is the risk management function within the Risk & System Management Division. The third defense is independent function, which is part of the Internal Audit Division's duties and responsibilities. The Company requires the implementation of thorough risk management in order to provide benefit to the Company and stakeholders. In actual implementation, the Risk & System Management Division is assisted by personnel who are responsible for risk management activities in each Department, known as the Risk Champions.

Risk & System Management Division's Structure and Position

The Risk & System Management Division directly answers to the President Director and works closely with the Risk Oversight Committee that the Company had established. The Risk & System Management Division is led by Risk & System Management General Manager and supported by risk management team that has experience in similar industries and works objectively and independently. The employees of the Risk & System Management Division are provided with adequate training activities to keep abreast with new knowledge and expertise skills in their respective field. In accordance with the Decree of the Board of Directors No: 012/SK-HR/BDMS/IX/18, Budhi Pribadi Ishak was appointed as the Head of Risk & System Management Division.

Risk & System Management Division's Commitment

In the implementation of its duties, Risk & System Management Division refers to the Risk Management's Commitment and Guidelines, whereas Risk Oversight Committee refers to Risk Oversight Charter currently being ratified. The Commitment, Guidelines and Charter contain the procedures, of duties, responsibilities, and authority of all members of the Risk & System Management Division and Risk Oversight Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko

- Menyusun laporan Profil Risiko Perseroan secara berkala dan menyampaikannya kepada Dewan Direksi dan Komite Pemantau Risiko.
- Memantau posisi Risiko Perseroan secara korporat yang dituangkan dalam bentuk Pemetaan Risiko (*Risk Mapping/Risk Matrix*).
- Memberikan masukan kepada Dewan Direksi mengenai besaran atau maksimum Eksposur risiko (tingkat risiko) terhadap Risiko Operasional untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.
- Memberikan usulan kepada Dewan Direksi dan Komite Pemantau Risiko mengenai besaran atau maksimum Eksposur risiko (tingkat risiko) terhadap Risiko Strategis sebagai pertimbangan terhadap menentukan kebijakan Perseroan.
- Memberikan rekomendasi kepada Komite Pemantau Risiko.
- Melakukan pengkajian terhadap risiko-risiko pada usulan Aktivitas/Transaksi Usaha tertentu apabila dipandang perlu oleh Dewan Direksi dan Komite Manajemen Risiko.
- Melakukan dokumentasi yang memadai untuk keperluan Pengendalian Internal.
- Mengkaji secara berkala kecukupan dan kelayakan dari Kebijakan, Pedoman, dan Strategi Penerapan Manajemen Risiko, serta menyampaikan rekomendasi perubahan kepada Komite Pemantau Risiko.
- Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Komite Pemantau Risiko.
- Melakukan evaluasi terhadap proses Manajemen Risiko guna memastikan bahwa proses pengelolaan Risiko telah dilaksanakan dengan baik.
- Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko.

Risk & System Management Division's Duties and Responsibilities

- Prepare periodical Risk Profile of the Company and submit it to the Board of Directors and Risk Oversight Committee.
- Monitor the Company's Risk positions in a corporate manner, type of Risks and Risks in each Functional Activity, which can be set out in the form of Risk Mapping (Risk Matrix).
- Provide input to the Board of Directors regarding the amount or maximum Risk Exposure to be incorporated into the Work Plan and Budget of the Company.
- Provide recommendations to the Risk Oversight Committee concerning Risk Appetite and Risk Tolerance of the Company based on input from each Division.
- Provide recommendations to the Risk Oversight Committee.
- Review the Risks on proposals of Specific Business Activity/Transaction if deemed necessary by the Board of Directors and the Risk Management Committee.
- Conduct adequate documentation for the Internal Control purposes.
- Periodically review adequacy and feasibility of Policies, Guidelines and Strategies of Risk Management Implementation, as well as submit recommendation of changes to the Risk Oversight Committee.
- Monitor the implementation of Risk Management policy as determined by the Risk Oversight Committee.
- Evaluate the Risk Management process to ensure that the Risk management process has been well implemented.
- Develop human resources competencies related to Risk Management.



// Foto ini diambil sebelum masa pandemi Covid-19
This picture was taken before the Covid-19 pandemic.

// Manajemen Risiko

Risk Management

Perseroan menyadari bahwa selalu ada ketidakpastian yang dapat menghambat tercapainya target aktivitas Perseroan yang dijalankan. Kondisi ketidakpastian tersebut menyebabkan adanya paparan risiko. Oleh karenanya, risiko merupakan aspek yang harus diperhitungkan dengan seksama dalam setiap proses usaha Perseroan. Risiko tersebut dapat berupa risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan.

Manajemen risiko berfungsi untuk melindungi Perseroan dari risiko yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan Perseroan. Manajemen risiko juga diharapkan dapat memaksimalkan peluang, menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif, membangun kepercayaan investor dan calon investor, meningkatkan shareholder value, meningkatkan tata kelola Perseroan yang sehat dan mengintegrasikan strategi Perseroan. Kebijakan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi atas analisis risiko berdasarkan informasi terbaik sebagai referensi bagi pengambilan keputusan strategis manajemen. Analisis risiko dibuat berdasarkan permintaan Manajemen, maupun atas inisiatif pengelola manajemen risiko untuk memberikan pandangan terbaik kepada pemangku kepentingan internal.

Roadmap Enterprise Risk Management (ERM) Perseroan



Implementasi ISO 31000:2018 Perseroan

Perseroan mulai menerapkan manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2018 secara bertahap pada tahun 2018, dimulai dari kebijakan, komitmen dan mandat hingga proses manajemen risiko. Secara garis besar, penerapan ISO 31000:2018 dijabarkan sebagai berikut:

The Company is firmly aware that there is always uncertainty that can disrupt its business. The aforementioned uncertainty leads to risk exposure. Therefore, risks are an aspect that must be carefully considered in the Company's every business process. These risks include risks that are under and beyond the Company's control.

Risk management aims to protect the Company from risks that have adverse impacts on efforts to achieve its corporate goals. Risk management is also expected to maximize opportunities, create and maintain a conducive work environment, nurture the investors' and prospective investors' trust, increase shareholder value, improve sound corporate governance, and integrate the Company's strategy. Risk Management Policy provides recommendations on risk analysis based on the best information as a reference for the management's strategic decision making. Risk analysis is prepared based on the Management's request, as well as at the initiative of the risk management manager to provide the best view to internal stakeholders.

The Company's Enterprise Risk Management (ERM) Roadmap

The Company's ISO 31000:2018 Implementation

The Company started the gradual implementation of risk management based on ISO 31000:2018 in 2018, starting from policies, commitment and mandate, as well as risk management process. In general, the application of ISO 31000:2018 is described as follows:

1. Mandat dan Komitmen

Mandat dan komitmen Direksi Perseroan disusun sebagai bentuk komitmen Direksi untuk memperhitungkan aspek risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Mandat dan komitmen Direksi tersebut mengacu pada Prinsip Manajemen Risiko sesuai ISO 31000:2018 dan telah dituangkan dalam Komitmen Manajemen Risiko Perseroan yang telah diresmikan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi pada 27 Maret 2018.

Komitmen Manajemen Risiko tersebut dijadikan sebagai landasan dan pedoman untuk mendukung penerapan manajemen risiko di setiap proses usaha Perseroan. Pengelolaan risiko dilakukan dengan penuh kesadaran yang tinggi didukung oleh tata kerja Perseroan dan individu yang baik.

2. Penyusunan Profil Risiko

Profil risiko Perseroan disusun berdasarkan pada Proses Manajemen Risiko dalam ISO 31000:2018 yang mencakup penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan dan pemantauan risiko. Penetapan konteks dalam penyusunan profil risiko dibatasi untuk *Ongoing Business* dan *Business Development* yang berpotensi terjadi selama satu tahun anggaran, baik yang memiliki dampak secara finansial, reputasi, strategis, legal, dan aspek bisnis lainnya. *Risk owner* (diwakili oleh Risk Champion) sebagai *first line defense* terdepan dalam pengelolaan risiko melakukan identifikasi dan analisis risiko baik secara kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan data historis maupun *expert judgment*. Berdasarkan nilai kekerapan/kemungkinan (*probability/likelihood*) dan dampak (*consequence/impact*) nya, Perseroan membagi risiko menjadi 4 (empat) tingkat, yaitu rendah (*low risk*), menengah (*medium risk*), tinggi (*high risk*), dan ekstrim (*extreme risk*).

Langkah berikutnya dilakukan evaluasi risiko berdasarkan hasil analisis suatu risiko, untuk membuat keputusan apakah perlu dilakukan penanganan risiko lebih lanjut dan jenis tindakan mitigasi risiko yang diambil agar mampu mengatasi penyebab risiko secara efektif dan efisien. Adapun risiko yang menjadi perhatian lebih dari Perseroan adalah risiko yang berada pada tingkat tinggi dan ekstrim, sedangkan untuk risiko yang berada pada tingkat rendah dan menengah, dilakukan monitor dan langkah pencegahan agar risiko tidak berpindah ke tingkat yang lebih tinggi. Semua proses tersebut didokumentasikan dalam Risk Register.

Risk Register yang telah disusun oleh *risk owner* ditinjau kembali dan hasilnya akan dikonsolidasi oleh Tim Manajemen Risiko dan disampaikan kepada Top

1. Mandate and Commitment

The Board of Directors' mandate and commitment were prepared as a form of the Board of Directors' commitment to taking into account the risk aspect in every decision-making process. The Board of Directors' mandate and commitment refer to the Risk Management Principles according to ISO 31000:2018 and have been outlined in the Company's Risk Management Commitment that was ratified and signed by all members of the Board of Directors on March 27th, 2018.

The Risk Management Commitment serves as a foundation and guideline to support the risk management implementation in the Company's every business process. Risk management is carried out with high awareness and enhanced by the Company's and its employees' distinguished working procedure.

2. Risk Profile Preparation

The Company's risk profile was prepared based on the Risk Management Process in ISO 31000:2018 that includes risks context setting, identification, analysis, evaluation, management and monitoring. In the preparation of risk profile, context setting is limited to Ongoing Business and Business Development that may occur throughout the fiscal year, which affect financial, reputation, strategic, legal, and other business aspects. Risk owners as the first line defense and front-line business units in risk management identify risks and analyze risks in a qualitative and quantitative manner based on historical data and expert judgment. Based on the probability/likelihood value and consequence/impact, the Company divides risk into 4 (four) levels, namely low (low risk), medium (medium risk), high (high risk), and extreme (extreme risk).

Afterward, risk evaluation is conducted based on the results of the previous analysis to determine whether it is necessary to conduct further risk management as well as the types of risk mitigation measures taken to deal with the causes of risk effectively and efficiently. High and extreme risks are of greater concern to the Company, whereas low and medium risks are monitored and preventive measures are taken to prevent them from moving to higher risk levels. All of these processes are documented in the Risk Register.

The Risk Register prepared by risk owners is reviewed and the results will be consolidated by the Risk Management Team and submitted to Top Management in order to

Management agar diputuskan Top Risk Perseroan yang penting untuk diperhatikan, dikelola dan dicari solusi strategi mitigasinya.

Pengelolaan Top Risk menjadi tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui Divisi *Risk & System Management*. Dengan pengelolaan risiko yang baik, diharapkan dapat meningkatkan assurance dan memberi nilai tambah bagi Perseroan.

3. Monitoring dan Review

Divisi *Risk & System Management* memastikan bahwa *risk owner* sebagai pemilik risiko melakukan tindakan mitigasi sesuai rencana yang telah ditetapkan dan memastikan proses mitigasi yang dilakukan berdampak pada penurunan tingkat risiko, baik itu tingkat kekerapan/kemungkinan maupun tingkat dampaknya. Hasil mitigasi risiko akan disusun dalam laporan progres mitigasi risiko dan dilaporkan dalam Rapat Komite Pemantau Risiko secara periodik.

Penerapan Manajemen Risiko di Perseroan berjalan dengan baik karena ditunjang oleh struktur organisasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Risiko yang dihadapi Perseroan dan Pengelolaannya

1. Risiko Eksternal/Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang disebabkan oleh kejadian atau keadaan eksternal yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan. Risiko strategis ini umumnya adalah risiko-risiko yang terjadi diluar kendali Perseroan, sehingga penanganan risikonya lebih ditujukan untuk mengurangi dampak risikonya. Adapun Risiko Eksternal/Strategis yang teridentifikasi di Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Risiko Ekonomi

Risiko Ekonomi adalah kategori risiko yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan yang berasal dari ketidak-pastian faktor-faktor ekonomi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Risiko Ekonomi yang memengaruhi kinerja Perseroan antara lain turunnya harga batubara dunia, menurunnya volume penjualan batubara, dan fluktuasi harga bahan bakar dunia.

b. Risiko Keberlanjutan Usaha

Risiko keberlanjutan usaha adalah kategori risiko yang dapat menyebabkan Perusahaan tidak lagi dapat melakukan kegiatan usaha dibidang pertambangan batubara. Risiko-risiko tersebut antara lain Habisnya cadangan batubara, dan risiko keberlanjutan batubara sebagai sumber energi dunia.

determine the Company's Top Risks that require attention, management, and mitigation solution.

Top Risks management is the responsibility of the Risk Oversight Committee and Board of Directors through the Risk & System Management Division. Proper risk management is expected to improve assurance and add value to the Company.

3. Monitoring and Review

The Risk & System Management Division ensures that the Risk Owners perform mitigation actions according to the predetermined plan and ensures the implemented mitigation process reduce the level of risk, both the frequency/likelihood and the level of impact. Risk mitigation results will be included in risk mitigation progress report and reported during the Risk Oversight Committee's Meeting every four months.

The Risk Management is implemented properly in the Company as it is supported by an organizational structure with clear duties and responsibilities.

Risks faced by the Company and Their Management

1. External/Strategic Risks

Strategic risks are risks caused by events or external circumstances that can affect the Company's performance. These strategic risks generally occur beyond the Company's control, therefore their risk mitigation is aimed at reducing the impact of the risks. The External/Strategic Risks identified in the Company are as follows:

a. Economic Risks

Economic risks are a risk category that can affect the Company's performance due to uncertain economic factors, both domestic and foreign. Economic risks that affect the Company's performance include falling world coal prices, decreasing coal sales volume, and fluctuating world fuel prices.

b. Business Sustainability Risks

Business sustainability risks are a risk category that may cause the Company to no longer be able to carry out business activities in the coal mining sector as its current main business activity. These risks include the exhaustion of coal reserves and the risk of sustainability of coal as a world energy source.

c. Risiko Regulasi

Risiko Regulasi adalah kategori risiko yang muncul sebagai akibat dari adanya peraturan/perundangan pemerintah dalam negeri maupun dunia, baik yang berlaku atau yang akan berlaku, dan yang akan memengaruhi aktivitas usaha Perseroan secara signifikan. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain: peraturan pemerintah mengenai DMO, pembatasan import komoditi tertentu oleh negara lain, dan sebagainya.

d. Risiko Investasi

Dalam rangka menjalani bisnis yang berkelanjutan, maka Perseroan melakukan investasi di berbagai bidang usaha, baik di bidang batubara maupun di bidang sumber daya energi terbarukan. Investasi-investasi tersebut tentunya mengandung risiko dimana investasi-investasi tersebut tidak memberikan *rate of return* atau nilai tambah sesuai yang diharapkan.

e. Risiko Teknologi

Perseroan didukung oleh sistem teknologi informasi agar aktivitas-aktivitas usaha dapat dilakukan secara lebih efisien. Namun dalam menggunakan system tehnologi informasi, Perseroan terpapar pada risiko kegagalan opsional sistem informasi, peretas data, teknologi yang perlu diperbarui, dan sebagainya. Adapun risiko teknologi yang teridentifikasi pada tahun 2020 di Perseroan adalah Risiko ancaman keamanan teknologi informasi dan Sistem Enterprise Resources Planning (ERP) Perseroan yang perlu diperbarui.

f. Risiko Keuangan dan Pajak

Risiko keuangan dan pajak akan berdampak pada semua perusahaan dari jenis industri apapun, karena keuangan adalah merupakan urat nadi perusahaan. Karena itulah, faktor keuangan juga sangat menentukan kinerja Perseroan. Adapun risiko faktor keuangan utama yang teridentifikasi di Perseroan adalah fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

g. Risiko Keadaan Kahar

Risiko keadaan kahar adalah risiko sebagai akibat bencana alam (banjir, kebakaran, huru-hara, pandemi, dan sebagainya) yang mungkin terjadi terhadap aset Perseroan, yang akan mengakibatkan Perseroan tidak dapat beroperasi baik sebagian atau seluruhnya. Adapun risiko keadaan kahar yang teridentifikasi pada Perseroan antara lain ialah Risiko terganggunya operasional Perseroan karena pandemi Covid-19 dan kerusakan pada bangunan kantor pusat.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang dapat mengakibatkan reputasi/nama baik Perseroan

c. Regulatory Risks

Regulatory Risks are a risk category that arises as a result of domestic and global government regulations/laws, either applicable now or in the future, and which will significantly affect the Company's business activities. The regulatory risks that are identified in the Company are the risk of not meeting the DMO quota and the risk of import restriction in certain countries.

d. Investment Risk

In order to run a sustainable business, the Company invests in various lines of business, both in the coal sector and in the renewable energy sector. These investments carry risks if they failed to generate rate of return or added value as expected.

e. Technology Risk

The Company is supported by information technology systems that ensure business activities can be carried out more efficiently. However, in using information technology systems, the Company is exposed to the risk of operational failure of said systems, data hackers, outdated technology, et cetera. The technology risk identified in 2020 in the Company is the risk of threats to information technology security and the Company's Enterprise Resources Planning (ERP) System, which expired at the end of 2020.

f. Financial and Taxation Risk

Financial and taxation risks will have an impact on all companies from any type of industry as finance is the lifeblood of a company. In that regard, financial factors are also vital to the Company's performance. The main financial risk factor identified in the Company is fluctuation in foreign currency exchange rates.

g. Force Majeure Risks

Force majeure risks are risks resulting from natural disasters (floods, fires, riots, pandemics, etc.) that may affect the Company's assets, which would result in the Company's inability to operate either partially or entirely. The identified force majeure risks at the Company include the risk of disruption of the Company's operations due to the Covid-19 pandemic and damage to the head office building.

h. Reputation Risk

Reputation risk is a risk that can result in the Company's damaged reputation/good name in the

terganggu. Adapun risiko reputasi Perseroan yang mungkin terjadi adalah pemberitaan negatif mengenai Perseroan di media.

2. Risiko Operasional

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan entitas anak dihadapkan dengan berbagai risiko operasional yang mungkin terjadi dan berdampak signifikan. Adapun risiko operasional dengan tingkat risiko extreme dan high yang telah diidentifikasi selama tahun 2020, adalah sebagai berikut:

- a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Risiko K3 yang dihadapi oleh Perseroan adalah resiko yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan telah memitigasi risiko ini dengan menerapkan prosedur K3 yang ketat dan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- b. Lingkungan
Risiko ini merupakan risiko yang disebabkan oleh pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan sebagai dampak operasional Perseroan. Risiko tersebut telah dimitigasi oleh Perseroan agar pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Infrastruktur
Risiko ini adalah dampak dari adanya infrastruktur penunjang operasional Perseroan yang memerlukan pemeliharaan sehingga tidak mengganggu jalan operasional Perseroan. Perseroan telah melakukan monitor dan perawatan terhadap semua fasilitas Perseroan secara periodik, sehingga dampak risiko ini dapat diminimalisir.
- d. *Supply Chain*
Persediaan (*sparepart*, BBM dan pelumas) adalah bahan penunjang operasional yang perlu dimonitor dengan ketat pada aktivitas *Supply Change*. Kontrol terhadap tingkat persediaan yang optimal sangat penting untuk menjaga laba Perseroan. Perseroan telah melakukan usaha yang signifikan untuk menurunkan dan mengendalikan tingkat persediaan yang optimal selama tahun 2020.
- e. Perencanaan
Perencanaan penambangan akan sangat mempengaruhi hasil akhir yang diperoleh. Oleh karena itu Perseroan telah melakukan perencanaan penambangan yang detil dan hati-hati agar tidak terjadi deviasi yang signifikan pada saat pelaksanaannya. Selain itu koordinasi selama pelaksanaan dilakukan dengan optimal antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian Perseroan dapat menghindari risiko perencanaan yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan menurunnya laba Perseroan.

eyes of Stakeholders. The Company reputation risk that may occur is negative news about the Company in the media.

2. Operational Risk

In running its business, the Company and subsidiaries are exposed to various operational risks that may arise and have a significant impact. The operational risks that have been identified throughout 2020 were as follows:

- a. Occupational Health & Safety (OSH)
OSH risk faced by the Company is risk related to occupational health and safety. The Company has mitigated this risk by implementing strict OSH procedures in accordance with applicable laws.
- b. Environment
This risk is caused by environmental management carried out by the Company as a result of the Company's operations. This risk has been mitigated by the Company so that environmental management is in accordance with applicable regulations.
- c. Infrastructure
This risk is caused by the impact of the Company's operational supporting infrastructures that require maintenance so that they do not disrupt the Company's operations. The Company has periodically monitored and maintained all of the Company's facilities, therefore effectively mitigating the impact of this risk.
- d. Supply Chain
Inventories (*spare parts*, fuel and lubricants) are operational support materials that need to be closely monitored during *Supply Change* activities. Control over optimal inventory levels is very important to maintain the Company's profit. The Company has made significant efforts to reduce and control optimal inventory levels throughout 2020.
- e. Planning
Mining planning will greatly affect the final results obtained. Therefore, the Company has carried out a detailed and careful mining plan so that there is no significant deviation during the implementation. In addition, coordination during implementation is carried out optimally between all parties involved. The Company therefore can avoid planning risks that can increase production costs and decrease the Company's profits.

- f. **Biaya Produksi**
Biaya pemeliharaan armada angkut menjadi bagian dari biaya produksi batubara Perseroan. Oleh karena itu, menjaga biaya pemeliharaan armada angkut menjadi sangat penting. Selain itu juga, Perseroan telah melakukan investasi yang signifikan pada armada angkut tersebut. Selama tahun 2020, biaya pemeliharaan ini dapat dikontrol dengan baik, sehingga risiko kenaikan biaya pemeliharaan ini tidak terjadi.
- g. **Terganggunya Operasional**
Operasional Perseroan dapat terganggu karena dampak teknis penambangan maupun keadaan alam lokasi penambangan. Perseroan telah melakukan mitigasi untuk meminimalisir dampak risiko ini dengan menerapkan standar dan prosedur penambangan yang konsisten, pengawasan pelaksanaan penambangan dengan lebih ketat, serta pengawasan lokasi penambangan secara berkala.

- f. **Production Costs**
Maintenance costs for the transport fleets are part of the Company's coal production costs. Therefore, proper management of transport fleets maintenance costs is crucial. In addition, the Company has made significant investments in these transport fleets. Throughout 2020, the aforementioned maintenance cost could be controlled properly, and as a result, the risk of increasing maintenance costs did not occur.
- g. **Operational Disruption**
The Company's operations are liable to disruptions due to the technical impact of mining and the natural conditions of the mining sites. The Company has undertaken mitigation efforts to minimize the impact of this risk by consistently applying mining standards and procedures, tighter supervision of mining operations, and periodic monitoring of mining sites.

Efektivitas Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaannya, kebijakan manajemen risiko memberikan rekomendasi atas analisis risiko berdasarkan informasi terbaik yang ada untuk menunjang pengambilan keputusan oleh manajemen yang bersifat strategis yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Analisis terhadap risiko dibuat berdasarkan permintaan manajemen maupun atas inisiatif pengelola manajemen risiko untuk memberikan pandangan kepada pemangku kepentingan internal terkait agar dapat memberikan nilai tambah. Analisis risiko terkait proyek strategis Perseroan dilakukan sebagai pelengkap dalam melakukan proses seleksi, prioritas dan balancing inisiatif portofolio strategis Perseroan. Pengelola manajemen risiko juga menangani faktor ketidakpastian pada Rencana Jangka Panjang Perseroan dan faktor risiko, baik jangka panjang maupun jangka pendek pada seluruh kebijakan manajemen risiko.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengelolaan Manajemen Risiko

Perseroan mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko melalui kebijakan serta prosedur kerja yang telah disahkan serta disosialisasikan ke seluruh unit kerja dan karyawan sehingga setiap karyawan memiliki persepsi dan pemahaman yang sama.

Untuk tahun 2021, Perseroan berencana melakukan evaluasi sistem pengelolaan risiko dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Hal ini dilakukan salah satunya dalam rangka mengevaluasi sistem pengelolaan risiko yang sudah berjalan dan menumbuhkan budaya risiko di lingkungan Perseroan. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2022 dan seterusnya Perseroan sudah dapat melakukan penilaian sendiri terhadap sistem pengelolaan risiko. Hal ini sejalan dengan roadmap Manajemen Risiko Perseroan.

Risk Management Effectiveness

In practice, risk management policy provides recommendation on risk analysis based on best information available to support decision-making by the management on strategic matters in accordance with the prevailing laws and regulations. Analysis on risk is created upon request of the management or initiative of the risk management unit to provide opinion to related internal stakeholders to deliver added value. Risk analysis related to the Company's strategic project is executed to complement the Company's strategy in performing selection process, priority determination, and balancing of strategic portfolio initiative of the Company. Risk management also manages uncertainty factor in the Company's long- and short-term risk factors in overall risk management policy.

Evaluation on Risk Management System Effectiveness

The Company implements Risk Management System through policies and work procedures that have been ratified and disseminates to all work units and employees so that they have the same perception and understanding.

For 2021, the Company plans to conduct risk management system evaluation by involving third parties in order to, among others, evaluate the existing risk management system and foster a risk culture within the Company. Therefore, the Company is expected to be able to self-assess its risk management system starting from 2022 onwards. This is in line with the Company's Risk Management roadmap. This matter is in line with the Company's Risk Management roadmap.



// Foto ini diambil sebelum masa pandemi Covid-19
This picture was taken before the Covid-19 pandemic.

// Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of Good Corporate Governance Guideline for Public Companies

Perseroan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015, dengan penjabaran sebagai berikut:

The Company implements good corporate governance in accordance with POJK No. 21/POJK.04/2015 and SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015, with the following details:

Rekomendasi Recommendation		Keterangan Description	Penerapan Implementation
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1 Improving the Quality of General Meeting of Shareholders (GSM).			
1.1	<p>Perseroan memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>The Company has technical voting mechanism, either open vote or closed vote, which promote independency and shareholder's interest.</p>	<p>Tercantum dalam tata tertib RUPS serta dijelaskan oleh Ketua Rapat pada saat RUPS berlangsung.</p> <p>Stipulated in GMS procedure and explained by the Chairman during GMS.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
1.2	<p>Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners attend the Annual GMS.</p>	<p>Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diundang datang menghadiri RUPS Tahunan kecuali apabila berhalangan.</p> <p>All members of the Board of Directors and Board of Commissioners attended the Annual GMS unless unable to do so.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
1.3	<p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perseroan paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Summary of the GMS is available on the Company's website at least for 1 (one) year.</p>	<p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam laman www.mitrabaraadiperdana.co.id sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.</p> <p>Summary of GMS minutes is available at www.mitrabaraadiperdana.co.id for the required time period.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2 Improving the Quality of Communication between the Company and Shareholders or Investors.			
2.1	<p>Perseroan memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>The Company has a policy on communication with shareholders or investors.</p>	<p>Perseroan secara berkala mengunggah laporan berkala dan keterbukaan informasi Perseroan melalui laman Bursa Efek Indonesia dan/atau laman Perseroan www.mitrabaraadiperdana.co.id</p> <p>Di samping itu Perseroan memiliki sarana komunikasi dengan pemegang saham dan investor melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Paparan Publik tahunan. <p>The Company periodically uploaded periodic report and disclosed the Company's information through Indonesian Stock Exchange website and/or the Company's website www.mitrabaraadiperdana.co.id</p> <p>Additionally the Company also communicating with the shareholders and investors through:</p> <ol style="list-style-type: none"> Annual General Meeting of Shareholders Annual Public Expose. 	<p>Sedang dalam proses penyusunan</p> <p>On going process</p>

	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Description	Penerapan Implementation
2.2	<p>Perseroan mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.</p> <p>The Company discloses corporate policy on communication with shareholders or investors on the website.</p>	<p>Dipublikasikan di dalam laman Perseroan www.mitrabaraadiperdana.co.id.</p> <p>Published on the Company's website www.mitrabaraadiperdana.co.id.</p>	<p>Sedang dalam proses pengembangan</p> <p>Development Process</p>
<p>Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3 Enhancing the Membership and Composition of the Board of Commissioners.</p>			
3.1	<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perseroan.</p> <p>The number of members of the Board of Commissioners is determined by taking into account the condition of the Company.</p>	<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris dan peraturan pasar modal dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan.</p> <p>Determination of the number of Board of Commissioners' members is based on the provisions stipulated in the Company's Article of Association, Board of Commissioners' Charter and stock exchange regulations by taking into account the Company's condition.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
3.2	<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>The composition of the members of the Board of Commissioners is determined by taking into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris memiliki latar belakang pendidikan yang diperlukan Perseroan serta memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>All of the members of the Board of Commissioners have educational background needed by the Company and therefore achieve the diversity of skills, knowledge and experience required.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
<p>Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4 Improving the Quality of the Implementation of the Board of Commissioners' Duties and Responsibilities.</p>			
4.1	<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners has self assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.</p>	<p>Dewan Komisaris telah mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>The Board of Commissioners has self assessment policy to evaluate their own performance as stated in the Company's Annual Report.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
4.2	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>The self assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Company's Annual Report.</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>The self assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in the Company's Annual Report.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>

Rekomendasi Recommendation	Keterangan Description	Penerapan Implementation
<p>4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Commissioners has a policy on the resignation of members of the Board of Commissioners if they were involved in financial crimes.</p>	<p>Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Dewan Komisaris mengatur bahwa jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan. Dengan demikian maka dalam hal anggota Dewan Komisaris dinyatakan sebagai terdakwa dalam kejahatan keuangan maka yang bersangkutan dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak dapat lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.</p> <p>The Company's Article of Association and the Board of Commissioners' Charter stipulated that the term of a member of Board of Commissioners shall end if such member does not comply with the prevailing laws and regulations. Thus, in the event a member of the Board of Commissioner is indicted with financial crime, then such member will be deemed incapable to carry out legal action (on behalf of the Company) and can no longer serve as a member of the Board of Commissioners.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
<p>4.4 Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners or Nomination and Remuneration Committee prepares succession policy for nominating potential members of the Board of Directors.</p>	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi yang independen dan objektif tentang calon anggota prospektif untuk Direksi untuk diusulkan kepada pemegang saham.</p> <p>The Nomination and Remuneration Committee provides independent and objectives recommendation for each prospective member for the Board of Directors to be proposed to the shareholders.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
<p>Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5 Enhancing the Membership and Composition of the Board of Directors.</p>		
<p>5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>The number of members of the Board of Directors is determined by taking into account the condition of the Company as well as the effectiveness of the decision-making process.</p>	<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Direksi berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Direksi dan peraturan pasar modal dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan.</p> <p>Determination of the number of Board of Directors' members is based on the provisions stipulated in the Company's Article of Association, Board of Directors' Charter and stock exchange regulations by taking into account the Company's condition.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
<p>5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>The composition of members of the Board of Directors is determined by taking into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.</p>	<p>Anggota Direksi memiliki latar belakang pendidikan yang diperlukan Perseroan serta memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>All of the members of the Board of Directors have educational background needed by the Company and therefore achieve the diversity of skills, knowledge and experience required.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>

	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Description	Penerapan Implementation
5.3	<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.</p>	<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang dibuktikan dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman kerja terkait.</p> <p>Board of Directors' member in charge of accounting or finance has the expertise and/or knowledge in accounting subject as proven through educational background and/or related work experiences.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
<p>Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6 Improving the Quality of the Implementation of the Board of Directors' Duties and Responsibilities.</p>			
6.1	<p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>The Board of Directors has self assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.</p>	<p>Penilaian terhadap kinerja Direksi dilaksanakan secara internal atau <i>self assessment</i> oleh Dewan Komisaris</p> <p>The Board of Directors' performance assessment is conducted internally or self-assessment by the Board of Commissioners</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
6.2	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perseroan.</p> <p>The self assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed in the Company's annual report.</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>The self assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors has been disclosed in the Company's Annual Report.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
6.3	<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Directors has a policy on the resignation of members of the Board of Directors if they were involved in financial crimes.</p>	<p>Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Direksi mengatur bahwa jabatan Direksi berakhir apabila tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan. Dengan demikian maka dalam hal anggota Direksi dinyatakan sebagai terdakwa dalam kejahatan keuangan maka yang bersangkutan dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak dapat lagi menjabat sebagai anggota Direksi.</p> <p>The Company's Article of Association and the Board of Directors' Charter stipulated that the term of a member of Board of Directors shall end if such member does not comply with the prevailing laws and regulations. Thus, in the event a member of the Board of Director is indicted with financial crime, then such member will be deemed incapable to carry out legal action (on behalf of the Company) and can no longer serve as a member of the Board of Directors.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
<p>Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7 Improving the Aspects of Good Corporate Governance through Stakeholders Participation.</p>			
7.1	<p>Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>The Company has a policy to prevent insider trading.</p>	<p>Kebijakan mencegah <i>insider trading</i> tercantum dalam Kode Etik.</p> <p>The policy to prevent insider trading is stipulated in the Code of Conduct.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>

Rekomendasi Recommendation	Keterangan Description	Penerapan Implementation
<p>7.2 Perseroan memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i>.</p> <p>The Company has anti-corruption and anti-fraud policies.</p>	<p>Kebijakan anti korupsi dan anti fraud tercantum dalam Kode Etik.</p> <p>Anti Corruption and Anti Fraud Policies are stipulated in the Code of Conduct.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
<p>7.3 Perseroan memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>The Company has a policy on the selection and capacity improvement of suppliers or vendors.</p>	<p>Kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor tercantum dalam Kode Etik.</p> <p>Policy regarding the selection and capacity improvement for suppliers or vendors are stipulated in the Code of Conduct.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
<p>7.4 Perseroan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>The Company has a policy on the fulfillment of creditors' rights.</p>	<p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur tercantum dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh Perseroan.</p> <p>Policy in regards to fulfilling creditors' rights can be found in the agreements made by the Company.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
<p>7.5 Perseroan memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>The Company has whistleblowing system policy.</p>	<p>Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>The whistleblowing policy has been disclosed in the Company's Annual Report.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
<p>7.6 Perseroan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>The Company has long-term incentive policy for the Board of Directors and employees.</p>	<p>Kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama.</p> <p>The long term incentive policy given to the Board of Directors and its employee can be found in the Collective Labor Agreement</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>
<p>Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8 Improving the Implementation of Information Disclosure.</p>		
<p>8.1 Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>The Company utilizes information technology other than the corporate website to disclose information.</p>	<p>Selain laman milik Perseroan, Perseroan memanfaatkan teknologi informasi yang disediakan oleh BEI yaitu melalui IDXnet sebagai saluran media untuk keterbukaan informasi.</p> <p>Aside from using the Company's website, the Company also utilizes information technology offered by IDX through IDXnet as a medium to disclose information.</p>	<p>Sedang dalam pengembangan</p> <p>Development Process</p>
<p>8.2 Laporan Tahunan Perseroan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>The Company's Annual Report discloses the final beneficiary of the Company's shareholders with at least 5% (five percent) shares in addition to the disclosure of the final beneficiary of the Company's majority and controlling shareholders.</p>	<p>Kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% (lima persen) tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>The Shareholders with a minimum of five percent (5%) shares in the Company are disclosed within the Company's Annual Report.</p>	<p>Sudah diterapkan</p> <p>Has been implemented</p>



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Dalam mengimplementasikan program pengembangan masyarakat, Perseroan telah menetapkan tema utama yaitu "Menciptakan Masyarakat Mandiri Yang Berdaya Saing Unggul" sesuai dengan Visi dan Misi CSR Perseroan

In its efforts to properly implement community development programs, the Company has set "Creating Independent Communities with Superior Competitiveness" as the main theme of its CSR in accordance with the Company's CSR Vision and Mission.





// Landasan, Komitmen, dan Pencapaian

Foundation, Commitment, and Achievements

PT Mitrabara Adiperdana Tbk melanjutkan kesinambungan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam bentuk pengembangan masyarakat, di sepanjang 2020. Perseroan selalu berkontribusi terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat. Berbagai inisiatif, program, dan kegiatan pengembangan masyarakat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan mengacu pada 5 pilar program pengembangan masyarakat, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Kemasyarakatan, dan Lingkungan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Following up on the implementation of its corporate social responsibility (CSR), in 2020 PT Mitrabara Adiperdana Tbk persistently contributed to efforts to conserve the environment and improve the living standards of the local communities. In this regard, the Company implemented its community development initiatives, programs and activities in a consistent and sustainable manner in accordance with 5 community development program pillars namely Education, Health, Economy, Community, and Environment, as well as full compliance with applicable regulations such as Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies and Government Regulation No. 47/2012 on Social and Environmental Responsibilities of Limited Liability Companies.



// Foto ini diambil sebelum masa pandemi Covid-19
This picture was taken before the Covid-19 pandemic.



Dalam mengimplementasikan program pengembangan masyarakat, Perseroan telah menetapkan tema utama yaitu "Menciptakan Masyarakat Mandiri Yang Berdaya Saing Unggul" sesuai dengan Visi dan Misi CSR Perseroan, sebagai berikut:

VISI

Berdayanya masyarakat di wilayah operasional Perseroan yang mandiri, sejahtera dan mempunyai daya saing yang unggul.

MISI

1. Memberdayakan masyarakat lokal dengan berpegang teguh kepada kearifan lokal.
2. Melaksanakan program CSR berbasis kebutuhan masyarakat.
3. Menerapkan tata kelola CSR yang berkelanjutan dan berdaya guna.

Pada tahun 2020, Perseroan melaksanakan program pengembangan masyarakat melalui berbagai tahapan, dimulai dari pemetaan kebutuhan sosial masyarakat (*social mapping*), penyusunan rencana strategis serta penyusunan program kerja, dan ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan program CSR tersebut, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan sekitar, serta memperkuat hubungan industrial yang kondusif antara karyawan pendatang dengan karyawan lokal melalui peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja. Langkah-langkah ini diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan memberdayakan potensi masyarakat secara menyeluruh, baik di sekitar wilayah tambang Perseroan maupun di sekitar kantor pusat Perseroan.

In its efforts to properly implement community development programs, the Company has set "Creating Independent Communities with Superior Competitiveness" as the main theme of its CSR in accordance with the Company's CSR Vision and Mission, as follows:

VISION

Empowering the communities in the vicinity of the Company's operational areas to be independent, prosperous, and highly competitive.

MISSION

1. To empower local communities by adhering to local wisdom.
2. To implement community-based CSR programs.
3. To implement sustainable and efficient CSR governance.

In 2020, the Company carried out its community development programs through various stages starting from social mapping, strategic plan preparation, work program preparation, and CSR program activities implementation in the fields of education, health, and public welfare; environment conservation; and to strengthen good industrial relations between local employees and migrant employees through occupational health and safety improvement. These measures are intended to improve living standards and empower the potential of the community around the Company's mining areas and headquarters.

Tak hanya itu, komitmen Perseroan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang dan berkelanjutan dengan masyarakat dan lingkungan tempatnya beroperasi telah mendapat pengakuan dari masyarakat umum. Pada tahun 2020, Perseroan memperoleh penghargaan ICA (*Indonesian CSR Award*) 2020 di kategori *Gold* dengan subjek inti: Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat UMKM Cafe Sahabat sebagai Peningkatan Pendapatan Pemuda dalam Mendukung Program Desa Wisata Long Loreh (Desa Wisata Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Organisasi dan *Chapter CFCD (Corporate Forum for Community Development)* kepada Perseroan pada tanggal 6 November 2020. Selain itu, Perseroan pun meraih peringkat BIRU dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Perusahaan Tingkat Nasional (PROPERNAS) tahun 2020.

Moreover, the Company's commitment to establishing harmonious, balanced and sustainable relationships with the community and environment where it operates has been widely acknowledged by the general public. In 2020, the Company received the 2020 ICA (*Indonesian CSR Award*) in the Gold category with the core subject: Community Engagement and Development of the Cafe Sahabat MSME to Increase Youth Income in Supporting the Long Loreh Tourist Village Program (Long Loreh Tourist Village, Malinau Selatan Sub-District, Malinau Regency, North Kalimantan). The award was handed by the Head of Organization and Chapter of the CFCD (*Corporate Forum for Community Development*) to the Company on November 6th, 2020. In addition, the Company received BLUE rating from the Ministry of Environment and Forestry in the 2020 National Environmental Performance Rating Program (PROPERNAS).



// Implementasi Program Pengembangan Masyarakat

Community Development Program Implementation

Program pengembangan masyarakat di wilayah operasional Perseroan dirancang dan diimplementasikan berdasarkan survei mendasar mengenai aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan serta kemasyarakatan pada desa-desa di wilayah sekitar konsesi Perseroan. Survei tersebut terangkum dalam dokumen pemetaan sosial masyarakat (*social mapping*) yang menjadi landasan untuk merancang program pengembangan masyarakat yang efektif dan tepat sasaran.

Di tahun 2020, program pengembangan masyarakat Perseroan dibagi menjadi tiga jenis program, yaitu :

- Program Pemberdayaan Masyarakat
- Program Hubungan Masyarakat
- Program Pelayanan Masyarakat

The community development programs in the Company's operational were designed and implemented based on a basic survey of health, education, economic, environmental and social aspects in the villages around the Company's concession area. The survey was summarized in the Social Mapping document that served as the basis for designing effective community development programs that can reach their intended recipients.

In 2020, the Company's community development programs were divided into the following three categories:

- Community Empowerment Program
- Community Relation Program
- Community Service Program



// Foto ini diambil sebelum masa pandemi Covid-19
This picture was taken before the Covid-19 pandemic.

Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi dan Misi CSR-nya, Perseroan telah menyusun strategi jangka panjang program pengembangan masyarakat 2018-2022 yang berfungsi sebagai panduan dan tolok ukur pencapaian target pelaksanaan program pengembangan masyarakat:

Community Empowerment Program

In order to realize its CSR Vision and Mission, the Company has prepared the 2018-2022 long-term community development program strategy that serves as community development program implementation guideline and target achievement benchmark, as follows:

CSR Milestone



Sesuai dengan rencana strategis program pengembangan masyarakat 2018-2022, pada tahun 2020 program difokuskan pada peningkatan hasil program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaksana. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan telah menerapkan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Setempat

Di tahun 2020, kegiatan pengembangan masyarakat Perseroan difokuskan kepada program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut bertujuan mempersiapkan masyarakat mandiri melalui kegiatan-kegiatan yang mendorong perputaran ekonomi di desa-desa sekitar operasional tambang dengan memanfaatkan potensi yang ada baik dalam hal *Natural Capital* (Modal Alam), *Human Capital* (Modal Kemampuan, Keterampilan, dan Pengetahuan), serta *Physical Capital* (Modal Peralatan/ Mesin dalam Produksi serta Jasa).

In accordance with the 2018-2022 community development program strategic plan, in 2020 the community empowerment program was focused on improving result on empowerment program and capacity building for the implementer. To that end, the Company had implemented the following programs and activities:

1. Empowerment of Local Communities

In 2020, the Company's community development activities were focused on community empowerment programs. The programs aimed to prepare self-sustainable communities through activities that would stimulate the economy in villages around mining operations by utilizing existing potential in terms of *Natural Capital*, *Human Capital* (Capabilities, Skills, and Knowledge) and *Physical Capital* (Equipment/Machinery for Production and Services).

Atas dasar itulah di sepanjang tahun 2020, Perseroan telah membina beberapa kelompok masyarakat mulai dari peternakan dan pertanian, BUMDES, dan UMKM lokal, dengan rincian sebagai berikut:

Accordingly, throughout 2020, the Company had fostered several community groups engaging in livestock and agriculture, Village-Owned Enterprises (BUMDES), as well as local MSMEs, as follows:

No	Nama Kelompok Group	Jenis Usaha Line of Business	Lokasi Domicile	Status
1	BUMDES Mepun	BUMDES Village-Owned Enterprise (BUMDES)	Laban Nyarit	Tumbuh Growing
2	Empat Serumpun	Peternakan Livestock	Laban Nyarit	Tumbuh Growing
3	Ngelayau Marang	Perikanan Fishery	Laban Nyarit	Berkembang Developing
4	Pakalae	Ayam Petelur Layer Poultry	Langap	Berkembang Developing
5	Sumber Usaha	Ayam Potong Broiler	Langap	Tumbuh Growing
6	Petemau	Ayam Potong Broiler	Langap	Tumbuh Growing
7	Dinyana Gallery	Batik	Langap	Tumbuh Growing
8	Langap Jaya Mandiri	Peternakan Livestock	Langap	Berkembang Developing
9	BUMDES Lepubung Lepo	BUMDES	Long Loreh	Berkembang Developing
10	Apau Bilit	Pertanian Agriculture	Long Loreh	Tumbuh Growing
11	Sahabat Group	UMKM MSME	Long Loreh	Mandiri Self-Sustainable
12	FKPPI	Ayam Potong Broiler	Malinau Kota	Tumbuh Growing
13	Mitra Karya Jaya	Koperasi Serba Usaha Multipurpose Cooperative	Malinau Kota	Mandiri Self-Sustainable
14	Kawe Mose Nai	Ayam Potong Broiler	Sempayang	Tumbuh Growing
15	BUMDES Sempayang Baru Jaya	BUMDES	Sempayang	Berkembang Developing
16	Rumah Telur	Ayam Petelur Layer Poultry	Tanjung Lapang	Tumbuh Growing
17	UMKM Keripik & Sale Keripik & Sale MSME	Keripik Pisang Banana Chip	Tanjung Lapang	Tumbuh Growing
18	Mitra Puon Mulon	Peternakan Livestock	Tanjung Lapang	Berkembang Developing
19	Menuju Sukses	Peternakan Livestock	Tanjung Lapang	Tumbuh Growing
20	Rumah Tani Milenial	Hidroponik Hydroponic	Tanjung Lapang	Tumbuh Growing

Tidak hanya itu, Perseroan juga memberdayakan 3 kelompok mitra binaan menjadi mitra profesional yaitu Koperasi Mitra Karya Jaya, BUMDes Lepubung Lepo, dan BUMDes Sempayang Baru Jaya. Koperasi Mitra Karya Jaya dan BUMDes Lepubung Lepo merupakan mitra Perseroan dalam penyediaan sembako untuk karyawan yang tinggal di luar mess Perseroan. Kedua kelompok mitra binaan tersebut memiliki omzet rata-rata sekitar Rp20 juta per bulan dari pengadaan sembako karyawan.

Selain itu, BUMDes Sempayang Baru Jaya juga merupakan mitra rantai pasok Perseroan di bidang pengadaan daging ayam untuk konsumsi sehari-hari karyawan Perseroan. BUMDes Sempayang Baru Jaya mengirimkan daging ayam potong ke Perseroan sebanyak 650 kg setiap 5 minggu sekali dengan nilai transaksi mencapai Rp25 juta setiap pengiriman.

Selain 3 mitra rantai pasok profesional tersebut, ada 36 orang pemasok sayuran lokal dan 4 pengusaha tahu tempe, yang keseluruhannya diambil dari sekitar Desa Wisata Long Loreh, Desa Sengayan, dan Desa Langap. Sayuran yang dipasok antara lain kangkung, cabai, mentimun, kacang panjang, labu dan palawija lainnya dengan nilai transaksi per bulannya rata-rata mencapai Rp25 juta.

In addition, the Company also empowered 3 partner development groups by establishing them as professional partners, namely Mitra Karya Jaya Cooperative, BUMDes Lepubung Lepo, and BUMDes Sempayang Baru Jaya. Mitra Karya Jaya Cooperative and BUMDes Lepubung Lepo were the Company's partners that provided staple food to employees who live outside the Company's lodging. The two partner groups boasted an average turnover of approximately Rp20 million per month from the provision of staple food to employees.

Moreover, BUMDes Sempayang Baru Jaya was also the Company's supply chain partner that provided chicken meat for the daily consumption of the Company's employees. BUMDes Sempayang Baru Jaya delivered 650 kg of chicken meat to the Company every 5 weeks with a transaction value of up to Rp25 million per delivery.

Apart from the abovementioned 3 professional supply chain partners, there were 36 local vegetable suppliers and 4 tofu and tempeh businesses, all of which originated from around Long Loreh Tourist Village, Sengayan Village, and Langap Village. The supplied vegetables included water spinach, chilies, cucumbers, long beans, pumpkin and other crops with an average monthly transaction value of Rp25 million.





Program Hubungan Masyarakat

1. Pemberian Buku/Literasi Kelas Awal

Di bidang pendidikan, sepanjang tahun 2020 Perseroan fokus pada kegiatan pengembangan literasi dan minat baca di kelas awal. Kegiatan ini mencakup kegiatan literasi di 4 taman bacaan binaan Perseroan, dan pemberian buku untuk taman baca, 2 SD, dan 1 SMP di kecamatan Malinau Selatan dan Malinau Selatan Hulu.

2. Penanganan Pandemi Covid 19

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Perseroan pun berperan aktif dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Sepanjang pandemi tersebut, Perseroan memberikan bantuan kepada fasilitas-fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Kabupaten Malinau. Perseroan turut pula membangun wastafel darurat untuk fasilitas-fasilitas umum, menyumbangkan masker dan APD kepada tenaga medis di RSUD Malinau, Puskesmas UPTD Long Loreh, serta Rumah Sakit Pratama Langap. Perseroan pun secara aktif melaksanakan sosialisasi bersama tenaga medis Puskesmas UPTD Long Loreh terkait pandemi Covid-19, serta menyumbangkan disinfektan kepada desa-desa di sekitar wilayah kerjanya.

3. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) menjadi salah satu kegiatan rutin perseroan dalam mendukung pencegahan stunting pada balita di desa sekitar operasional perusahaan. Ada 7 posyandu yang menjadi binaan perseroan, bekerja sama dengan UPTD PKM Long Loreh. Selain pada balita, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga diberikan pada lansia yang tergabung dalam kegiatan Posyandu Lansia.

Community Relation Program

1. Books Donation/Early Literacy Class

In the field of education, throughout 2020 the Company focused on activities to develop literacy and reading interest in early grades. These activities included literacy activities at the Company's 4 partner reading gardens, as well as the provision of books for reading gardens, 2 elementary schools and 1 junior high school in Malinau Selatan and Malinau Selatan Hulu Sub-Districts.

2. Covid-19 Pandemic Mitigation

As part of its responsibility, the Company also played an active role in Covid-19 pandemic mitigation efforts. Over the course of the pandemic, the Company provided assistance to healthcare facilities and medical personnel in Malinau Regency. The Company also built emergency hand sinks for public facilities, donated masks and personal protective equipment to medical personnel at Malinau General Hospital, UPTD Long Loreh Community Healthcare Center, and Langap Pratama Hospital. The Company also actively conducted dissemination together with UPTD Long Loreh Community Healthcare Center medical personnel regarding the Covid-19 pandemic, as well as donating disinfectants to villages around its working area.

3. Supplementary Food Provision

Supplementary Food Provision is one of the Company's regular activities to support the prevention of stunting in toddlers in villages around the Company's operational areas. There are 7 Integrated Health Service Posts (Posyandu) developed by the Company in collaboration with Long Loreh Community Healthcare Center. Apart from toddlers, Supplementary Food Provision is also aimed at the elderly who are part of the Elderly Posyandu activities.



Program Pelayanan Masyarakat

1. Perbaikan Sarana dan Prasarana Sosial

Di tahun 2020, Perseroan membangun dan memperbaiki beberapa sarana dan prasarana sosial di sekitar wilayah kerjanya. Salah satunya adalah pembangunan jembatan kelompok tani di Desa Malinau Kota untuk mempermudah mereka mengolah lahannya. Perseroan turut pula melaksanakan pemasangan listrik desa di Desa Long Loreh, Langap, Nunuk Tanah Kibang (NTK) dan Laban Nyarit, Kecamatan Malinau Selatan. Sasaran bantuan pemasangan listrik desa mencakup rumah tangga miskin, serta fasilitas umum seperti gedung SD dan SMP, gereja, dan balai adat.

Perseroan juga bersinergi dengan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) TNI untuk melaksanakan perbaikan dan perataan jalan desa sepanjang 10 km RT 03 Desa Sengayan. Perseroan pun terlibat kegiatan penyemenan jalan akses masyarakat di RT 6 Liyumahan Desa Long Loreh. Selain itu, Perseroan turut melaksanakan perataan lahan di Desa Sempayang. Lahan ini ke depannya akan dikembangkan menjadi lahan pasar desa mengingat selama ini Desa Sempayang belum memiliki fasilitas tersebut. Pasar itu nantinya akan dikelola oleh BUMDes Sempayang Baru Jaya sebagai unit usaha Desa Sempayang.

2. Donasi Lainnya

Perseroan juga rutin memberikan bantuan kepada desa-desa di sekitar wilayah operasionalnya. Bantuan tersebut antara lain berupa bantuan kemasyarakatan untuk mengadakan acara keagamaan masyarakat, bantuan kegiatan Sumpah Pemuda, bantuan perbaikan fasilitas pendidikan bagi PAUD dan TK di desa, bantuan solar rutin kepada desa-desa yang masih menggunakan genset sebagai sumber utama penerangan, dan lain sebagainya.

Community Service Program

1. Public Facilities and Infrastructures Repair

In 2020, the Company built and repaired a number of public facilities and infrastructures around its working area. These efforts included the construction of a bridge for farmer groups in Malinau Kota Village to make it easier for them to cultivate their land. The Company also installed village electricity in Long Loreh, Langap, Nunuk Tanah Kibang (NTK), and Laban Nyarit Villages, Malinau Selatan Sub-District. The village electricity installation was aimed at poor households, as well as public facilities such as elementary and junior high school buildings, churches, and traditional centers.

The Company also synergized with the Indonesian Military (TNI)'s Regular Integrated Village Development (TMMD) Program to repair and flatten a 10-km village road in RT 03 Neighborhood Unit, Sengayan Village. Moreover, the Company contributed to efforts to cement the community access road in RT 6 Liyumah Neighborhood Unit, Long Loreh Village. In addition, the Company leveled the land in Sempayang Village to be developed into village market as the village has yet to have said infrastructure. The market will be managed by BUMDes Sempayang Baru Jaya, an enterprise owned by Sempayang Village.

3. Other Donations

The Company also regularly provided assistance to villages around its operational area. The assistance, among others, included support for community religious events, Youth Pledge commemoration, the repair of early childhood education and kindergarten facilities in villages, the regular provision of diesel fuel to villages that still use generators as the main source of power, et cetera.



Indeks Kepuasan Masyarakat

Perseroan mengukur kinerja program tanggung jawab sosial yang dijalankan di masyarakat, menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Kinerja dan Kepentingan. IKM terdiri dari unsur-unsur perencanaan (2 unsur), pelaksanaan (8 unsur), monitoring dan evaluasi (2 unsur), dampak (1 unsur) dan keberlanjutan (1 unsur) program PPM secara umum (keseluruhan program) dan program PPM secara khusus.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja

Nilai IKM Kinerja keseluruhan program PPM Perseroan mencapai **76,77** dari 85 responden. Mengacu kepada Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 14 Tahun 2017 maka nilai tersebut dapat dikategorikan **baik** atau nilai **B** karena berada di antara nilai kinerja 3,0644-3,532.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kepentingan

Nilai IKM Kepentingan keseluruhan program PPM PT MA mencapai nilai **88,51** dari 85 responden. Mengacu kepada Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 maka IKM kepentingan keseluruhan program Perseroan dapat dikategorikan **Sangat Penting** atau nilai **A** karena berada di antara nilai kepentingan 3,5324- 4,00.

Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk mengevaluasi program yang dijalankan, mengetahui kinerja penyelenggara program, serta mengetahui tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan program yang dilakukan. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat ini nantinya menjadi salah satu acuan Perseroan untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Community Satisfaction Index

The Company measures the performance of its social responsibility program implemented in the community using the Community Satisfaction Index (CSI) with regard to Performance and Importance. The Index consists of elements of planning (2 elements), implementation (8 elements), monitoring and evaluation (2 elements), impact (1 element) and sustainability (1 element) of the community development program (CDP) as a whole as well as specific community development programs.

1. Community Satisfaction Index with regard to Performance

With regard to Performance, the Company's overall CDP was rated 76.77 by 85 respondents. Pursuant to Administrative and Bureaucratic Reform Minister Decree No. 14/2017, the aforementioned rating is categorized as good or B as it is between the performance values of 3.0644 and 3.532.

2. Community Satisfaction Index with regard to Importance

With regard to Importance, the Company's overall CDP was rated 88.51 by 85 respondents. Pursuant to Administrative and Bureaucratic Reform Minister Decree No. 14/2017, the aforementioned rating is categorized as Very Important or A as it falls between the importance values of 3.5324 and 4.00.

The Community Satisfaction Index is utilized to evaluate the program being implemented, to learn about the performance of program administrators, and to determine the level of satisfaction of the beneficiaries with regard to the basic needs of the community based on the program being carried out. The results of the Community Satisfaction Index will be used as one of the Company's references in carrying out corporate social responsibility in community development and empowerment.

// Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Mitrabara Adiperdana Tbk tahun 2020

Statement of Members of Board of Commissioners and Board of Directors on the Responsibility for the 2020 Annual Report of PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Mitrabara Adiperdana Tbk tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, testify that all information in the 2020 Annual Report of PT Mitrabara Adiperdana Tbk is presented in its entirety and we are fully responsible for the validity of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, April 2021

Jakarta, April 2021

Dewan Komisaris Board of Commissioners



Kenji Tomisawa
Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner



Arie Prabowo Ariotedjo
Komisaris Utama
President Commissioner



Abdullah Fawzy Siddik
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi Board of Directors



Khoirudin
Direktur Utama
President Director



Hidefumi Kodama
Wakil Direktur Utama
Vice President Director



Ir. Syadaruddin
Direktur
Director



Eric Rahardja
Direktur
Director

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



Pada tahun 2020, Perseroan membukukan pendapatan sebesar US\$201,2 juta dan laba bersih sebesar US\$27,5 juta.

In 2020, the Company posted US\$201.2 million revenue and US\$27.5 million net profit.

**PT Mitrabara Adiperdana Tbk
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries***

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements as of December 31, 2020 and for the year then ended with independent auditors' report

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Statement of Directors</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-2	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	3-4	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	7-98	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTORS' STATEMENT REGARDING**

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2020 DAN 2019,
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**THE RESPONSIBILITY
FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT 31 DECEMBER 2020 AND 2019,
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES**

Atas nama Dewan Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

Nama : Khoirudin
Alamat : Jl. Suryopranoto No. 2 Komplek
Harmoni Blok 8A
Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 6385 1140
Jabatan : Direktur Utama

Name : Khoirudin
Address : Jl. Suryopranoto No. 2 Komplek
Harmoni Blok 8A
Jakarta Pusat
Telephone : 021 - 6385 1140
Position : President Director

Nama : Eric Rahardja
Alamat : Jl. Suryopranoto No. 2 Komplek
Harmoni Blok 8A
Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 6385 1140
Jabatan : Direktur

Name : Eric Rahardja
Address : Jl. Suryopranoto No. 2 Komplek
Harmoni Blok 8A
Jakarta Pusat
Telephone : 021 - 6385 1140
Position : Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Mitrabara Adiperdana Tbk dan entitas anaknya ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Mitrabara Adiperdana Tbk and its subsidiaries (the "Group");*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;*
b. *The Group's consolidated financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and*
4. *We are responsible for the Group's internal control systems.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi:

For and on behalf of the Board of Directors:

Jakarta, 23 Maret/March 2021

Khoirudin
Direktur Utama / President Director

Eric Rahardja
Direktur / Director

PT. MITRABARA ADIPERDANA, Tbk.

GRHA BARAMULTI, Komp. Harmoni Blok A8, Jl. Suryopranoto No. 2
Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130 - Indonesia
- T. (62-21) 6385 6211 - F. (62-21) 6385 2326 - E.ma@baramultigroup.co.id
www.mitrabaraadiperdana.co.id

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00264/2.1032/AU.1/02/0696-1/1/III/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Mitrabara Adiperdana Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00264/2.1032/AU.1/02/0696-1/1/III/2021

**The Shareholders and Boards of Commissioners and Directors
PT Mitrabara Adiperdana Tbk**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Mitrabara Adiperdana Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00264/2.1032/AU.1/02/0696-1/1/III/2021 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Mitrabara Adiperdana Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00264/2.1032/AU.1/02/0696-1/1/III/2021 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Mitrabara Adiperdana Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00264/2.1032/AU.1/02/0696-1/1/III/2021 (lanjutan)

Hal lain

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain, yang menyatakan opini tanpa modifikasian dalam laporan No. 00650/2.1025/AU.2/02/0243-3/1/IV/2020 tanggal 21 April 2020.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00264/2.1032/AU.1/02/0696-1/1/III/2021 (continued)

Other matter

The consolidated financial statements as of December 31, 2019 and for the year then ended, were audited by other independent auditors, who expressed an unmodified opinion on their report No. 00650/2.1025/AU.2/02/0243-3/1/IV/2020 dated April 21, 2020.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Indrajuwana Komala Widjaja

Registrasi Akuntan Publik No.AP.0696/*Public Accountant Registration No. AP.0696*

23 Maret 2021/*March 23, 2021*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dollar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

	2020	Catatan/ Notes	2019	
Aset				Assets
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan setara kas	46.063.170	4	29.103.941	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	43.000.000	4	62.000.000	<i>Short-term investment</i>
Piutang usaha		5		<i>Trade receivables</i>
Pihak berelasi	3.294.926	24	3.920.196	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	16.776.000		24.161.282	<i>Third parties</i>
Piutang lain-lain				<i>Other receivables</i>
Pihak berelasi	491.788	24	83.560	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	372.440		265.727	<i>Third parties</i>
Persediaan	13.090.584	6	11.390.183	<i>Inventories</i>
Uang muka pelanggan	873.502		849.332	<i>Advances to suppliers</i>
Biaya dibayar di muka	211.154	7	239.738	<i>Prepaid expenses</i>
Tagihan pajak pertambahan nilai	1.286.302	14	-	<i>Claims for value-added tax refund</i>
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka	167.814	14	49.407	<i>Prepaid value-added tax</i>
Aset lancar lainnya	22.472		27.350	<i>Other current assets</i>
Total Aset Lancar	125.650.152		132.090.716	Total Current Assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Kas yang dibatasi penggunaannya	4.617.994	28	1.843.802	<i>Restricted cash</i>
Tagihan pajak penghasilan	-	14	8.017.535	<i>Claims for income tax refund</i>
Investasi pada ventura bersama	12.710.438	11	12.723.822	<i>Investment in joint ventures</i>
Aset pajak tangguhan	3.780.758	14	3.676.180	<i>Deferred tax assets</i>
Aset hak-guna	7.322.111	9	-	<i>Right-of-use assets</i>
Aset tetap	23.422.018	10	29.843.952	<i>Fixed assets</i>
Properti pertambangan	3.115.300	8	3.806.603	<i>Mine properties</i>
Aset tidak lancar lainnya	1.354.331		524.679	<i>Other non-current assets</i>
Total Aset Tidak Lancar	56.322.950		60.436.573	Total Non-current Assets
Total Aset	181.973.102		192.527.289	Total Assets

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dollar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

	2020	Catatan/ Notes	2019	
Liabilitas dan Ekuitas				Liabilities and Equity
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang usaha		12		Trade payables
Pihak ketiga	5.605.197		6.505.194	Third parties
Pihak berelasi	160.962	24	1.205.361	Related parties
Utang lain-lain - Pihak ketiga	50.407		61.162	Other payables - Third parties
Biaya masih harus dibayar	16.375.393	13	20.213.984	Accrued expenses
Utang pajak	3.095.609	14	3.944.944	Taxes payable
Utang sewa pembiayaan	-	15	49.272	Finance lease payables
Bagian lancar atas:				Current maturities of:
Utang bank jangka panjang	4.675.057	15	4.675.058	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	3.597.673	9	-	Lease liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek	33.560.298		36.654.975	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-current Liabilities
Utang bank jangka panjang	-	15	4.675.058	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	3.949.244	9	-	Lease liabilities
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	3.454.205	28	3.298.966	Provision for mine reclamation and closure
Liabilitas imbalan kerja	2.789.179	16	2.257.900	Employee benefits liability
Total Liabilitas Jangka Panjang	10.192.628		10.231.924	Total Non-current Liabilities
Total Liabilitas	43.752.926		46.886.899	Total Liabilities
Ekuitas				Equity
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to the Owners of the Parent
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham				Share capital - par value of Rp100 per share
Modal dasar - 3.900.000.000 saham				Authorised - 3,900,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.227.271.952 saham	10.743.672	17	10.743.672	Issued and fully paid - 1,227,271,952 shares
Tambahan modal disetor	15.415.593	18	15.415.593	Additional paid-in capital
Selisih akuisisi kepentingan nonpengendali	237.206	18	237.206	Difference arising from acquisitions of non-controlling interests
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	51.824		(27.041)	Exchange differences on translation of financial statements
Saldo laba:				Retained earnings:
Cadangan umum	2.148.734		2.148.734	Appropriated for general reserve
Belum ditentukan penggunaannya	109.622.653		117.121.800	Unappropriated
	138.219.682		145.639.964	
Kepentingan Nonpengendali	494		426	Non-controlling Interests
Total Ekuitas	138.220.176		145.640.390	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	181.973.102		192.527.289	Total Liabilities and Equity

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dollar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

	2020	Catatan/ Notes	2019	
Pendapatan	201.207.287	20	260.849.803	Revenue
Beban pokok penjualan	(134.218.223)	21	(169.429.055)	Cost of revenue
Laba bruto	66.989.064		91.420.748	Gross profit
Beban penjualan	(23.733.920)	22	(32.848.684)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(8.382.693)	23	(9.395.118)	General and administrative expenses
Penghasilan operasi lain	1.763.865		604.061	Other operating income
Beban operasi lain	(132.352)		(1.381.776)	Other operating expenses
Laba usaha	36.503.964		48.399.231	Operating profit
Penghasilan keuangan	2.621.904		1.709.182	Finance income
Pajak final atas penghasilan keuangan	(524.381)		(341.837)	Final tax on finance income
Beban keuangan	(1.214.511)		(571.229)	Finance costs
Bagian atas rugi ventura bersama	(13.384)	11	(756.683)	Share in loss of joint ventures
Laba sebelum pajak penghasilan	37.373.592		48.438.664	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(9.906.106)	14	(13.151.107)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	27.467.486		35.287.557	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:				Item that will not be reclassified to profit or loss:
(Rugi)/laba atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(322.349)	16	174.281	(Loss)/gain on re-measurement of employee benefits liability
Pengaruh pajak penghasilan	70.917	14	(43.570)	Income tax effect
Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:				Item that will be reclassified to profit or loss:
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	78.865		40.868	Exchange differences on translation of financial statements
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(172.567)		171.579	Other comprehensive income for the year, net of tax
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	27.294.919		35.459.136	Total comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dollar AS, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)**

	2020	Catatan/ Notes	2019	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				<i>Profit for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk	27.467.417		35.287.482	<i>Owners of the parent entity</i>
Kepentingan nonpengendali	69		75	<i>Non-controlling interests</i>
Total	27.467.486		35.287.557	Total
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				<i>Total comprehensive income for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk	27.294.851		35.459.061	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan nonpengendali	68		75	<i>Non-controlling interests</i>
Total	27.294.919		35.459.136	Total
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0,022	19	0,029	<i>Basic earnings per share attributable to owners of the parent entity</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT MITRABARA ADIPERDANA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dollar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)

**Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/
 Equity Attributable to the Owners of the Parent**

Catatan/ Notes	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Share Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Selisih Akuisisi Kepentingan Nonpengendali/ Difference Arising from Acquisitions of Non-controlling Interests	Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan/ Exchange Differences on Translation of Financial Statements	Saldo Laba/ Retained Earnings	Total/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interests	Total Ekuitas/ Total Equity	
Saldo per 1 Januari 2019	10.743.672	15.415.593	237.206	(67.909)	97.852.341	124.180.903	351	124.181.254	Balance at January 1, 2019
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	35.287.482	35.287.482	75	35.287.557	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	40.868	130.711	171.579	-	171.579	Other comprehensive income
Dividen kas	17	-	-	-	(14.000.000)	(14.000.000)	-	(14.000.000)	Cash dividend
Saldo per 31 Desember 2019	10.743.672	15.415.593	237.206	(27.041)	119.270.534	145.639.964	426	145.640.390	Balance at December 31, 2019
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	27.467.417	27.467.417	69	27.467.486	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	78.865	(251.431)	(172.566)	(1)	(172.567)	Other comprehensive income
Dividen kas	17	-	-	-	(34.715.133)	(34.715.133)	-	(34.715.133)	Cash dividend
Saldo per 31 Desember 2020	10.743.672	15.415.593	237.206	51.824	111.771.387	138.219.682	494	138.220.176	Balance at December 31, 2020

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dollar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

	2020	Catatan/ Notes	2019	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	209.217.839		261.096.678	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan beban operasi	(145.887.628)		(176.830.858)	Cash paid to suppliers and operating expenses
Pembayaran royalti	(8.108.410)		(12.342.920)	Payments of royalty
Pembayaran kepada karyawan	(9.898.350)		(10.560.580)	Payments to employees
Kas yang diperoleh dari operasi	45.323.451		61.362.320	Cash generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan	(2.436.902)		(10.297.736)	Payments of income taxes
Penerimaan penghasilan bunga	2.097.523		1.367.345	Interest received
Pembayaran beban bunga	(367.919)		(571.229)	Payments of interest expense
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	44.616.153		51.860.700	Net Cash Provided by Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Penarikan/(penempatan) investasi jangka pendek	19.000.000		(62.000.000)	Withdrawal/(placement) of short-term investment
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	(2.814.871)		(560.766)	Placement of restricted cash
Penambahan aset tetap	(801.213)	10	(3.441.154)	Additions to fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	3.847	10	91.686	Proceeds from sales of fixed assets
Kas Neto yang Diperoleh dari/ (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	15.387.763		(65.910.234)	Net Cash Provided by/(Used in) Investing Activities
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	-	25	(4.940)	Payments of consumer financing loans
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(48.559)	25	(95.495)	Payments of obligation under finance lease
Penerimaan utang bank	-	25	7.015.977	Proceeds from bank loans
Pembayaran utang bank	(4.675.059)	25	(4.037.241)	Repayment of bank loans
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham	(34.715.133)	17	(14.000.000)	Payments of cash dividends to shareholders
Pembayaran liabilitas sewa	(4.017.871)	25	-	Payments of lease liabilities
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(43.456.622)		(11.121.699)	Net Cash Used in Financing Activities
Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	16.547.294		(25.171.233)	Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	29.103.941		54.261.741	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Dampak Neto Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan Setara Kas	411.935		13.433	Net Effects of Changes in Rates on Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	46.063.170		29.103.941	Cash and Cash Equivalents at End of the Year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Mitrabara Adiperdana Tbk ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1992 berdasarkan Akta Notaris H.A. Kadir Usman, S.H. No. 34. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-8887.HT.01.01.TH'92 tanggal 28 Oktober 1992. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 28 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., tanggal 20 Oktober 2020, sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0406035 pada tanggal 10 November 2020.

Kegiatan utama Perusahaan dan entitas anaknya (secara bersama-sama dirujuk sebagai "Kelompok Usaha") mencakup pertambangan, perdagangan dan perindustrian batubara. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Grha Baramulti, Jl. Suryopranoto No. 2, Komplek Harmoni Blok A-8, Jakarta Pusat. Perusahaan memiliki tambang batubara yang terletak di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (dahulu Kalimantan Timur).

Perusahaan memulai tahap produksi pada tahun 2008.

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ini, yang telah disusun, diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 23 Maret 2021.

Ny. Ghan Djoe Hiang adalah pemegang saham pengendali akhir Perusahaan.

b. Penawaran umum dan aksi korporasi yang mempengaruhi modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh

Pada tanggal 30 Juni 2014, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan atau "OJK" mengenai penawaran umum saham perdana.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Mitrabara Adiperdana Tbk (the "Company") was established in the Republic of Indonesia on May 29, 1992 based on the Notarial Deed No. 34 of H.A. Kadir Usman, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice as stated in Decision Letter No. C2-8887.HT.01.01.TH'92 dated October 28, 1992. The Company's Articles of Association have been amended several times, the most recent of which was documented in the Notarial Deed No. 28 of Liestiani Wang, S.H., M.Kn., dated June 20, 2020, in relation to changes in members of the Company's Boards of Commissioners and Directors. The said amendment was received by the Minister of Law and Human Rights in Letter No. AHU-AH.01.03-0406035 on 10 November 2020.

The principal activities of the Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") are coal mining, trading and industrial services. The Company's registered office address is at Grha Baramulti, Jl. Suryopranoto No. 2, Komplek Harmoni Block A-8, Central Jakarta. The Company's coal mines are located in the Regency of Malinau, Province of North Kalimantan (previously East Kalimantan).

The Company started its production stage in 2008.

The management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements, which were prepared, completed and authorised for issuance by the Company's Board of Directors on March 23, 2021.

Mrs. Ghan Djoe Hiang is the Company's ultimate controlling shareholder.

b. Public offering and corporate actions affecting issued and fully paid share capital

On June 30, 2014, the Company obtained an effective statement from the Board of Commissioners of the Indonesian Financial Services Authority or "Otoritas Jasa Keuangan" ("OJK") regarding the initial public offering.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum dan aksi korporasi yang mempengaruhi modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh (lanjutan)

Perusahaan melakukan penawaran umum saham sebesar 245.454.400 saham yang terdiri dari 122.727.200 saham baru dan 122.727.200 saham divestasi milik PT Wahana Sentosa Cemerlang dengan nilai nominal sebesar Rp100 (angka penuh) per saham melalui Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran sebesar Rp1.300 (angka penuh) per saham.

c. Manajemen kunci dan informasi lainnya

Susunan dewan komisaris dan direksi serta komite audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Arie Prabowo Ariotedjo
Wakil Komisaris Utama	Kenji Tomisawa
Komisaris Independen	Abdullah Fawzy Siddik
Dewan Direksi	
Direktur Utama	Khoirudin
Wakil Direktur Utama	Hidefumi Kodama
Direktur	Ir. Syadaruddin
Direktur	Eric Rahardja
Komite Audit	
Ketua	Abdullah Fawzy Siddik
Anggota	Dadan Gunawan
Anggota	Dini Rosdini

Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha memiliki 639 orang (2019: 459) karyawan tetap (tidak diaudit).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah kompensasi bagi manajemen kunci yang terdiri atas Komisaris dan Direktur adalah sebesar AS\$1.516.472 (2019: AS\$1.592.143).

1. GENERAL (continued)

b. Public offering and corporate actions affecting issued and fully paid share capital (continued)

The Company made a public offering of its 245,454,400 shares that consisted of 122,727,200 new shares and 122,727,200 divestment shares owned by PT Wahana Sentosa Cemerlang with a par value of Rp100 (full amount) per share through the Indonesia Stock Exchange at the offering price of Rp1,300 (full amount) per share.

c. Key management and other information

The composition of the Company's boards of commissioners and directors and audit committee as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
			Board of Commissioners
		Yo Angela Soedjana	President Commissioner
		Fumitake Uyama	Vice President Commissioner
		Abdullah Fawzy Siddik	Independent Commissioner
			Board of Directors
		Widada	President Director
		Hidefumi Kodama	Vice President Director
		Ir. Syadaruddin	Director
		Deden Ramdhan	Director
			Audit Committee
		Abdullah Fawzy Siddik	Chairman
		Alip	Member
		Dini Rosdini	Member

As of December 31, 2020, the Group has a total of permanent 639 employees (2019: 459) (unaudited).

For the year ended December 31, 2020, the total compensation for the key management which consists of Commissioners and Directors amounted to US\$1,516,472 (2019: US\$1,592,143).

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Struktur perusahaan dan entitas anak

Entitas anak yang dimiliki oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Entitas anak/ Subsidiaries	Kegiatan usaha/ Business activities	Domisili/ Domicile	Awal operasi komersial/ Start of Commercial operations	Persentase Kepemilikan Efektif Kelompok Usaha (%) Effective Percentage of Ownership of Group (%)		Total Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Eliminations	
				2020	2019	2020	2019
PT Baradinamika Mudasukses ("BDMS")	Pertambangan/ Mining	Jakarta	1997	99,999	99,999	60.377.659	52.727.778
PT Mitra Malinau Energi ("MME")	Pembangkit listrik tenaga biomassa/ Biomass power plant	Jakarta	¹⁾	99,999	99,999	686.503	697.863
PT Malinau Hijau Lestari ("MHL")	Perkebunan/ Plantation	Jakarta	¹⁾	99,999	99,999	2.127.707	443.381

¹⁾ Dalam tahap pengembangan/Under development stage

1. GENERAL (continued)

d. Corporate structure and subsidiaries

The Company's subsidiaries as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

e. Daerah pengembangan

Perusahaan

Lokasi/ Location	Tanggal perolehan izin pertambangan/ Mining license acquisition date	Tahun/ Years
Malinau	Izin Usaha Pertambangan ("IUP") - 1 Agustus 2003/Mining Right (Izin Usaha Pertambangan or the "IUP") - August 1, 2003	20 tahun/ years

e. Area of interests

The Company

BDMS

BDMS

Lokasi/ Location	Tanggal perolehan izin eksploitasi/ Exploitation license acquisition date	Tahun/ Years
Malinau	IUP - 28 Desember 2009/ IUP - 28 December 2009 Pada tanggal 24 Juli 2017, BDMS memperoleh perpanjangan izin eksploitasi selama 10 tahun dari Gubernur Provinsi Kalimantan Utara/ On July 24, 2017, BDMS obtained an extension of the exploitation license for 10 years from the Governor of North Kalimantan Province	10 tahun/ years

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Kelompok Usaha adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b dibawah ini.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Kelompok Usaha menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, termasuk standar baru dan/atau yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan" or "OJK").

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

b. Changes in accounting principles

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2020, including the following new and/or revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group:

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 menggantikan PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yang menggabungkan ketiga aspek akuntansi untuk instrumen keuangan: klasifikasi dan pengukuran; penurunan nilai; dan akuntansi lindung nilai.

Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK 71 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi, dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020 dan menyesuaikan dampak penerapan pada tanggal tersebut.

Penilaian model bisnis dan apakah aset keuangan memenuhi persyaratan pembayaran pokok dan Bunga ("SPPB") dilakukan pada tanggal 1 Januari 2020.

Dampak terhadap klasifikasi aset keuangan Kelompok Usaha pada pos-pos dalam laporan keuangan konsolidasian atas penerapan pertama kali PSAK 71 adalah sebagai berikut:

PSAK 55

*Pinjaman yang diberikan dan piutang/
Loans and receivables:*
Piutang Usaha/*Trade Receivables*
Piutang lain-lain/*Other Receivables*

PSAK 71 mengharuskan Kelompok usaha untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian ("KKE") pada semua aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL dan jaminan keuangan. Kelompok usaha sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Changes in accounting principles
(continued)**

PSAK 71: Financial Instruments

PSAK 71 replaces PSAK 55: *Financial Instruments: Recognition and Measurement for annual periods beginning on or after January 1, 2020, bringing together all three aspects of the accounting for financial instruments: classification and measurement; impairment; and hedge accounting.*

The Group has applied PSAK 71 using modified retrospectively approach, with the initial application date of January 1, 2020 and adjusting the impact of adoption at that date.

The assessment of the business model and whether the financial assets meet solely payments for principal and interests ("SPPI") requirements was made as of January 1, 2020.

The impact to classification of the Group's financial assets in the consolidated financial statements line items upon the first time adoption of the PSAK 71 are as follows:

Pada tanggal 1 Januari 2020/As of January 1, 2020

PSAK 71		
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("NWLRL")/ <i>Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")</i>	Biaya Perolehan Diamortisasi/ <i>Amortised Cost</i>	Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("NWPKL")/ <i>Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVOCI")</i>
PSAK 55		
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables:</i>		
Piutang Usaha/ <i>Trade Receivables</i>	28.081.478	-
Piutang lain-lain/ <i>Other Receivables</i>	349.287	-

PSAK 71 requires the Group to record expected credit losses ("ECL") on all of its financial assets measured at amortised cost or FVOCI and financial guarantees. The Group previously recorded impairment based on the incurred loss model when there is objective evidence that financial asset is impaired.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

PSAK 71: Instrumen Keuangan (lanjutan)

Setelah penerapan PSAK 71, Kelompok usaha menerapkan pendekatan yang disederhanakan menggunakan matriks pencadangan dengan menyertakan informasi masa depan (*forward looking information*) yang relevan untuk menilai KKE atas semua piutang usaha dan piutang lain-lain yang tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan. Tidak ada pengaruh signifikan pada laporan keuangan konsolidasian dalam penerapan PSAK 71 pada Kelompok Usaha.

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 72 menggantikan PSAK 34: *Kontrak Konstruksi*, PSAK 44: *Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate*, PSAK 23: *Pendapatan* dan Interpretasi terkait dan berlaku, dengan pengecualian terbatas, untuk semua pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggannya.

PSAK 72 menetapkan model lima langkah untuk memperhitungkan pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Berdasarkan PSAK 72, pendapatan diakui pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang diserahkan kepada pelanggan.

PSAK 72 mengharuskan Kelompok Usaha untuk melakukan pertimbangan, dengan menyertakan semua fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan setiap langkah dari model pada kontrak dengan pelanggan mereka. Selain itu, standar ini mensyaratkan pengungkapan yang luas atas pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Tidak ada pengaruh signifikan pada laporan keuangan konsolidasian dalam penerapan PSAK 72 pada Kelompok Usaha.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Changes in accounting principles
(continued)**

PSAK 71: Financial Instruments (continued)

Upon adoption of PSAK 71, the Group applies the simplified approach using provision matrix with relevant forward-looking information to assess the ECL on trade and other receivables which do not have significant financing component. There is no significant effect in the consolidated financial statements on the adoption of PSAK 71 at The Group.

PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers

PSAK 72 supersedes PSAK 34: *Construction Contracts*, PSAK 44: *Accounting for Real Estate Development Activity*, PSAK 23: *Revenue and related Interpretations and it applies, with limited exceptions, to all revenue arising from contracts with its customers.*

PSAK 72 establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers. Under PSAK 72, revenue is recognized at an amount that reflects the consideration which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer.

PSAK 72 requires the Group to exercise judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when applying each step of the model to contracts with their customers. In addition, the standard requires extensive disclosures about revenue from contracts with customers. There is no significant effect in the consolidated financial statements on the adoption of PSAK 72 at The Group.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa, ISAK 8: *Penentuan apakah suatu Perjanjian mengandung suatu Sewa*, ISAK 23: *Sewa Operasi-Insentif* dan ISAK 24: *Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Bentuk Legal Sewa*. Standar tersebut menetapkan prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa dan mengharuskan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa pada laporan posisi keuangan.

Akuntansi pesewa berdasarkan PSAK 73 secara substansial tidak berubah dari PSAK 30. Pesewa akan tetap menetapkan klasifikasi sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dengan menggunakan prinsip yang sama seperti dalam PSAK 30. Oleh karena itu, PSAK 73 tidak berdampak pada pengaturan sewa yang Kelompok Usaha adalah pesewa.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 73 menggunakan metode retrospektif modifikasi adopsi dengan efek kumulatif pada awalnya menerapkan standar sebagai penyesuaian terhadap saldo laba awal pada tanggal penerapan awal, 1 Januari 2020.

Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kendali. PSAK 73 menentukan apakah suatu kontrak mengandung sewa berdasarkan apakah pelanggan (penyewa) memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian untuk periode waktu tertentu. Kelompok Usaha juga menggunakan cara praktis yang tersedia dalam aturan transisi untuk menerapkan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang serupa.

Pada penerapan PSAK 73, Kelompok Usaha mengakui aset hak-guna sebesar AS\$10.983.167 dan liabilitas sewa sebesar AS\$10.983.167 untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi pada tanggal 1 Januari 2020.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Changes in accounting principles
(continued)**

PSAK 73: Leases

PSAK 73 supersedes PSAK 30: Leases, ISAK 8: *Determining whether an Arrangement contains a Lease*, ISAK 23: *Operating Leases-Incentives and ISAK 24: Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease*. The standard sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to recognize most leases on the statement of financial position.

Lessor accounting under PSAK 73 is substantially unchanged from PSAK 30. Lessors will continue to classify leases as either operating or finance leases using similar principles as in PSAK 30. Therefore, PSAK 73 did not have an impact for leases where the Group is the lessor.

The Group adopted PSAK 73 using modified retrospective method of adoption with the cumulative effect of initially applying the standard as an adjustment to the opening retained earnings at the date of initial application, January 1, 2020.

The change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether the customer (lessee) has the right to control the use of an identified asset for a period of time. The Group also made use of the practical expedient available on transition rule to apply a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics.

On the adoption of PSAK 73, the Group recognized right-of-use assets of US\$10,983,167 and lease liabilities of US\$10,983,167 for its leases previously classified as operating lease of January 1, 2020.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

PSAK 73: Sewa (lanjutan)

Saat mengukur liabilitas sewa, Kelompok Usaha mendiskontokan pembayaran sewa masa depan menggunakan suku bunga indikatif inkremental pada tanggal dimulainya sewa yang telah ditentukan sebesar 9,36%. Liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 dapat direkonsiliasi dengan komitmen sewa operasi pada tanggal 31 Desember 2019, sebagai berikut:

Komitmen sewa operasi	13.759.356
Komitmen terkait sewa aset bernilai rendah dan sewa jangka pendek	(1.119.580)
	<u>12.639.776</u>
Penyesuaian nilai kini	(1.656.609)
Komitmen sewa operasi yang didiskontokan dan kewajiban sewa	<u>10.983.167</u>

Standar Lain

Standar berikut ini juga berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, tetapi tidak mempengaruhi pelaporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha:

- ISAK 36: *Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa.*
- ISAK 35: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.*
- Amandemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* - judul laporan keuangan.
- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: *Definisi Material.*
- Amandemen PSAK 15: *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama - Kepentingan Jangka Panjang.*
- Amandemen PSAK 50, PSAK 66 dan PSAK 71: *Reformasi Acuan Suku Bunga (Tahap 1).*
- Amandemen PSAK 62: *Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62.*
- Amandemen PSAK 73: *Sewa - Konsesi Sewa Terkait Covid-19.*

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting principles (continued)

PSAK 73: Leases (continued)

When measuring lease liabilities, the Group discounted the future lease payments using its incremental indicative loan borrowing rate at the lease commencement date which was determined to be 9.36%. The lease liabilities as of January 1, 2020 can be reconciled to the operating lease commitments as of 31 December 2019, as follows:

Operating lease commitments	13.759.356
Commitments relating to leases of low-value assets and short term leases	(1.119.580)
	<u>12.639.776</u>
Present value adjustment	(1.656.609)
Discounted operating lease commitments and lease liabilities	<u>10.983.167</u>

Other Standards

The following standards were also effective for the period beginning on January 1, 2020, but did not affect the consolidated financial reporting of the Group:

- ISAK 36: *Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights, in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases.*
- ISAK 35: *Presentation of Financial Statements for Non-Profit Oriented Entities.*
- *Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements - the title of financial statements.*
- *Amendments to PSAK 1 and 25: Definition of Material.*
- *Amendments to PSAK 15: Investments in Associates and Joint Ventures - Long-term Interests.*
- *Amendments to PSAK 50, PSAK 66 and PSAK 71: Interest Rate Benchmark Reform (Phase 1).*
- *Amendments to PSAK 62: Insurance Contract - Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62.*
- *Amendments to PSAK 73: Lease - Covid-19 Related Rent Concessions.*

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Kelompok Usaha terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Kelompok Usaha tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Kelompok Usaha mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Kelompok Usaha memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berhenti pada saat Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Kelompok Usaha memperoleh kendali sampai tanggal Kelompok usaha tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

- i) Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,
- ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
- ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
- iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Kelompok Usaha dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan atas aset (termasuk goodwill), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

d. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Kelompok Usaha menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Principles of Consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

d. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
- ii) held primarily for the purpose of trading,*
- iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or*
- iv) cash or cash equivalents unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.*

All other assets are classified as non-current.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Klasifikasi lancar dan tak lancar (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, tidak digunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

f. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal ditentukan oleh karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Kelompok Usaha untuk mengelolanya. Pada pengakuan awal, Kelompok Usaha mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada NWLR, biaya transaksi. Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, yang kedalamnya Kelompok Usaha telah menerapkan cara praktis diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72, seperti diungkapkan pada Catatan 2q.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**d. Current and non-current classification
(continued)**

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle
- ii) held primarily for the purpose of trading
- iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents comprise cash on hand and in banks and time deposits with maturity of less than three months from the date of their placement, which are not pledged as collateral and not restricted in use.

f. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Group's business model for managing them. At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72, as disclosed in Note 2q.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari pokok belum dilunasi. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Kelompok Usaha untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pendapatan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- NWLR.

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kelompok Usaha mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari pokok yang belum dilunasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *FVTPL.*

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan diuji untuk penurunan nilai. Laba dan rugi diakui pada laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Kelompok Usaha yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk piutang usaha dan lain-lain.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir. Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat dan jumlah imbalan yang diterima dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dalam laba rugi.

Penurunan Nilai

Kelompok Usaha mengakui penyisihan KKE untuk semua instrumen utang yang bukan pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual sesuai kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Kelompok Usaha, didiskonto pada estimasi SBE awal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian dari ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes trade and other receivables.

Derecognition

A financial asset is derecognized when the contractual rights to receive the cash flows from the assets has expired. On derecognition of a financial asset in its entirety, the differences between the carrying amount and the sum of the consideration received and any cumulative gains or losses that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss.

Impairment

The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL).

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, terlepas dari jangka waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Kelompok Usaha menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Kelompok Usaha membentuk matriks pencadangan berdasarkan kerugian kredit masa lalu, disesuaikan dengan faktor-faktor spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi masa depan (*forward-looking*) yang relevan.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, bagi liabilitas keuangan dalam bentuk utang dan pinjaman, dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Kelompok Usaha menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha dan lain-lain, biaya masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan utang bank.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade and other payables, accrued expense, short-term employee benefits liability and bank loans.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Utang dan pinjaman

(i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

(ii) Utang dan Akrua

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Loans and borrowings

(i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

(ii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefits liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

g. Transactions with Related Parties

The company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 7.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 24.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

h. Persediaan

Persediaan batubara dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang yang mencakup biaya penambangan, biaya tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya, dan alokasi bagian biaya tidak langsung variabel dan tetap yang berkaitan dengan kegiatan penambangan. Biaya tersebut tidak termasuk biaya pinjaman. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Persediaan suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas, perlengkapan dan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Bahan pendukung kegiatan pemeliharaan dicatat sebagai beban produksi pada periode digunakan.

i. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**g. Transactions with Related Parties
(continued)**

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 24.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

h. Inventories

Coal inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined based on the weighted average method, which includes mining costs, direct labour costs, other direct costs and an appropriate portion of fixed and variable overheads related to mining operations. It excludes borrowing costs. The net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Spare parts, fuel, lubricants, tools and supplies are valued at cost less a provision for obsolete and slow moving inventory. Cost is determined based on the weighted average method. A provision for obsolete and slow-moving inventory is determined on the basis of estimated future usage or sale of individual inventory items. Supplies of maintenance materials are charged to production costs in the period in which they are used.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortised and charged to operations over the periods benefited.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Ventura Bersama

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini dicatat menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Akuisisi

Investasi pada ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi ventura bersama merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada ventura bersama dengan bagian Kelompok Usaha atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari ventura bersama dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

Metode ekuitas

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Kelompok Usaha atas laba rugi ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Kelompok Usaha atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Joint Venture

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

Acquisitions

Investment in joint venture is initially recognized at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as of the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

Goodwill on acquisition of joint venture represents the excess of the cost of acquisition of joint venture over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

Equity method of accounting

In applying the equity method of accounting, the Group's share of joint venture's post-acquisition profit or loss is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Ventura Bersama (lanjutan)

Metode ekuitas (lanjutan)

Jika bagian Kelompok Usaha atas rugi ventura bersama sebesar atau melebihi kepentingannya pada ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Kelompok Usaha memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Kelompok Usaha dengan ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Kelompok Usaha dalam ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

Dividen yang akan diterima dari ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Kelompok Usaha menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

Pelepasan

Investasi pada ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Kelompok Usaha tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Kelompok Usaha mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Joint Venture (continued)

Equity method of accounting (continued)

When the Group's share of the losses of joint venture equals or exceeds its interest in the joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognize further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the joint venture.

Unrealised gains on transactions between the Group and joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in the joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from joint venture are recognized as reductions in the carrying amounts of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the joint venture and its carrying value and recognizes the amount in profit or loss.

Disposals

An investment in joint venture is derecognized when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognized in profit or loss.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Ventura Bersama (lanjutan)

Pelepasan (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

k. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Kelompok Usaha memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Kelompok Usaha mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, Kelompok Usaha mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Joint Venture (continued)

Disposals (continued)

Gains and losses arising from partial disposal or dilution of an investment in joint venture in which significant influence is retained are recognized in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

k. Business Combinations

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

k. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Setiap imbalan kontinjensi yang akan ditransfer oleh perusahaan pengakuisisi akan diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya adalah diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yaitu instrumen keuangan dan dalam lingkup PSAK 71, diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 71. Imbalan kontinjensi lain yang tidak termasuk dalam PSAK 71 diukur sebesar nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan perubahan nilai wajar yang diakui pada laba rugi.

Bila pencatatan awal kombinasi bisnis belum dapat diselesaikan pada tanggal pelaporan, Kelompok Usaha melaporkan jumlah sementara bagi pos yang pencatatannya belum dapat diselesaikan tersebut.

Periode pengukuran adalah periode setelah tanggal akuisisi yang didalamnya Kelompok Usaha dapat melakukan penyesuaian atas jumlah sementara yang diakui dalam kombinasi bisnis tersebut. Selama periode pengukuran, Kelompok Usaha mengakui penambahan aset atau liabilitas bila terdapat informasi terbaru yang diperoleh mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi, yang bila diketahui pada saat itu, akan menyebabkan pengakuan atas aset dan liabilitas pada tanggal tersebut.

Periode pengukuran berakhir pada saat pengakuisisi menerima informasi yang diperlukan mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi atau mengetahui bahwa informasi lainnya tidak dapat diperoleh, namun tidak lebih dari satu tahun dari tanggal akuisisi.

l. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai maksud manajemen. Biaya perolehan tersebut juga termasuk biaya untuk mengganti komponen dari aset tetap pada saat penggantian, bila kriteria pengakuan terpenuhi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Business Combinations (continued)

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Contingent consideration classified as equity is not re-measured and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration classified as an asset or liability that is a financial instrument and within the scope of PSAK 71, is measured at fair value with the changes in fair value recognized in the statement of profit or loss in accordance with PSAK 71. Other contingent consideration that is not within the scope of PSAK 71 is measured at fair value at each reporting date with changes in fair value recognized in profit or loss.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete.

The measurement period is the period after the acquisition date during which the Group may adjust the provisional amounts recognized for a business combination. During the measurement period, the Group recognizes additional assets or liabilities if new information is obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

The measurement period ends as soon as the acquirer receives the information it was seeking about facts and circumstances that existed as of the acquisition date or learns that more information is not obtainable, but shall not exceed one year from the acquisition date.

l. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used. Such cost also includes the cost of replacing part of such fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset Tetap (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, aset ini dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Kelompok Usaha dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama yang lebih pendek antara estimasi umur aset atau umur tambang. Umur manfaat aset tetap diestimasi sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan dan prasarana	4-20
Mesin, alat berat dan kendaraan	3-8
Peralatan tambang	4-8
Perabot dan peralatan kantor	4

Jumlah tercatat aset ini direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu aset, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Fixed Assets (continued)

Subsequent to initial recognition, these assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of an asset is commenced when the asset is available for use in the manner intended by the Group and is computed using the straight-line method over the shorter between the estimated useful lives of the assets or the life of mine. The estimated useful lives of the assets as follows:

Building and infrastructure
Machinery, heavy equipment and vehicles
Mining equipment
Office furniture and fixtures

The carrying amounts of these assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

The carrying amount of an item of these assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.

The asset residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively if necessary.

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed. Assets under construction are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset Tetap (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat masa berlakunya selesai.

m. Pengeluaran Eksplorasi, Evaluasi dan Pengembangan Sumber Daya Mineral

Pengeluaran Sebelum Perolehan Ijin

Pengeluaran yang dilakukan sebelum perolehan ijin penambangan dibebankan pada saat terjadinya.

Pengeluaran untuk Eksplorasi dan Evaluasi

Pengeluaran untuk eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasi dan diakui sebagai "Aset Eksplorasi dan Evaluasi" untuk setiap daerah pengembangan (*area of interest*) apabila izin pertambangan telah diperoleh dan masih berlaku dan: (i) biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi daerah pengembangan, atau (ii) apabila kegiatan tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk menentukan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan, dalam daerah pengembangan (*area of interest*) terkait masih berlangsung. Pengeluaran ini meliputi penggunaan bahan pembantu dan bahan bakar, biaya survei, biaya pengeboran dan pengupasan tanah sebelum dimulainya tahap produksi dan pembayaran kepada kontraktor.

Setelah pengakuan awal, aset eksplorasi dan evaluasi dicatat menggunakan model biaya dan diklasifikasikan sebagai aset berwujud, kecuali memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset tak berwujud.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Fixed Assets (continued)

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Land are stated at cost and not amortized as the management is of the opinion that it is probable the titles of land rights can be renewed/extended upon expiration.

m. Mineral Resources Evaluation, Exploration and Development Expenditures

Pre-license Costs

Pre-license costs are expensed in the period in which they are incurred.

Exploration and Evaluation Expenditures

Exploration and evaluation expenditures are capitalized and recognized as "Exploration and Evaluation Assets" for each area of interest when mining rights are obtained and still valid and: (i) the costs are expected to be recouped through successful development and exploitation of the area of interest, or (ii) where activities in the area of interest have not reached the stage that allow a reasonable assessment of the existence of economically recoverable reserves, and active and significant operations in, or in relation to, the area of interest are continuing. These expenditures include materials and fuel used, surveying costs, drilling and stripping costs before the commencement of production stage and payments made to contractors.

After initial recognition, exploration and evaluation assets are subsequently measured using cost model and classified as tangible assets, unless they are qualified to be recognized as intangibles.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**m. Pengeluaran Eksplorasi, Evaluasi dan
Pengembangan Sumber Daya Mineral
(lanjutan)**

**Pengeluaran untuk Eksplorasi dan Evaluasi
(lanjutan)**

Pemulihan aset eksplorasi dan evaluasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji untuk penurunan nilai bila fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatatnya mungkin melebihi jumlah terpulihkannya. Dalam keadaan tersebut, maka entitas harus mengukur, menyajikan dan mengungkapkan rugi penurunan nilai terkait sesuai dengan PSAK 48.

Aset eksplorasi dan evaluasi ditransfer ke "Tambang dalam Pengembangan" pada akun "Aset Pertambangan" setelah ditetapkan bahwa tambang memiliki nilai ekonomis untuk dikembangkan.

Aset Pertambangan

Pengeluaran untuk Pengembangan Tambang

Pengeluaran untuk pengembangan tambang dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu daerah pengembangan (*area of interest*) setelah transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi namun sebelum dimulainya tahap produksi, sepanjang memenuhi kriteria pengakuan dikapitalisasi ke tambang dalam pengembangan.

Tambang Produktif

Pada saat pengembangan tambang diselesaikan dan tahap produksi dimulai, aset tersebut ditransfer ke "Tambang Produktif" pada akun "Aset Pertambangan", yang dicatat pada nilai perolehan, dikurangi deplesi dan akumulasi penurunan nilai.

Deplesi tambang produktif adalah berdasarkan metode unit produksi sejak daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut telah berproduksi secara komersial, selama periode waktu yang lebih pendek antara umur tambang dan sisa berlakunya IUP.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Mineral Resources Evaluation, Exploration
and Development Expenditures (continued)**

**Exploration and Evaluation Expenditures
(continued)**

The ultimate recoupment of deferred exploration expenditure is dependent upon successful development and commercial exploitation of the related area of interest. Exploration and evaluation assets shall be assessed for impairment when facts and circumstances suggest that the carrying amount of an exploration and evaluation asset may exceed its recoverable amount. In such a case, an entity shall measure, present and disclose any resulting impairment loss in accordance with PSAK 48.

Exploration and evaluation assets are transferred to "Mines under Construction" in the "Mine Properties" account after the mines are determined to be economically viable to be developed.

Mine Properties

Mine Development Expenditures

Mine development expenditures and incorporated costs in developing an area of interest subsequent to the transfer from exploration and evaluation assets but prior to the commencement of production stage in the respective area, as long as they meet the recognition criteria are capitalized to mines under construction.

Producing Mines

Upon completion of mine construction and the production stage is commenced, the assets are transferred into "Producing Mines" in the "Mine Properties" account, which are stated at cost, less depletion and accumulated impairment losses.

Depletion of producing mines are based on using unit-of-production method from the date of commercial production of the respective area of interest over the lesser of the life of the mine and the remaining terms of the IUP.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**m. Pengeluaran Eksplorasi, Evaluasi dan
Pengembangan Sumber Daya Mineral
(lanjutan)**

Aktivitas Pengupasan Tanah

Biaya pengupasan lapisan tanah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuang tanah penutup suatu tambang. Biaya pengupasan lapisan tanah yang terjadi pada tahap pengembangan tambang sebelum dimulainya produksi diakui sebagai biaya pengembangan tambang dan akan didepleksi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga.

Aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terjadi selama tahap produksi mungkin memiliki dua manfaat untuk kepentingan Kelompok Usaha: (i) batubara yang dapat diproses untuk menjadi persediaan dalam tahun berjalan; dan (ii) peningkatan akses ke badan batubara di periode berikutnya.

Sepanjang manfaat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah dapat direalisasikan dalam bentuk persediaan yang diproduksi dalam periode tersebut, Kelompok Usaha mencatat biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah sesuai dengan prinsip PSAK 14: *Persediaan*. Sepanjang biaya pengupasan lapisan tanah memberikan manfaat peningkatan akses menuju badan batubara di periode yang akan datang, Kelompok Usaha mencatat biaya tersebut sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah, jika dan hanya jika, memenuhi kriteria berikut:

- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan (peningkatan akses menuju badan batubara) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada Kelompok Usaha;
- b) Kelompok Usaha dapat mengidentifikasi komponen badan batubara yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
- c) Biaya aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terkait dengan komponen tersebut dapat diukur secara andal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Mineral Resources Evaluation, Exploration
and Development Expenditures (continued)**

Stripping Activities

Stripping costs are the costs of removing overburden from a mine. Stripping costs incurred in the development of a mine before production commences are capitalised as part of the cost of developing the mine, and are subsequently depleted using the units-of-production method on the basis of proven and probable reserves.

Stripping activity conducted during the production phase may provide two benefits that accrue to the Group: (i) coal that is processed into inventory in the current year; and (ii) improved access to the coal body in future periods.

To the extent that the benefit from the stripping activity is realised in the form of inventory produced, the Group accounts for the costs of this stripping activity in accordance with the principles of PSAK 14: *Inventories*. To the extent the benefit is improved access to the coal body, the Group recognizes these costs as a stripping activity asset, if, and only if, all of the following criteria are met:

- a) It is probable that the future economic benefit (improved access to the coal body) associated with the stripping activity will flow to the Group;
- b) The Group can identify the component of the coal body for which access has been improved; and
- c) The costs relating to the stripping activity associated with that component can be measured reliably.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**m. Pengeluaran Eksplorasi, Evaluasi dan
Pengembangan Sumber Daya Mineral
(lanjutan)**

Aktivitas Pengupasan Tanah (lanjutan)

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah pada awalnya diukur pada biaya perolehan, biaya ini merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitas pengupasan lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadap komponen badan batubara yang teridentifikasi, ditambah alokasi biaya *overhead* yang dapat diatribusikan secara langsung. Jika aktivitas insidental terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengupasan lapisan tanah tahap produksi, namun aktivitas insidental tersebut tidak harus ada untuk melanjutkan aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagaimana direncanakan, biaya yang terkait dengan aktivitas insidental tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah diamortisasi menggunakan metode unit produksi selama ekspektasi masa manfaat dari komponen badan batubara yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas lapisan pengupasan tanah.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah, bila ada, dicatat sebagai penambahan atau peningkatan dari aset yang ada, sehingga disajikan sebagai "properti pertambangan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Kelompok Usaha tidak memiliki biaya pengupasan lapisan tanah selama tahap produksi yang memenuhi kriteria untuk ditangguhkan seperti yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Kelompok Usaha .

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Mineral Resources Evaluation, Exploration
and Development Expenditures (continued)**

Stripping Activities (continued)

A stripping activity asset is initially measured at cost, which represents the accumulation of costs directly incurred to perform stripping activity that improves access to the identified component of the coal body, plus an allocation of directly attributable overhead costs. If incidental operations are occurring at the same time as the production stripping activity, but are not necessary for the production stripping activity to continue as planned, the costs associated with these incidental operations are not included in the cost of the stripping activity asset.

Subsequently, the stripping activity asset is carried at cost less amortisation and impairment losses, if any. The stripping activity asset is amortised using the units-of-production method over the expected useful life of the identified component of the coal body that becomes more accessible as a result of the stripping activity unless another method is more appropriate.

A stripping activity asset, if any, is accounted for as an addition to, or enhancement of, an existing asset, and therefore is presented as part of "mine properties" in the consolidated statement of financial position.

As of the date of these consolidated financial statements, the Group did not have stripping costs during the production phase which qualify for deferral in accordance with the Group's accounting policies.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Provisi

Provisi pembongkaran, reklamasi, dan penutupan tambang

Kewajiban lingkungan terdiri dari biaya-biaya yang berkaitan dengan reklamasi tambang selama masa operasi, penutupan tambang dan pembongkaran dan pemindahan fasilitas dan aktivitas penutupan lainnya.

Provisi untuk estimasi biaya reklamasi tambang dan penutupan tambang dicatat pada saat Perusahaan memiliki kewajiban hukum atau konstruktif yang timbul sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dimasa lalu; besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlahnya dapat diestimasi dengan andal.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi karena berlalunya waktu diakui pada laporan laba rugi sebagai beban keuangan. Perubahan atas estimasi waktu, jumlah pengeluaran atau tingkat diskonto diperlakukan sebagai perubahan atas nilai tercatat aset terkait. Pada kondisi di mana penurunan nilai provisi lebih besar daripada sisa nilai tercatat aset terkait yang belum disusutkan, nilai tercatat aset tersebut dikurangkan menjadi nol dan penyesuaian sisanya dicatat dalam laporan laba rugi.

Provisi lain-lain

Provisi untuk biaya restrukturisasi, tuntutan hukum, hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penarikan aset, reklamasi, dan penutupan area pertambangan dan lainnya diakui ketika:

- i) Kelompok Usaha memiliki kewajiban hukum atau konstruktif saat ini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
- ii) kemungkinan arus keluar sumber daya diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan
- iii) jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Provision

Provision for decommissioning, mine reclamation and mine closure

The environmental obligations consist of costs associated with mine reclamation during mine operation, mine closure and decommissioning and demobilisation of facilities and other closure activities.

Provision for estimated costs of mine reclamation and mine closure is recorded when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount can be reliably estimated.

Provision is measured at the present value of expenditure expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. The increase in the provision due to passage of time is recognized in profit or loss under finance charges. Changes in the estimated timing or amount of the expenditure or discount rate are accounted for as a change in the corresponding capitalised costs. At the time where a reduction in the provision is greater than the undepreciated capitalised cost of the related assets, the capitalised cost is reduced to nil and the remaining adjustment is recognized in profit or loss.

Other provisions

Provision for restructuring costs, legal claims, and environmental issues may not involve the retirement of an asset, reclamation and closure of mining areas and others is recognized when:

- i) the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events;
- ii) it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and
- iii) the amount can be reliably estimated.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Provisi (lanjutan)

Provisi lain-lain (lanjutan)

Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa, maka kemungkinan arus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan secara keseluruhan kelompok kewajiban. Walaupun kemungkinan arus keluar untuk setiap pos kewajiban tersebut kecil, dapat saja terdapat kemungkinan besar dibutuhkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kelompok kewajiban secara keseluruhan. Jika hal itu terjadi, maka provisi diakui.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

o. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset tetap atau properti pertambangan) diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Provision (continued)

Other provisions (continued)

Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in a settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. Although the likelihood of an outflow for any one item may be small, it may well be probable that some outflow of resources will be needed to settle the class of obligations as a whole. If that is the case, a provision is recognized.

Provisions are measured at the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. Increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

o. Impairment of Non-financial Assets

The Group assesses at the end of each reporting year whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an fixed assets or mine properties) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**o. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan
(lanjutan)**

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai pada aset tetap dan aset non-keuangan tidak lancar lainnya yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020.

p. Imbalan Kerja

Kelompok Usaha menyediakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan yang memenuhi syarat sesuai Kontrak Kerja Bersama (KKB). Imbalan kerja minimal yang harus diberikan kepada karyawan adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003").

Kelompok Usaha juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan UU No. 13/2003. Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**o. Impairment of Non-financial Assets
(continued)**

For assets excluding *goodwill*, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than *goodwill* is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Management believes that there is no indication of impairment in values for fixed assets and other non-current non-financial assets presented in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020.

p. Employee Benefits

The Group provides defined benefit pension plan for all qualified employees in accordance with Collective Labor Agreement (CLA). The minimum employee benefits to be provided to the employees are in accordance with Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Group also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above-mentioned pension plan in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under the Law No. 13/2003. The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Imbalan Kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i) ketika amandemen program atau kurtailmen terjadi, dan
- ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Kelompok Usaha mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan
- ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

q. Pendapatan

Perusahaan dan entitas anak bergerak dalam bidang industri eksplorasi, pertambangan, pengolahan dan penjualan batubara. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui ketika pengendalian atas barang dialihkan kepada pelanggan pada suatu jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Kelompok Usaha sebagai imbalan atas barang tersebut. Kelompok Usaha secara umum menyimpulkan bahwa mereka adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Employee Benefits (continued)

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier of:

- i) the date of the plan amendment or curtailment, and*
- ii) the date that entity recognizes related restructuring costs.*

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "General and Administrative Expenses" as appropriate in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, and*
- ii) Net interest expense or income.*

q. Revenue

The Company and its subsidiaries are engaged in exploring, mining, processing and selling of coal. Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods are transferred to the customers at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those goods or services. The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

q. Pendapatan (lanjutan)

Piutang usaha merupakan hak Kelompok Usaha atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo). Lihat kebijakan akuntansi aset keuangan di bagian Instrumen Keuangan mengenai pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya.

Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Kelompok Usaha mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Kelompok Usaha memenuhi pelaksanaan kontrak.

Penghasilan/Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

r. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Dolar Amerika Serikat ("AS\$") atau "Dolar AS") yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan BDMS. Mata uang fungsional MME, MHL, PT Engie Cipta Tenaga Surya (ventura bersama) dan PT Duta Bara Utama (ventura bersama) adalah Rupiah Indonesia ("Rupiah" atau "Rp").

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Revenue (continued)

Trade receivables represent the Group's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due). Refer to accounting policies of financial assets in Financial instruments section regarding initial recognition and subsequent measurement.

If a customer pays consideration before the Group transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognized as revenue when the Group performs under the contract.

Interest Income/Expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the EIR, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Expenses

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

r. Foreign currency transactions and balances

The presentation currency used in the consolidated financial statements is United States Dollars ("US\$") atau "US Dollars"), which is also the Company's and BDMS functional currency. The functional currency of MME, MHL, PT Engie Cipta Tenaga Surya (joint venture), and PT Duta Bara Utama (joint venture) is Indonesian Rupiah ("Rupiah" or "Rp").

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**r. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
(lanjutan)**

Untuk tujuan konsolidasi entitas anak yang memiliki mata uang fungsional Rupiah, aset dan liabilitas entitas anak ditranslasikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan. Sementara itu, pendapatan dan beban ditranslasikan dengan kurs rata-rata dari kurs tengah Bank Indonesia selama periode laporan laba rugi.

Selisih yang timbul dari penjabaran laporan keuangan entitas anak tersebut ke dalam Dolar AS disajikan dalam akun "Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain – Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan" sebagai bagian dari komponen ekuitas lainnya pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Dolar AS berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

	2020	2019	
Rupiah Indonesia per Dolar AS	14.105	13.901	Indonesian Rupiah equivalent to US Dollar

Kurs rata-rata untuk periode pelaporan, berdasarkan rata-rata kurs yang diterbitkan Bank Indonesia selama periode pelaporan:

	2020	2019	
Rupiah Indonesia per Dolar AS	14.577	14.146	Indonesian Rupiah equivalent to US Dollar

Transaksi dalam mata uang asing selain Rupiah adalah tidak signifikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**r. Foreign currency transactions and balances
(continued)**

For consolidation purpose of subsidiaries using currency Rupiah as functional currency, assets and liabilities are translated using Bank of Indonesia middle rate at the end of reporting period. Besides, revenue and expenses are translated using average Bank of Indonesia middle rate during profit or loss period.

The difference arising from the translation of those subsidiaries' financial statements into US Dollar is presented as "Other comprehensive income/(loss) – Exchange differences on translation of financial statements" account as part of other components of equity in the equity section of the consolidated statements of financial position.

Transactions involving foreign currencies are recorded in US Dollars at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the buying and selling rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the year, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations in the current year.

The average exchange rate for the reporting period, based on the middle rate published by Bank Indonesia during the reporting period:

	2020	2019	
Rupiah Indonesia per Dolar AS	14.577	14.146	Indonesian Rupiah equivalent to US Dollar

Transactions in foreign currencies other than Rupiah are not significant.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Sewa

Kelompok Usaha mengevaluasi pada insepri kontrak bila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Kelompok Usaha sebagai Penyewa

Kelompok Usaha menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Kelompok usaha mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset hak-guna

Kelompok usaha mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (dikurangi piutang insentif sewa), pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar sesuai jaminan nilai sisa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (less any lease incentives receivable), variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai Penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Kelompok Usaha dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan pelaksanaan opsi untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan penambahan bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Kelompok Usaha menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi pembelian). Kelompok Usaha juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset pendasar bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Leases (continueud)

The Group as Lessee (continued)

Lease liabilities (continued)

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its incremental borrowing rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Kelompok Usaha tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan disertakan dalam pendapatan pada laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

t. Perpajakan

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Kelompok Usaha beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Leases (continued)

The Group as Lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income.

t. Taxation

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

- i. liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
- ii. dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

- i. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau
- ii. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

- i. where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;
- ii. in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

- i. where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or
- ii. in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disalinghapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, Kelompok Usaha yang bermaksud untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- .. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- .. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: *Pajak Penghasilan*.

u. Laba bersih per saham

Labanya bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- .. Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and
- .. Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authorities is included as part of receivables or payables in the consolidated statement of financial position.

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

u. Earnings per share

Basic earnings per share are calculated by dividing the profit for the year attributable to the equity holders of the Company by the weighted-average number of ordinary shares outstanding during the year.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Informasi segmen

Untuk tujuan manajemen, Kelompok Usaha hanya terdiri atas satu laporan segmen operasi, yaitu penambangan dan perdagangan batubara. Pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen Perusahaan yang secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen tersebut dan untuk menilai kinerja segmen.

Pengungkapan tambahan terdapat dalam Catatan 29, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Segment information

For management purposes, the Group is organised as one reportable operating segment, i.e. coal mining and trading. The segment manager report directly to the management who regularly review the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance.

Additional disclosures are shown in Note 29, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Perpajakan (lanjutan)

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat neto utang pajak penghasilan badan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar US\$2.498.333 (2019: US\$3.053.497). Penjelasan lebih rinci mengenai utang pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 14.

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak -
Kelompok Usaha sebagai penyewa

Kelompok Usaha menentukan jangka waktu sewa sesuai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika secara wajar dipastikan akan dilaksanakan, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa, jika secara wajar dipastikan untuk tidak dilakukan.

Kelompok usaha memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Kelompok Usaha mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Kelompok Usaha menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 9.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Taxes (continued)

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The net carrying amount of corporate income tax payable as of December 31, 2020 was US\$2,498,333 (2019: US\$3,053,497). Further details regarding taxation payable are disclosed in Note 14.

Lease term of contracts with renewal and
termination options - the Group as lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Group has several lease contracts that include extension and termination options. The Group applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain whether to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Group considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Group reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

Further disclosures of leases are made in Note 9.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan nilai realisasi neto persediaan

Penyisihan nilai realisasi neto persediaan batubara diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar US\$13.090.584 (2019: US\$11.390.183). Penjelasan lebih rinci mengenai persediaan diungkapkan dalam Catatan 6.

Estimasi cadangan batubara

Kelompok Usaha menggunakan laporan spesialis dalam menentukan dan melaporkan cadangan batubara berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kode untuk Pelaporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih ("Kode JORC"). Untuk memperkirakan cadangan batubara, diperlukan asumsi tentang, antara lain, faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah produksi, teknik produksi, rasio pengupasan tanah, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar. Proses ini juga memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for net realisable value of inventories

Allowance for net realizable value of coal inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amount of the Group's inventories as of December 31, 2020 was US\$13,090,584 (2019: US\$11,390,183). Further details regarding inventories are disclosed in Note 6.

Coal reserve estimates

The Group used the report of specialist in determining and reporting its coal reserves under the principles incorporated in the Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (the "JORC Code"). In estimating coal reserves, the assumptions required are, among others, geological, technical and economic factors, including production quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transportation costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates. This process may require complex and difficult geological judgments to interpret the data.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi cadangan batubara (lanjutan)

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari tahun ke tahun dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari tahun ke tahun. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan, deplesi, dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah dimana beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan metode unit produksi, atau dimana masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Provisi penutupan tambang dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi atas kemungkinan terpulihkannya manfaat pajak.

Penyusutan aset tetap

Aset tetap pada Kelompok Usaha disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama yang lebih pendek antara estimasi umur aset atau umur tambang. Manajemen memperkirakan masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 20 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Nilai tercatat neto atas aset tetap Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar US\$23.422.018 (2019: US\$29.843.952). Penjelasan lebih rinci atas aset tetap diungkapkan dalam Catatan 10.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Coal reserve estimates (continued)

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from year to year and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from year to year. Changes in reported reserves may affect the Group's consolidated financial results and financial position in a number of ways, including the following:

- Assets' carrying values may be affected due to changes in the estimated future cash flows.
- Depreciation, depletion and amortisation charged to profit or loss may change where such charges are determined based on a unit-of-production method or where the economic useful lives of assets change.
- Provision for mine closure may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.
- The carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likelihood of the recoverability of the tax benefits.

Depreciation of fixed assets

Fixed assets of the Group are depreciated using the straight-line method over the shorter between the estimated useful lives of the assets or the life of mine. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 3 to 20 years, which are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

The net carrying amount of the Group's fixed assets as of December 31, 2020 was US\$23,422,018 (2019: US\$29,843,952). Further details on fixed assets are disclosed in Note 10.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja ditentukan dengan menggunakan perhitungan aktuarial, yang melibatkan penentuan berbagai asumsi yang mungkin berbeda pada saat realisasi di masa depan, antara lain, penentuan tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian, dan kenaikan pensiun di masa depan. Karena kompleksitas yang terlibat dalam penilaian dan sifat jangka panjangnya, liabilitas imbalan pasti sangat peka terhadap perubahan asumsi-asumsi ini, yang ditelaah setiap tanggal pelaporan.

Walaupun Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

Nilai tercatat neto liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar US\$2.789.179 (2019: US\$2.257.900). Penjelasan lebih rinci atas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 16.

Estimasi atas Suku Bunga Pinjaman Inkremental dari Suatu Sewa

Kelompok Usaha tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Kelompok Usaha menggunakan SBPI untuk mengukur liabilitas sewa. SBPI adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Kelompok Usaha untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi yang serupa.

Dengan demikian, SBPI mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh Kelompok Usaha, yang perlu diestimasi ketika tidak ada tingkat bunga yang dapat langsung diamati (seperti untuk entitas dalam Kelompok Usaha yang tidak melakukan transaksi pembiayaan) atau ketika tingkat bunga perlu disesuaikan untuk mencerminkan persyaratan dan kondisi sewa.

Kelompok Usaha menetapkan estimasi SBPI menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Employee benefits liability

Employee benefits liability is determined using actuarial computation, which involves determination of various assumptions that may differ when they are realized in the future, such as determination of the discount rate, future salary increases, mortality rates, and future pension increases. Due to the complexities involved in the valuation and its long-term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions, which are reviewed at each reporting date.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

The net carrying amount of the Group's employee benefits liability as of December 31, 2020 was US\$2,789,179 (2019: US\$2,257,900). Further details on employee benefits are disclosed in Note 16.

Estimating the Incremental Borrowing Rate of a Lease

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its IBR to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment.

The IBR therefore reflects interest the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available (such as for entities within the Group that do not enter into financing transactions) or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease.

The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and make certain entity-specific estimates as necessary.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**4. KAS DAN SETARA KAS DAN INVESTASI
JANGKA PENDEK**

Kas dan setara kas

	2020	2019
Kas	115.029	73.803
Bank		
<u>Dolar AS</u>		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.255.816	6.836.798
MUFG Bank, Ltd. ("MUFG")	3.546.263	17.874.076
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	620.822	3.212.840
PT Bank UOB Indonesia ("UOB Indonesia")	589.548	524.455
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.243	-
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.417.918	377.017
PT Bank CIMB Niaga Tbk	245.180	177.526
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	52.436	21.566
MUFG	580	4.448
PT Bank Sinarmas Tbk	1.324	1.412
Sub-total	16.731.130	29.030.138
Deposito berjangka		
<u>Dolar AS</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	19.000.000	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.000.000	-
MUFG	5.000.000	-
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	217.011	-
Sub-total	29.217.011	-
Total	46.063.170	29.103.941

Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek merupakan penempatan pada deposito dengan jangka waktu 12 bulan.

	2020	2019
<u>Dolar AS</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	38.000.000	62.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.000.000	-
Total	43.000.000	62.000.000

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND SHORT-
TERM INVESTMENT**

Cash and cash equivalents

	2020	2019
Cash on hand		
<u>Banks</u>		
<u>US Dollars</u>		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6.836.798	17.874.076
MUFG Bank, Ltd. ("MUFG")	3.212.840	3.212.840
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	524.455	524.455
PT Bank UOB Indonesia ("UOB Indonesia")	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	377.017	377.017
PT Bank CIMB Niaga Tbk	177.526	177.526
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21.566	21.566
MUFG	4.448	4.448
PT Bank Sinarmas Tbk	1.412	1.412
Sub-total	29.030.138	29.030.138
Time deposits		
<u>US Dollars</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-
MUFG	-	-
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-
Sub-total	-	-
Total	29.103.941	29.103.941

Short-term investment

Short-term investment represent placements in time deposits with a maturity of 12 months.

	2020	2019
<u>US Dollars</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	62.000.000	62.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-
Total	62.000.000	62.000.000

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**4. KAS DAN SETARA KAS DAN INVESTASI
JANGKA PENDEK**

Rentang suku bunga tahunan dari deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>
Rupiah	3,50%
Dolar AS	0,37% - 2,50%

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND SHORT-
TERM INVESTMENT**

The range of annual interest rates of the time deposits are as follows:

	<u>2019</u>	
	-	Rupiah
	3,05% - 3,20%	US Dollars

5. PIUTANG USAHA

	<u>2020</u>
Pihak berelasi (Catatan 24)	
Dolar AS	3.294.926
Pihak ketiga	
Dolar AS	15.389.290
Rupiah	1.386.710
Sub-total	16.776.000
Total	20.070.926

Sifat hubungan dan transaksi antara Kelompok Usaha dengan pihak-pihak berelasi dijelaskan pada Catatan 24.

Piutang usaha tidak dikenakan bunga dan umumnya dikenakan syarat pembayaran selama 30 sampai dengan 45 hari.

5. TRADE RECEIVABLES

	<u>2019</u>	
	3.920.196	Related parties (Note 24)
		US Dollars
		Third parties
	17.113.798	US Dollars
	7.047.484	Rupiah
Sub-total	24.161.282	Sub-total
Total	28.081.478	Total

The nature of relationships and transactions of the Group with the related parties are explained in Note 24.

The trade receivables are non-interest bearing and generally based on a 30 to 45 days term of payment.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

	2020
Pihak berelasi	
Lancar dan tidak mengalami penurunan nilai	3.294.926
Pihak ketiga	
Lancar dan tidak mengalami penurunan nilai	16.776.000
Total	20.070.926

Catatan 25 mengenai risiko kredit piutang usaha mengungkapkan bagaimana Kelompok Usaha mengelola kualitas kredit piutang usaha.

Berdasarkan hasil penelaahannya, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

6. PERSEDIAAN

Rincian persediaan, yang dicatat pada nilai realisasi neto, adalah sebagai berikut:

	2020
Batubara	12.391.474
Bahan bakar dan bahan pembantu	699.110
Neto	13.090.584

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

	2019	
		Related parties
	3.920.196	<i>Current and not impaired</i>
		Third parties
	24.161.282	<i>Current and not impaired</i>
Total	28.081.478	Total

Note 25 on credit risk of trade receivables discloses how the Group manages credit quality of trade receivables.

Based on the results of its assessment, management believes that no impairment indicators for trade receivables existed as of December 31, 2020 and 2019.

6. INVENTORIES

The details of inventories, which are recognized at net realizable value, are as follows:

	2020	2019	
Batubara	12.391.474	10.633.298	<i>Coal</i>
Bahan bakar dan bahan pembantu	699.110	756.885	<i>Fuel and supplies</i>
Neto	13.090.584	11.390.183	Net

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Perubahan penyisihan nilai realisasi neto persediaan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Saldo awal	605.735	564.227	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	-	41.508	<i>Addition</i>
Pemulihan sehubungan dengan konsumsi	(88.288)	-	<i>Reversal due to consumption</i>
Saldo akhir	517.447	605.735	<i>Ending balance</i>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik dari persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari keusangan dan penurunan nilai persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar AS\$9.356.647, manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut dapat menutupi kerugian yang mungkin timbul atas risiko-risiko tersebut.

6. INVENTORIES (continued)

The changes in the allowance for net realizable value of inventories are as follows

	2020	2019	
Saldo awal	605.735	564.227	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	-	41.508	<i>Addition</i>
Pemulihan sehubungan dengan konsumsi	(88.288)	-	<i>Reversal due to consumption</i>
Saldo akhir	517.447	605.735	<i>Ending balance</i>

Based on a review of market price and physical conditions of the inventories at the reporting dates, management believes that the above allowance is adequate to cover any possible losses from obsolescence and decline in market value of inventories.

As of December 31, 2020, inventories are covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket insurance policies with a total coverage amounting to US\$9,356,647 management believes that the insurance coverage is sufficient to cover losses that may arise from the insured risks.

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	2020	2019	
Asuransi dibayar di muka	87.828	82.481	<i>Prepaid insurance</i>
Lain-lain	123.326	157.257	<i>Others</i>
Total	211.154	239.738	<i>Total</i>

7. PREPAID EXPENSES

8. PROPERTI PERTAMBANGAN

	2020	2019	
Nilai perolehan			<i>Cost</i>
Saldo awal	17.660.828	17.660.828	<i>Beginning balance</i>
Saldo akhir	17.660.828	17.660.828	<i>Ending balance</i>
Deplesi			<i>Depletion</i>
Saldo awal	(13.854.225)	(13.132.599)	<i>Beginning balance</i>
Pembebanan tahun berjalan	(691.303)	(721.626)	<i>Charge for the year</i>
Saldo akhir	(14.545.528)	(13.854.225)	<i>Ending balance</i>
Nilai tercatat neto	3.115.300	3.806.603	<i>Net carrying value</i>

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat aset pertambangan tidak melebihi jumlah terpulihkannya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The management believes that the carrying value of the mine properties does not exceed its recoverable amount as of December 31, 2020 and 2019.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

9. SEWA

Kelompok Usaha Sebagai Penyewa

Kelompok usaha memiliki kontrak sewa untuk aset peralatan tambang yang digunakan dalam operasinya, dengan jangka waktu sewa 3 tahun.

Kelompok usaha juga memiliki sewa tertentu untuk peralatan kantor dengan masa sewa kurang dari 12 bulan atau dengan nilai rendah. Kelompok usaha menerapkan pengecualian pengakuan untuk sewa-sewa ini dan mengakui biaya sewa berdasarkan garis lurus dalam laba rugi.

Di bawah ini adalah jumlah tercatat dari aset hak-guna yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha dan pergerakannya selama tahun berjalan:

	<u>Peralatan Tambang/ Mining Equipment</u>	
1 Januari 2020	10.983.167	January 1, 2020
Beban penyusutan	(3.661.056)	Depreciation expense
Pada tanggal 31 Desember 2020	<u>7.322.111</u>	At December 31, 2020

Mutasi jumlah tercatat liabilitas sewa:

Movement of lease liabilities:

	<u>2020</u>	
Saldo awal	10.983.167	Beginning balance
Penambahan bunga	846.592	Accretion of interest
Pembayaran	(4.017.871)	Payments
Selisih kurs	(264.971)	Exchange difference
Sub-total	<u>7.546.917</u>	Sub-total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>3.597.673</u>	Less current portion
Bagian Jangka Panjang	<u>3.949.244</u>	Long-term Portion

Jumlah yang diakui dalam laba rugi:

Amounts recognized in the profit or loss:

	<u>2020</u>	
Beban penyusutan aset hak-guna	3.661.056	Depreciation expense of right-of-use assets
Beban bunga atas liabilitas sewa	846.592	Interest expense on lease liabilities
Biaya yang terkait dengan sewa aset bernilai rendah dan sewa jangka pendek	1.119.580	Expense relating to leases of low value assets and short-term leases
Total	<u>5.627.228</u>	Total

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

2020							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclass- ifications	Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ Exchange differences arising from translation of financial statements in foreign currency	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan							Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>							<u>Direct ownership</u>
Tanah	469.948	-	-	10.074	-	480.022	Land
Bangunan dan prasarana	28.966.803	-	-	790.437	-	29.757.240	Building and infrastructure
Mesin, alat berat dan kendaraan	33.045.210	220.620	15.699	379.868	-	33.629.999	Machinery, heavy equipment and vehicles
Peralatan tambang	4.313.253	261.898	-	4.548	-	4.579.699	Mining equipment
Perabot dan peralatan kantor	1.284.015	80.994	-	-	-	1.365.009	Office furniture and fixtures
Aset tetap dalam penyelesaian	953.235	237.701	-	(859.933)	-	331.003	Constructions-in- progress
	<u>69.032.464</u>	<u>801.213</u>	<u>15.699</u>	<u>324.994</u>	<u>-</u>	<u>70.142.972</u>	
<u>Aset sewa pembiayaan</u>							<u>Assets under finance leases</u>
Mesin, alat berat dan kendaraan	324.994	-	-	(324.994)	-	-	Machinery, heavy equipment and vehicles
Total biaya perolehan	<u>69.357.458</u>	<u>801.213</u>	<u>15.699</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>70.142.972</u>	Total cost
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>							<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	13.075.563	3.082.388	-	-	-	16.157.951	Building and infrastructure
Mesin, alat berat dan kendaraan	22.924.688	3.147.293	15.699	183.345	-	26.239.627	Machinery, heavy equipment and vehicles
Peralatan tambang	2.427.973	821.082	-	-	-	3.249.055	Mining equipment
Perabot dan peralatan kantor	927.621	146.700	-	-	-	1.074.321	Office furniture and fixtures
	<u>39.355.845</u>	<u>7.197.463</u>	<u>15.699</u>	<u>183.345</u>	<u>-</u>	<u>46.720.954</u>	
<u>Aset sewa pembiayaan</u>							<u>Assets under finance leases</u>
Mesin, alat berat dan kendaraan	157.661	25.684	-	(183.345)	-	-	Machinery, heavy equipment and vehicles
Total akumulasi penyusutan	<u>39.513.506</u>	<u>7.223.147</u>	<u>15.699</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>46.720.954</u>	Total accumulated depreciation
Nilai tercatat neto	<u>29.843.952</u>					<u>23.422.018</u>	Net carrying value

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

		2019						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclass- ifications</i>	Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ <i>Exchange differences arising from translation of financial statements in foreign currency</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>		Cost
Biaya perolehan								
<u>Kepemilikan langsung</u>								<u>Direct ownership</u>
Tanah	377.975	91.973	-	-	-	469.948		Land
Bangunan dan prasarana	28.031.520	14.725	-	920.558	-	28.966.803		Building and infrastructure
Mesin, alat berat dan kendaraan	32.698.217	1.749.070	1.437.264	35.187	-	33.045.210		Machinery, heavy equipment and vehicles
Peralatan tambang	3.457.417	547.291	7.094	315.639	-	4.313.253		Mining equipment
Perabot dan peralatan kantor	1.055.686	199.953	-	28.376	-	1.284.015		Office furniture and fixtures
Aset tetap dalam penyelesaian	1.360.095	838.142	-	(1.278.160)	33.158	953.235		Constructions-in- progress
	<u>66.980.910</u>	<u>3.441.154</u>	<u>1.444.358</u>	<u>21.600</u>	<u>33.158</u>	<u>69.032.464</u>		
 <u>Aset sewa pembiayaan</u>								 <u>Assets under finance leases</u>
Mesin, alat berat dan kendaraan	346.594	-	-	(21.600)	-	324.994		Machinery, heavy equipment and vehicles
Total biaya perolehan	<u>67.327.504</u>	<u>3.441.154</u>	<u>1.444.358</u>	<u>-</u>	<u>33.158</u>	<u>69.357.458</u>		Total cost
 Akumulasi penyusutan								 Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>								<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	10.048.400	3.027.163	-	-	-	13.075.563		Building and infrastructure
Mesin, alat berat dan kendaraan	21.284.267	3.062.776	1.432.255	9.900	-	22.924.688		Machinery, heavy equipment and vehicles
Peralatan tambang	1.715.715	719.352	7.094	-	-	2.427.973		Mining equipment
Perabot dan peralatan kantor	792.815	134.806	-	-	-	927.621		Office furniture and fixtures
	<u>33.841.197</u>	<u>6.944.097</u>	<u>1.439.349</u>	<u>9.900</u>	<u>-</u>	<u>39.355.845</u>		
 <u>Aset sewa pembiayaan</u>								 <u>Assets under finance leases</u>
Mesin, alat berat dan kendaraan	102.561	65.000	-	(9.900)	-	157.661		Machinery, heavy equipment and vehicles
Total akumulasi penyusutan	<u>33.943.758</u>	<u>7.009.097</u>	<u>1.439.349</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>39.513.506</u>		Total accumulated depreciation
 Nilai tercatat neto	<u><u>33.383.746</u></u>					<u><u>29.843.952</u></u>		 Net carrying value

Penyusutan dibebankan pada operasi sebagai bagian dari:

Depreciation expenses were charged to operations as part of:

	2020	2019	
Beban pokok penjualan (Catatan 21)	6.936.459	6.819.893	Cost of revenue (Note 21)
Beban umum dan administrasi	286.688	189.204	General and administrative expenses
Total	<u><u>7.223.147</u></u>	<u><u>7.009.097</u></u>	Total

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

10. ASET TETAP (lanjutan)

Analisa laba atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Penerimaan	3.847	91.686	Proceeds
Nilai tercatat neto	-	(5.009)	Net carrying value
Laba	3.847	86.677	Gains

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset tetap Kelompok Usaha yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan terutama terdiri dari (i) bangunan dan prasarana; (ii) mesin, alat berat dan kendaraan, (iii) peralatan tambang, dan (iv) perabot dan peralatan kantor dengan biaya perolehan sebesar AS\$16.836.065 (2019: AS\$16.255.579).

Aset sewa pembiayaan Kelompok Usaha dijaminan terhadap fasilitas sewa pembiayaan terkait.

Aset tetap dalam penyelesaian

	Perkiraan % penyelesaian/ Estimated % of completion	Nilai perolehan/ Cost	Perkiraan tahun penyelesaian/ Estimated years of completion	
31 Desember 2020				
Bangunan dan prasarana	38% - 95%	317.987	2021	December 31, 2020 Building and infrastructure
Peralatan tambang	95% - 98%	7.628	2021	Mining equipment
Perabot dan peralatan kantor	65%	5.388	2021	Office furniture and fixtures
Total		331.003		Total
31 Desember 2019				
Bangunan dan prasarana	20% - 95%	907.480	2020 – 2022	December 31, 2019 Building and infrastructure
Mesin, alat berat, dan kendaraan	20% - 98%	43.646	2020	Machinery, heavy equipment and vehicles
Peralatan tambang	20% - 95%	2.109	2020	Mining equipment
Total		953.235		Total

Hak atas tanah

Jenis kepemilikan hak atas tanah BDMS berupa Hak Guna Bangunan ("HGB") yang akan berakhir antara tahun 2030 sampai 2035. Manajemen berpendapat bahwa kepemilikan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

10. FIXED ASSETS (continued)

An analysis of the gain on disposal of fixed assets is as follows:

As of December 31, 2020, the Group's fixed assets that have been fully depreciated but are still being utilised mainly consist of (i) building and infrastructure; (ii) machinery, heavy equipment and vehicles, (iii) mining equipment, and (iv) office furniture and fixtures with acquisition costs amounting to US\$16,836,065 (2019: US\$16,255,579).

Assets under finance leases of the Group are used as collateral to secure credit facilities obtained from the related finance lease.

Constructions-in-progress

Land rights

BDMS's titles of ownership on its land rights are in the form of Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") which will expire between 2030 and 2035. Management is of the opinion that the said titles of land right ownership can be renewed/extended upon their expiration.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

10. ASET TETAP (lanjutan)

Asuransi

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset tetap tertentu telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar AS\$42.668.861 (2019: AS\$43.524.325). Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi atas aset tetap tersebut dapat menutupi kerugian yang mungkin timbul atas risiko-risiko tersebut.

Penurunan nilai aset

Berdasarkan hasil penelaahannya, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

11. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA

Ventura bersama yang dimiliki oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Nama ventura bersama/ Name of joint venture	Kedudukan/ Domicile	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Investasi pada ventura bersama/ Investment in joint ventures	
				31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019
PT Engie Cipta Tenaga Surya ¹⁾	Jakarta	47,5	Penyewaan mesin dan peralatan tenaga surya/ Solar power leasing	58.710	78.053
PT Duta Bara Utama	Jakarta	26	Pertambangan batubara/ Coal Mining	12.651.728	12.645.769

¹⁾ Dalam tahap pengembangan, sebelumnya bernama PT Cipta Tenaga Surya

10. FIXED ASSETS (continued)

Insurance

As of December 31, 2020, certain fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket insurance policies with combined coverage amounting to US\$42,668,861 (2019: US\$43,524,325). Management believes that the insurance coverage for these fixed assets is sufficient to cover losses that may arise from the insured risks.

Impairment of assets

Based on the results of its assessment, management believes that there were no impairment indicators for fixed assets as of December 31, 2020 and 2019.

11. INVESTMENT IN JOINT VENTURES

The Company's joint ventures as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

PT Engie Cipta Tenaga Surya ("ECTS")

Rincian penyertaan saham Perusahaan di ECTS adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Nilai perolehan investasi	92.658	92.658
Akumulasi bagian rugi	(33.948)	(14.605)
Nilai tercatat investasi	58.710	78.053

PT Engie Cipta Tenaga Surya ("ECTS")

The details of the Company's investment in shares of ECTS are as follows:

Cost of investment
Accumulated share of loss
Carrying value of investment

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**11. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA
(lanjutan)**

PT Engie Cipta Tenaga Surya (“ECTS”) (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan

	2020
Total aset	152.265
Total liabilitas	(28.504)
Nilai aset neto	123.761
	2020
(Rugi)/laba tahun berjalan	(40.723)
Bagian atas (rugi)/ laba ECTS	(19.343)

PT Duta Bara Utama (“DBU”)

Pada tanggal 5 Desember 2017, Perusahaan mengadakan Perjanjian Penempatan Saham dan Jual Beli Saham Bersyarat (“CSSPA”) dan Perjanjian Pemegang Saham dengan DBU dan pemegang saham DBU untuk mengakuisisi total 26% saham DBU yang akan selesai dalam tiga tahap dengan kondisi preseden terkait untuk setiap tahap. DBU memiliki IUP eksplorasi selama dua puluh tahun dimulai pada tanggal 12 Desember 2011 dengan luas 1.967 hektar di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, kondisi preseden tahap pertama telah terpenuhi dan Perusahaan telah memiliki saham DBU sebesar 13,33% sebagai bagian dari kondisi preseden tahap pertama.

Pada tanggal 27 Desember 2018, kondisi preseden tahap kedua dan ketiga telah terpenuhi. Perusahaan menyelesaikan transaksi investasi ventura bersama ini dengan nilai transaksi tambahan sebesar AS\$5.921.622 dan persentase kepemilikan saham di DBU menjadi 26%.

DBU merupakan perusahaan swasta yang sahamnya tidak terdaftar pada bursa efek manapun.

Tabel dibawah ini menampilkan ringkasan informasi keuangan DBU.

11. INVESTMENT IN JOINT VENTURES (continued)

PT Engie Cipta Tenaga Surya (“ECTS”) (continued)

The summary of financial information

	2019	
Total aset	165.924	Total assets
Total liabilitas	(181)	Total liabilities
Nilai aset neto	165.743	Net assets
	2019	
(Loss)/gain for the year	7.019	(Loss)/gain for the year
Share in (loss)/gain of ECTS	3.334	Share in (loss)/gain of ECTS

PT Duta Bara Utama (“DBU”)

On December 5, 2017, the Company entered into a Conditional Share Subscription and Share Purchase Agreement (“CSSPA”) and Shareholder Agreement with DBU and DBU’s shareholders to acquire a total of 26% of DBU shares which would be completed in three stages with the related condition precedents for each stage. DBU holds an exploration IUP for twenty years starting December 12, 2011 with an area of 1,967 hectares in Muara Enim Regency, South Sumatera Province.

As of December 31, 2017, the first stage condition precedents had been fulfilled and the Company had owned 13.33% of DBU shares as part of the first stage condition precedent.

On December 27, 2018, the second and third stage of condition precedent had been completed. The Company completed the investment transaction of this joint venture with the total additional transaction value of US\$5,921,622, where the percentage of this share ownership in DBU become 26%.

DBU is a private company and its shares are not listed in any stock exchanges.

The table below provides a summary of the financial information DBU.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**11. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA
(lanjutan)**

PT Duta Bara Utama (“DBU”) (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan

	2020
Kas dan setara kas	126.245
Aset lancar	189.139
Aset tidak lancar	15.991.514
Liabilitas jangka pendek	(1.769.480)
Liabilitas jangka panjang	(27.108)
Rugi sebelum pajak penghasilan	(421.340)
Rugi tahun berjalan	(421.340)
Penghasilan/(beban) komprehensif lain tahun berjalan	444.260
Persentase kepemilikan (%)	26

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan Kelompok Usaha di DBU:

	2020
Pada awal tahun	14.361.145
Laba/(rugi) tahun berjalan	22.920
Pada akhir tahun	14.384.065
Persentase kepemilikan (%)	26
	3.739.857
Properti pertambangan	8.911.871
Nilai tercatat investasi pada DBU	12.651.728

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa nilai tercatat investasi pada ventura bersama tidak melebihi jumlah terpulihkannya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

12. UTANG USAHA

Utang usaha terutama terkait dengan jasa kontraktor penambangan batubara untuk Kelompok Usaha, dengan rincian sebagai berikut:

11. INVESTMENT IN JOINT VENTURES (continued)

PT Duta Bara Utama (“DBU”) (continued)

The summary of financial information

	2019	
	60.292	Cash and cash equivalents
	344.840	Current assets
	16.061.979	Non-current assets
	(1.348.599)	Current liabilities
	(27.506)	Non-current liabilities
	(2.917.987)	Loss before income tax
	(2.920.551)	Loss for the year
	(2.592)	Other comprehensive income/(loss) for the year
	26	Percentage of ownership (%)

The reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of the Group's interests in the DBU is as follows:

	2019	
	17.284.288	At the beginning of the year
	(2.923.143)	Profit/(loss) for the year
	14.361.145	At the end of the year
	26	Percentage of ownership (%)
	3.733.898	
	8.911.871	Mining properties
	12.645.769	Carrying amount of investment in DBU

The Group's management believe that the carrying value of investment in joint ventures does not exceed its recoverable amount as of December 31, 2020 and 2019.

12. TRADE PAYABLES

Trade payables primarily relate to coal mining contractor services for the Group, with the following details:

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

12. UTANG USAHA (lanjutan)

	2020
Pihak ketiga	
Rupiah	5.605.121
Dolar AS	76
Sub-total	<u>5.605.197</u>
Pihak berelasi (Catatan 24)	
Rupiah	160.962
Dolar AS	-
Sub-total	<u>160.962</u>
Total	<u>5.766.159</u>

Utang usaha tidak dikenakan jaminan, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran antara 30 sampai dengan 90 hari.

Sifat hubungan dan transaksi antara Kelompok Usaha dengan pihak-pihak berelasi dijelaskan pada Catatan 24.

12. TRADE PAYABLES (continued)

	2019	
		Third parties
		Rupiah
		US Dollars
		Sub-total
		Related parties (Note 24)
		Rupiah
		US Dollars
		Sub-total
		Total

Trade payables are unsecured, non-interest bearing and generally have credit terms between 30 and 90 days.

The nature of relationships and transactions of the Group with the related parties are explained in Note 24.

13. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	2020
Biaya kontraktor	9.991.643
Pengangkutan tongkang	958.989
Bonus	895.569
Biaya pemasaran	603.164
Lain-lain	3.926.028
Total	<u>16.375.393</u>

Biaya masih harus dibayar tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya mempunyai jangka waktu pembayaran antara 30 sampai dengan 60 hari.

13. ACCRUED EXPENSES

	2019	
		Contractor fee
		Freight barging
		Bonuses
		Marketing fee
		Others
		Total

Accrued expenses are unsecured, non-interest bearing and generally have credit terms between 30 to 60 days.

14. PERPAJAKAN

Pajak dibayar di muka

	2020
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	
Perusahaan	136.635
Entitas anak	31.179
Total	<u>167.814</u>

14. TAXATION

Prepaid tax

	2019	
		Value-Added Tax ("VAT")
		The Company
		Subsidiary
		Total

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

Tagihan Pajak

Claims for tax refund

	2020	2019	
Bagian lancar			Current portion
PPN - Perusahaan	1.286.302	-	VAT - The Company
Total	1.286.302	-	Total
Bagian tidak lancar			Non-current portion
Pajak penghasilan			Income taxes
2018 - Perusahaan	-	7.267.156	2018 - The Company
2018 - Entitas Anak	-	750.379	2018 - Subsidiary
Total	-	8.017.535	Total

Utang Pajak

Taxes Payable

	2020	2019	
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 4(2)	3.025	4.151	Article 4(2)
Pasal 23	107.194	105.633	Article 23
Pasal 15	17.381	32.239	Article 15
Pasal 21	44.163	48.567	Article 21
Pasal 25	158.526	439.922	Article 25
Pasal 29	2.498.333	3.053.497	Article 29
Pajak pertambahan nilai, neto	266.987	260.935	Value added taxes, net
Total	3.095.609	3.944.944	Total

Beban pajak penghasilan

Income tax expense

Rincian dari beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Details of income tax expense are as follows:

	2020	2019	
<u>Dibebankan ke laba rugi</u>			<u>Charged to profit or loss</u>
Pajak penghasilan badan - tahun berjalan	(9.300.467)	(12.286.701)	Corporate income tax-current year
Penyesuaian atas tahun sebelumnya	(639.300)	(394.199)	Adjustments in respect of the previous years
	(9.939.767)	(12.680.900)	
Pajak tangguhan - tahun berjalan	33.661	(470.207)	Deferred tax - current year
Beban pajak penghasilan yang dibebankan ke laba rugi	(9.906.106)	(13.151.107)	Income tax expense charged to profit or loss
<u>Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</u>			<u>Charged to other comprehensive income</u>
Pajak tangguhan (Laba)/rugi atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(70.917)	43.570	Deferred tax Re-measurement (gains)/loss of employee benefits liability

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, sebagaimana tercantum pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	37.373.592	48.438.664
Ditambah/(dikurangi):		
Bagian atas rugi ventura bersama	13.384	756.683
Eliminasi atas transaksi dengan entitas anak	711.943	77.551
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(11.451.675)	(11.600.909)
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	26.647.244	37.671.989
Beda temporer:		
Penurunan nilai piutang lain-lain	-	(31.352)
Penyusutan aset hak-guna	335.559	-
Penyusutan aset tetap	615.764	576.728
Provisi untuk bonus karyawan	16.805	(580.920)
Provisi rehabilitasi Daerah Aliran Sungai ("DAS")	(34.245)	311.160
Provisi penggunaan bahan kimia untuk pengolahan air	-	(2.979.092)
Sewa pembiayaan	5.395	18.816
Provisi penutupan tambang	-	(1.354.108)
Provisi imbalan kerja	457.277	961.516
Beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak	2.150.380	1.770.893
Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final	(1.728.909)	(1.135.834)
Penghasilan kena pajak - Perusahaan	28.465.270	35.229.796
Beban pajak penghasilan kini - Perusahaan	(6.262.359)	(8.807.449)
Pajak penghasilan dibayar di muka		
Pasal 22	2.253.447	3.464.594
Pasal 23	1.171	-
Pasal 25	2.596.509	3.746.149
	4.851.127	7.210.743
Kurang bayar pajak penghasilan badan - Perusahaan	(1.411.232)	(1.596.706)

14. TAXATION (continued)

Fiscal Reconciliation

A reconciliation between profit before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and taxable profit is as follows:

Profit before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Add/(deduct):
Share in loss of joint ventures
Elimination of transactions with subsidiaries
Profit of subsidiaries before income tax
Profit before income tax attributable to the Company
Temporary differences:
Impairment of other receivables
Depreciation of right-of-use assets
Depreciation of fixed assets
Provision for employees' bonus
Provision for rehabilitation of watershed ("DAS")
Provision of chemical usage for water treatment
Finance lease
Provision for mine closure
Provision for employee benefits
Permanent differences:
Non-deductible expenses
Income already subjected to final income tax
Taxable profit attributable to the Company
Current income tax expense - The Company
Prepaid income tax
Article 22
Article 23
Article 25
Underpayment corporate income tax - The Company

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi Fiskal (lanjutan)

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2020 seperti yang disebutkan di atas dan utang PPh terkait akan dilaporkan oleh Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") PPh badan tahun 2020 ke Kantor Pajak.

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2019 seperti yang disebutkan di atas dan utang PPh yang telah dilaporkan oleh Perusahaan dalam SPT PPh badan tahun 2019 ke Kantor Pajak.

Rekonsiliasi Tarif Pajak Efektif

Rekonsiliasi antara: (i) beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak penghasilan, dan (ii) beban pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	37.373.592	48.438.664	<i>Profit before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	(8.976.050)	(12.109.666)	<i>Income tax expense at applicable tax rate</i>
Pengaruh pajak atas beda tetap: Denda	(307)	(3)	<i>Tax effects of permanent differences: Penalties</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak	(747.720)	(798.342)	<i>Non-deductible expenses</i>
Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final	460.215	348.613	<i>Income already subjected to final income tax</i>
Provisi untuk kompensasi rugi fiskal yang tidak dapat dipulihkan	-	(8.339)	<i>Provision for unrecoverable tax loss carryforward</i>
Bagian atas rugi ventura bersama	(2.944)	(189.171)	<i>Share in losses of joint ventures</i>
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya	(639.300)	(394.199)	<i>Adjustments in respect of corporate income tax of the previous years</i>
Beban pajak penghasilan	(9.906.106)	(13.151.107)	<i>Income tax expense</i>

14. TAXATION (continued)

Fiscal Reconciliation (continued)

The amounts of the Company's taxable income and current income tax expense for 2020, as stated in the foregoing, and the related tax payables will be reported by the Company in its 2020 annual income tax return ("SPT") to be submitted to the Tax Office.

The amounts of the Company's taxable income and current income tax expense for 2019, as stated in the foregoing, and the related tax payables have been reported by the Company in its 2019 SPT as submitted to the Tax Office.

Reconciliation of Effective Tax Rate

The reconciliation between: (i) income tax expense, calculated by applying the applicable tax rate to the profit before income tax, and (ii) income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi Tarif Pajak Efektif (lanjutan)

Pada tanggal 3 Agustus 2015, Presiden Republik Indonesia menandatangani PP 56/2015 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka", yang mengubah PP 77/2013, dan mengatur bahwa perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan ("PPH") sebesar 5% dari tarif tertinggi PPH sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1b Undang-undang Pajak Penghasilan, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu (i) Perseroan yang saham atau efek bersifat ekuitas lainnya dengan jumlah paling sedikit 40% dari keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, (ii) Saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak, (iii) Masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh, dan (iv) Ketentuan (i) sampai dengan (iii) tersebut harus dipenuhi oleh perseroan terbuka dalam waktu paling sedikit seratus delapan puluh tiga hari kalender dalam jangka waktu satu tahun pajak.

Kemudian pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang "Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan", yang mengatur penyesuaian tarif PPh badan sebagai berikut:

- a. 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021,
- b. 20% mulai tahun pajak 2022, dan
- c. Perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif pada butir a dan b di atas.

14. TAXATION (continued)

Reconciliation of Effective Tax Rate (continued)

On August 3, 2015, the President of the Republic of Indonesia signed PP 56/2015 regarding the "Reduction of Income Tax Rate on Resident Corporate Taxpayers in the Form of Publicly-listed Companies", which replaced PP 77/2013, and regulates that resident publicly-listed companies in Indonesia can avail a reduction of income tax rate by 5% from the highest rate set forth under Article 17 paragraph 1b of the Income Tax Law, provided they meet the prescribed criteria, such as (i) Companies whose at least 40% or more of the total paid-up shares or other equity instruments are listed for trading in the Indonesia stock exchanges, (ii) Such shares are owned by at least 300 parties, (iii) Each party of such shall own less than 5% of the total outstanding issued and fully paid shares, and (iv) Requirements (i) to (iii) above should be fulfilled by the publicly-listed companies for a period of at least one hundred eighty three calendar's days within one fiscal year.

Subsequently on March 31, 2020, the President of the Republic of Indonesia signed Government Regulation as a Substitute of Laws (Perppu) No.1 Year 2020 regarding "State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease (Covid-19) and/or in Order to Face Threats to Harm the National Economy and/or Financial System Stability", which regulates the adjustment of corporate income tax rate as follows:

- a. 22% effective for Fiscal Year 2020 and 2021,
- b. 20% effective starting Fiscal Year 2022, and
- c. Resident publicly-listed companies in Indonesia whose at least 40% or more of the total paid-up shares or other equity instruments are listed for trading in the Indonesia stock exchange and meet certain requirements in accordance with the government regulations, are entitled for 3% reduction of the rates stated in points a and b above.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi Tarif Pajak Efektif (lanjutan)

Perusahaan tidak menerapkan penurunan tarif pajak tersebut dalam perhitungan beban PPh badan seperti diungkapkan pada butir c di atas karena tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan di dalamnya. Namun Perusahaan telah menggunakan tarif pajak penghasilan tunggal sesuai butir a di atas untuk tahun pajak 2020 sebesar 22% (2019: 25%).

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan terdiri dari:

	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited/ (charged) to other comprehensive income	Saldo Akhir/ Ending balance	
31 Desember 2020					December 31, 2020
<u>Aset pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax assets</u>
Penyisihan atas					Allowance for
keusangan persediaan	150.598	(36.761)	-	113.837	obsolescence of inventories
Aset tetap	2.365.974	(35.346)	-	2.330.628	Fixed assets
Aset hak-guna	-	66.900	-	66.900	Right-of-use assets
Penyisihan bonus	224.313	(27.287)	-	197.026	Allowance for bonus
Sewa pembiayaan	(32.959)	32.959	-	-	Finance leases
Imbalan kerja karyawan	564.472	(76.939)	70.917	558.450	Employee benefits liabilities
Provisi rehabilitasi DAS	77.790	(16.869)	-	60.921	Provision for rehabilitation of DAS
Perubahan neto laba antar perusahaan yang belum terealisasi	325.992	127.004	-	452.996	Net changes in unrealised inter-company profits
Neto	3.676.180	33.661	70.917	3.780.758	Net
31 Desember 2019					December 31, 2019
<u>Aset pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax assets</u>
Provisi penurunan nilai piutang lain-lain	7.838	(7.838)	-	-	Provision for declining other receivables
Penyisihan atas					Allowance for
keusangan persediaan	141.057	9.541	-	150.598	obsolescence of inventories
Aset tetap	1.801.266	564.708	-	2.365.974	Fixed assets
Penyisihan bonus	543.389	(319.076)	-	224.313	Allowance for bonus
Sewa pembiayaan	(35.430)	2.471	-	(32.959)	Finance leases
Provisi penutupan tambang	338.527	(338.527)	-	-	Provision for mine closure
Imbalan kerja karyawan	342.130	265.914	(43.572)	564.472	Employee benefits liabilities
Provisi rehabilitasi DAS	-	77.790	-	77.790	Provision for rehabilitation of DAS
Provisi penggunaan bahan kimia untuk pengolahan air	744.773	(744.773)	-	-	Provision of chemical usage for water treatment
Perubahan neto laba antar perusahaan yang belum terealisasi	306.409	19.583	-	325.992	Net changes in unrealised inter-company profits
Neto	4.189.959	(470.207)	(43.572)	3.676.180	Net

14. TAXATION (continued)

Reconciliation of Effective Tax Rate (continued)

The Company does not apply the said reduction of tax rates in the computation of corporate income tax as disclosed in point c above since it cannot fulfill all the requirements set forth therein. Thus, the Company has applied a single tax rate as disclosed in point a above for the fiscal year 2020 of 22% (2019: 25%).

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities consist of the following:

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Pajak

Perusahaan menyampaikan pajak tahunan atas dasar perhitungan sendiri ("self assessment"). Sesuai dengan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008, Kantor Pajak dapat menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Hasil pemeriksaan dan SKP yang dikeluarkan Kantor Pajak adalah sebagai berikut:

	Tahun Pajak/ Fiscal Year	Jumlah yang Dilaporkan/ Amounts Reported	Jumlah yang Disetujui oleh Kantor Pajak/ Amounts Approved by Tax Office	Jumlah yang Dibebankan pada Laba Rugi/ Amounts Charged to Profit or Loss	Jumlah Keberatan Termasuk Bunga dan Denda/ Amounts Appealed, Including Interests and Penalties
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020/ Year Ended December 31, 2020					
<u>Perusahaan/The Company</u>					
Pajak Penghasilan/Income Taxes					
Pasal 28A/Article 28A	2018	7.267.156	7.082.395	184.761	-
Pasal 29/Article 29	2017	1.237.095	1.411.211	174.116	-
Pasal 29/Article 29	2016	319.205	599.628	280.423	-
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/ Year Ended December 31, 2019					
<u>Entitas Anak/Subsidiaries</u>					
Pajak Penghasilan/Income Taxes					
Pasal 28A/Article 28A	2018	1.144.578	750.379	394.199	-
Pasal 29/Article 29	2017	1.005	1.005	-	-

14. TAXATION (continued)

Tax Assessment Results

The Company submits its tax returns on the basis of self-assessment. In accordance with the latest amendments of the General Taxation and Procedural Law which became effective on January 1, 2008, the Tax Office may assess or amend taxes within 5 years from the date the tax becomes payable.

The tax assessment results and tax decision letters issued by the Tax Office are as follows:

15. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Utang sewa pembiayaan

	2020	2019
<u>Utang sewa pembiayaan</u>		
PT Mandiri Tunas Finance	-	49.272
Lain-lain	-	-
Total	-	49.272
Dikurangi:		
Bagian jangka pendek	-	(49.272)
Bagian jangka panjang	-	-

15. LONG-TERM BORROWINGS

Finance lease payables

<u>Obligations under finance leases</u>	
PT Mandiri Tunas Finance	
Others	
Total	
Less:	
Current portion	
Non-current portion	

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

15. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Utang bank

	2020
UOB Indonesia	4.675.057
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek dari utang bank	(4.675.057)
Bagian jangka panjang	-

Perjanjian fasilitas pinjaman UOB Indonesia

Pada tanggal 4 Oktober 2018, Perusahaan mengadakan perubahan perjanjian kredit dengan UOB Indonesia seperti yang tercantum dalam Akta notaris No. 1054 oleh R.F. Limpele, S.H. dimana akta perjanjian kredit sebelumnya No. 34 oleh Sri Rahayuningsih S.H. tertanggal 12 Maret 2015. Sesuai perubahan perjanjian tersebut, Perusahaan memperoleh fasilitas untuk transaksi valuta asing dengan limit maksimal sebesar AS\$20.000.000, fasilitas term loan ("TL") dengan limit maksimal sebesar AS\$17.500.000 dan fasilitas interest rate swap dengan limit maksimal sebesar AS\$17.500.000.

Atas fasilitas tersebut, Perusahaan memberikan jaminan tambahan berupa:

- Gadai saham atas kepemilikan saham Perusahaan sampai dengan sebesar 26% dalam DBU.
- Jaminan fidusia atas mesin dan peralatan atas nama Perusahaan dan BDMS dengan nilai jaminan sebesar AS\$1.775.159 dan AS\$11.901.268.

Pada tanggal 16 November 2018, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar AS\$6.371.380 dari fasilitas term loan dengan tingkat bunga LIBOR ditambah 2% per tahun. Pada tanggal 16 November 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian swap tingkat suku bunga mengambang untuk mendapatkan tingkat suku bunga tetap 5,12% per tahun.

Pada tanggal 6 Maret 2019, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar AS\$7.015.977 dari fasilitas term loan dengan tingkat bunga LIBOR ditambah 2% per tahun.

15. LONG-TERM BORROWINGS (continued)

Bank loan

	2019	
	9.350.116	UOB Indonesia
		Less:
	(4.675.058)	Current portion of bank loan
	4.675.058	Non-current portion

Loan facility agreement UOB Indonesia

On October 4, 2018, the Company entered into credit agreements with UOB Indonesia as stated on Notarial Deed No. 1054 of R.F. Limpele, S.H. where the previous credit agreement No. 34 of Sri Rahayuningsih S.H. was dated on March 12, 2015. Based on this agreement, the Company has obtained a foreign exchange facility with a maximum limit of US\$20,000,000, term loan facility ("TL") with a maximum limit of US\$17,500,000 and interest rate swap facility with a maximum limit of US\$17,500,000.

For these facilities, the Company provides additional guarantees in the form of:

- Mortgage of the Company's shares ownership up to 26% in DBU.
- Fiduciary guarantees of machinery and equipment on behalf of the Company and BDMS with collateral value US\$1,775,159 and US\$11,901,268.

On November 16, 2018, the Company has drawn down US\$6,371,380 from the term loan facility with the interest rate of LIBOR plus 2% per annum. On November 16, 2018, the Company entered into interest rate swap agreement to receive interest at floating rate and to pay interest at fixed rate of 5.12% per annum.

On March 6, 2019, the Company has drawn down US\$7,015,977 from the term loan facility with the interest rate of LIBOR plus 2% per annum.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

15. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Utang bank (lanjutan)

Perjanjian fasilitas pinjaman UOB Indonesia (lanjutan)

Pinjaman tersebut dibayarkan setiap triwulanan dengan pembayaran terakhir pada tanggal 4 Oktober 2021, dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Jadwal pembayaran/ Payment Schedule	Jumlah pembayaran/ Payment amount
Februari/February 2021	1.168.764
Mei/May 2021	1.168.764
Agustus/August 2021	1.168.764
Oktober/October 2021	1.168.765
Total/Total	4.675.057

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, pinjaman dari UOB Indonesia telah dibayar sebesar AS\$4.675.059 (2019: AS\$4.037.241) dengan beban bunga sebesar AS\$314.905 (2019: AS\$486.730).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan tertentu yang diwajibkan oleh krediturnya.

Perjanjian fasilitas kredit MUFG

Pada tanggal 17 September 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan MUFG seperti yang tercantum dalam Akta notaris No. 48 oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dengan amandemen terakhir pada tanggal 27 Agustus 2019. Sesuai perjanjian tersebut, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit tanpa komitmen melalui mekanisme dana yang ditarik di muka dengan batas fasilitas sebesar AS\$10.000.000. Perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 17 September 2020.

Tingkat bunga untuk fasilitas pinjaman di atas adalah sebesar LIBOR 3 (tiga) bulan ditambah 1,75% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat nilai terutang atas fasilitas kredit ini.

15. LONG-TERM BORROWINGS (continued)

Bank loan (continued)

Loan facility agreement UOB Indonesia (continued)

The loan is repayable on quarterly basis with the final repayment date on October 4, 2021, according to the following schedule:

For the year ended December 31, 2020, loan from UOB Indonesia has been paid amounting to US\$4,675,059 (2019: US\$4,037,241) with interest expense amounting to US\$314,905 (2019: US\$486,730).

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with debt covenants required by the lender.

Credit facility agreement MUFG

On September 17, 2015, the Company entered into credit facility agreements with MUFG as stated on Notarial Deed No. 48 of Aryanti Artisari, S. H., M. Kn. with the latest amendment on August 27, 2019. Based on this agreement, the Company has obtained the credit facility without commitment by an advance funding mechanism with a credit limit of US\$10,000,000. The agreements has ended on September 17, 2020.

Interest rates for the above credit facility are LIBOR 3 (three) months plus 1.75% per annum.

As of December 31, 2020 and 2019, there is no outstanding balance of this credit facility.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Kelompok Usaha mencatat beban imbalan kerja karyawan sebagaimana diharuskan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan. Beban imbalan kerja ditentukan menggunakan metode "Projected Unit Credit" berdasarkan laporan penilaian aktuaris independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Program pensiun imbalan pasti dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") AIA dan Manulife Indonesia, yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan. Sumber dana program pensiun berasal dari kontribusi Perusahaan dan BDMS, dimana beban pensiun yang dibebankan pada usaha 31 Desember 2020, masing-masing sebesar Rp1.750.000.000 dan Rp1.626.356.000 (31 Desember 2019, masing-masing sebesar Rp1.800.000.000 dan Rp3.600.000.000).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset program ditempatkan seluruhnya pada instrumen pasar uang yang tidak memiliki harga pasar yang dikutip.

Asumsi-asumsi signifikan dalam perhitungan aktuarial

Tingkat diskonto tahunan	:	2020: 5,55% (2019: 6,90%)	:	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	:	2020: 6,00% (2019: 6,00%)	:	Future annual salary increase rate
Tingkat pengunduran diri	:	10% untuk karyawan di bawah usia 25 tahun dan akan berkurang secara linear sampai 0% pada usia 45 tahun/ 10% for employees before the age of 25 years and will decrease linearly until 0% at the age of 45 years	:	Annual employee turn-over rate
Tingkat cacat tahunan	:	10% dari tingkat kematian/ 10% from mortality rate	:	Annual disability rate
Usia pensiun normal	:	55 tahun/55 years	:	Normal retirement age
Tingkat kematian	:	Tabel Mortalita Indonesia IV (TMI IV) Indonesian Mortality Table IV (TMI IV)	:	Mortality rate

16. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

The Group recognizes employee benefit expense as required by the Labour Law. The employee benefit expense was determined using the "Projected Unit Credit" method based on the actuary reports of an independent actuary, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, for the year ended December 31, 2020 and 2019.

The defined benefit pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") AIA and Manulife Indonesia, the establishment of which was approved by the Minister of Finance. The fund is contributed by the Company and BDMS, whereby pension expenses charged to operations in December 31, 2020 amounted to Rp1,750,000,000 and Rp1,626,356,000 respectively (December 31, 2019 amounted to Rp1,800,000,000 and Rp3,600,000,000 respectively).

As of December 31, 2020 and 2019, the plan assets were fully invested in the money market, which did not have a quoted market.

Significant assumptions in the actuarial calculations

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

16. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

The sensitivity analysis to the key assumptions used in determining employee benefits obligations as of December 31, 2020 is as follows:

Asumsi utama	Kenaikan/ (penurunan)/ Increase/ (decrease)	(Penurunan)/kenaikan liabilitas imbalan kerja neto/ (Decrease)/ increase in the net employee benefits liabilities	Key assumptions
Tingkat diskonto tahunan	100/(100) basis poin/ <i>Basis points</i>	(US\$226.474)/US\$241.204	<i>Annual discount rate</i>
Kenaikan gaji tahunan	100/(100) basis poin/ <i>Basis points</i>	US\$244.142/(US\$233.569)	<i>Annual salary increase</i>

Perubahan Kewajiban Imbalan Kerja

Changes in Employee Benefits Obligations

	2020	2019	
Saldo awal	2.257.900	1.368.522	<i>Beginning balance</i>
<u>Perubahan yang dibebankan ke laba rugi</u>			<u><i>Changes charged to profit or loss</i></u>
Biaya jasa kini	566.305	565.185	<i>Current-service cost</i>
Biaya bunga	246.675	234.427	<i>Interest cost</i>
Pendapatan bunga dari aset program	(134.803)	(142.984)	<i>Interest income from plan assets</i>
Liabilitas dari pengakuan jasa lalu	54.267	55.035	<i>Liability assumed due to recognition of past services</i>
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	-	721.399	<i>Past service costs for changes in benefits</i>
Liabilitas dari mutasi karyawan	(213.962)	(37.027)	<i>Liability from employee mutation</i>
Provisi untuk kelebihan pembayaran Imbalan kerja	81.259	59.865	<i>Provision for excess benefit payment</i>
Sub-total	599.741	1.455.900	<i>Sub-total</i>
Kontribusi Kelompok Usaha atas aset program	(232.918)	(381.724)	<i>Contributions to plan made by the Group</i>
Penghasilan komprehensif lain	322.349	(174.281)	<i>Other comprehensive income</i>
Imbalan yang dibayarkan	(144.789)	(84.440)	<i>Benefits paid</i>
Selisih penjabaran mata uang asing	(13.104)	73.923	<i>Foreign exchange difference</i>
Total	2.789.179	2.257.900	<i>Total</i>

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mutasi nilai wajar aset program

	2020	2019
Saldo awal	1.927.225	1.527.411
Kontribusi Kelompok Usaha atas aset program	232.918	381.724
Hasil pengembangan riil	110.884	116.773
Pembayaran manfaat aset program	(346.528)	(168.238)
Selisih penjabaran mata uang asing	(29.301)	69.555
Total	1.895.198	1.927.225

Rincian liabilitas imbalan kerja

	2020	2019
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	4.684.377	4.185.125
Nilai wajar aset program	(1.895.198)	(1.927.225)
Neto	2.789.179	2.257.900

Mutasi saldo liabilitas imbalan pasti

	2020	2019
Saldo awal	4.185.125	2.895.933
Biaya jasa kini	566.305	565.185
Biaya bunga	246.675	234.427
Liabilitas dari pengakuan jasa lalu	54.267	55.035
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	-	721.399
Provisi untuk kelebihan pembayaran imbalan kerja	81.259	59.866
Imbalan yang dibayarkan	(144.789)	(84.440)
Pembayaran manfaat aset program	(346.528)	(168.238)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan karyawan	298.430	(174.281)
Liabilitas dari mutasi karyawan	(213.962)	(37.027)
Selisih penjabaran mata uang asing	(42.405)	117.266
Total	4.684.377	4.185.125

16. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Fair value of plan assets movement

Beginning balance
Contributions to plan made by the Group
Return on plan assets
Benefit payments of plan assets
Foreign exchange difference
Total

Details of employee benefit liabilities

Present value of employee benefit obligations
Fair value of plan assets
Net

Movements in the present value of the Group's defined benefit obligation

Beginning balance
Current service cost
Interest cost
Liability due to recognition of past services
Past service costs for changes in benefits
Provision for excess benefit payment
Benefits paid
Benefit payment of plan assets
Remeasurement of employee benefit liabilities
Liability from employee mutation
Foreign exchange difference
Total

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan kerja yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Dalam 12 bulan mendatang	95.214	131.798	Within the next 12 months
Antara 1 sampai 2 tahun	189.541	122.438	Between 1 and 2 years
Antara 2 sampai 5 tahun	909.709	901.048	Between 2 and 5 years
Di atas 5 tahun	6.952.743	6.510.960	Beyond 5 years
Total	8.147.207	7.666.244	Total

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 5,6 tahun (2019: 6,48 tahun).

Perhitungan liabilitas imbalan kerja tersebut di atas masih merujuk kepada UU No. 13/2003 yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai acuan imbalan minimum, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan beberapa ketentuan dari UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja baru diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2021.

16. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Expected maturity analysis of undiscounted employee benefits are as follows:

The average duration of the benefit obligation at December 31, 2020 was 5.6 years (2019: 6.48 years).

The calculation of the employee benefits liability above was still referring to the Law No. 13/2003 which was still in effect at December 31, 2020 as reference for minimum benefits, while Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement certain provisions of Law No. 11/2020 concerning Job Creation ("Cipta Kerja") has just been promulgated and put into effect on February 2, 2021.

17. EKUITAS

Modal saham

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rincian pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan sahamnya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Amount	Jumlah setara dalam Rupiah/ Total in Rupiah equivalent	Shareholders
31 Desember 2020					December 31, 2020
PT Wahana Sentosa Cemerlang	736.363.152	60,00	6.461.654	73.636.315.200	PT Wahana Sentosa Cemerlang
Idemitsu Kosan Co., Ltd.	368.181.600	30,00	3.232.619	36.818.160.000	Idemitsu Kosan Co., Ltd. Khoirudin (President Director)
Khoirudin (Direktur Utama)	3.408.100	0,28	29.142	340.810.000	Ir. Syadaruddin (Director)
Ir. Syadaruddin (Direktur)	2.000	0,00	17	200.000	Eric Rahardja (Director)
Eric Rahardja (Direktur)	100	0,00	1	10.000	
Masyarakat lainnya (dengan masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	119.317.000	9,72	1.020.239	11.931.700.000	Public (each with ownership interests below 5%)
Total	1.227.271.952	100,00	10.743.672	122.727.195.200	Total

17. EQUITY

Share capital

As of December 31, 2020 and 2019, the Company's shareholders and their respective share ownership are as follows:

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

17. EKUITAS (lanjutan)

Modal saham (lanjutan)

Pemegang saham	Saham ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Number of shares issued and fully paid</i>	Persentase kepemilikan (%)/ <i>Percentage of ownership (%)</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	Jumlah setara dalam Rupiah/ <i>Total in Rupiah equivalent</i>	Shareholders
31 Desember 2019					
PT Wahana Sentosa Cemerlang	736.363.152	60,00	6.461.654	73.636.315.200	PT Wahana Sentosa Cemerlang
Idemitsu Kosan Co., Ltd.	368.181.600	30,00	3.232.619	36.818.160.000	Idemitsu Kosan Co., Ltd.
Yo Angela Soedjana (Komisaris Utama)	8.883.800	0,72	75.962	888.380.000	Yo Angela Soedjana (President Commissioner)
Widada (Direktur Utama)	1.000	0,00	8	100.000	Widada (President Director)
Ir. Syadaruddin (Direktur)	2.000	0,00	17	200.000	Ir. Syadaruddin (Director)
Deden Ramdhan (Direktur)	2.027.400	0,16	17.336	202.740.000	Deden Ramdhan (Director)
Masyarakat lainnya (dengan masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	111.813.000	9,12	956.076	11.181.300.000	Public (each with ownership interests below 5%)
Total	1.227.271.952	100,00	10.743.672	122.727.195.200	Total

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, pengembalian modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

17. EQUITY (continued)

Share capital (continued)

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximise shareholders' value.

The Company is required by the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Entities, effective from August 16, 2007, to allocate and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements are considered by the Company in each Annual General Meeting of Shareholder ("AGMS").

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, if necessary, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust its capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. No changes were made to the objectives, policies or processes for the year ended December 31, 2020 and 2019.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

17. EKUITAS (lanjutan)

Dividen kas

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Komisaris dan Direksi pada tanggal 11 Agustus 2020, Perusahaan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham sebesar AS\$29.533.061 (atau AS\$0,0241 per saham) dan telah dibayarkan seluruhnya pada tanggal 31 Agustus 2020.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 9 Juni 2020, Perusahaan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham sebesar AS\$5.182.072 (atau AS\$0,0042 per saham) dan telah dibayarkan oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juni 2020.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi pada tanggal 30 Oktober 2019, Perusahaan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham sebesar AS\$9.000.000 (atau AS\$0,0073 per saham) dan telah dibayarkan seluruhnya pada tanggal 15 November 2019.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 Juni 2019, Perusahaan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham sebesar AS\$5.000.000 (atau AS\$0,0041 per saham) dan telah dibayarkan oleh Perusahaan pada bulan Juli 2019.

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN SELISIH AKUISISI KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Tambahan modal disetor

Akun tambahan modal disetor merupakan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dan agio saham. Rincian akun ini pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	Jumlah/ Total
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	3.151.281
Agio saham	12.081.104
Pengakuan aset pengampunan pajak	183.208
Total	15.415.593

17. EQUITY (continued)

Cash dividends

Based on Circular Resolution of Board of Commissioners and Board of Directors dated August 11, 2020, the Company distributed the cash dividends to the shareholders amounting to US\$29,533,061 (or US\$0.0241 per share) has been fully paid on August 31, 2020.

Based on Resolution of Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 9, 2020, the Company distributed the cash dividends to the shareholders amounting to US\$5,182,072 (or US\$0.0042 per share) which has been fully paid by the Company on June 24, 2020.

Based on Circular Resolution of Board of Directors dated 30 Oktober 2019, the Company distributed the cash dividends to the shareholders amounting to US\$9,000,000 (or US\$0.0073 per share) has been fully paid on November 15, 2019.

Based on Resolution of Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 12, 2019, the Company distributed the cash dividends to the shareholders amounting to US\$5,000,000 (or US\$0.0041 per share) which has been fully paid by the Company in July 2019.

18. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND DIFFERENCES ARISING FROM ACQUISITION OF NON-CONTROLLING INTEREST

Additional paid-in capital

Additional paid-in capital account represents the differences arising from restructuring transactions among entities under common control and share premium. The details of this account as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

The differences arising from restructuring transactions among entities under common control	
Share premium	
Recognition of tax amnesty assets	
Total	Total

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**18. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN SELISIH
AKUISISI KEPENTINGAN NONPENGENDALI
(lanjutan)**

Tambahan modal disetor (lanjutan)

Pada tanggal 25 September 2013, beberapa pemegang saham entitas anak, yang merupakan pihak sepengendali atau pemegang saham pengendali akhir Perusahaan, setuju untuk menjual kepemilikan saham kepada Perusahaan. Selisih antara pembayaran yang dialihkan dengan nilai buku aset neto Entitas Anak disajikan sebagai bagian dari akun "Tambahan modal disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Rincian transaksi adalah sebagai berikut:

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah saham/ Number of shares</u>	<u>Pembayaran yang dialihkan/ Consideration transferred</u>	<u>Nilai buku aset neto entitas anak/ Book value of the net assets of subsidiary</u>	<u>Selisih/ Difference</u>	<u>Shareholders</u>
PT Wahana Sentosa Cemerlang	12.800	4.602.756	6.771.496	2.168.740	PT Wahana Sentosa Cemerlang
PT Baramulti Sugih Sentosa	3.800	1.366.443	2.010.288	643.845	PT Baramulti Sugih Sentosa
Tn. Athanasius Tossin Suharya	1.999	718.821	1.057.517	338.696	Mr. Athanasius Tossin Suharya
Total	18.599	6.688.020	9.839.301	3.151.281	Total

Agio saham merupakan selisih antara nilai nominal saham yang diterbitkan dalam rangka IPO pada bulan Juli 2014 dengan hasil yang diterima sebesar AS\$12.081.104, setelah dikurangi biaya emisi saham.

Amnesti pajak

Perusahaan

Perusahaan berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Perusahaan memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") No. KET-189/PP/WPJ.19/2017 tanggal 22 Maret 2017 dengan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak sebesar Rp874.923.974 (setara AS\$65.587).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset pengampunan pajak ini dicatat sebagai persediaan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**18. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND
DIFFERENCES ARISING FROM ACQUISITION
OF NON-CONTROLLING INTEREST (continued)**

Additional paid-in capital (continued)

On September 25, 2013, several shareholders of the subsidiary, which is an entity under common control or the ultimate controlling shareholder of the Company, agreed to sell their equity ownership to the Company. The difference between the consideration transferred and the book value of net assets of the Subsidiary was presented as part of the "Additional paid-in capital" account in the consolidated statements of financial position. The details of the transaction are as follows:

Share premium represents the difference between the total par value of new shares issued in connection with the IPO conducted in July 2014 and the related proceeds amounting to US\$12,081,104, after netting off the share issuance costs.

Tax amnesty

The Company

The Company participated in The Tax Amnesty Program in accordance with Law No. 11 Year 2016. The Company obtained Tax Amnesty Acknowledgement letter ("SKPP") No. KET-189/PP/WPJ.19/2017 dated March 22, 2017 with the amounts recognized as tax amnesty asset, which amounted to Rp874,923,974 (equivalent to US\$65,587).

As of December 31, 2020 and 2019, the tax amnesty asset is recorded as inventories in the consolidated statements of financial position.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**18. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN SELISIH
AKUISISI KEPENTINGAN NONPENGENDALI
(lanjutan)**

Amnesti pajak (lanjutan)

BDMS

Pada tanggal 24 Februari 2017, BDMS berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. BDMS memperoleh SKPP No. KET-158/PP/WPJ.19/2017 tanggal 3 Maret 2017 dengan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak sebesar Rp1.568.600.000 (setara AS\$117.621).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset pengampunan pajak ini dicatat sebagai kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Selisih akuisisi kepentingan nonpengendali

Pada tanggal 26 September 2013, Perusahaan mengakuisisi 7% saham BDMS dari pemegang saham nonpengendali dengan nilai transaksi sebesar AS\$503.426. Selisih yang timbul antara pembayaran kepada kepentingan nonpengendali dengan nilai buku terkait sebesar AS\$237.206 dicatat sebagai "Selisih akuisisi kepentingan nonpengendali" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilusi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**18. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND
DIFFERENCES ARISING FROM ACQUISITION
OF NON-CONTROLLING INTEREST (continued)**

Tax amnesty (continued)

BDMS

On February 24, 2017, BDMS participated in The Tax Amnesty Program in accordance with Law No. 11 Year 2016. BDMS obtained SKPP No. KET-158/PP/WPJ.19/2017 dated March 3, 2017 with the amount recognized as tax amnesty asset amounted to Rp1,568,600,000 (equivalent to US\$117,621).

As of December 31, 2020 and 2019, the tax amnesty asset is recorded as cash and cash equivalents in the consolidated statements of financial position.

Difference arising from acquisitions of non-controlling interests

On September 26, 2013, the Company acquired 7% of the BDMS shares from the non-controlling interests for a consideration of US\$503,426. The difference arising between the considerations paid to the non-controlling interests with the related book value amounting to US\$237,206 was recognized as "Difference arising from acquisitions of non-controlling interests" in the consolidated statements of financial position.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2020 and 2019.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

19. LABA PER SAHAM DASAR

Rincian perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Profit attributable to owners of the parent	Jumlah rata-rata tertimbang saham/Weighted average number of shares	Laba per saham dasar/ Basic earnings per share	
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	27.467.417	1.227.271.952	0,022	Year ended December 31, 2020
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	35.287.482	1.227.271.952	0,029	Year ended December 31, 2019

19. BASIC EARNINGS PER SHARE

The details of basic earnings per share computation are as follows:

20. PENDAPATAN

Rincian penjualan batubara adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Pihak ketiga	174.244.205	220.646.340	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 24)	26.963.082	40.203.463	Related parties (Note 24)
Total	201.207.287	260.849.803	Total

20. REVENUE

The details of coal sales are as follows:

Penjualan di atas 10% dari jumlah penjualan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Pihak ketiga			Third parties
KCH Energy Co., Ltd.	121.666.841	51.852.733	KCH Energy Co., Ltd.
PT Paiton Energy	10.988.557	29.343.490	PT Paiton Energy
TNB Fuel Service Sdn. Bhd	4.544.540	48.037.126	TNB Fuel Service Sdn. Bhd
Pihak berelasi (Catatan 24)			Related parties (Note 24)
Brooklyn Enterprise Pte., Ltd.	25.339.354	31.752.531	Brooklyn Enterprise Pte., Ltd.

Kewajiban pelaksanaan pada Kelompok Usaha, yang mencakup produk diatas, dipenuhi pada saat pengiriman dari lokasi Kelompok Usaha sesuai persyaratan dalam kontrak.

The performance obligations of the Group, which cover the product mentioned above, are satisfied upon shipment from the Group's location as agreed in the contracts.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

21. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Biaya produksi:		
Jasa kontraktor	65.131.569	82.901.941
Jasa pengangkutan	19.331.977	23.828.540
Bahan bakar	7.101.305	10.978.238
Penyusutan aset tetap (Catatan 10)	6.936.459	6.819.893
Gaji dan tunjangan	5.869.722	5.412.205
Biaya penggunaan bahan kimia untuk pengelolaan air	4.370.277	255.514
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 9)	3.661.056	-
Suku cadang dan peralatan	2.636.627	4.073.280
Lain-lain	11.569.450	11.516.375
Sub-total	126.608.442	145.785.986
Royalti	9.367.957	12.997.620
Persediaan batubara		
Awal tahun	10.934.758	21.580.207
Akhir tahun	(12.692.934)	(10.934.758)
Total	134.218.223	169.429.055

Rincian pemasok yang memiliki nilai transaksi lebih dari 10% dari penjualan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2020	2019
PT Kalimantan Prima Persada ("KPP")	69.117.636	80.159.418

21. COST OF REVENUE

The details of cost of revenue are as follow:

Production cost:
Contractor fee
Hauling fee
Fuel
Depreciation of fixed assets (Note 10)
Salaries and allowances
Chemical usage cost for water treatment
Depreciation of right-of-use assets (Note 9)
Spareparts and equipment
Others
Sub-total
Royalties
Coal inventories
At beginning of year
At end of year
Total

Details of the suppliers which have total transaction value of more than 10% of the consolidated revenue are as follows:

PT Kalimantan Prima Persada ("KPP")

22. BEBAN PENJUALAN

	2020	2019
Pengangkutan tongkang	11.958.202	17.829.607
Biaya pemasaran (Catatan 24)	5.545.546	7.393.094
Floating crane	5.725.092	6.446.650
Lain-lain	505.080	1.179.333
Total	23.733.920	32.848.684

22. SELLING EXPENSES

Freight barging
Marketing fee (Note 24)
Floating crane
Others
Total

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2020	2019
Gaji dan kesejahteraan karyawan	4.283.625	4.911.025
Beban pajak	692.842	1.440
Jasa manajemen (Catatan 24)	629.951	659.917
Biaya profesional	392.123	675.811
Peralatan kantor	377.395	611.182
Biaya perjalanan	182.600	582.323
Lain-lain	1.824.157	1.953.420
Total	8.382.693	9.395.118

23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Salaries and employee benefits
Tax expense
Management fee (Note 24)
Professional fee
Office supplies
Traveling expense
Others

**24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-
PIHAK BERELASI**

	Total/Total		Persentase terhadap Jumlah penjualan/ Percentage of total sales	
	2020	2019	2020	2019
Penjualan neto (Catatan 20)				
<u>Entitas dengan pengaruh signifikan</u>				
Idemitsu Kosan Co., Ltd.	1.623.728	4.322.392	0,81	1,66
<u>Entitas sependongi</u>				
Brooklyn Enterprise Pte., Ltd.	25.339.354	31.752.531	12,59	12,17
Goodlink International Ltd.	-	4.128.540	-	1,58
Total	26.963.082	40.203.463	13,40	15,41

Net sales (Note 20)
<u>Entity with significant influence</u>
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
<u>Under common control</u>
Brooklyn Enterprise Pte., Ltd.
Goodlink International Ltd.

	Total/Total		Persentase terhadap jumlah pendapatan/beban yang bersangkutan Percentage of total/ related income/expenses	
	2020	2019	2020	2019
Penghasilan lain-lain				
<u>Entitas sependongi</u>				
PT Global Trans Energy	3.761	-	0,21	-
PT Armada Indonesia Mandiri	1.150	-	0,06	-
PT Idemitsu Lube Indonesia	-	1.547	-	0,26
Total	4.911	1.547	0,27	0,26
Biaya pemasaran (Catatan 22)				
<u>Entitas dengan pengaruh signifikan</u>				
Idemitsu Kosan Co., Ltd.	959.212	2.119.458	4,04	6,45
<u>Entitas sependongi</u>				
PT Baramulti Sugih Sentosa	4.586.334	5.273.636	19,32	16,05
Total	5.545.546	7.393.094	23,36	22,50

Other revenue
<u>Under common control</u>
PT Global Trans Energy
PT Armada Indonesia Mandiri
PT Idemitsu Lube Indonesia

Marketing fee (Note 22)
<u>Entity with significant influence</u>
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
<u>Under common control</u>
PT Baramulti Sugih Sentosa

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**24. TRANSACTIONS AND ACCOUNT BALANCES
WITH RELATED PARTIES (continued)**

	Total/Total		Persentase terhadap jumlah pendapatan/beban yang bersangkutan Percentage of total/ related income/expenses		
	2020	2019	2020	2019	
Biaya pengangkutan tongkang					Freight barging
<u>Entitas sepengendali</u>					<u>Under common control</u>
PT Global Trans Energy International	7.843.285	11.516.471	33,05	35,06	PT Global Trans Energy International
PT Wahana Yasa International Shipping	1.767.023	4.059.989	7,45	12,36	PT Wahana Yasa International Shipping
Total	9.610.308	15.576.460	40,50	47,42	Total
Biaya stevedoring					Stevedoring fee
<u>Entitas sepengendali</u>					<u>Under common control</u>
PT Global Stevedoring Indonesia	560.644	670.221	2,36	2,04	PT Global Stevedoring Indonesia
Biaya floating crane (Catatan 22)					Floating crane fee (Note 22)
<u>Entitas sepengendali</u>					<u>Under common control</u>
PT Armada Indonesia Mandiri	5.548.266	6.446.650	23,38	19,62	PT Armada Indonesia Mandiri
Jasa manajemen (Catatan 23)					Management fee (Note 23)
<u>Entitas sepengendali</u>					<u>Under common control</u>
PT Baramulti Sugih Sentosa	629.951	659.917	7,52	7,02	PT Baramulti Sugih Sentosa
Sewa gedung kantor					Office building rent
<u>Entitas sepengendali</u>					<u>Under common control</u>
PT Sarana Kelola Sejahtera	152.982	171.573	1,82	1,83	PT Sarana Kelola Sejahtera
Jasa lainnya (bagian dari beban pokok penjualan)					Other services (part of cost of revenue)
<u>Entitas sepengendali</u>					<u>Under common control</u>
PT Idemitsu Lube Indonesia	164.059	189.772	0,12	0,11	PT Idemitsu Lube Indonesia
PT Baramulti Sugih Sentosa	66.013	231.152	0,05	0,14	PT Baramulti Sugih Sentosa
Total	230.072	420.924	0,17	0,25	Total
Jasa lainnya (bagian dari beban umum dan administrasi)					Other services (part of general and administrative expenses)
<u>Entitas sepengendali</u>					<u>Under common control</u>
PT Baramulti Sugih Sentosa	-	104.237	-	1,11	PT Baramulti Sugih Sentosa

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**24. TRANSACTIONS AND ACCOUNT BALANCES
WITH RELATED PARTIES (continued)**

	Total/Total		Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage of total assets		
	2020	2019	2020	2019	
Piutang usaha (Catatan 5)					Trade receivables (Note 5)
<u>Entitas dengan pengaruh signifikan</u>					<u>Entity with significant influence</u>
Idemitsu Kosan Co., Ltd.	-	1.097.400	-	0,57	Idemitsu Kosan Co., Ltd.
<u>Entitas sepengendali</u>					<u>Under common control</u>
Brooklyn Enterprise Pte., Ltd.	3.294.926	2.822.796	1,81	1,47	Brooklyn Enterprise Pte., Ltd.
Total	3.294.926	3.920.196	1,81	2,04	Total

Penjualan batubara kepada pihak berelasi dilakukan pada harga jual yang disepakati dengan mengacu kepada harga pasar.

Sales of coal to related parties are made based on agreed selling price based on prevailing market price.

	Total/Total		Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage of total assets		
	2020	2019	2020	2019	
Piutang lain-lain					Other receivables
<u>Entitas dengan pengaruh signifikan</u>					<u>Entity with significant influence</u>
Idemitsu Kosan Co., Ltd.	23.385	27.551	0,01	0,01	Idemitsu Kosan Co., Ltd.
<u>Ventura bersama</u>					<u>Joint venture</u>
PT Duta Bara Utama	439.049	37.952	0,24	0,02	PT Duta Bara Utama
PT Engie Cipta Tenaga Surya	26.861	6.704	0,02	0,00	PT Engie Cipta Tenaga Surya
<u>Entitas sepengendali</u>					<u>Under common control</u>
PT Armada Indonesia Mandiri	-	9.090	-	0,01	PT Armada Indonesia Mandiri
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$5.000)	2.493	2.263	0,00	0,00	Others (each less than US\$5,000)
Total	491.788	83.560	0,27	0,04	Total

	Total/Total		Persentase terhadap jumlah liabilitas/ Percentage of total liabilities		
	2020	2019	2020	2019	
Utang usaha (Catatan 12)					Trade payables (Note 12)
<u>Entitas dengan pengaruh signifikan</u>					<u>Entity with significant influence</u>
Idemitsu Kosan Co., Ltd.	-	440.771	-	0,94	Idemitsu Kosan Co., Ltd.
<u>Entitas sepengendali</u>					<u>Under common control</u>
PT Global Trans Energy International	120.608	366.736	0,28	0,78	PT Global Trans Energy International
PT Wahana Yasa International Shipping	-	177.343	-	0,38	PT Wahana Yasa International Shipping
PT Armada Indonesia Mandiri	-	166.274	-	0,36	PT Armada Indonesia Mandiri
PT Global Stevedoring Indonesia	-	35.204	-	0,07	PT Global Stevedoring Indonesia
PT Idemitsu Lube Indonesia	23.497	16.794	0,05	0,04	PT Idemitsu Lube Indonesia
PT Baramulti Sugih Sentosa	11.945	-	0,03	-	PT Baramulti Sugih Sentosa
PT Wahana Niaga Cemerlang	4.912	-	0,01	-	PT Wahana Niaga Cemerlang
<u>Pihak berelasi lainnya</u>					<u>Other related parties</u>
PT Sarana Kelola Sejahtera	-	2.239	-	0,00	PT Sarana Kelola Sejahtera
Total	160.962	1.205.361	0,37	2,57	Total

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Liabilitas keuangan utama Kelompok Usaha meliputi utang usaha dan lain-lain, biaya masih harus dibayar dan pinjaman jangka panjang. Tujuan utama dari liabilitas keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasi Kelompok Usaha. Kelompok Usaha juga mempunyai berbagai aset keuangan seperti piutang usaha dan lain-lain serta kas dan setara kas, yang dihasilkan langsung dari kegiatan usahanya.

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga Kelompok Usaha berasal dari pinjaman bank dan fasilitas kredit yang didasarkan pada suku bunga mengambang. Oleh karena itu, Kelompok Usaha terekspos dengan fluktuasi arus kas yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Kelompok Usaha mengelola risiko ini dengan melakukan perjanjian swap suku bunga untuk mengurangi pengaruh dari perubahan suku bunga mengambang dari sebagian pinjaman bank (Catatan 15). Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Kelompok Usaha dengan risiko suku bunga nilai wajar.

Kelompok Usaha menganalisis eksposur dari risiko bunga secara dinamis. Beberapa skenario disimulasikan dengan beberapa pertimbangan seperti pembiayaan kembali, memperbaharui dari kondisi yang ada dan alternatif lain pembiayaan. Berdasarkan skenario tersebut diatas, Kelompok Usaha mengelola risiko arus kas dari suku bunga dengan melakukan pembiayaan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika tingkat suku bunga atas pinjaman bank adalah 25 basis poin lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan menjadi lebih rendah atau lebih tinggi sebesar AS\$8.226. Hal ini diakibatkan beban bunga yang lebih tinggi/lebih rendah atas pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang.

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group's principal financial liabilities comprise trade and other payables, accrued expenses and long-term borrowings. The main objective of these financial liabilities is to raise funds for the Group's operations. The Group also has various financial assets such as trade and other receivables, and cash and cash equivalents, which arise directly from its operations.

Interest rate risk

The interest rate risk of the Group is resulted from bank loans and credit facilities which are based on floating interest rates. Accordingly, the Group is exposed to fluctuation in cash flows due to changes in interest rates. The Group managed the risk by entered into interest rate swap agreement to reduce the impact of changes in interest rates on its floating rate from a portion of bank loan (Note 15). Borrowings issued at fixed rates exposes the Group to fair value interest risk.

The Group analyses its interest rate exposure on a dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration the refinancing of existing positions, and alternative financing. Based on the above scenarios, the Group manages its cash flows interest rate risk by refinancing borrowings at a lower interest rate.

As of December 31, 2020, if interest rate on bank loans had been 25 basis points higher/lower with all other variables held constant, the profit after tax for the year would have been US\$8,226 lower or higher, mainly as a result of higher/lower interest expense on floating rate borrowings.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko mata uang asing

Sebagai akibat piutang dan utang dalam mata uang Rupiah, laporan posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar Dolar AS/Rupiah. Mayoritas penjualan Kelompok Usaha dalam mata uang Dolar AS, sehingga risiko mata uang asing telah terlindungi secara otomatis. Kelompok Usaha terus memonitor fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing sehingga, apabila diperlukan, dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari eksposur nilai tukar yang signifikan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, berdasarkan simulasi yang rasional, bila nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah mengalami pelemahan/penguatan sebesar 1%, dengan variabel lain tetap konstan, laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar AS\$293.657 (2019: AS\$99.868), terutama akibat rugi/laba selisih kurs atas penjabaran kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, aset lainnya, utang usaha, utang lain-lain, biaya masih harus dibayar, utang pajak, utang jangka pendek, utang jangka pendek, liabilitas imbalan kerja dan provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang yang didenominasi dalam Rupiah.

Risiko harga komoditas

Aset keuangan dan liabilitas Kelompok Usaha tidak terekspos secara signifikan terhadap risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga dari harga komoditas yang diperdagangkan di pasar batubara dunia dikarenakan penyelesaian aset dan liabilitas keuangan berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak jual beli batubara yang ditentukan pada saat pengiriman.

**25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Foreign currency risk

As a result of receivables and payables denominated in Rupiah currency, the Group's consolidated statements of financial position may be affected by movements in the US Dollars/Rupiah exchange rates. Majority sales of the Group are in US Dollars and therefore provide a natural hedge against the impact of fluctuations in the exchange rate. The Group monitors the foreign exchange rate fluctuation and market expectation so, if needed, it can take necessary actions to avoid significant exposures in exchange rates.

As of December 31, 2020, based on a sensible simulation, had the exchange rate of US Dollars against Rupiah depreciated/appreciated by 1%, with all other variables held constant, profit before income tax for the year ended December 31, 2020 would have been US\$293,657 (2019: US\$99,868) lower/higher, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, other current assets, other assets, trade payables, other payables, accrued expenses, taxes payable, short-term debts, long-term debts, employee benefit liabilities and provision for mine reclamation and closure, which are denominated in Rupiah.

Commodity price risk

The Group's financial assets and liabilities are not significantly exposed to market risks related to the price volatility of commodity price which is traded in world coal markets because the settlement of financial assets and liabilities are based on prices stipulated in the coal sales and purchase agreements, which will be determined at the time of delivery.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Kelompok Usaha berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan.

Kelompok Usaha memiliki kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Kelompok Usaha bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Kelompok Usaha memberikan syarat pembayaran antara 30 sampai dengan 45 hari. Kelompok Usaha memiliki kebijakan yang membatasi jumlah kredit untuk tiap-tiap pelanggan. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih.

Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan sesuai dengan syarat pembayaran, Kelompok Usaha akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kelompok Usaha akan menempuh jalur hukum. Sesuai dengan evaluasi oleh Kelompok Usaha, provisi spesifik dapat dibuat jika utang dianggap tidak tertagih. Untuk menekan risiko kredit, Kelompok Usaha akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang terlambat dan/atau gagal bayar. Kelompok Usaha juga meminta pembayaran dengan menggunakan *letter of credit* untuk pelanggannya.

Untuk menghindari konsentrasi risiko, kas disimpan di beberapa lembaga keuangan swasta dan yang dimiliki Pemerintah Indonesia yang memiliki reputasi yang baik.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Kelompok Usaha terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan adalah:

	2020	2019	
Kas di bank dan deposito berjangka	45.948.141	29.030.138	Cash in banks and time deposits
Investasi jangka pendek	43.000.000	62.000.000	Short-term investment
Piutang usaha	20.070.926	28.081.478	Trade receivables
Piutang lain-lain	864.228	349.287	Other receivables
Kas yang dibatasi penggunaannya	4.617.994	1.843.802	Restricted cash
Total	114.501.289	121.304.705	Total

**25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Credit risk

The Group has credit risk arising from the credits granted to the customers.

The Group has policies in place to ensure that whole sales of products are made only to creditworthy customers with proven track records or good credit history. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. The Group may grant its customers credit on a 30 to 45 days term of payment. The Group has policies that limit the amount of credit exposure to any particular customer. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the exposure to bad debts.

When a customer fails to make a payment within the granted credit terms, the Group will contact the customer to act on the overdue receivable. If the customer does not settle the overdue receivable within a reasonable time, the Group will proceed with legal actions. Depending on the Group's assessment, specific provisions may be made if the debt is deemed uncollectible. To mitigate its credit risk, the Group will cease the supply of all products to customers in the event of late payment and/or default. Group also requesting payments by letter of credit for their customers.

To avoid concentration of risk, cash is deposited at several financial institutions, both private and owned by the Government of Indonesia with good standing.

On the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each category of financial assets was as follows:

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko likuiditas

Kelompok Usaha mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan setara kas yang cukup, dan ketersediaan pendanaan melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima.

Kelompok Usaha secara teratur mengevaluasi proyeksi arus kas dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan melakukan penggalangan dana.

Tabel berikut menyajikan profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Kelompok Usaha, berdasarkan jumlah pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto:

31 Desember 2020	Jumlah/ Total	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	December 31, 2020
Utang usaha	5.766.159	5.766.159	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	50.407	50.407	-	-	Other payables
Biaya masih harus dibayar	16.375.393	16.375.393	-	-	Accrued expenses
Liabilitas Sewa	7.546.917	3.597.673	3.949.244	-	Lease liabilities
Utang sewa pembiayaan					Finance lease payables
Pokok pinjaman	-	-	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	757.728	554.649	203.079	-	Future imputed interest charges
Utang bank					Bank loan
Pokok pinjaman	4.675.057	4.675.057	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	136.089	136.089	-	-	Future imputed interest charges
Total	35.307.750	31.155.427	4.152.323	-	Total

**25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Liquidity risk

The Group manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditures and settle its maturing debts by maintaining sufficient cash and cash equivalents, and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.

The Group regularly evaluates its projected and actual cash flow informations and continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to pursue fund-raising initiatives.

The table below summarises the maturity profile of the Group's financial liabilities, based on contractual undiscounted payments:

31 Desember 2019	Jumlah/ Total	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	December 31, 2019
Utang usaha	7.710.555	7.710.555	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	61.162	61.162	-	-	Other payables
Biaya masih harus dibayar	19.131.050	19.131.050	-	-	Accrued expenses
Utang sewa pembiayaan					Finance lease payables
Pokok pinjaman	49.272	49.272	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	1.611	1.611	-	-	Future imputed interest charges
Utang bank					Bank loan
Pokok pinjaman	9.350.116	4.675.058	4.675.058	-	Principal
Beban bunga masa depan	510.255	374.166	136.089	-	Future imputed interest charges
Total	36.814.021	32.002.874	4.811.147	-	Total

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko likuiditas (lanjutan)

**Perubahan Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas
Pendanaan**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	Saldo Awal / Beginning Balance	Penerapan Awal PSAK 73: Sewa/ Initial Adoption PSAK 73: Leases	Arus Kas / Cash Flow	Lain-lain / Others	Saldo Akhir / Ending Balance	Year Ended December 31, 2019
Utang sewa pembiayaan	143.804	-	(100.435)	5.903	49.272	Finance lease payables
Utang bank jangka panjang	6.371.380	-	2.978.736	-	9.350.116	Long-term bank loans
Total	6.515.184	-	2.878.301	5.903	9.399.388	Total
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020						Year Ended December 31, 2020
Utang sewa pembiayaan	49.272	-	(48.559)	(713)	-	Finance lease payables
Utang bank jangka panjang	9.350.116	-	(4.675.059)	-	4.675.057	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	-	10.983.167	(4.017.871)	581.621	7.546.917	Lease liabilities
Total	9.399.388	10.983.167	(8.741.489)	580.908	12.221.974	Total

**25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Liquidity risk (lanjutan)

**Changes in Liabilities arising from Financing
Activities**

26. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas dan setara kas, piutang usaha dan lain-lain dan aset keuangan tidak lancar lainnya, utang usaha dan lain-lain, dan biaya masih harus dibayar, kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut berjangka pendek.

Nilai tercatat dari utang bank jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.

26. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The carrying values of financial instruments presented in the consolidated statement of financial position approximate their fair values.

Management has determined that the carrying amounts (based on notional amounts) of cash and cash equivalents, trade and other receivables and other non-current financial assets, trade and other payables, and accrued expenses, reasonably approximate their fair values because they are mostly short-term in nature.

The carrying amounts of long-term bank loans with floating interest rates are approximately at their fair values as they are re-priced frequently.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

27. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Rupiah yang signifikan. Nilai yang setara dengan Dolar AS atas aset dan liabilitas dalam mata uang Rupiah tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 dan 23 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

27. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

As of December 31, 2020, the Group has significant monetary assets and liabilities denominated in Rupiah currency. The equivalent US Dollars values of the said Rupiah currency denominated assets and liabilities as of December 31, 2020 and March 23, 2021 are as follows:

	Jumlah dalam mata uang Rupiah/ Amount in Rupiah currency	31 Desember 2020 (tanggal pelaporan/ December 31, 2020 (reporting date)	23 Maret 2021 (Tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian)/ March 23, 2021 (consolidated financial statement completion date)	
Aset				Assets
Dalam Rupiah				In Rupiah
Kas dan setara kas	28.907.887.190	2.049.478	2.004.569	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	19.559.551.097	1.386.710	1.356.324	Trade receivables
Piutang lain-lain	6.967.862.862	493.999	483.175	Other receivables
Tagihan pajak pertambahan nilai	18.143.285.782	1.286.302	1.258.116	Claims for value-added tax refund
Pajak di bayar di muka	2.367.016.470	167.814	164.137	Prepaid taxes
Total aset	75.945.603.401	5.384.303	5.266.321	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Dalam Rupiah				In Rupiah
Utang usaha	(81.330.600.715)	(5.766.083)	(5.639.734)	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	(203.974.620.274)	(14.461.157)	(14.144.277)	Accrued expenses
Utang pajak	(6.188.568.750)	(438.750)	(429.136)	Taxes payable
Liabilitas sewa jangka pendek	(50.745.182.461)	(3.597.673)	(3.518.839)	Short-term lease liabilities
Liabilitas sewa jangka panjang	(55.704.081.824)	(3.949.244)	(3.862.706)	Long-term lease liabilities
Liabilitas imbalan kerja	(39.341.379.245)	(2.789.179)	(2.728.062)	Employee benefit liabilities
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	(48.721.561.525)	(3.454.205)	(3.378.515)	Provision for mine reclamation and closure
Total liabilitas	(486.005.994.794)	(34.456.291)	(33.701.269)	Total liabilities
Liabilitas neto	(410.060.391.393)	(29.071.988)	(28.434.948)	Net liabilities

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**28. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
YANG SIGNIFIKAN**

Perjanjian jual beli batubara

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memiliki komitmen untuk menjual batubara kepada beberapa pembeli. Penjualan batubara ini akan dilakukan sampai dengan masa berakhirnya IUP.

Perjanjian-perjanjian operasi

- a. Pada tanggal 30 September 2014, Perusahaan mengadakan perjanjian pengupasan tanah dan sewa peralatan tambang dengan KPP. Nilai kontrak tergantung pada volume tanah overburden yang dipindahkan dan batubara yang ditambang. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.
- b. Pada tanggal 30 Mei 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian jasa pengangkutan batubara dengan PT Global Trans Energy International, pihak berelasi. Nilai kontrak tergantung pada volume batubara yang diangkut. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 28 Juni 2021.
- c. Pada tanggal 29 September 2014, BDMS menerima Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 825 Tahun 2014 tentang penggunaan terminal khusus BDMS untuk kepentingan umum sampai dengan 29 Juli 2018. Pada tanggal 25 Februari 2019, BDMS menerima Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 54 Tahun 2019 tentang penggunaan terminal khusus BDMS untuk kepentingan umum dengan jangka waktu selama 1 tahun sejak tanggal perjanjian.

Pada tanggal 27 Januari 2020, Perusahaan menerima surat keputusan Menteri Perhubungan No. A.83/AL.308/DJPL tentang penggunaan terminal khusus untuk pertambangan batubara sampai dengan 1 Agustus 2023.

- d. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama atas jasa penanganan lumpur dan air ("dewatering") dengan KPP. Nilai kontrak tergantung pada volume air dan lumpur yang ditangani. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

**28. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES**

Sale and purchase of coal agreements

As of December 31, 2020, the Company has various commitments to sell coal to various buyers. The coal will be delivered until the end of the IUP term.

Operating agreements

- a. On September 30, 2014, the Company entered into a stripping and mining equipment rental agreement with KPP. Contract values are dependent on the volumes of overburden moved and coal mined. This agreement is valid until December 31, 2022.
- b. On May 30, 2020, the Company entered into contract of coal transportation service with PT Global Trans Energy International, a related party. Contract values are dependent on the volumes of coal being transported. This agreement is valid until June 28, 2021.
- c. On September 29, 2014, BDMS received a Decision Letter from Minister of Transportation No. KP 825 Year 2014 regarding the use of special terminal of BDMS for the public until July 29, 2018. On February 25, 2019, BDMS received a Decision Letter from Minister of Transportation No. KM 54 Year 2019 regarding the use of special terminal of BDMS for the public with an extension period of 1 year from the commencement date.

On January 27, 2020, the Company received a decision letter from Minister of Transportation No. A.83/AL.308/DJPL regarding the use of special terminal for coal mining until August 1, 2023.

- d. On December 31, 2018, the Company entered into contract of mud and water handling services with KPP. Contract values are dependent on the volumes of water and mud being handled. This agreement is valid until December 31, 2022.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**28. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Perjanjian jasa manajemen dan jasa pemasaran

- a. Pada tanggal 2 Januari 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian jasa manajemen dengan PT Baramulti Sugih Sentosa ("BMSS"), pihak berelasi, yang mencakup layanan keuangan dan pemeriksaan internal, jasa konsultasi, layanan teknik pertambangan dan layanan legal. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- b. Pada tanggal 20 Desember 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian jasa pemasaran batubara dengan BMSS, pihak berelasi. Pada tanggal 29 Juni 2016, Kelompok Usaha setuju untuk menambah 2 agen pemasaran yaitu Brooklyn Enterprise Pte. Ltd., pihak berelasi, dan Goodlink International Limited, pihak berelasi. Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya IUP operasi produksi Perusahaan.
- c. Pada tanggal 20 Desember 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian jasa pemasaran batubara dengan Idemitsu Kosan Co., Ltd., pihak berelasi. Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya IUP operasi produksi Perusahaan.
- d. Pada tanggal 4 Desember 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian jasa pemasaran batubara dengan DBU, dimana DBU setuju untuk menunjuk Perusahaan sebagai satu-satunya agen pemasaran DBU. Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya IUP DBU.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 ("PP No. 78") yang mengatur aktivitas reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Pemegang IUP Eksplorasi, antara lain, diharuskan memuat rencana reklamasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

**28. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

Management services and marketing services agreement

- a. On January 2, 2013, the Company entered into a management service agreement with PT Baramulti Sugih Sentosa ("BMSS"), a related party, which covered services on finance and internal audits, consultancy services, mining technical services and legal services. The agreement will expire on December 31, 2022.
- b. On 20 December 2013, the Company entered into a coal marketing services agreement with BMSS, a related party. On June 29, 2016, the Group agreed to add 2 marketing agents, Brooklyn Enterprise Pte. Ltd., a related party, and Goodlink International Limited, a related party. This agreement is valid until the end of the Company's IUP production operation.
- c. On December 20, 2013, the Company entered into a marketing service agreement with Idemitsu Kosan Co., Ltd., a related party. This agreement is valid until the end of the Company's IUP production operation.
- d. On December 4, 2017, the Company entered into a coal marketing service agreement with DBU, where DBU agreed to appoint the Company as the DBU's sole marketing agent. The agreement is valid until the end of DBU IUP.

Government Regulation No. 78 Year 2010

On December 20, 2010, the Government of Indonesia issued Government Regulation No. 78 Year 2010 ("GR No. 78") that deals with reclamation and post-mining activities for both IUP Exploration and IUP Production Operation holders.

An IUP Exploration holder, among others, is required to include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state-owned bank.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**28. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010
(lanjutan)**

Pemegang IUP Operasi Produksi, antara lain, diharuskan untuk: (a) menyiapkan rencana reklamasi 5 tahunan; (b) menyiapkan rencana pascatambang; (c) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (d) menyediakan jaminan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak meniadakan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pascatambang.

Perusahaan

Pada tanggal 24 Juli 2013, Perusahaan telah memperoleh surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Malinau terkait persetujuan atas anggaran rencana reklamasi periode 5 tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pada tanggal 12 November 2018, Perusahaan telah memperoleh surat dari Gubernur Kalimantan Utara terkait persetujuan atas rencana reklamasi periode 2018 - 2022.

Pada tanggal 26 Juli 2019, Perusahaan telah memperoleh surat dari Gubernur Kalimantan Utara terkait persetujuan atas rencana pasca tambang.

Pada tanggal 22 September 2020, Perusahaan telah memperoleh surat dari Gubernur Kalimantan Utara terkait persetujuan atas revisi rencana pasca tambang.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah menempatkan jaminan pasca tambang dan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka sebesar AS\$1.688.719 (2019: AS\$1.213.114).

BDMS

Pada tanggal 21 Oktober 2013, BDMS memperoleh surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Malinau terkait persetujuan atas anggaran rencana reklamasi periode 5 tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

**28. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

**Government Regulation No. 78 Year 2010
(continued)**

An IUP Production Operation holder, among others, is required to: (a) prepare a 5-year reclamation plan; (b) prepare a post-mining plan; (c) provide a reclamation guarantee, either in the form of a joint account or time deposit placed at a state-owned bank, a bank guarantee, or an accounting provision; and (d) provide a post-mining guarantee in the form of a time deposit placed in a state-owned bank.

The placement of reclamation and post-mining guarantees does not relieve the IUP holders from the requirement to perform reclamation and post-mining activities.

The Company

On July 24, 2013, the Company obtained a letter from the Mining and Energy Services regarding the approval for the mine reclamation plan of Malinau Regency of a 5-year reclamation plan from year 2013 until year 2017. On November 12, 2018, the Company obtained a letter from the Governor of North Kalimantan regarding the approval for reclamation plan period of 2018 - 2022.

On July 26, 2019, the Company has obtained a letter from the Government of North Kalimantan regarding the approval for the post-mining activities plan.

On September 22, 2020, the Company has obtained a letter from the Government of North Kalimantan regarding the approval for revision of the post-mining activities plan.

As of December 31, 2020, the Company has placed a mine closure and reclamation guarantee in the form of time deposits amounting US\$1,688,719 (2019: US\$1,213,114).

BDMS

On October 21, 2013, BDMS obtained letter from the Mining and Energy Services of Malinau Regency regarding the approval for the mine reclamation plan budget of a 5-year reclamation plan, from year 2013 until year 2017.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**28. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Juli 2016, BDMS memperoleh surat dari Gubernur Kalimantan Utara terkait persetujuan atas rencana pasca tambang.

Pada tanggal 22 September 2020, BDMS telah memperoleh surat dari Gubernur Kalimantan Utara terkait persetujuan atas revisi rencana pasca tambang.

Pada tanggal 31 Desember 2020, BDMS telah menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dalam bentuk deposito berjangka sebesar AS\$1.009.275 (2019: AS\$630.688).

Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha membentuk provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang sebesar AS\$3.454.205 (2019: AS\$3,298,966) dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019	
Saldo awal	3.298.966	2.777.420	<i>Beginning balance</i>
Penambahan dan akresi	731.801	514.230	<i>Addition and accretion</i>
Realisasi	(553.060)	(107.081)	<i>Realisation</i>
Perubahan selisih kurs	(23.502)	114.397	<i>Foreign exchange difference</i>
Jumlah	3.454.205	3.298.966	Total

**Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral No. 17 Tahun 2010**

Pada bulan September 2010, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("MESDM") mengeluarkan Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2010 ("PM No. 17/2010") tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, yang mengatur bahwa penjualan batubara harus dilakukan dengan mengacu pada harga patokan batubara sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

**28. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

**Government Regulation No. 78 Year 2010
(continued)**

On July 31, 2016, BDMS obtained a letter from the Government of North Kalimantan regarding the approval for the post-mining activities.

On September 22, 2020, BDMS has obtained a letter from the Government of North Kalimantan regarding the approval for revision of the post-mining activities plan.

As of December 31, 2020, BDMS has placed a reclamation guarantee and post-mining guarantee in the form of time deposits amounting to US\$1,009,275 (2019: US\$630,688).

As of December 31, 2020, the Group made a provision for mine reclamation and closure amounting to US\$3,454,205 (2019: US\$3,298,966) with details as follows:

**Regulation of the Minister of Energy and Mineral
Resources No. 17 Year 2010**

In September 2010, the Minister of Energy and Mineral Resources ("MoEMR") issued Ministerial Regulation No. 17 Year 2010 ("MR No. 17/2010") regarding the Procedures to set Selling Price References of Mineral and Coal, which regulates that the sale of coal shall be conducted with reference to the benchmark price as issued by the Government, through a regulation issued by the Director General of Mineral, Coal and Geothermal.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**28. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Peraturan Menteri No. 25/2018

Pada tanggal 30 April 2018, MESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 25/2018 mengenai perusahaan pertambangan mineral dan batubara ("Permen ESDM 25/2018") mencabut antara lain, Peraturan Menteri No. 34/2009 tentang Pengutamakan Pemasokan Kebutuhan Mineral Dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri, Peraturan Menteri No. 17/2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara, Peraturan Menteri No. 33/2015 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Dan Batubara, Peraturan Menteri No. 41/2016 tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Permen ESDM 25/2018 mengatur usaha pertambangan mineral dan batubara, pelaksanaan kegiatan IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi, pelaksanaan kegiatan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi, keuangan, penerimaan negara bukan pajak, pengelolaan data mineral dan batubara, divestasi saham, pengadaan tenaga kerja, tatacara pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lain, pengendalian produksi dan penjualan, harga mineral dan batubara, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan pengakhiran kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pada tanggal 5 September 2018, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 1952 K/MEM/84/2018 mengenai penggunaan perbankan di dalam negeri atau cabang perbankan Indonesia di luar negeri untuk penjualan mineral dan batubara ke luar negeri dan Peraturan Menteri No. 1953 K/06/MEM/2018 mengenai penggunaan barang operasi, barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya yang diproduksi di dalam negeri pada sektor energi dan sumber daya mineral.

Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan dan BDMS telah memenuhi ketentuan dalam peraturan sebagaimana disebut di atas.

**28. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

Ministerial Regulation No. 25/2018

On April 30, 2018, the MoEMR issued Ministerial Regulation No. 25/2018 regarding the enterprise of mineral and coal mining ("Ministerial Regulation 25/2018") which revokes, among others, Ministerial Regulation No. 34/2009 on the Prioritisation Of Supplying Minerals and Coal for Domestic Needs, Ministerial Regulation No. 17/2010 on the Procedure for Setting the Mineral and Coal Benchmark Price, Ministerial Regulation No. 33/2015 on the Procedure for Establishing Boundary Mark for the Area of Mining Business Permit and Special Business Permit Mineral and Coal, Ministerial Regulation No.41/2016 on the Development and Empowerment of Communities in Mineral and Coal Mining Activities.

Ministerial Regulation No. 25/2018 regulates the mineral and coal mining business, activities of IUP exploration or IUPK exploration, activities of IUP Operation Production and IUPK Operation Production, financial, non-tax state revenue, mineral and coal data processing, share divestment, manpower recruitment and capital goods procurement, equipment, raw and other supporting material, control of production and sales, mineral and coal price, community development and empowerment, and termination of mineral and coal mining business activity.

On September 5, 2018, the MoEMR issued both Ministerial Decree No. 1952 K/84/MEM/2018 regarding the use of domestic banking or the offshore branch of Indonesian banks for mineral and coal export proceeds and Ministerial Decree No. 1953 K/06/MEM/2018 regarding the use of operation goods, capital goods, equipment, raw and other supporting materials which are domestically produced in the energy and minerals sector.

Management believes that the Company and BDMS have complied with the requirements of the regulations mentioned above.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**28. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Peraturan Menteri No. 78K/30/MEM/2019

Pada tanggal 6 Mei 2019, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 78K/30/MEM/2019 tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2019 yang menetapkan persentase batas minimal *Domestic Market Obligation* ("DMO") tahun 2019. Kelompok Usaha selalu memonitor pemenuhan kebutuhan DMO.

Pada tanggal 11 Januari 2017, MESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 7/2017, yang mengatur Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Beberapa ketentuan di PM No. 17/2010, berhubungan dengan harga patokan penjualan untuk mineral dan batubara dicabut sejak tanggal tersebut.

Pada tanggal 9 Maret 2018, MESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 1395.K/30/MEM/2018, yang mengatur harga jual batubara sebesar AS\$70 per metrik ton kapal FOB untuk pasokan listrik untuk kepentingan publik. Pada tanggal 12 Maret 2018, Keputusan Menteri ini diubah dengan Keputusan Menteri No. 1410.K/30/MEM/2018 untuk mengubah tanggal efektif dari tanggal berlakunya keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah volume penjualan batubara paling banyak 100 juta metrik ton per tahun. Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri No. 0617.K/32/MEM/2011 tentang Harga Batubara untuk PLN dalam Rangka Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara No. 644.K/30/DJB/2013**

Pada tanggal 21 Maret 2013, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 644.K/30/DJB/2013 tentang tata cara penetapan besaran biaya penyesuaian Harga Patokan Batubara ("HPB"). Biaya penyesuaian di dalam peraturan ini adalah biaya penambah atau pengurang terhadap HPB untuk menentukan harga batubara pada penjualan batubara yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk besarnya royalti yang harus dibayarkan kepada Pemerintah.

**28. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

Ministerial Decree No. 78K/30/MEM/2019

On May 6, 2019, MoEMR issued Ministerial Decree No. 78K/30/MEM/2019 regarding the Setting of the Minimum Percentage of Coal Sales for Domestic Consumption for the Year 2019 which stipulates the minimum Domestic Market Obligation ("DMO") percentage for the year 2019. The Group is closely monitoring the fulfillment of DMO requirement.

On January 11, 2017, MoEMR issued Ministerial Regulation No. 7/2017, which regulates the Procedures for the Setting of Benchmark Prices for Metal Minerals and Coal Sales. The provisions of MR No. 17/2010, relating to benchmark prices for minerals and coal sales are revoked from that date.

On March 9, 2018, the MoEMR issued Ministerial Decree No. 1395.K/30/MEM/2018, which regulates a coal sales price of US\$70 per metric tonne FOB vessel for supplying coal for electricity provided in the public interest. On March 12, 2018, this Ministerial Decree was amended by Ministerial Decree No. 1410.K/30/MEM/2018 to amend the effective date to become the date of enactment of this Decree up to December 31, 2019 with a maximum sales volume of 100 million metric tonnes annually. The provisions of Ministerial Decree No. 0617.K/32/MEM/2011 on the Benchmark Price for PLN for the Operation of Coal Fired Power Plants are therefore revoked since that date.

**Regulation of the Directorate General of Mineral
and Coal No. 644.K/30/DJB/2013**

On March 21, 2013, the Directorate General of Mineral and Coal Resources issued Regulation No. 644.K/30/DJB/2013 regarding the procedures for determining the magnitude of the adjustment cost of benchmark price of coal (Harga Patokan Batubara or the "HPB"). Cost of adjustment in this regulation is an addition or deduction to the cost of HPB to determine the price of coal in coal sales that will be used as a reference to the amount of royalties to be paid to the Government.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**28. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2019

Kelompok Usaha sebagai pemegang IUP diwajibkan untuk membayar royalti atas penjualan batubara. Peraturan Pemerintah No. 9/2012 yang selanjutnya digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2019, menetapkan tarif royalti sesuai dengan tingkat kualitas kalori batubara.

**Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. P.89/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/11/2016**

Pada bulan November 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("KLHK") mengeluarkan Peraturan Menteri No. P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai ("Permen KLHK No. 89/2016").

Peraturan ini merupakan pedoman bagi pemegang IPPKH yang memiliki kewajiban untuk melakukan penanaman rehabilitasi DAS pada lokasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, dan dengan jangka waktu pelaksanaan penanaman rehabilitasi DAS adalah sebelum berakhirnya masa IPPKH dengan tata cara pelaksanaan penanaman sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

Manajemen yakin bahwa Kelompok Usaha telah mematuhi ketentuan peraturan-peraturan yang disebutkan di atas.

29. INFORMASI SEGMENT

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2v atas laporan keuangan konsolidasian, Kelompok Usaha hanya terdiri atas satu segmen operasi, yaitu penambangan dan perdagangan batubara.

Seluruh aset nonkeuangan Kelompok Usaha berada di Indonesia.

**28. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

Government Regulation No. 81 Year 2019

The Group as the IUP holder is required to pay a royalty of the coal sold. Government Regulation No. 9/2012 which subsequently replaced by Government Regulation No. 81 Year 2019, determines the royalty tariff based on the calorie of the coal.

**Ministerial Regulation of Environment and
Forestry No. P.89/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/11/2016**

In November 2016, the Ministry of Environment and Forestry ("MoE&F") issued Ministerial Regulation No.P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 on Guidelines for Planting of Borrow to Use Licence ("IPPKH") Holders for the Rehabilitation of Watershed Areas ("Ministerial Regulation of Environment and Forestry No. 89/2016").

This regulation is a guideline for IPPKH holders which are obligated to perform rehabilitation of DAS at a location stipulated in accordance with the provisions set forth in this regulation, and with rehabilitation planting period set before the end of the IPPKH period with procedure of rehabilitation according to the provisions set forth in this rule.

Management believes that the Group has comply with the requirements of the regulations mentioned above.

29. SEGMENT INFORMATION

As described in Note 2v to the consolidated financial statements, the Group is organised as one operating segment, i.e. coal mines and trading.

All of the Group's non-financial assets are located in Indonesia.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

29. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi penjualan berdasarkan lokasi pelanggan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Korea Selatan	125.831.001	52.641.925	South Korea
Cina	32.310.760	74.339.876	China
Filipina	16.446.058	20.136.463	Philippines
Indonesia	10.988.557	29.343.490	Indonesia
Malaysia	4.544.540	48.037.126	Malaysia
Selandia Baru	3.311.220	6.959.700	New Zealand
Vietnam	1.560.900	10.523.429	Vietnam
India	-	12.127.973	India
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$5.000.000)	6.214.251	6.739.821	Others (each below US\$5,000,000)
Jumlah	201.207.287	260.849.803	Total

29. SEGMENT INFORMATION (continued)

The sales information based on the customers' location is as follows:

30. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Kelompok Usaha pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Kelompok Usaha masih diestimasi pada tanggal 23 Maret 2021:

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021

Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis

Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau bukan. Amandemen ini mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan keluaran, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

Amendemen PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62 dan PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2

30. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated as of March 23, 2021:

Effective beginning on or after January 1, 2021

Amendments to PSAK 22: Definition of Business

These amendments were issued to help entities determine whether an acquired set of activities and assets is a business or not. They clarify the minimum requirements for a business, remove the assessment of whether market participants are capable of replacing any missing elements, add guidance to help entities assess whether an acquired process is substantive, narrow the definitions of a business and of outputs, and introduce an optional fair value concentration test. New illustrative examples were provided along with the amendments.

Amendments to PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62 and PSAK 73 on Interest Rate Reference Reform - Phase 2

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**30. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021
(lanjutan)**

Amendemen PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62
dan PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga
– Tahap 2 (lanjutan)

Reformasi acuan suku bunga tersebut mengacu pada reformasi global yang menyepakati penggantian acuan suku bunga antarbank (*Interbank Offered Rate* atau ("IBOR")) dengan acuan suku bunga alternatif.

Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 membahas isu yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan selama reformasi acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau hubungan lindung nilai yang timbul dari penggantian acuan suku bunga dengan acuan alternatif yang baru.

Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai. Amendemen ini berlaku efektif per 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang
Rujukan ke Kerangka Konseptual

Amendemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis tentang Rujukan ke Kerangka Konseptual ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Secara umum Amendemen PSAK 22 ini:

- Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30".
- Mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi.
- Menambahkan definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

Amendemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis tentang Rujukan ke Kerangka Konseptual ini berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

**30. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2021
(continued)**

Amendments to PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60,
PSAK 62 and PSAK 73 on Interest Rate Reference
Reform - Phase 2 (continued)

The interest rate reference reform refers to the global reform which agrees to replace *Interbank Offered Rate* ("IBOR") with an alternative interest rate reference.

Interest Rate Reference Reform - Phase 2 addresses issues that may affect financial reporting during the benchmark interest rate reform, including the impact of changes in contractual cash flows or hedging relationships that arise from replacing the benchmark interest rate with a new alternative reference.

Interest Rate Reference Reform - Phase 2 applies only to changes required by the benchmark interest rate reform for financial instruments and hedge relationships. These amendments are effective as of January 1, 2021 with earlier application permitted.

Effective beginning on or after January 1, 2022

Amendments to PSAK 22: Business Combinations
regarding Reference to Conceptual Frameworks

The amendments to PSAK 22 Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks clarify the interactions between PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 and the Conceptual Framework of Financial Reporting.

In general, the amendments to PSAK 22:

- Add a description regarding "liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK 57 or ISAK 30".
- Clarifying the contingent liabilities recognized at the acquisition date.
- Adds definition of a contingent asset and its accounting treatment.

The amendments to PSAK 22 Business Combinations regarding References to Conceptual Frameworks will become effective on January 1, 2022 with earlier application permitted.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**30. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022
(lanjutan)**

Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi,
dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan -
Biaya Memenuhi Kontrak

Amendemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak yang memberatkan terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, yang terdiri dari:

1. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
2. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen PSAK 57 berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan -
Imbalan dalam pengujian '10 persen' untuk
penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Amendemen ini mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli. Biaya ini hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk biaya yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

Amendemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan lebih awal diizinkan.

Amendemen PSAK 69: Agrikultur

PSAK 69 mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran yang sebelumnya "entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen", menjadi "entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen".

Entitas menerapkan amendemen secara prospektif terhadap pengukuran nilai wajar pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan lebih awal diizinkan.

**30. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2022
(continued)**

Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent
Liabilities, and Contingent Assets regarding
Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs

The amendments to PSAK 57 provide that costs to fulfill an onerous contract consist of costs that are directly related to the contract, which consist of:

1. incremental costs to fulfill the contract, and
2. allocation of other costs that are directly related to fulfilling the contract.

Amendments to PSAK 57 is effective on January 1, 2022 with earlier application permitted

Amendments to PSAK 71: Financial Instruments -
Fees in the '10 per cent' test for derecognition of
financial liabilities

The amendment clarifies the fees that an entity includes when assessing whether the terms of a new or modified financial liability are substantially different from the terms of the original financial liability. These fees include only those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's behalf.

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted.

Amendments to PSAK 69: Agriculture

PSAK 69 clarifies the recognition and measurement that previously "the entity does not take into account cash flows for financing assets, taxation or regeneration of biological assets after harvest", to "the entity does not account for cash flows for financing assets or regeneration. biological assets after harvest".

An entity applies the amendment prospectively to fair value measurements on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted.

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars,
Unless Otherwise Stated)**

**30. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2023

Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar dan menjelaskan:

- Apa yang dimaksud dengan hak untuk menunda penyelesaian,
- Bahwa hak untuk menunda harus ada pada akhir periode pelaporan,
- Klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan hak penangguhannya, dan
- Bahwa hanya jika derivatif melekat dalam liabilitas konversi itu sendiri merupakan instrumen ekuitas, ketentuan liabilitas tidak akan memengaruhi klasifikasinya

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif.

**30. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

Effective beginning on or after January 1, 2023

Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements Classification of Liabilities as Current or Non-current

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- What is meant by a right to defer settlement,
- That a right to defer must exist at the end of the reporting period,
- That classification is unaffected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
- That only if an embedded derivative in a convertible liability is itself an equity instrument would the terms of a liability not impact its classification

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and must be applied retrospectively.



PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk

Grha Baramulti

Jl. Suryopranoto No. 2
Komplek Harmoni Plaza Blok A-8
Jakarta Pusat 10130
Indonesia

Telephone : (+6221) 6385 6211
Fax : (+6221) 6385 2326
Email : corsec@mitrabaraadiperdana.co.id

www.mitrabaraadiperdana.co.id